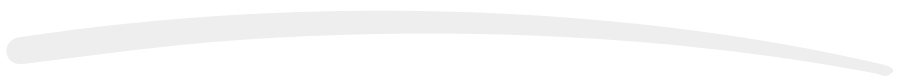


Adil itu

ADIL ITU DAMAI

Damai



Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Adil itu Damai

75 **M. Jusuf Kalla**
Kumpulan Pidato Pilihan
2016

Daftar Isi

**Adil itu
Damai**

75 **M. Jusuf Kalla**
Kumpulan Pidato Pilihan
2016

Copyright© 2017, Muhammad Taufiqurrahman

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Buku Kompas, 2017
PT Kompas Media Nusantara
Jl. Palmerah Selatan 26-28
Jakarta 10270
e-mail: buku@kompas.com

Editor: Husain Abdullah, Burhanuddin Bella
Perancang sampul: Muhammad Rifqi

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

xiv + 378 hlm.; 13 cm x 21 cm
ISBN: 978-602-412-253-9 (Soft Cover)
ISBN: 978-602-412-254-6 (e-Book)
KMN: 581712031

Isi di luar tanggung jawab Percetakan PT. Gramedia, Jakarta

Wakil Presiden Republik Indonesia - Sambutan *ix*
Kata Pengantar *xi*

Bab 1 Keadilan 1

Kemajuan dan Kedamaian 3
Tangan di Atas 9
Kesenjangan yang Berbeda Agama 13
Ekonomi Umat 19
Insentif Petani 30
Kemajuan dan Keadilan 35
Kesenjangan 0.40 41
Berdagang Itu Sunnah Rasul 46
Keadilan dan Pertumbuhan 51
Islam Entrepreneur 55
Memenuhi Sandang 58
Keadilan Harus Diusahakan 63
Kesenjangan Kita 67

BAB 2 Ekonomi 71

APBN 2.000 Triliun 73
Spirit Saudagar Bugis Makassar 79
Tumbuh dari Bawah 88
Hidup dari Pengusaha 93

Hunian Vertikal	98
Efisien yang Menang	101
Tenaga Dalam	105
Belajar dari Venezuela	109
Belajar dari Kesalahan	116
Makna Independensi BI	121
Mengejar Pertumbuhan Ekonomi	125
Investasi Infrastruktur	128
BUMN Siap Bersaing	133
Negara Moderat Pajak	138
Tax Amnesty	141
50 Persen PAD	144
Mengurangi Risiko	148
Jangan Hamburkan Uang	151
Bisnis Pariwisata	156
Segudang Masalah Pangan	161

BAB 3 ENERGI dan LINGKUNGAN 169

Tidak Boleh Padam	171
Kadang Listrik Lebih Penting dari Sembako	179
Sumber Energi Harus Kombinasi	182
Tantangan <i>Renewable Energy</i>	187
Jangan Boros Energi	190
Rahmat dan Musibah	196
Hijaukan dengan Bambu	199
Belajar Mengelola Sampah	203
Merusak Hutan Indonesia	206

BAB 4 TEKNOLOGI 211

Tanpa Teknologi	213
Maju karena Industri	217
Inovasi untuk Pasar	221
Melek Sosmed	225
Gojek “Mengubah” Kehidupan	229
Teknologi atau Konten	233

Lawan Hoaks	237
Host “Jalan Keluar”	241
Jangan Pencitraan	244

BAB 5 POLITIK DAN HUKUM 249

Dunia Kurang Tersenyum	251
Stop Radikalisme	254
Zaman Jahiliah	258
Lahir dari Kemarahan	262
Paling Stabil	269
Amandemen Konstitusi	273
Pilkada Sempel	276
Partai yang Demokratis	280
Jangan <i>Copy Paste</i>	286
Korupsi Subur	294

BAB 6 PEMERINTAHAN 299

Pemerintahan dan IT	301
Debirokratisasi Birokrat	311
Lebih Suka “Tidak”	317
Deregulasi melalui Regulasi	323
Otonomi Kesejahteraan	320

BAB 7 PENDIDIKAN 329

Universitas dan Museum	331
Nilai UN Murid	335
Mendahului zamannya	341
Harus Rajin Riset	346
Guru Lebih Pragmatis	350
Sekolah Untuk Pengusaha	358
Tidur di Gontor	362
Ilmuwan Islam	366

Indeks 371



WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sambutan

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih atas upaya penerbitan buku berjudul "Adil itu Damai" yang merupakan kumpulan pidato saya, antara tahun 2016-2017 bersama Presiden Jokowi Widodo. Tahun yang merupakan masa pelaksanaan program yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya.

Sudah banyak yang dilakukan pemerintah pada masa tersebut, bahkan sebagian telah dinikmati masyarakat. Tetapi tentunya masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki, terutama peningkatkan perekonomian masyarakat secara adil agar tidak terjadi kesenjangan dan.

Judul buku "Adil itu Damai" bermakna betapa nilai dan rasa keadilan haruslah berdiri tegak dalam seluruh proses pembangunan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan untuk semua tanpa memandang suku, agama dan golongan.

Saya mencermati kesenjangan dalam masyarakat masih sangat tinggi. Sebagian dari mereka hidup miskin, sementara terdapat sekelompok kecil masyarakat yang hidupnya berlebihan. Selalu saya katakan; kita tidak ingin menurunkan jumlah orang-orang yang kuat secara ekonomi, itu harus tetap kita pertahankan. Tetapi yang jauh lebih penting adalah

Kata Pengantar

bagaimana menumbuhkan ekonomi masyarakat bawah, agar mampu bersaing secara proporsional dan adil.

Pengalaman saya dalam menyelesaikan konflik, mulai dari Poso, Ambon sampai Aceh, selalu penyebab utamanya ketidakadilan. Ketidakadilan itulah yang menyebabkan terusiknya harmoni dalam masyarakat serta terjadinya konflik sosial yang mengganggu perdamaian.

Kehadiran pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mampu menciptakan rasa adil dengan dukungan seluruh elemen masyarakat mutlak dibutuhkan karena keadilan akan memperkokoh keutuhan dan kedaulatan bangsa kita.

Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih atas terbitnya buku ini. Semoga kita memetik pelajaran dan manfaat.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 10 Mei 2017

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



M. JUSUF KALLA

Yang khas dari pidato bapak M. Jusuf Kalla, pesannya diolah dari logika lalu dengan meyakinkan Pak JK menyampaikan definisi, batasan masalah, solusi, serta langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan.

Pak JK senang meramu temuan-temuan atau inovasi para ahli yang dianggapnya telah mengubah kebiasaan manusia bahkan mengubah dunia, maksudnya sebagai motivasi dan juga inspirasi agar setiap orang bergerak dan maju lebih kompetitif.

Menjadi kekuatan saat berpidato, Pak JK tanpa diduga membuat seisi ruangan pecah oleh *joke-joke*-nya yang spontan dan jenaka. Pak JK sendiri mungkin tidak menyadari apa yang disampaikannya mampu mengocok perut, ia berbicara mengalir di podium-podium, padahal sarat makna, mengandung hal baru serta humor-humor segar.

Dengan bahasa sederhana, Pak JK mampu mengajak banyak orang melakukan perubahan, semisal Pak JK menyerukan umat Islam agar produktif dan giat menekuni bisnis. Kata Pak JK, ceramah ustaz jangan hanya menyebut nikah sebagai sunnah rasul, tapi jelaskan juga berdagang termasuk sunnah rasul.

Seruan kebajikan ini disampaikan Pak JK terutama di forum-forum Islami. Jika berbicara di kampus-kampus, Pak JK selalu mengingatkan beda museum dengan universitas. Museum melihat ke belakang, universitas melihat ke depan. Dengan harapan para akademisi giat menggelar penelitian, dan penerbitan jurnal-jurnal ilmiah.

Pak JK bukan seorang orator, tapi ia mampu berpidato 2-3 kali sehari tanpa teks dengan tema berbeda-beda. Karena tanpa teks, pidato Pak JK menjadi kekinian, *up date*, dan kontekstual. Andalannya hanya secarik kertas kecil, berisi intisari pidatonya. Dari secarik kertas itulah pesan-pesan Pak JK mengalir bagai mesin printer, pesan yang kaya dengan logika, pengalaman dan bacaannya yang beragam pengetahuan. Pak JK sangat tangguh berbicara ekonomi dari studi ekonomi pembangunan hingga sektor keuangan/perbankan. Tema tema pendidikan, konflik perdamaian, terorisme, politik, dan Hankam begitu mudah diuraikan Pak JK di berbagai forum termasuk forum internasional. Pak JK dengan penuh percaya diri sudah mengembara menyampaikan pidatonya hingga ke Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa yang dihadiri pemimpin-pemimpin kelas dunia, seperti Barack Obama, Vladimir Putin, Xie Jinping, dan Shinzo Abe.

Buku ini memilih 75 pidato Pak JK dalam rentang waktu 2016-2017 dari beragam tema, sosial, ekonomi, politik, budaya, maupun agama. Didedikasikan untuk ulang tahun Pak JK yang ke-75. Usia seorang Pak JK tentu tidak bisa disebut muda lagi, tetapi dari gesit langkah dan keunggulan berpikirnya yang terbaca dari pidatonya yang tersaji dalam buku ini, fakta kalau Pak JK masih andal mengemban tugas-tugas kenegaraan sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Jokowi.

Tidak semua pidato Pak JK disajikan dalam buku ini, masih setumpuk yang tersisa, tetapi 75 judul ini penting dan menarik jadi bacaan publik.

Setahun lalu kami menerbitkan pula kumpulan 74 pidato terbaik Pak JK, dengan judul *Satu Digit*, yang fokus pada penurunan suka bunga perbankan untuk KUR. Kali ini terbit dengan judul *Adil itu Damai*, bahasan yang memang menjadi *trade mark* Pak JK. Tidak ada perdamaian tanpa keadilan, kata Pak JK dalam beberapa pidatonya yang berulang ulang ia tekankan. Ini pulalah pesan kuat dalam buku ini.

Editor menyajikan pidato Pak JK secara apa adanya, sesuai karakter dan gaya bicara Pak JK. Penyajian gaya bahasa orsinal ini, sejujurnya lebih sulit dibanding membuatnya dalam kemasan tulisan yang baku. Tapi dengan cara itulah buku ini menghadirkan sosok Pak JK ketika berada di tangan pembaca.

Kepada teman-teman yang dengan tulus membantu penerbitan buku ini, Bur Bella, Adi Sulhardi, Soleh, Dekur, Rifqi, Hekso kami haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga jerih payah kita semua menjadi ladang ilmu dan amal. *

Editor
Husain Abdullah

BAB 1
KEADILAN

Kemajuan dan Kedamaian

Tujuan utama kita berbangsa bagaimana kita mencapai masyarakat yang adil dan makmur, negara yang maju, negara yang kita cita-citakan dan harapkan untuk kita semuanya. Apabila kita berbicara sesuatu, tentulah harus disertai dengan kerja keras bersama, mempersatukan bangsa ini dan kedamaian.

Tidak ada negara yang maju tanpa kedamaian. Kedamaian artinya saling menghormati, hidup rukun, saling mengamalkan keyakinan. Itulah makna dan cara hidup kita agar kita mencapai kemajuan.

Dunia selalu menghargai bahwa di Indonesia dengan keragamannya, dengan hampir semua agama besar dunia diakui di sini, dengan lebih dari 300 bahasa, warna kulit yang berbeda, namun kita tetap bersatu. Memang, kadang terjadi riak-riak atau konflik, namun apabila dibandingkan dengan negara lain, kita harus bersyukur, kita dapat menjalankan kebangsaan kita secara baik.

Bagaimana mencapai kerukunan dan kesamaan ideologi, pertama, mengutamakan persamaan dan menghormati perbedaan. Apabila kita berbicara agama, tentu agama mempunyai tujuan yang sama, kebaikan. Kita boleh berbeda istilah, berbeda pemahaman, tetapi kita sama percaya kepada

Tuhan YME, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Persamaan kedua, kita percaya hari kemudian, hari kehidupan setelah di dunia ini. Bagaimanapun istilah dan caranya. Kesamaannya adalah, artinya apa yang kita perbuat di dunia ini akan mendapatkan balasan di hari kemudian. Itulah esensi dan persamaan kita.

Saya selalu ingin memberikan penghargaan dan kebahagiaan apabila berbicara tentang kerukunan di Sulawesi Utara. Lima belas tahun lalu di sebelah Timur, di Ambon, terjadi konflik besar. Kemudian di Selatan, konfliknya Poso. Tetapi *alhamdulillah* di Sulawesi Utara tetap semua bersaudara.

Itulah cara kehidupan yang dapat menjadi contoh pada bangsa ini, bahwa kita berbeda-beda, tapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang dapat kita contoh tentang kerukunan dan toleransi.

Toleransi pada dasarnya adalah menghormati satu sama lain, menghormati perbedaan. Walaupun bentuk menghormati itu, artinya tidak mencampuri satu sama lain urusan internal, tidak mencela, tetap menghormati perbedaan itu. Itu akan menjadikan masa depan yang baik bagi bangsa ini.

Kita tidak ingin seperti yang lain. Di banyak negara Asia dan Afrika dewasa ini, konflik terjadi. Pengalaman kita, konflik itu tidak dimulai dengan agama, tetapi terjadi karena faktor di luar agama. Kemudian menjadi membesar karena dimasukkan faktor agama.

Apa yang terjadi di Ambon, Poso, Aceh, beberapa puluh tahun lalu bukan karena faktor agama, tetapi faktor politik, faktor ekonomi misalnya. Membesar karena memasukkan faktor agama. Apabila agama dimasukkan demi solidaritas,

orang akan tidak netral. Karena itulah masing-masing pihak harus saling mengenali agama dan menghormatinya.

Pada saat forum umat beragama kita mulai di Makassar, saya sebagai ketuanya yang pertama. Ada suatu aturan yang kita jalankan, setiap pertemuan harus diadakan di rumah ibadah. Cara pertama, masing-masing pimpinan menjelaskan agamanya kepada yang hadir sehingga orang Islam mengenal apa itu esensi agama Kristen, Katolik, Buddha, dan sebagainya. Demikian juga sebaliknya, yang lain akan mengenal apa itu Islam.

Timbullah rasa penghargaan dan rasa saling menghormati bahwa sebenarnya kita lebih banyak persamaan daripada perbedaan. Yang terjadi di banyak negara adalah memperuncing perbedaannya. Konflik akan terjadi apabila ada faktor perbedaan, kita lebih mengedepankan perbedaan daripada persamaan.

Sekali lagi, tidak ada negara yang maju tanpa kemajuan ekonomi dan sosial politik. Tidak ada kemajuan, tanpa perdamaian. Lihatlah negara-negara yang hari ini berkonflik.

Harus diakui, sebagian besar yang berkonflik, negara berpenduduk mayoritas Islam, seperti Suriah. Irak yang begitu kaya, hancur lebur akibat masalah-masalah perbedaan yang ditonjolkan.

Ada yang mengatakan sekiranya Irak atau Suriah berhenti berkonflik hari ini, dibutuhkan 50 tahun untuk rehabilitasi. Tentu, kita tidak ingin seperti itu. Memang semua itu hanya dapat dijalankan oleh pemimpin yang baik, pemimpin yang adil.

Kalau kita melihat akar konflik yang terjadi di negara kita, seperti Permesta, DI TII, RMS, GAM, konflik di Kalimantan, Poso, Ambon, di Papua, dan sebagainya, semua itu timbul karena ketidakadilan yang sebagian kemudian membawa agama masuk dan kemudian terjadi konflik.

Itulah yang terjadi. Karena dalam agama pemimpin itu harus adil. Tanpa keadilan, tidak akan bisa menciptakan negara yang damai.

Di Indonesia, dengan penduduk muslim 87 persen, artinya kurang lebih 220 juta orang, mempunyai masjid 800.000 masjid dan mushalla. Waktu Raja Salman datang ke Indonesia, saya kemukakan, minta maaf, saya ini Ketua Masjid. Di sini ada 800.000 masjid. Dia terkejut karena kalau di Saudi paling tinggi puluhan ribu. Itu artinya, tiap 270 orang Islam, punya satu masjid.

Ada 61.000 gereja. Kalau umatnya 10 persen, berarti setiap 400 orang ada satu gereja. Kenapa itu terjadi? Contoh kecil saja supaya lebih mengerti masing-masing agama. Kenapa masjid lebih banyak dan gereja lebih sedikit? Masjid kalau hari Jumat dipakai hanya satu kali. Setelah itu jam tiga tidak ada lagi. Kalau gereja, bisa dipakai lima *shift*. Boleh misa pagi, misa siang, misa malam. Jadi gereja lebih efisien dipakai daripada masjid. Seperti itu contohnya.

Kedua, karena hari Minggu, di mana ibadah yang penting umat Kristen, Katolik, itu hari libur. Kalau hari Jumat tidak libur untuk menghormati. Jadi terpaksa kita ada dua masjid, satu di kantor, satu masjid dekat rumah. Begitu kan, karena tidak bisa pulang lagi, apalagi umumnya di kota besar. Terpaksa orang di kota Jumat di kantor, shalat lainnya di masjid dekat rumah.

Jadi saya bilang, ini adalah penghormatan untuk hari ibadah Minggu, maka libur hari Minggu, selama 70 tahun. Di sebagian negara-negara Islam, hampir semuanya libur hari Jumat. Hanya di Indonesia tidak. Itu artinya, bagaimana kita saling menghormati. Tetapi efeknya harus dipahami, terpaksa banyak masjid.

Hal-hal kecil itu, orang sering bertanya kepada saya, kenapa di kantor, gampang dikasih izin mendirikan masjid?

Ya, boleh saja ada gereja asal hari Minggu menjadi hari kerja. Itulah perbedaannya. Itulah Indonesia, tidak terjadi di Saudi, tidak di negara apa pun.

Contoh lagi, bagaimana kita membina kebersamaan di Indonesia ini. Di Indonesia, sekarang ada 16 hari libur, setelah tanggal 1 Juni libur, dulu hanya 15 hari. Hari raya nasional hanya empat, pada tanggal 1 Januari, 17 Agustus, 1 Mei, dan 1 Juni. Lainnya ada 12 hari, semuanya hari agama. Untuk agama Islam enam hari liburnya, Kristen tiga, Buddha satu, Hindu satu, Imlek satu hari liburnya. Walaupun, barangkali penduduk Tionghoa hanya satu atau dua persen. Tetap ada hari libur nasionalnya.

Jadi kalau mau jumlah penduduk berarti harusnya Islam 80 persen, tidak hanya 50 persen hari liburnya. Jadi itulah bangsa kita, ini membina kebersamaan dan kerukunan dengan baik. Begitu juga di pemerintahan.

Di Filipina, baru saja, dua tahun lalu Hari Raya Idul Fitri jadi hari nasional, padahal penduduk Islam disana 8 persen. Artinya, negara mendesain kerukunan yang berjalan, bukan hanya simbolik, tetapi kita laksanakan dengan baik.

Karena itulah, kita harus menjalankan kerukunan ini dengan baik. Sekali lagi, kita tidak ingin seperti Irak, kita tidak ingin seperti Suriah, kita tidak ingin seperti Sudan, tidak ingin seperti Libya, tidak ingin seperti Nigeria, kita tidak ingin seperti Rwanda pada zaman dulu, kita tidak ingin seperti Afganistan, kita tidak ingin seperti Pakistan.

Dan yang paling mudah digerakkan untuk memecahkan suatu bangsa adalah agama karena agama tidak ada orang netral. Karena itulah, saya selalu memuji dan menghargai masyarakat Sulawesi Utara dalam keragamannya.

Saya bayangkan sekiranya dulu Sulawesi Utara ikut bergolak, berkonflik, saya tidak bayangkan bagaimana menyelesaikannya, karena akan menjalar ke bawah. Tetapi

kita bersyukur, hanya terbatas di suatu kabupaten, tidak ke atas.

Malah Sulawesi Utara waktu itu menampung pengungsi-pengungsi yang datang dari timur dan dari selatan. Itulah masyarakat yang apabila mendahulukan persamaan daripada perbedaannya. *

Disampaikan pada acara Perayaan Paskah Bersama Sulawesi Utara,
Manado, 23 April 2017

Tangan di Atas

Kita semua selalu mengatakan, hingga kini Islam itu modern, mengikuti perkembangan zaman, sesuai dengan zaman. Karena itulah pendidikan sebagai tonggak dari keberlanjutan, juga harus mengikuti zamannya.

Malah mendahului zamannya karena pendidikan adalah kepentingan masa depan. Pendidikan harus mendahului. Santri yang belajar di sini hari ini, nanti punya manfaat 10 tahun yang akan datang. Jadi harus mendapat ilmu yang kira-kira dipergunakan untuk kemajuan pada 10 tahun yang akan datang, bukan hanya sekarang.

Kenapa pondok modern itu penting? Karena modern bukan hanya jas-nya, malah sekarang kita kembali pakai batik begitu, kan? Jadi bukan hanya pakaiannya yang modern, tetapi perilaku dan ilmunya harus modern, harus mengikuti zamannya, mendahului zamannya. Harus selalu menggali ilmu, mengikuti ilmu, agar bermanfaat untuk masa datang.

Masa yang akan datang, masa di mana persaingan sangat penting. Masa hubungan dunia sangat penting karena apabila kita tidak mengikutinya, justru sebaliknya akan menimbulkan kekacauan.

Kita sedih melihat dunia Islam dewasa ini. Hampir sebagian besar negara-negara di Timur Tengah, negara Arab,

kacau balau, saling membunuh, saling membakar, saling megebom dewasa ini. Tetapi disamping hal menyedihkan itu, kita juga bersyukur di Indonesia ini umat Islam terjaga, tidak mengalami konflik-konflik yang besar. Konflik-konflik kecil, ya sering terjadi, tetapi tidak saling membunuh, tidak saling membakar, tidak saling megebom, ataupun tidak saling menyalahkan. Secara politik kita sudah menjadi Islam yang baik, tidak ada lagi pertentangan politik.

Kadang-kadang partai tidak ada lagi bedanya antara partai yang dulu berasaskan Islam dengan yang tidak. Kadang-kadang PDI-P lebih duluan maulid daripada PPP. Atau Golkar lebih duluan halal bil halal dibandingkan partai lain.

Jadi, sudah tidak ada lagi sekat-sekat dari sisi kultural keagamaan kita. Itulah yang harus kita menjaga dengan baik ini, tidak mengalami seperti negara-negara Islam lainnya. Pesantren juga pasti mengajarkan kehidupan yang saling menghargai, yang moderat, yang toleran.

Kita harus juga mengartikan toleran itu secara baik. Toleransi itu, harus semua pihak yang toleran, tidak satu saja. Jangan ada apa-apa, “Oh tidak toleran yang besar”. Harus semuanya toleran. Yang satu toleran kepada yang nomor dua, yang nomor dua harus toleran kepada yang nomor tiga, dan sebagainya.

Dari sisi agama sederhana saja, *lakum dinukum waliyadin*, agama kamu agamamu, agama saya agama saya. Dengan pengertian itu saja kita harus saling menghargai. Dari saling menghargai timbulah toleran, tidak saling menyalahkan.

Tetapi kalau salah, memang harus disalahkan, tidak berarti apa pun dibuat oleh satu pihak harus ditoleransi. Tidak. Kalau yang satu pihak berbuat kesalahan, dia harus ditegur. Itulah penghormatan dan toleransi yang baik. Tetapi tidak seperti apa yang terjadi di Timur Tengah, saling merusak dan sebagainya.

Kita bangga sebagai umat Islam, sekaligus bangsa Indonesia untuk selalu mengambil martabat dan selalu menjaga hal-hal seperti itu. Karena itulah modal pendidikan agama yang baik, seperti pesantren modern ini, sama juga dengan pesantren-pesantren yang begitu banyak di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, di seluruh Indonesia. Karena itulah kita harus menjaganya.

Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan juga, bagaimana dan apa yang kita hadapi ke depan? Yang kita hadapi ke depan adalah kemajuan yang pesat. Dalam kesempatan lain juga, saling bersaing. Umat kita luar biasa, penduduk terbesar, menguasai politik, pemerintahan, *alhamdulillah*.

Saya lihat tadi di perjalanan, anak-anak muda kita luar biasa. Yang perempuan, gadis-gadisnya 90 persen pakai jilbab. Itu juga suatu fenomena yang luar biasa bagusnya.

Namun, yang kita kurang kuasai ekonomi. Sering saya katakan, kalau ada 100 orang kaya, yang terdaftar paling tinggi 10 umat Islam di situ. Tapi kalau ada 100 orang miskin, biasanya 90 umat yang miskin.

Penerima segala bantuan lebih banyak Islam, sebenarnya. Apakah listrik, bantuan raskin, bantuan apa. Itu bukan kemajuan. Artinya, kita belum bisa bersaing di sektor ekonomi. Walaupun kita banyak, tetapi *muzzaqi*-nya kurang dan *mustahiq*-nya saja yang banyak, tentu kita tidak bisa.

Karena itulah lembaga pendidikan ini disamping mengajarkan keagamaan, menagajarkan fiqih, mengajarkan tauhid, mengajarkan tafsir, juga harus bagaimana anak-anak memulai bersaing di bidang usaha. Pondok pesantren modern ini bukan hanya modern dalam kurikulum, tetapi kemodernannya dalam kemajuan.

Rasulullah memulai dengan berdagang ke Syam dan sebagainya, kita juga harus mengikuti. Sekarang, Syam sudah

habis setelah dibom, tetapi Rasulullah mempunyai sejarah yang panjang di sana.

Pendidikan tidak melihat ke belakang. Melihat ke belakang sebagai sejarah yang harus menjadi pembelajaran, tetapi modalnya ke depan, tidak ke belakang. Kalau ke belakang namanya museum, ke depan itu pendidikan. Kalau selalu menceritakan hanya kemajuan Islam pada abad ke-15, itu miliknya para ulama. Milik kita masa depan yang harus diisi pendidikan.

Kita jangan, selalu berpikir tangan di bawah. Kita harus berpikir tangan di atas. Jangan kita lihat Amerika, kapan dia bantu kita, lihat Jepang kapan dia bantu kita, lihat China kapan dia bantu kita.

Kita harus membantu sesama, baru bisa menjadi negara yang besar. Itu hasil pendidikan, hasil keagamaan, dan hasil kerja keras kita semuanya. ✨

Disampaikan pada acara Peresmian Masjid Agung Ar-Ridwan dan Rusunawa Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung, di Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung, 16 Januari 2017

Kesenjangan yang Berbeda Agama

Apabila kita bicara tentang kedaulatan dan keadilan, ini bukan hanya menjadi masalah di negeri ini. Di seluruh dunia telah menjadi masalah. Ini yang harus diperbaiki.

Sekarang kesenjangan di dunia, sudah luar biasa antara negara-negara maju dan tidak maju. Di antara negara-negara sendiri juga mengalami banyak ketimpangan. Bukan hanya negara yang miskin, tetapi negara yang maju seperti Amerika juga ada masalah ketimpangan, antara satu persen yang menguasai 99 persen.

Di negara Eropa, ini juga menjadi perhatian, apalagi negara-negara Asia, Afrika, dan sebagainya. Oleh karena itu, keadilan menjadi faktor yang harus kita perhatikan untuk kemajuan dunia dan bangsa kita secara keseluruhan.

Apalagi Indonesia yang telah menetapkan keadilan sosial sebagai suatu falsafah yang tinggi. Saya sependapat dengan banyak pembicaraan seperti Buya bahwa Pancasila bukan hal yang tidak kita laksanakan. Hanya sila kelimanya yang paling sulit dan paling telat kita laksanakan.

Karena itu sangat tepat Muhammadiyah pada tanwir ini membicarakan hal itu untuk kita laksanakan hari ini dan ke depan. Tanpa itu, bangsa ini akan tercecceer.

Apa itu keadilan? Saya memberikan contoh yang sederhana. Pada tahun 2007, banjir besar di Jakarta. Di Jakarta ada beberapa pintu air untuk melindungi daerah-daerah yang penting. Salah satu pintu air itu di Manggarai.

Kenapa ada pintu air di Manggarai? Agar Menteng jangan kebanjiran. Menteng kita tahu, termasuk ada kantor Muhammadiyah, juga rumah saya sekarang ini, agar aman. Hujan deras, dijaga polisi agar pintu air jangan dibuka, maka banjirlah Manggarai.

Rakyat yang tinggal di sekitar situ kebanjiran. Mereka marah. Akhirnya Gubernur Sutiyoso dengan terpaksa membuka pintu air. Banjirlah Menteng sampai ke Istana. Orang Manggarai tepuk tangan, bahwa dia sudah sama dengan siapa pun. Keadilan tercapai.

Keadilan itu bisa sama rata sama rasa. Tetapi apakah keadilan begitu yang kita harapkan? Tentu bukan, sebenarnya. Yang kita harapkan Menteng tidak banjir, tetapi Manggarai juga tidak banjir. Itu namanya keadilan turun ke bawah. Sementara, yang kita harapkan naik ke atas keadilannya. Menteng tidak banjir, semua juga tidak banjir.

Itulah salah satu intropeksi untuk kita semua. Kita harapkan dengan keadilan, kita menikmati kemajuan secara bersama-sama. Tidak sebagian kecil saja yang menikmatinya. Atau kemajuan, semuanya. Itu contoh yang harus kita laksanakan.

Akhir-akhir ini banyak data yang kita lihat tentang apa arti berkeadilan itu. Orang bicara generatio yang 0,4, tetapi itu karena konsumsi.

Saya tanya BPS, kok baik? Ya, pak. Memang karena yang kita bisa tanya orang-orang yang tidak mampu. Konsumsinya berapa? Tentu sederhana, begitu ditanya orang gedongan, pintunya terkunci. Yang keluar hanya pembantu, jadi dijawab seadanya. Tetapi kalau diukur dari segi pendapatan,

ketimpangan jauh lebih tinggi, bisa 0,7 persen, bisa 50 persen, lebih tinggi dari yang diukur, dari konsumsi.

Baru kita baca berita beberapa hari lalu bahwa satu sampai empat orang kaya bisa sama dengan 100 juta orang yang tidak mampu. Banyak sekali data yang dapat kita simpulkan bahwa memang bangsa ini mempunyai tingkat keadilan yang sangat rentan.

Di Indonesia selama merdeka terjadi 15 kali konflik besar. Di antara 15 kali konflik tersebut, 10 karena ketidakadilan. Ketidakadilan politik, ketidakadilan ekonomi, antardaerah, dan sebagainya. Orang banyak mengira di Ambon, di Poso, itu konflik agama. Itu hanya akibat saja karena adanya kesenjangan politik dan ekonomi di dua daerah tersebut.

Aceh orang mengira masalah agama, tidak. Karena mereka kaya tetapi mendapat sedikit. PRRI/Permesta lebih lagi, ketidakadilan daerah. Semua itu menjadi beban dan pikiran pemerintah untuk memperbaikinya.

Banyak hal telah kita lakukan. Pajak yang tinggi, memberikan subsidi kepada barang-barang yang dibutuhkan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan kredit murah kepada rakyat kecil, KUR. Tetapi tidak cukup untuk memperbaiki kesenjangan yang terjadi, tidak cukup untuk memperbaiki ketidakadilan.

Tidak ada langkah yang gratis, tidak ada langkah dengan orasi saja. Tidak ada. Langkahnya harus bersama memperbaiki. Tetapi inti dari itu semua, memang kita harus berbuat lebih banyak lagi.

Kalau kita lihat di dunia ini, penduduk enam miliar. Yang Islam 1,6 miliar, berarti kurang lebih 26 persen. Di Indonesia penduduk 255 juta orang hari ini. Itu sama dengan empat persen penduduk dunia. Tetapi yang Islam kira-kira 210 juta. Itu berarti 13 persen dari seluruh penduduk Islam dunia ada di Indonesia. Artinya, apabila ada masalah kesenjangan dan

kemiskinan, tentu sebagian besar di kalangan umat. Ini yang harus kita majukan bersama-sama dengan umat lainnya.

Saya ingin mengingatkan kembali apa yang terjadi di Timur Tengah, Arab Spring, mulai dari Tunisia, Mesir, Suriah, dan sebagainya, hancur lebur akibat mulai dari ketimpangan, mulai dari kesenjangan. Mereka merasa tidak adil dan mulai bergerak. Kemudian juga ditopang oleh gerakan dari negara besar di luar untuk menjadikan mereka ajang konflik.

Kita menghindari hal-hal seperti yang terjadi di Timur Tengah itu. Di antara 50 negara yang berpenduduk Islam—karena kita bukan negara Islam dalam arti kata undang-undang—, kita punya penduduk mayoritas Islam. Tinggal Indonesia, Malaysia, dan Brunei yang alhamdulillah mempunyai rasa aman yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain.

Semua itu dimulai dari ketidakadilan dan penghambur-hamburan sumber daya alam dari negara-negara tersebut. Apakah Libya, Suriah, Iran, Irak, Nigeria, dan Sudan. Semuanya mempunyai akibat-akibat yang dalam kepada rakyatnya. Karena itulah kita semua kembali mempersatukan itu.

Kita mempunyai pengalaman-pengalaman juga, tetapi alhamdulillah, semua dapat atasi dengan baik. Kita semua bersaudara untuk mengatasi hal tersebut. Memang kesenjangan di Indonesia cukup berbahaya dibanding negara lain. Di Thailand juga ada kesenjangan. Diukur dari jumlah kesenjangan, dia nomor enam di dunia menurut laporannya. Tetapi di Thailand yang kaya dan yang miskin sama agamanya. Di Filipina juga, kaya-miskin sama sukunya, sama agamanya.

Kalau kita agak berbeda, sebagian besar yang kaya keturunan. Agamanya ada yang Konghucu, ada yang Buddha, ada yang Kristen. Sebagian besar yang miskin itu Islam, ada juga yang Kristen. Karena itulah kita harus berpikir jernih

untuk mengatasi. Karena itu marilah kita bersama-sama bekerja untuk keadilan dan untuk Indonesia yang maju.

Pemerintah memberikan kebijakan dan menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk itu. Pembangunan di mana-mana, jalan, dan sebagainya. Itu untuk memperbaiki ekonomi daerah tersebut. Pembangunan pendidikan, memberikan subsidi untuk bahan makanan, dan sebagainya, sebagai cara memberikan jaminan kesehatan, membangun ekonomi secara bersama-sama. Tetapi ada satu hal yang tidak dapat diberikan oleh pemerintah, mendorong umat beragama untuk mempunyai inovasi, kemauan kerja, dan sebagainya.

Orang mengatakan untuk maju harus bekerja keras. Itu benar juga. Tidak salah, cuma tidak cukup. Kalau diukur dari orang bekerja keras, siapa yang bekerja paling keras dibandingkan petani? Subuh sampai sore mereka berada di sawah. Kepanasan kerja terus tetapi pendapatannya tidak lebih dari sejuta sebulan. Tetapi orang bekerja *smart*, bekerja dengan ilmu, bekerja dengan inovasi, mungkin hanya enam jam menghasilkan puluhan kali lipat dari petani.

Artinya, kita harus mendorong masyarakat, mendorong umat kita bekerja keras dengan inovasi. Bekerja yang *smart*, yang tepat, dengan memasukkan ilmu pengetahuan dalam pekerjaan. Itu baru kita dapat mengatasi kemajuan yang adil.

Di samping itu, kita tidak diskriminasi karena undang-undang, tetapi kita perlu afirmasi, memberikan keutamaan. Pemerintah sekarang telah merancang afirmasi apa, keutamaan apa yang diberikan kepada pengusaha kecil agar menjadi besar, pengusaha menengah agar lebih besar lagi. Siapa pun di negeri ini yang membutuhkannya.

Kita tidak diskriminatif dalam agama, tetapi kita diskriminatif dalam keutamaan, memberikan dorongan bahwa pengusaha kecil harus diberikan kredit lebih murah dibandingkan pengusaha besar. Pengusaha menengah harus

Ekonomi Umat

diberikan kesempatan lebih banyak dibandingkan dengan teman-teman yang lain.

Tanpa itu, tidak akan kita ciptakan keadilannya. Tanpa itu, keadilan hanya retorika. Tanpa itu, kita hanya mengeluh dan mengeluh terus-menerus.

Kita tidak ingin, seperti tadi, penyelesaian keadilan dengan cara Manggarai. Artinya, baru adil kalau kita sama-sama susah. Bukan itu, kita merasa adil kalau sama-sama senang.

Sama-sama susah juga adil, tetapi itu bukan tujuan. Tujuannya ialah sama-sama senang, sama-sama maju, dan sama-sama menikmati kemajuan bangsa ini.

Kita mempunyai banyak modal untuk itu. Karena itu mari kita semua memberikan hal-hal yang baik. Banyak hal-hal sederhana. Contohnya, masih banyak masyarakat kita ingin memenuhi rukun Islamnya dengan haji. Walaupun tidak mampu, menjual sawah untuk naik haji. Itu harus kita berikan pengertian bahwa Anda belum wajib karena belum mampu. Jual sawah bisa terjadi pulang haji, nanti lebih miskin. Sama juga di tempat lain, sama juga di Jakarta.

Kita mempunyai banyak rencana. Kita harus melunasi utang kita. Saya sebagai Wakil Presiden tentu turut bertanggung jawab bahwa kita belum mencapai kemajuan sebagaimana kita harapkan, adil, dan makmur. Kebutuhan dasar negara pun belum seluruhnya kita penuhi. ✱

Disampaikan pada acara Penutupan Tanwir Muhammadiyah tahun 2017 di Surabaya, Jawa Timur, 26 Februari 2017

Sudah menjadi kenyataan, suatu negara apabila terjadi ketidakseimbangan akan menjadi masalah yang besar. Keseimbangan, bukan keseimbangan di bidang birokrasi, di politik, atau masalah-masalah lainnya.

Ketimpangan besar itu, seperti ketimpangan di bidang ekonomi. Ekonomi kita tumbuh, tetapi menimbulkan ketidakseimbangan kepada penguasaan ekonomi itu sendiri.

Ini berbahaya. Ketimpangan yang terjadi di negara-negara Arab menimbulkan adanya Arab Spring. Apalagi bila diimbangi dengan pemerintahan yang tidak adil sehingga menimbulkan masalah kehancuran. Karena itulah kita harus berusaha berbuat yang baik agar ekonomi tumbuh, dan kita menikmati bersama-sama.

Banyak ukurannya. Ada ukuran-ukuran *gini ratio*, ada ukuran pendapatan. Dulu Jalan Sudirman, di sebelah ada Probosutedjo, di sebelahnya ada Masayu, ada Ibnu Sutowo, kemudian beberapa tempat lagi. Sekarang makin banyak, makin tidak seimbang. Itulah yang harus mendapat perhatian.

Kita sependapat, untuk mengurangi ketimpangan bukan menurunkan yang sudah baik, tetapi menaikkan yang belum baik. Kita tidak ingin menurunkan yang sudah baik karena akan terjadi pengangguran, ekonomi melambat, terjadi

ketidakseimbangan. Yang benar, kita naikkan yang belum baik sehingga makin mendekat.

Di Turki waktu itu, dengan Fethullah Gulen, dengan gerakan hizmet atau khidmat, suatu gerakan yang mendorong timbulnya semangat dunia usaha di kalangan rakyat Turki. Terjadi peningkatan dunia usaha di kalangan umat.

Kita juga berbicara dengan teman-teman Tionghoa. Mereka khawatir apabila terjadi peristiwa masa lalu yang tidak menguntungkan kita semua. Kita tidak ingin terjadi seperti tahun 1997-1998, ada kerusakan.

Mari kita perbaiki ketimpangan ini dengan bekerja bersama-sama dalam suatu bangsa. Banyak hal yang dapat kita lakukan. Ini niat yang harus kita laksanakan karena di antara negara-negara dunia, ketimpangan di Indonesia sangat berbahaya.

Berbeda kalau di Turki, yang kaya dan yang miskin tetap Islam. Di Thailand yang kaya dan miskin tetap orang Buddha. Di Filipina tetap Katolik. Di sini berbeda. Karena itulah lebih cepat bisa menimbulkan masalah apabila kita tidak tangani.

Tidak ada satu pun pekerjaan yang baik hanya dengan berbicara, hanya dengan kongres. Tidak ada. Sekiranya masalah di Indonesia bisa selesai dengan seminar, dengan Keppres, dengan Inpres, dengan kongres, selesailah persoalan. Itu karena kita negara yang paling banyak seminarnya, paling banyak konferensinya, paling banyak peraturannya.

Pertanyaannya, dari mana sumbernya ini? Apa masalah kita? Ya, umat tidak banyak berminat masuk dalam dunia usaha yang baik. Tidak ada persoalan selesai dengan keluhan. Makin mengeluh makin malas bekerja. Pengusaha harus optimistis.

Bagaimana kita mulai? Tidak ada kerja tanpa kebijakan yang mendorong. Itulah tugas pemerintah. Memang dalam 70 tahun merdeka, baru tiga kebijakan yang berpihak kepada

pengusaha pribumi atau nasional waktu itu. Pertama pada waktu tahun 1952, kebijakan devisa untuk pengusaha nasional oleh Mr. Iskak Tjokrodisurjo, Menteri Perdagangan.

Muncullah pengusaha pribumi yang tiba-tiba dapat devisa, kemudian dia berusaha berdagang, termasuk bapak saya, Bakrie, Masayu, dan banyak pengusaha yang senior mulai muncul. Walaupun banyak juga yang gagal, yang tidak mau kerja keras, hanya jual devisanya ke pengusaha besar, dia hanya mendapat komisi, akhirnya tidak jalan.

Kemudian setelah peristiwa Malari timbullah KIK, KMKP, timbullah Keppres 18, Keppres 15 yang mendahulukan pengusaha daerah dan modal yang mudah. Kira-kira 10 tahun lalu, kita bikin KUR lagi untuk pengusaha kecil menengah.

Di tengahnya ekonomi liberal dan krisis. Krisis bukannya apa? Ada dua hal, ada orang kaya makin kaya, kemudian banyak orang menganggur. Terjadilah konflik besar, kerusuhan besar, akibat hal tersebut pada tahun 1997-1998.

Bagaimana kita selesaikan tanpa konflik? Bagaimana kita menyelesaikan ini dengan baik? Pertama, sekali lagi, tidak ada solusi hanya dengan resolusi, dengan pernyataan. Yang paling penting bagaimana menumbuhkan semangat orang berusaha karena pemerintah tidak diskriminatif, malah mendorong yang baru.

Pemerintah juga pernah punya kesalahan besar lima tahun lalu, saat kabinet sebelum ini. Kabinet waktu zaman saya yang pertama, kita buat KUR, bunganya 10 hingga 11 persen. Tiba-tiba pada Kabinet kedua, SBY dinaikkan menjadi 23 persen. Jadi pengusaha besar makin besar, pengusaha kecil makin kecil. Pengusaha besar kreditnya 11 hingga 12 persen, pengusaha kecil 23 persen. Bagaimana UKM bisa, dan mampu bertahan dengan cara itu?

Sekarang kita turunkan menjadi sembilan persen dan kita akan turunkan lagi menjadi tujuh persen. Itu suatu kesalahan,

kezaliman yang terjadi sewaktu menaikkan bunga KUK 23 persen.

Jadi apa tugas kita, apa tugas MUI? Tugasnya memberikan semangat kepada generasi muda untuk berusaha. Saya ingat, kenapa saya sebut Gulen? Gulen tidak berbuat apa-apa, hanya mendorong keyakinannya kepada masyarakat bahwa hanya kalian yang dapat mengembangkan Islam di Turki. Apabila kita bersaing dengan orang Eropa, Anda harus bekerja produktif.

Karena itulah, menggerakkan masyarakatnya untuk bekerja. Minta maaf, berkali-kali saya katakan, bukan hanya di sini. Di ICMI juga. Saya tidak setuju suatu organisasi berdagang. Masyarakatlah yang didorong berusaha.

Darimana sumber pengusaha? Sumber yang paling mudah adalah keluarga, anak dari para pengusaha karena sejak kecil bisa dilatih. Kenapa kita kekurangan pengusaha dibandingkan sahabat-sahabat, keluarga kita dari Tionghoa? Sederhana sekali, karena pengusaha Tionghoa sesuai dengan deret ukur.

Sengaja saya undang Sofyan Wanandi datang ke sini karena dia Ketua Apindo supaya mendengar juga. Bagaimana Apindo membantu nanti. Kalau anak lima, kelima-limanya jadi pengusaha karena dulu tidak bisa jadi tentara, tidak bisa jadi pegawai pemerintah.

Kita anak lima, satu mau menjadi tentara, satu pengusaha, satu pegawai negeri, dan sebagainya. Akhirnya pengusaha tidak bertambah-tambah, hanya lanjut saja. Kadang-kadang tidak lanjut pula. Ada toko, toko itu saja yang dipertahankan.

Kalau keturunan Tionghoa, anaknya buka toko yang lain. Ada anaknya lagi, buka toko lagi. Jadi makin lebar. Karena itulah, kita harus membikin sinergi untuk itu.

Kedua sumbernya profesional. Pengalaman saya, waktu saya mulai kembali berusaha melanjutkan usaha bapak saya,

kita tumbuhkan usaha, kemudian banyak orang-orang saya, direktur-direktur saya. Antara lain bapaknya Erwin, Aksa Mahmud. Begitu sudah pintar, dia ingin bikin usaha sendiri, silakan. Alwi Hamu jalan sendiri. Akhirnya kita tumbuh, dari satu menjadi tiga. Jadi sumber yang kedua profesional.

Sumber ketiga generasi muda yang sekarang disebut *start up*. Bagaimana mendorong mereka? Kalau dulu ditanya mahasiswa mau menjadi apa, mungkin 50-60 persen ingin menjadi PNS. Sekarang mau menangis pun untuk menjadi PNS tidak mudah. Sekarang yang diterima setiap tahun hanya 7.000. Sarjana paling tinggi 10.000.

Jadi tidak ada cara lain, mereka harus masuk profesional atau memulai *start up*. Itu yang harus kita dorong. Tugas utama Majelis Ulama memberi semangat kepada umat.

Berkali-kali saya katakan, siapa yang mengembangkan agama kita ini? Para pengusaha. Rasulullah berusaha dulu baru kawin. Kawin pula dengan pengusaha, Siti Khadijah. Abubakar saudagar, Usman saudagar, Umar juga. Semuanya tumbuh dari situ. Begitu banyaknya contoh yang dapat diberikan, begitu banyaknya hal yang dapat dikemukakan.

Suatu hari waktu saya tamat, bapak saya panggil saya. “Kau mau jadi apa?” Waktu itu banyak tawaran.

“Ikut bapak saja.”

“Ya, tapi niatmu dulu harus jernih? Apa niatnya? Niatmu bahwa pengusaha itu ibadah. Bagaimana caranya meniatkan berusaha menjadi ibadah? Ya, kau berniat untuk bayar zakat lebih banyak, membantu orang. Itu semua ibadah. Jangan kau berniat untuk foya-foya, untuk membeli mobil.”

Bagaimana kita formulasikan, bagaimana membikin sinergi. Banyak hal yang tentu bisa dilakukan. Itu yang dimunculkan dulu.

Sekarang bagaimana kebijakan pemerintah? Tanpa kebijakan, juga tentu tidak mudah. Malaysia contohnya.

Memang kita tidak sekonsisten Malaysia. Malaysia konsisten. Malaysia bumi putranya sekarang sudah sekitar 20 persen. Tetapi jangan lupa, penduduk pribuminya kurang lebih 50 persen.

Jadi bagaimana kebijakan pemerintah agar siap untuk itu. Seperti KUR, tentu Presiden sudah memberikan instruksi bagaimana perbaikan redistribusi aset. Tetapi jangan lupa redistribusi aset itu, juga tidak bisa tanpa ada orang yang siap menjalankan aset itu.

Waktu krisis 1998, zaman Pak Habibie, juga redistribusi aset dibicarakan. Penggeraknya Adi Sasono, almarhum. Semua saham-saham yang rusak mau dibeli, tetapi akhirnya yang dibeli siapa? Yang punya uang. Karena itu mesti juga beli walaupun harganya mungkin hanya 10 hingga 20 persen dari harga aslinya, tetapi kita tidak punya uang.

Akhirnya, kembali lagi ke pengusaha besar. Akhirnya aset didistribusikan, tetapi bukan ke umat karena banyak pengusaha umat tidak punya uang.

Jadi jangan pula dengan redistribusi, langsung beres persoalan. Tidak beres persoalan. Karena dibutuhkan orang yang mau bekerja keras, dibutuhkan orang yang mempunyai cara berpikir yang baik.

Karena itulah saya selalu katakan, juga pertemuan dengan Majelis Ulama, bagaimana mengembangkan ini tanpa mengeluh, tetapi bekerja. Pengusaha itu bukan hanya bekerja keras, tetapi bekerja *smart*, bekerja yang pintar. Kalau hanya bekerja keras, mestinya yang paling kaya petani karena dari pagi mencangkul sampai sore, tetapi hasilnya begitu saja. Coba bekerja dengan baik, bibit yang baik, belajar bagaimana menanam yang baik, akan baik.

Tentu faktor politik juga dibutuhkan untuk mendapatkan dukungan secara politik. Dukungan pemerintahan, DPR, aturan-aturan yang memberikan jaminan suatu sistem

memberikan keadilan baru, ada keseimbangan baru, arus baru kalau disebut.

Kalau di DPR, bagaimana dibicarakan arus baru itu. Artinya, memberikan keutamaan kepada UKM, pengusaha pribumi. Itu harus dibicarakan, tidak usah kita malu-malu karena demi keamanan dan kesatuan bangsa ini.

Kalau contoh yang gampang, kota apa yang paling jelas perbedaannya di Asia, ya Jakarta. Tinggal Jakarta dan Manila, ditambah Calcuta. Jadi yang kaya betul luar biasa dan yang miskin betul ada di situ.

Jadi ini masih awal pekerjaan bersama yang besar. Tetapi inti yang ingin saya katakan, berilah semangat. Para keluarga pengusaha, ayo *total football* untuk maju. Itu yang paling banyak kemungkinannya, minta maaf, saya alami sekeluarga. Bapak saya, semua kita akhirnya ikut bapak-ibu jadi pengusaha. Jadi bertahan dan melebar.

Para profesional, begitu punya kemampuan, ayo bikin usaha sendiri. Pengalaman saya, bagaimana tumbuhnya manajer-manajer saya, direktur saya, kemudian menjadi pengusaha yang besar dengan pengalaman yang ada. Itu penting sekali.

Kemudian bagaimana mendorong generasi muda *start* dari yang kecil. Di situlah fungsi pemerintah memberikan KUR, memberikan fasilitas yang mudah, bersaing, dan sebagainya. Kemudian kembali lagi, kita kelola aset-aset yang besar itu.

Tetapi, ini harus dengan perjuangan. Seperti aset lahan, yang ingin lahannya yang paling banyak penduduknya. Artinya, ya di Jawa, tetapi lahannya ada di Kalimantan, ada di Sumatera. Siapa yang mau pindah ke Kalimantan untuk berusaha mulai dari nol. Itu lagi dia. Jangan berpikir nanti terima sertifikat baru dijual lagi ke pengusaha lain.

Jangan lupa, dulu yang dapat izin HPH lebih banyak orang-orang kita, tetapi karena tidak sanggup, dijual semua ke Prayogo Pangestu. Prayogo Pangestu yang punya satu juta hektar. Sawit begitu juga. Semua tambang-tambang juga sebagian besar mula-mula yang punya orang kita, tetapi kemudian tidak serius, hanya mau tinggal di Jakarta bersenang senang. Yang mau bekerja keras pengusaha-pengusaha lain, akhirnya berpindah tangan.

Jadi pemerintah bukannya tidak memperhatikan, tetapi yang dibutuhkan semangat berusaha. Jadi sekali lagi, tugas Majelis Ulama jangan berusaha, tetapi berikan semangat berusaha.

Jangan pula ingin eksklusif, wah kalau begitu kita bikin bank, kita bikin apa. Mau kembali lagi seperti BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang akhirnya bunganya 25 persen padahal BRI-BNI menyiapkan 9 persen.

Cukup mengajar umat bagaimana memakai yang sembilan persen ini. Bagaimana Rp 120 triliun yang kita siapkan tahun ini bisa dipakai secara produktif. Cukup itu. Daripada kumpulkan uang, dana, rupiah demi rupiah, paling tinggi puluhan miliar sudah merasa hebat.

Ada modal puluhan miliar, padahal BRI-BNI punya Rp 120 triliun yang mau diberikan dengan mudah. Jadi ajak saja.

Saya pernah bicara dengan Muhammadiyah. Seluruh mahasiswa diajar bagaimana pakai KUR, sembilan persen. Jangan pula bikin bank yang bunganya 20 persen. Itu rentenir namanya. Itu baru riba namanya.

Jadi kadang-kadang kita sendiri membuat riba. Alasannya asal bahasa Arab maka tidak riba. Bukan. Asal bahasa Arab ini halal, padahal dihitung-hitung 20 persen. KUR sembilan persen. Yang mana yang riba coba? Belum lagi kalau dilarikan. Banyak itu. Di Depok kemarin triliunan uang rakyat dilarikan.

Pokoknya sudahlah. Berbuatlah yang terbaik dan negara mempersiapkan itu. Kemarin kita siapkan Rp 110 triliun, yang dipakai hanya Rp 80-an triliun. Sekarang kita siapkan Rp 120 triliun dengan subsidi Rp 10 triliun. Subsidi saja 10 triliun. Jadi bikinlah kelompok-kelompok berusaha atas nama orang.

Saya ke Turki, tidak ada satu pun atas nama Gulen. Semua pengusaha ini, pengusaha itu tiap malam kita diundang makan orang kaya-kaya di situ hanya karena membikin jaringan-jaringan usaha yang kuat.

Jadi ustaz-ustaz yang ada di sini, dorong semangat itu. Dia sendiri yang akan tahu sendiri caranya berusaha. Mau berusaha mulai gado-gado, toko, kita juga sudah mempersiapkan contohnya.

Karena apabila tidak dibatasi dan diberikan suatu celah, habis juga warung-warung di daerah ini, akibat Indomart, Alfamart, dan sebagainya.

Makanya nanti ada kewajiban, 1 toko Indomart atau Alfamart harus membina sepuluh warung di sekitarnya. Harus dengan logistik yang sama, harga yang sama. Kalau tidak, tidak bisa bersaing.

Ada AC-nya, lampunya terang, harganya murah, barangnya baru, bagaimana bersaing dengan warung Haji Ali di situ, dengan si mbok-mbok. Tidak bisa bersaing. Karena itulah, harus diwajibkan membina warung-warung di dekatnya dengan logistik yang baik, dengan IT yang baik sehingga mereka juga mendapat stok.

Contohnya, kenapa mereka bisa jual murah? Bukannya mereka rakus, tidak. Karena mereka punya toko 10.000, 20.000 di seluruh Indonesia. Jadi membeli barang, membeli sabun, dia membeli setiap hari mungkin sejuta. Tentu harganya dikasih diskon 10 persen hingga 20 persen dibandingkan membeli 10 biji.

Akhirnya dia bisa jual murah. Akibat IT-nya tidak putus, mudah stoknya, akhirnya modal kerja yang dibutuhkan sedikit. Toko-toko itu tidak butuh modal kerja yang besar karena dia hutang ke pabrik. Bayar sebulan, contohnya.

Dia jual seminggu sudah laku, uang itu dia bayarkan ke toko dengan diskon. Bagaimana bisa mengalahkannya? Rakyat pula senang karena terang benderang lampunya, buka 24 jam. Karena itu, mereka harus membantu warung yang terdekatnya dengan desain yang baik, harga yang sama. Trennya akan begitu. Kalau tidak, habis sudah warung-warung ini.

Jangan lupa, kalau warung-warung masih jual makanan apa di situ, pisang goreng dari belakang rumah dititip, akhirnya semua usaha bisa dia jual. Jadi harus kerja sama. Di situ dibutuhkan kerja sama. Jangan pula dilempari itu Alfamart karena rakyat susah. Kerja sama dibutuhkan.

Hal-hal itu harus kita jaga. Jangan pula disuruh tutup. Kalau ditutup, rakyatnya juga marah. “Dulu saya beli barang murah di situ, baru lagi, bersih lagi, tidak berdebu.”

Karena itu yang dibutuhkan, nanti kita bikin bersama, bagaimana mensinkronkan ini. Dulu zaman Soeharto ada namanya bapak angkat, anak angkat.

Sistem itulah kita perbaiki sehingga terjadi kenaikan bersama-sama. Tetapi inti dari semua itu ialah semangat anak muda yang mau berdagang. Majelis Ulama kami harap beri semangat.

Tidak lebih dari dua hal itu, ajak bersinergi karena semua upaya yang seperti itu akan kalah dengan program pemerintah. Kalaupun bikin bank, tidak mungkin bayar bunganya sembilan persen. Kita akan turunkan menjadi tujuh persen dengan subsidi usaha. Jadi akan mati, semua bank-bank yang mau makan rente-nya rakyat. Hati-hati. Semua

bank yang hanya mau hidup dari riba akan mati. Bukan sengaja, mati sendiri.

Sering kita merasa puas setelah kongres. Sudah ada statemen, habis perkara. Bukan itu. Dibutuhkan pengajian-pengajian yang berlanjut, dibutuhkan upaya-upaya yang mendorong.

Kumpulkan pengusaha-pengusaha di daerah, kenapa anaknya itu, tidak melanjutkan usahanya? Yang muda-muda didorong bekerja. Anak-anak SMK dikasih modal sedikit-sedikit untuk berusaha, baru juga tumbuhkan pengusaha besar. Kita akan tumbuhkan pengusaha besar. ✱

Disampaikan pada acara Penutupan Konferensi Ekonomi Umat Tahun 2017 oleh Majelis Ulama Indonesia, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 24 April 2017

Insentif Petani

Apa pun yang kita hadapi, kemakmuran selalu dengan cara menambah nilai karena tidak mungkin kemakmuran dicapai tanpa penambahan nilai. Apakah produksi, penghasilan dan juga produktivitas yang lainnya.

Khususnya apabila kita berbicara pertanian, tentu lebih penting lagi. Seperti tadi disampaikan oleh Ketua ISEI, bahwa 26 juta penduduk, keluarga penduduk masih bekerja di pertanian, kurang lebih 35 hingga 40 persen tenaga kerja bekerja di sektor pertanian, angka yang pastinya mungkin nanti setelah sensus ekonomi kita tahu lagi, sebelumnya 41 persen.

Dari sisi GDP sektor pertanian hanya menghasilkan 15 persen. Dari situ tecermin bahwa produktivitas pertanian dibanding dengan sektor ekonomi lainnya masih sangat rendah apabila dilihat dari sisi porsinya, dilihat dari sisi pendapatan masyarakat yang 40 persen itu, yang hanya menghasilkan 15 persen dari seluruh total pendapatan nasional.

Jumlahnya tentu secara persentase sudah turun, kalau 10 tahun lalu, 45 persen penduduk bekerja di sektor pertanian, sekarang saya kira di bawah 40 persen, secara persentase

itu pasti menurun, tetapi secara nominal tetap naik. Karena kalau 45 persen dibandingkan 15 tahun yang lalu dari 20 juta penduduk dibandingkan sekarang yang 250 juta, pasti lebih banyak lagi.

Maka itu tecermin dari makin kecilnya lahan yang dipakai per keluarga tadi. Kalau mungkin 50 tahun lalu, satu hektar per keluarga, sekarang sisa sepertiga hektar saja. Akibatnya, jumlah petani secara persentase turun, tetapi secara jumlah selalu naik. Artinya, *resources* nasional kita memang terbagi habis, lebih banyak di sektor pertanian ini. Itu menjadi bagian daripada peta-peta yang selalu kita pelajari dari sektor pertanian kita. Kalau kita berbicara sektor pertanian, tentu juga berbeda-beda cara penanganannya. Sektor pertanian dapat kita bagi, kepada pertanian yg menghasilkan makanan dan industri gabungan dengan makanan.

Kalau makanan tentu jelas, mulai beras, jagung, coklat, kopi, dan sebagainya. Kalau industri, maka terkait dengan karet, sawit, *mix* antara industri dan pertanian, tentu turunannya banyak sekali, tentu makanan.

Ini memberi kita bagian yang berbeda-beda cara pandangnya, tentunya. Namun demikian, pastilah namanya pertanian selalu membutuhkan lahan yang besar dan sebaliknya akibat penduduk yang makin tinggi maka lahan makin kecil.

Kita lihat saja kalau ke Karawang atau ke mana saja, habislah lahan karena industri, rumah, toko, dan sebagainya, habislah tanah lahan itu, di lain pihak penduduk bertambah, di lain pihak kita butuh makanan yang lebih banyak. Hasil akhirnya ialah kita mengimpor makanan kita.

Apakah akibatnya, maka tentu solusinya cuma satu, produktivitas yang dinaikkan, karena tidak mungkin kita membuat sawah lebih banyak lagi, karena setiap sawah butuh pengairan, butuh hutan yang dikurangi, sedangkan

kita semua sudah berjanji tidak akan menebangi hutan dimanapun, melalui moratorium, dan sebagainya, sehingga tak ada cara lain selain produktivitas dinaikkan. Nah, tentu itulah solusi yang menjadi bagian. Memang tidak mudah juga mengambil kebijakan yang sama di bidang pertanian.

Untuk pertanian di bidang makanan, terbagi atas dua macam, yakni makanan pokok, dan tambahan, kopi, coklat, dan sebagainya. Khusus untuk pertanian makanan ini kita mengalami dilema.

Setiap kenaikan harga kopi, coklat, sawit, semua orang tepuk tangan, petani, pedagang, siapapun bergembira, pemerintah juga bergembira. Tetapi setiap kenaikan harga beras, semua orang marah kecuali petani beras. Pemerintah dihujat kalau harga beras naik. Karena itulah, maka petani harus diberikan insentif karena harga tidak bisa menjadi insentif, berbeda dengan komoditas yang lainnya. Akan tetapi, apa pun semua itu, pokoknya tetap insentif utama ialah produktivitas.

Pada waktu kita bicara kopi di Lampung, di Indonesia, produktivitas itu kurang dari 1/2 ton per hektar, 600-700 kg per hektar, di Vietnam sudah lebih dari dua ton per hektar. Vietnam yang baru juga mengalahkan, apalagi di tempat lain. Kakao juga begitu, kita hanya menghasilkan rata-rata, walaupun produktivitas kakao kita nomor tiga di dunia tetapi kita hanya menghasilkan ½ ton per hektar dibanding Ghana atau Pantai Gading yang lebih tinggi dari kita.

Artinya, sebenarnya satu berita baik, satu berita buruk. Berita buruknya kita di bawah, berita baiknya berarti banyak kesempatan menaikkannya. Sekiranya sudah *full*, ini susah. Ini masih rendah, jadi gampang kita naikkan, semestinya secara teknis. Begitu juga yg lainnya.

Sama juga dengan beras, sama dengan sawit, kalau kita bicara tentang petani plasma yang menghasilkan hanya satu

sampai dua ton per hektar dibanding dengan para pengusaha, yang lebih baik bisa menghasilkan empat hingga lima ton per hektar, tentu gabah bisa dinaikkan secara teknis.

Terkecuali kalau semuanya lima ton, ini yang susah. Artinya, bagaimana peluang-peluang itu. Kita bisa lakukan perbaikan. Karena itulah maka saya menghargai tentu upaya-upaya hari ini, upaya ISEI, KADIN, dan PISAgro, untuk konsep-konsep, bagaimana kita tingkatkan sektor pertanian, baik produktivitasnya, lewat bibit, penanganan yang baik dan juga *financial inclusion*, artinya seluruh petani mendapat layanan keuangan yang baik.

Hal ini bukan hal yang baru sebenarnya. Pada awal kita tingkatkan produktivitas pertanian kita, apakah itu lewat bimas, apakah itu lewat upaya lainnya, apakah itu lewat perkebunan besar, apakah lewat KUD zaman dulu. Semua menginginkan hal yang sama, suatu layanan yang lengkap kepada petani, baik kepada layanan tentang teknologinya, pupuknya, bibitnya, dan layanan keuangannya, maka dibentuk BRI unit desa sebenarnya. Jadi hanya membangkitkan suatu konsep yang sebenarnya kita tahu.

Sama dengan KUR, waktu kita mulai KUR lagi, lima tahun lalu, saya katakan tidak usahlah seminar, tidak perlu studi. Cukup cari arsip dan sistem zaman dulu, perbaiki konsepnya, selesai, jalankan, dan itu kita jalankan. Jadi dalam waktu satu bulan, kita jalankan KUR itu, dalam 10 tahun lalu, tanpa seminar, tanpa rapat, tanpa apa, hanya mencari konsep di KMKP, bikin, perbarui kondisi sistem KMKP.

Walaupun setelah saya tidak menjabat lagi, naik lagi bunganya 23 persen seperti rentenir. Kita turunkan lagi hari ini menjadi sembilan persen. Karena menyebabkan ketidakadilan yang luar biasa kepada rakyat kita. Ini juga tentu termasuk apa yang kita lakukan kepada petani, suatu layanan keuangan yang adil.

Jangan pengusaha besar, termasuk saya zaman dulu, mendapat bunga yang lebih rendah dibanding pengusaha kecil. Jadi sebenarnya pengusaha kecil mampu, cuma digerus pendapatannya oleh kita sendiri, maka dari itu, dia tidak bisa bergerak.

Hal ini, tentu kita harus hindari, kita jalankan yang benar, yang adil, karena seperti saya katakan, tujuan bangsa ini adalah bagaimana kemakmuran yang adil. *

Disampaikan pada acara "Inovasi Rantai Nilai Sektor Agro Dalam Mendukung Implementasi Financial Inclusion Untuk Petani" Kartika Expo Center, Balai Kartini, Jakarta, 23 mei 2016

Kemajuan dan Keadilan

Minggu ini seluruh negeri ini heboh dengan kunjungan Raja Salman. Hari ini, 15 kepala negara hadir, tetapi banyak yang tidak tahu lima belas kepala negara itu.

Kenapa? Karena kedatangan Raja Salman begitu wah, rombongannya wah, fasilitasnya wah. Setiap hari, TV hanya membahas tangga pesawat yang pakai elevator, mobil yang berapa mahal, pengawal yang macam-macam. Heboh sebangsa.

Di Timur Tengah juga heboh melihat kehebohan kita. Dia menghebohkan karena kita heboh. Kita heboh karena tidak pernah terjadi.

Sekali lagi, kenapa ini? Dia bisa wah karena kaya, mampu. Walaupun tentu kita tahu, mampunya itu karena rezeki Allah, rezeki negerinya. Tetapi bagaimanapun, dia mampu. Jadi sering saya katakan, hanya dua negara di dunia yang diperhatikan. Pertama kalau negara itu kaya, kedua kalau dia nakal.

Castro diperhatikan dulu, Chaves di Venuzela, Ahmadinejad di Iran, atau sekarang ini Korea Utara, Kim Jong Un. Betul dia hits, tetapi nakal. Begitu kan?

Kita kedua-duanya tidak. Tidak kaya, tidak nakal juga. Jadi kalau pergi ke mana-mana tidak banyak menjadi berita. Apalagi kalau saya ke mana-mana, berita kecil saja di koran. Di Amerika apalagi.

Tetapi kalau China, sekarang ke mana-mana, *live* CNN. India mulai, Jepang. Semua karena kaya. Coba lihat kalau negara-negara yang tanggung-tanggung, itu kurang mendapatkan perhatian dunia. Mau voting di PBB, kita kalah waktu kita mau menjabat pemimpin.

Apa yang saya katakan? Kalau kita ingin dikenang, tidak ada lain kita harus maju, kita harus mampu. Mau kita ngomong apa saja, tetapi kita tak mampu, “Ah kau ngomong apa?”

Bagaimana mau membantu, selalu tangan di bawah. Kita jarang tangan di atas. Mestinya kita selalu bantu Kamboja, Laos. Tetapi Raja Salman datang, pikiran kita, berapa dia bantu kita. Padahal itu pikiran orang yang tidak mampu. Selalu yang dibahas berapa investasinya. Tidak pernah berpikir berapa berapa investasi kita ke Saudi. Padahal 1,2 juta orang Indonesia ke Saudi setiap tahun untuk haji dan umrah.

Orang Saudi ke sini banyak juga, tetapi arahnya lebih banyak ke puncak. Begitu kan. Kenapa ke puncak? Sederhana. Ukuran surga dalam Islam itu cuma tiga, kehijauan, ada buah-buahan, air mengalir, dan bidadari. Di sana hijau, air mengalir, buah-buahan banyak, di pinggir jalan semua buah-buahan. Mana ada di Timur Tengah buah-buahan di pinggir jalan. Semuanya impor, terkecuali kurma.

Itulah suatu ukuran masyarakat kepada suatu negara. Karena itu saya sangat setuju, tema pertemuan ini “Bersama Membangun Bangsa”. Karena apa yang disampaikan Pak Alwi, memang asal-mulanya ialah suatu upaya memajukan bangsa dengan berpolitik. Karena apa yang kita tahu, politik

itu pada ujungnya kemampuan kita berbuat sesuatu dan akan berbuah kepada kemajuan.

Kita selalu bicara Pancasila, dari kapan pun. Sebenarnya kalau kita lihat satu persatu, justru satu persatu lancar. Ketuhanan yang Maha Esa, apa masalahnya? Semua orang beragama.

Kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kita memang ada kadang-kadang yang kurang adil dan beradab. Masih banyak orang yang tinggal di rumah kumuh, tidak manusiawi. Tapi oke.

Kalau Persatuan? Saya kira, kita satu-satunya negara yang paling kurang konfliknya dibanding negara lain. Kita lihat Pakistan, India, Thailand, Timur Tengah, Afrika. Kita lebih baik. Semua orang memuji itu.

Kerakyataan. Saya kira kita kadang-kadang sangat demokratis, malahan. Yang masalah Keadilan Sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Antara yang kaya dan miskin terlalu jauh dan masih banyak. Tetapi hanya dengan pembangunan ekonomi itu dapat diperbaiki.

Apa yang harus kita lakukan? Bukan hanya menganalisis. Menganalisis sudah terlalu banyak. Lembaga studi? Apanya lagi yang distudikan? Sudah terlalu banyak studi, terlalu banyak seminarnya. Kalau suatu bangsa bisa maju dengan seminar, dengan konferensi, dengan rapat, Indonesia negara paling maju di dunia. Atau paling banyak undang-undang, Inpres, Keppres, Pergub, Perbup, maka kita yang paling banyak di dunia ini.

Kalau lihat di Amerika, Trump memberikan keterangan *executive order*. *Executive order* di sini namanya Keppres. Itu cuma satu halaman, kita biasanya 20-30 halaman. Dijelaskan dulu apa arti menteri, apa itu daerah, apa itu provinsi. Padahal setiap kali kita sudah tahu menteri itu apa, dijelaskan lagi di

dalamnya. Menteri apa, tanggung jawabnya apa. Menimbang, mengingat, wah banyak sekali.

Kadang-kadang lebih panjang mengingatnya daripada isinya. Halaman mengingat dan menimbang panjang, padahal isinya mengangkat saudara ini menjadi ini. Itu semua kita akan perbaiki supaya negeri ini lebih ringkas kerjanya.

Karena itu, yang harus kita lakukan mengefisienkan bangsa, memajukan, dan bagaimana dan mensandingkan. Kita ini negara yang kesenjangan tinggi, tetapi lebih tinggi lagi Rusia dan Thailand, baru kita.

Kita lihat sejarah dunia. Indonesia dalam sejarahnya 70 tahun, sudah 15 konflik besar, kategori konflik besar itu yang korbannya lebih dari 1.000 orang di Ambon, di Poso. Waktu PRRI banyak, waktu DI/TII juga banyak.

Sepuluh di antara yang besar itu karena ketidakadilan. Apakah masalah PRRI, Permesta, di Ambon, di Poso, juga pergerakan di Aceh. Aceh itu bukan masalah agama, tetapi masalah hasil kekayaan dinikmati bukan di Aceh.

Kita ingin negeri ini harus maju tetapi adil. Adil dan kemajuan itu harus apa? Kemajuan itu nilai tambah, produktivitas. Kita baru makmur kalau hasil sawah dari lima ton menjadi tujuh ton. Kita baru makmur kalau produktivitas di pabrik kita bisa naik. Baru makmur kalau hasil cengkeh dan coklat kita naik. Baru makmur kalau hasil tambang kita naik. Baru makmur kalau banyak orang bekerja di industri.

Itulah baru kita mencapai kemakmuran yang adil. Tetapi adil baru bisa dicapai kalau orang kaya bayar pajak secara bagus dan betul, kemudian orang yang tidak mampu kita berikan bantuan. Kita berikan kredit, kita berikan modal usaha, dan sebagainya. Itu baru maju.

Karena itulah Institute Lembang Sembilan yang kita dirikan bersama-sama di bawah koordinasi Saudara Alwi, Saudara Tanri, dan Saudara Sofyan, dan semuanya untuk

bagaimana kemajuan bisa dicapai. Karena itu semangat kemajuanlah yang kita junjung tinggi.

Banyak pertanyaan, kenapa kurang di antara kita yang menjadi pejabat, menjadi komisaris? Karena memang niat didirikan institute ini, bagaimana kemajuan bersama. Tentu kemajuan juga membutuhkan posisi. Tanpa posisi bagaimana ada kemajuan.

Itu juga tentu menjadi bagian dari pemikiran-pemikiran kita. Tetapi yang sangat penting bagaimana mendorong? Jadi dibutuhkan spirit. Saya ke Surabaya ketemu mahasiswa, ketemu pimpinan-pimpinan generasi muda, selalu pikirannya politik. Sedikit-sedikit bagaimana menjadi anggota DPR, menjadi bupati. Padahal kemajuan bukan seperti itu. Kemajuan bagaimana menjadi pengusaha, karena kalau politik sudah penuh.

Justru berbahaya generasi muda, pengusaha muda, sedikit berpikir mau menjadi anggota DPR. Tentu ingin mencari penghasilan lebih tinggi daripada jadi pengusaha. Nah, itu bahayanya. Bisa berurusan dengan KPK dan macam-macam.

Karena itulah, diharapkan, di samping menjaga solidaritas, juga menjaga visi untuk kemajuan ke depan, dan menjaga juga ekonomi bangsa. Kedua membimbing dan mendorong generasi muda lebih banyak berpikir *entrepreneurship*. Hanya itu yang bisa mengurangi kesenjangan.

Saya ingin katakan, memang di Indonesia kesenjangan sangat berbahaya dibanding negara lain. Bahayanya, kalau di Thailand yang kaya dan miskin sama-sama beragama Buddha. Di Filipina yang kaya dan miskin sama-sama beragama Katolik.

Kita yang sangat miskin dan sangat kaya kadang-kadang berbeda banyak, 90 persen berbeda. Nah, itu menimbulkan titik-titik kritis yang harus kita jaga. Berbahaya untuk kedua belah pihak.

Kesenjangan 0.40

Jangan lupa di Indonesia hampir setiap 20-an tahun terjadi masalah antarmasyarakat. Tahun 1974 peristiwa Malari, Jakarta terbakar. Tahun 1998 terbakar lagi Jakarta, 1997-1998. Sekarang sudah 20 tahun, mudah-mudahan tidak terjadi akibat kesenjangan. Tetapi syaratnya, harus memajukan ekonomi dan mengurangi ketimpangan.

Saya juga berbicara di Muhammadiyah, ada dua masalah ketimpangan. Ini keadaan diturunkan atau dinaikkan. Kalau diturunkan, kita sama-sama miskin. Tidak. Kita harus sama-sama kaya, sama-sama mampu setidak-tidaknya. Jadi yang miskin dinaikkan, baru menjadi adil. Keadilanlah yang menjadi tujuan.

Itulah saya rasa, sehingga kita bukan hanya berbicara soal politik, soal kekuasaan, tetapi lebih banyak berbicara bagaimana Indonesia maju bersama-sama. Jangan hanya Saudi yang bikin heboh di sini. Kita juga harus bisa bikin heboh di negeri lain. Itulah yang dimaksud kemajuan, bagaimana mempunyai kesanggupan, kemampuan untuk bangsa ini. *

Disampaikan pada acara Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
Institut Lembang Sembilan Tahun 2017 di Hotel Mercure Sabang,
Jakarta, 5 Maret 2017

Untuk kemajuan suatu Negara, ada dua cara yang digunakan untuk mengukurnya. Pertama dibandingkan dengan negara sekitar, dan kedua melihat apa saja yang telah dicapai dari tahun ke tahun.

Indonesia jika dilihat dari pencapaiannya semenjak merdeka 70 tahun yang lalu, sudah banyak mengalami kemajuan. Misalnya, *income per-kapita* yang terus naik. Namun, jika dibandingkan dengan negara sekitar, seperti Malaysia, Singapura, dan Australia. Indonesia sangat jauh tertinggal. Meskipun, jika kita pakai tolok ukur, Negara ASEAN maka posisi Indonesia berada di tengah.

Tentunya, dalam mengejar ketertinggalannya, kita memiliki banyak tantangan. Apakah itu tantangan dari luar, maupun tantangan dari dalam. Tantangan dari luar adalah, dari segi ekonomi kita tumbuh karena kemampuan sumber daya alam dari lebih baik daripada negara lain.

Oleh karena itu, Indonesia dikenal maju karena mengeksport komoditas, mempunyai kemampuan industri walaupun tidak semaju dengan industri negara-negara industri lainnya. Dan kita juga mempunyai pasar yang luas, karena penduduk kita besar, dan otomatis golongan menengah juga lebih besar.

Tetapi, pada hari ini, negara-negara yang selalu menjadi patner dengan kita, seperti China, Jepang, dan Amerika juga

mengalami banyak masalah. Akibatnya, kita tidak mempunyai *opportunity* yang baik dalam hal pemanfaatan sumber daya alam.

Untuk itulah, pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, kita tidak bisa berharap banyak dengan hubungan dagang kita dengan negara lain. Sebab harga komoditas sedang turun, termasuk harga minyak. Maka tentulah, suatu negara seperti kita harus mempergunakan kemampuan internal kita untuk mencapai dan menjawab tantangan-tantangan itu.

Untuk itulah, kita harus memanfaatkan kemampuan nasional kita, yakni jumlah penduduk yang besar. Dengan jumlah penduduk yang besar, maka kita mempunyai pasar yang luas. Produktivitas yang tinggi, sumber daya alam yang baik dan tentunya golongan kelas menengah yang baik.

Sehebat apa pun Malaysia jika dibandingkan jumlah penduduk yang mampu, maka 50 persen jumlah penduduk mampu Malaysia, jumlahnya hanya setara dengan 10 persen penduduk mampu kita.

Itulah yang menjadi bagian, bahwa kita mempunyai kemampuan seperti itu, marilah kita memperbaiki semua itu dengan sebaik-baiknya, dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tentunya inovasi. Karena hanya dengan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dapat membuat perubahan-perubahan yang lebih cepat.

Dalam situasi seperti ini, dalam kerja sama ini, hari-hari ini kita mempunyai dua hal yang sangat penting, yaitu kita memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Artinya adalah, kita berkompetisi dalam bekerja sama, atau kita bekerja sama dalam kompetisi. Artinya adalah, sebagai tetangga tentu kita bekerja sama, tetapi tetangga juga harus bekerja lebih baik agar rumahnya lebih baik daripada tetangganya.

Karena itulah, selalu ada suatu persaingan dan saling kerja sama. Itulah yang akan terjadi, seperti itu. Siapa yang mendapat

lebih baik, hanyalah yang mempunyai inovasi, hanyalah yang mempunyai kreativitas, hanyalah yang mempunyai teknologi yang memajukan bangsanya.

Karena yang mengubah semua itu adalah teknologi, adalah perubahan yang mutlak, banyak hal yang mempunyai step-step perubahan. Contohnya, kita berbicara dengan teknologi, dulu orang berkirim surat, kemudian mengirim dengan telegram lebih cepat lagi, kemudian orang mengirim dengan telex, kemudian orang mengirim lewat faks lebih cepat lagi, sekarang orang dengan email jauh lebih cepat lagi.

Itulah suatu perubahan IT bagi kita. Selain masalah inovasi, hal lain yang perlu kita perbaiki adalah masalah ketimpangan. Apabila anda membaca beberapa analisis dan *research* terakhir tentang keadaan sosial, ekonomi sosial di negeri ini maka kita ada di puncak ketimpangan, dibanding dengan masa lalu.

Hari ini dapat ditafsirkan dalam suatu perhitungan sosial ekonomi, apabila kita menghitung ketimpangan dengan gini ratio kepemilikan, maka dapat disimpulkan, bahwa 1 persen penduduk Indonesia memiliki 50 persen aset bangsa ini, suatu ketimpangan yang luar biasa.

Pada masa 30 tahun yang lalu, 20 tahun lalu hanya sekitar 30 persen, sekarang 50 persen, 1:50 apabila dinaikkan 10 persen penduduk Indonesia, maka dia memiliki 77 persen dari aset bangsa ini, dan saya yakin yang 1 persen itu mungkin tidak ada di ruangan ini.

Karena itulah, Anda harus masuk lebih banyak lagi daripada jumlah-jumlah ini. Maka apa yang dapat mengubah ketimpangan yang tidak terduga itu adalah upaya kemajuan bersama.

Pemerintah tentu harus mempunyai kebijakan yang cukup besar dalam hal itu. Kita, pada hari ini, mempunyai banyak program pada tahun ini untuk mengubah kondisi tersebut.

Ada dua hal pokok untuk mengubah ketimpangan itu. Pokok yang pertama adalah, pemerintah harus mempunyai kebijakan pajak dan akan dilaksanakan dengan lebih baik kepada orang yang mampu itu. Memang, hanya orang yang mampulah yang dapat memberi pajak yang lebih baik, karena dengan begitu akan menciptakan keadilan.

Dan pajak pun hanya bisa naik apabila kita mempunyai sistem teknologi yang lebih baik, karena kita tidak mungkin lagi seperti dulu. Petugas pajak datang *door-to-door*, tidak mungkin lagi, kita harus mempunyai sistem yang lebih baik. Sistem IT yang lebih baik untuk perpajakan, baru dapat kita menerima pajak lebih baik, baru dapat kita kurangi penyelewengan pajak yang ada seperti itu, akhirnya dibutuhkan lagi teknologi disitu, dibutuhkan lagi inovasi disitu.

Kemudian yang kedua, ialah menaikkan golongan menengah. Golongan menengah ini adalah Anda semua yang hadir. Antara lain, para mahasiswa, para generasi muda, para ahli-ahli yang hadir disini, ataupun yang akan hadir disini sebagai diplomat menengah yang harus diangkat.

Diangkat itu tidak mungkin semua diangkat menjadi PNS. Contohnya, tidak mungkin diangkat semua menjadi pejabat, tetapi mengangkat dirinya dalam bentuk entrepreneur, dalam bentuk upaya, dalam bentuk sebagainya, karena itulah pemerintah memberikan banyak fasilitas, salah satunya adalah KUR, dengan bunga yang rendah.

Itulah, harapan kita untuk menjaga, bagaimana agar tidak terjadi ketimpangan yang panjang di negeri ini. Saya ingin katakan, apa yang terjadi di Timur Tengah pada dewasa ini, perang yang tidak habis-habisnya, dan itu semua bermula karena ketimpangan.

Arab Spring dimulai pada saat gini ratio 0.45, sekarang kita 0.41 secara rata-rata, tetapi 0.43 di perkotaan. Itu lebih berbahaya, sedikit lagi bisa menjadi lampu merah sekarang adalah lampu kuning, mudah-mudahan kita bisa kembalikan ke lampu hijau, karena apabila berkembang terus ketimpangan ini, dan menjadi lampu merah.

Kemudian akan berbahaya untuk keutuhan bangsa ini ke depan. Tetapi yang bisa berubah adalah kebijakan pemerintah yang lebih adil dan lebih merata, yang kita jalankan pada dewasa ini. Kemudian spirit bangsa kepada penerus generasi muda yang akan membawa bangsa ini lebih maju untuk mengatasi ketimpangan pendapatan dan ketimpangan dalam bekerja. *

Disampaikan pada saat memberikan Kuliah Umum pada acara
Dies Natalis ke-18 Universitas Paramadina, Aula Universitas Paramadina,
Jakarta, 13 Januari 2016

Berdagang Itu Sunnah Rasul

Kalau ada seratus orang yang kaya di negeri ini, biasanya angka itu paling tinggi 10 persen daripada jumlah umat. Sebaliknya, begitu ada data 100 orang miskin, maka 90 persennya berasal dari umat. Di mana letak masalahnya? Persoalannya adalah belum terkelolanya ekonomi umat. Padahal kita ketahui, Islam di Indonesia adalah termasuk yang moderat. Di mana tidak ada negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti kita, yang ikon wisatanya justru Candi Borobudur.

Kalau Borobudur di Timur Tengah, saya kira sudah habis di bom. Alhamdulillah di Indonesia kita menjaganya sebagai lambang. Itulah contoh kita tetap bersatu di sini dan kita bisa hidup dengan damai di sini, tidak saling membunuh, seperti apa yang terjadi di banyak negara yang penduduknya beragama Islam.

Akan tetapi, itu saja tidak cukup jika ketidakseimbangan masih terjadi. Ketidakseimbangan bukan karena aturan dan bukan karena kebijakan. Ketidakseimbangan terjadi dalam spirit dan akal kita yang harus kita perbaiki, ke arah yang lebih baik, menjadi lebih produktif.

Kemajuan dan kemakmuran itu hanya bisa terjadi apabila kita tingkatkan produktivitas. Produktivitas itu nilai tambah.

Untuk meningkatkan nilai tambah perlu upaya kreatif, dengan berusaha keras untuk memperbaiki. Upaya ini bisa di pertanian, perdagangan, dan industri. Skalanya pun bisa besar, kecil, ataupun menengah. Dalam beberapa kesempatan, termasuk di lingkungan keluarga Muhammadiyah, saya menekankan bahwa setelah membangun pendidikan dan kesehatan, mari kita fokus untuk memajukan spirit entrepreneur. Spirit saudagar di kalangan Muhammadiyah dan kalangan umat yang lainnya.

Secara umum sering saya katakan, bahwa spirit ini dengan sederhana kita harus selalu jaga dan tingkatkan, bahwa perdagangan itu sunnah. Karena sering kita hanya kalau berpidato pada saat pernikahan kita hanya selalu menganggap nikah itu sunnah, namun kita jarang berbicara perniagaan itu sunnah juga. Kalau melihat sejarah nabi, berdagang dulu, baru nikah. Apa yang pertama dilakukan Rasulluloh itu berdagang.

Umumnya setiap ingin memulai usaha dagang selalu memikirkan risiko dan rugi. Jarang berpikir bagaimana kalau untung. Padahal lebih banyak orang untung daripada rugi. Jadi bagaimana kita memberikan motivasi yang baik supaya kita semua berusaha sungguh-sungguh, karena kalau tidak, kita cuma bisa menjadi konsumen. Apalagi di dunia ini sudah demikian terbukanya sehingga kita bukan hanya konsumen dalam negeri, tetapi kita juga konsumen langganan luar negeri.

Risiko pasti ada dengan perubahan zaman. Dahulu banyak orang usaha wartel. Akan tetapi, begitu ada *handphone*, bisnis wartel mati semua. Sekarang membeli kue tidak usah datang ke toko, tinggal telepon saja melalui ojek online. Semua berubah, sehingga nanti mall akan berkurang, orang beli sesuatu dari internet saja. Dahulu, orang ramai datang ke perpustakaan, sekarang tinggal google saja, banyak berubah, sehingga dunia usaha juga harus mengikuti zamannya. Akan

tetapi, ada juga dunia usaha yang tidak berubah, karena hal itu menyangkut kebutuhan pokok, seperti makanan, dan kebutuhan pokok lainnya.

Kalau dunia usaha itu sama dengan orang belajar naik sepeda, boleh baca satu buku tentang segala macam tentang keseimbangan. Coba naik sepeda pasti tetap lututnya luka. Jatuh dulu, di pegang lama-lama baru dilepas, sampai akhirnya bisa naik sepeda sendiri. Sama seperti berenang, mau buku teori apa pun, saat belajar gaya dada, gaya punggung, gaya bebas di tengah sungai atau kolam renang pasti tenggelam juga. Akan tetapi kalau belajar dari pinggir sungai atau kolam, anak-anak bisa belajar pelan-pelan, tidak perlu teorinya, pasti langsung bisa juga. Akan tetapi, tentu kalau mau jago berenang ya mesti belajar teorinya.

Untuk berdagang tidak mesti baca dulu semua buku tentang manajemen, atau ekonomi karena makin lama justru makin takut. Waktu saya di Makassar, di Universitas Hasanuddin (Unhas), saya selalu dipanggil orang berbicara tentang dunia usaha. Saya katakan jangan panggil yang besar-besar, bahaya, nanti tambah ketakutan mahasiswa itu, panggil saja yang ada di media, atau di pasar sentral, yang punya rumah makan yang baik panggil untuk berbicara. Bagaimana dia memulai rumah makan, bagaimana memulai di pasar, karena yang paling susah itu memulai.

Kenapa orang Tionghoa banyak yang jadi pedagang? Orang Tionghoa itu kesempatannya kecil. Mau jadi PNS susah. Ingin jadi tentara juga tidak gampang, Orang Tionghoa kalau anaknya ada lima maka semuanya jadi pengusaha. Kalau kita anak satu, kalau pengusaha paling tinggi hanya satu itu. Jadi satu tambah satu, tambah satu, tambah satu, sampai lima. Tetapi kalau orang Tionghoa satu tambah lima, lima kali dua jadi 25, maka tambah terus, dan akhirnya lama-lama ketutup kita. Itulah sebabnya kenapa keadaan seperti ini.

Apa perbedaan NU dan Muhammadiyah dalam perdagangan. Muhammadiyah dididik untuk hebat di manajerial dan NU terbiasa dengan entrepreneur-nya, kemampuan berdiri sendiri. Manajerialnya ada di Muhammadiyah, karena terbiasa mengelolanya dengan baik. Ketua Muhammadiyah dan Ketua NU beda, Ketua Muhammadiyah bisa ganti kepala sekolah, tetapi Ketua NU tidak bisa, karena anaknya yang punya, karena bapaknya yang mendirikannya, tetapi dia NU, jadi sama-sama kuatnya. Karena itu saya bilang NU jangan memakai sistem Muhammadiyah, dan Muhammadiyah jangan memakai sistem NU, biarkan dua sistem itu berjalan secara bersamaan yang menjadikan kekuatan besar umat.

NU tinggal diperbaiki manajerialnya dan jadi besar kekuatannya. Jadi tinggal di gelombangkan spirit nilai tambah, spirit berusaha, sunnah Rasulullah, dan kemudian berbagi kesempatan. Di mana posisi pemerintah? Posisi pemerintah akan lebih mempermudah semua sistem ini. Pemerintah mendorong usaha pemula untuk naik ke atas dengan kredit yang murah.

Karena itulah maka Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dulu bunganya 22 persen sekarang kita turunkan menjadi sembilan persen. Insya Allah tahun depan kita bisa turunkan tujuh persen. Ini untuk menghindari masyarakat yang terbiasa hidup dengan bunga, ada uang didepositokan, maka dapat delapan persen atau 10 persen. Sekarang kalau bunga tujuh persen mau didepositokan tinggal empat persen, lebih baik membuat usaha. Itulah cara mendorong orang untuk berusaha dan menguntungkan.

Karena itulah maka kalau berusaha itu jangan Muhammadiyahnya, tetapi orang Muhammadiyahnya yang berusaha, kecuali usaha sosial. Kalau usaha, jangan bikin

risiko yang besar kepada Muhammadiyah. Janganlah ambil risiko yang tinggi, karena dapat merusak Muhammadiyah. Begitu banyak sekolah Muhammadiyah, begitu banyak universitasnya, masukkan *spirit entrepreneur* dan tinggal ikuti Rasulullah berdagang. Itu saja.

Kita berusaha mengurangi generasi muda masuk politik langsung. Namun, akibat dari UU, DPR sekarang dipenuhi para pengusaha muda. Akibat aturan PNS dan TNI tidak boleh masuk partai politik. Akibatnya, yang bisa masuk politik hanya di luar TNI dan PNS. Politik butuh dana yang cukup maka masuklah para pengusaha-pengusaha muda yang meninggalkan dunia usaha berdagangnya ke DPR. Saya bilang berdagang baik, berpolitik juga baik, yang salah memperdagangkan politik. Itu yang salah. Saya 35 tahun berdagang, baru masuk politik. Setelah urusan rumah tangga selesai, baru berpolitik. ✱

Disampaikan pada acara Temu Jaringan Saudagar Muhammadiyah di Hotel The Sahid Rich Yogyakarta, 14 Mei 2016

Keadilan dan Pertumbuhan

Dunia saat ini memang banyak berubah. Banyak negara yang mengalami masalah. Keterlambatan laju pertumbuhan ekonomi terjadi pada banyak negara seperti China, Korea, Jepang, Eropa sampai pada Amerika Serikat semua mengalami masalah. Yunani yang pada masa lampau merupakan kiblat peradaban juga tidak luput dari masalah. Kita dapat menarik pelajaran dari itu semua bahwa kita membutuhkan suatu pertumbuhan yang baik untuk menghadapi masa-masa yang baik dan kita tidak ingin seperti itu. Kita juga punya banyak pengalaman tentang masalah keuangan pada masa lalu. Bagaimana tahun 1998, 18 tahun yang lalu kita mengalami masalah besar, yang sampai sekarang masih dirasakan oleh negara kita. Parlemen tiap tahun harus memutuskan berapa ratus miliar rupiah, untuk membayar bunga utang akibat kebijakan *bailout* sebagai akibat krisis keuangan yang terjadi.

Karena itulah kita harus menyadari tanpa kerja sama antara pemerintah, dunia keuangan atau perbankan kita tidak bisa tumbuh dengan baik. Marilah kita lihat ke depan untuk bangsa kita yang lebih baik lagi. Bapak Presiden telah banyak menyampaikan hal-hal kebijakan umum ekonomi bangsa ini yang harus kita laksanakan secara bersama-sama. Karena

kondisi sekarang tentu berbeda dengan masa lalu. Persaingan antara ASEAN, dalam MEA itu adalah persaingan dalam kerja sama atau kerja sama dalam persaingan. Yang menang, adalah yang efisien.

Kita mempunyai pasar yang kuat dengan penduduk yang besar, sekaligus tenaga kerja yang besar. Kita mempunyai tenaga-tenaga muda. Kita mempunyai orang-orang dengan kemampuan hebat. Namun, pada akhirnya kebersamaan adalah kuncinya dan itu yang kita harus tumbuhkan.

Kita juga mengetahui kondisi internal Negara dan ekonomi kita. Kita maju dalam pertumbuhan yang lebih rendah dibanding sebelumnya. Pertumbuhan yang rendah artinya kita tidak bisa menyerap seluruh generasi muda yang ingin mempunyai pekerjaan. Padahal suatu ekonomi yang tumbuh adalah suatu pertumbuhan yang dapat menyerap dan memberikan lapangan kerja. Hanya orang yang bekerja yang dapat menggerakkan ekonomi

Yang kedua adalah keadilan yang dapat diukur dalam bermacam-macam cara, termasuk dengan *gini ratio* yang relatif lebih tinggi daripada sebelumnya, 0,41 atau 0,40 di perkotaan. Ini lampu kuning untuk suatu bangsa seperti Indonesia. Ada negara yang memang *gini ratio*-nya tinggi, tetapi pertumbuhannya juga cukup baik, sehingga semua bangsa itu tidak mengalami masalah. Yang bermasalah ialah apabila pertumbuhannya tidak terlalu tinggi, tetapi *gini ratio*-nya yang tinggi. Itu yang menjadi masalah.

Sering saya katakan, banyak negara yang tumbuh dengan rendah, tetapi tidak masalah, karena keadilan di negara itu sangat baik. Negara yang bermasalah ialah negeri yang penuh ketidakadilan. Saya selalu menggambarkan, bahwa Timur Tengah, Arab Spring, itu muncul karena gini ratio yang mendekati 4,5. Kita bersyukur, bahwa kita tidak sampai ke situ. Akan tetapi, apabila kita tidak hati-hati akan juga

bisa mendekati angka-angka yang berbahaya itu. Jika sudah demikian maka bangsa itu bisa bermasalah, dan menuju keruntuhan karena ketidakadilan.

Jadi, kita harus kembali kepada tujuan berbangsa kita. Bagaimana memajukan bangsa ini sekaligus adil, tumbuh merata. Itulah bagian yang sangat penting dalam upaya bersama kita semua. Di mana peranan lembaga keuangan? Darimana peranan perbankan? Di mana lembaga keuangan lainnya untuk mencapai hal tersebut?

Pilihan yang baik, tumbuh secara bersama. Indonesia satu-satunya ASEAN yang anggota G20. Artinya besaran ekonomi kita cukup besar, karena peringkat ke-16 G20. Akan tetapi, kenapa lembaga keuangan kita hanya nomor 11 dan 12 di negara-negara ASEAN? Ini, lima kali lipat dibanding bantuan terbesar di Singapura dan 2,5 kali lipat dibanding bantuan terbesar di Malaysia. Padahal ekonomi kita lebih besar dari mereka secara kerseluruhan.

Kita maju untuk mengambil keuntungan atau kue yang besar. Pemerintah akan berupaya membantu mendapatkan kue yang lebih besar dan memberikan kebijakan untuk membagi secara merata. Ini tecermin dalam angka-angka bahwa pada dewasa ini 1 persen keluarga Indonesia menguasai 50 persen aset nasional.

Angka *gini ratio* yang jelek itu terjadi setelah krisis tahun 1998. Apa artinya? Artinya adalah pada krisis keuangan tahun 1998 itu yang kecil makin sulit, tetapi beberapa di antara kita justru mengalami pemindahan aset yang terjadi, membesarkan aset pada waktu telah krisis itu. Artinya adalah ternyata dalam krisis itu yang membayar masyarakat umum, membayar kepada yang mampu. Itu yang terjadi pada saat-saat itu, karena seluruh beban krisis moneter ditanggung oleh fiskal. Itu sesuatu yang sebenarnya harus kita koreksi apabila terjadi kemudian hari. Itulah sebabnya bahwa bukan

Islam Entrepreneur

waktunya lagi, semua perilaku lembaga keuangan harus dijamin oleh pemerintah, segala masalah dalam moneter harus dijamin oleh fiskal, itu tidak akan kita tolerir lagi, karena akan berakibat ketimpangan bangsa yang sangat besar.

Karena itulah maka di mana pemerintah harus menjamin kerusakan yang terjadi karena perbuatan di lembaga-lembaga keuangan, maka pemerintah tidak akan bisa mentolerir lagi pada masa yang akan datang. Karena itulah maka lembaga keuangan haruslah hidup sehat dengan aturan-aturan yang baik.

Kita tidak mengharapkan masa sulit, tetapi apabila terjadi masa sulit semua harus bertanggung jawab apa yang telah dibuatnya. Tuhan pun berkata begitu. Anda harus bertanggung jawab apa yang Anda lakukan, bukannya Anda memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi orang lain yang bertanggung jawab. Itulah tentu yang kita harapkan dan itu juga tentang suatu akibat apabila terjadi. *

Disampaikan pada saat scara Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2016, Hotel Kempinski, Jakarta 15 januari 2016

Selama ini, umat Islam di Indonesia hanya membanggakan dua hal: jumlah yang banyak dan sifatnya yang *wasathiyah*, yang toleran, yang moderat. Kita harus menambah lebih banyak hal lagi. Di bidang keilmiahan, di bidang ekonomi harus lebih baik lagi sebagai bagian dari pada dunia yang lebih baik.

Di banyak negara, di banyak pertemuan, Indonesia selalu diharapkan berbuat lebih banyak lagi. Dunia Islam menaruh harapan besar kepada Indonesia. Turki mula-mula cukup baik, tetapi sekarang mengalami masalah yang juga rumit.

Karena itulah, pemerintah sangat berterima kasih kepada banyak ulama. Situasi ini tentu juga peran dan doa para ulama. Peran ulama yang menjaga semangat bangsa ini, menjaga roh bangsa ini, menjadi pengawas, menjadi wasit, dan menjadi pendorong semangat bangsa ini.

Tanpa para ulama, bangsa ini tentu tidak mempunyai pegangan yang baik. Tanpa para ulama, kita tidak mempunyai harapan-harapan yang baik dan dorongan-dorongan yang baik. Karena itulah kita meneruskan cita-cita para pendiri Majelis Ulama. Walaupun, tentunya kita juga mempunyai kekurangan-kekurangan.

Saya tanya berapa anggaran Majelis Ulama dari Menteri Agama? Tentu saat ekonomi yang lebih baik, pasti lebih baik lagi. Kenapa saya katakan ini, karena baru saja kemarin pemerintah memotong lagi anggarannya. Jadi agak kurang enak untuk menambah anggaran di tempat lain, padahal yang lain dipotong.

Tetapi insya Allah dengan upaya kerja keras kita, semuanya akan menjadi lebih baik lagi di masa akan datang. Kita juga memahami, tugas-tugas Majelis Ulama yang begitu penting dan berat.

Kalau di negara Islam, Kiai Ma'ruf ini mufti. Tetapi karena kita tidak mempunyai sistem itu, maka Ketua Majelis Ulama dan fungsinya sama dengan mufti, memberikan fatwa dan kebenaran, memberikan kehormatan.

Begitu juga tugas-tugas yang lainnya, terutama mendengarkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Apalagi dalam situasi seperti ini, tentu hal-hal ini sangat di butuhkan.

Memang kita mempunyai banyak kekurangan, tetapi kita juga mempunyai hal-hal yang mudah dan besar. Contohnya zakat, potensinya sekian puluh triliun rupiah, ratusan triliun rupiah. Yang diterima hanya dua, tiga triliun.

Semuanya itu angka resi. Angka resi itu puluhan kali lebih besar dari itu dan itu juga zakat namanya. Jadi zakat itu bukan hanya terdaftar di Bazarnas, terdaftar di mana-mana. Siapa yang membiayai 800.000 itu kalau bukan zakat dan infaq, sadaqoh. Siapa yang membangun madrasah atau pesantren yang jumlahnya puluhan ribu, siapa yang membiayai anak yatim, siapa yang bayar rumah sakit? Semua dari zakat, infaq, sadaqoh.

Jadi jangan seakan-akan mengecilkan arti zakat, hanya sekian persen. Besar sekali. Jangan angka resi intrinsik internal di Bazarnas itu dianggap zakat. Tidak, karena ulama juga mengajarkan kepada kita, dahulukan tetangga,

dahulukan famili, dahulukan orang sekitar kita. Jadi karena ajaran itu, maka tetap saja didahulukan, tidak ke Bazarnas, karena belum tentu Bazarnas, sebenarnya juga sesuai dengan apa yang diinginkan.

Inti daripada itu, bukan hanya mengumpulkannya. Tetapi bagaimana orang berinfaq. Itulah selalu saya katakan, tugas majelis ulama, ya mendorong semangat kita.

Bagaimana kita berpikir *entrepreneur*, *alhamdulillah* NU, Muhammadiyah, dan lembaga lainnya, yang selalu menggambarkan itu. Karena itulah umat Islam harus berpikir *entrepreneur*. Begitu juga keilmuan.

Marilah kita mendorong para alim ulama menulis buku yang baik. Karena itulah, seperti banyak diketahui dan sudah diumumkan pemerintah akan mendirikan organisasi Islam internasional yang akan memberikan semangat dan ilmu yang lebih tinggi lagi.

Itulah bagian-bagian penting dari upaya kita. Saya sangat yakin dengan upaya itu, umat akan tetap maju. Semangat dan orientasi pasti akan lebih baik lagi. Negara tentu berusaha keras untuk itu, tetapi tidak bisa tanpa dukungan kita semuanya. *

Disampaikan pada acara Tasyakuran Milad Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-41 dan Halal Bil Halal Idul Fitri 1437 H, di Grand Ballroom Rafflesia, Balai kartini Jakarta, 4 Agustus 2016

Memenuhi Sandang

Dalam sistem kita, juga negara, selalu terdiri atas alur-alur sistem yang baik. Mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan untuk pembangunan dilakukan Bappenas, kemudian sampai ke daerah oleh Bappeda.

Pengorganisasian tentu dilakukan masing-masing menteri, tetapi dengan patokan yang diatur oleh undang-undang dan peraturan, secara fokus dilaksanakan oleh Menteri PAN. Kalau pelaksanaannya, semua kementerian, lembaga, instansi, provinsi, dan daerah-daerah.

Dari sisi pengawasan, sebenarnya kita tidak kurang. Ada BPK, BPKP, Irjen, sampai pengawas di tingkat kabupaten. Begitu banyaknya pengawasan, sehingga kadang-kadang aparat di bawah capek memberikan bahan setelah diperiksa oleh tim BPK, BPKP, Irjen, dan lain-lain.

Karena itulah, dalam beberapa kesempatan yang lalu, saya minta ada koordinasi sistem antara BPK dan BPKP. Bukan untuk saling mengambil alih tugas masing-masing, tetapi untuk mensinkronkan cara pengawasan yang baik sehingga ada arah yang jelas. Tanpa sistem yang baik, pengawasan yang berulang-ulang, bisa saling bertentangan. Oleh karena itu, dibutuhkan *trust* di antara kita semua.

Seringkali saya sampaikan, untuk membersihkan sesuatu, kita harus memakai sapu yang bersih. Kalau sapunya

kotor, susah membersihkan ruangan dengan baik. Artinya, semuanya harus bersih.

Tetapi apabila pengawasan tidak mempunyai sistem, dan juga hal-hal yang baik, tentu sulit sekali melaksanakan pengawasan tersebut. Walaupun, tujuan kita sama, tujuan pemerintah, tujuan semua lembaga, ataupun aparat daerah. Yakni bertujuan untuk kemajuan bangsa, kemakmuran bangsa. Memang tujuan itu, yang harus kita capai.

Baru saja kita melaksanakan peringatan Kemerdekaan Ke-71. Dalam kesempatan itu, saya dengan Pak Jokowi, bilang marilah kita merenung dan mengevaluasi, apa yang telah dilaksanakan oleh bangsa ini selama 71 tahun.

Sejak zaman Soekarno, Soeharto, secara sederhana, selalu disampaikan bahwa ada tiga kebutuhan pokok bangsa ini, sandang, pangan, dan papan.

Itu yang pertama. Kemudian timbul kebutuhan yang kedua, lebih banyak berbicara tentang bagaimana kita mempunyai infrastruktur yang baik dan energi yang baik sehingga ada ketahanan energi.

Di samping tentu masalah pendidikan, kesehatan, dan masalah-masalah pokok lainnya.

Setelah kita mengevaluasi, pertanyaan besarnya, dari tiga masalah pokok ini, baru satu yang terpenuhi, baru sandang. Pangan terus saja kita bertengkar tentang impor tidak impor, harganya melonjak, dan sebagainya. Itu masih diperdebatkan setelah 71 tahun.

Kita bicara papan, di belakang sini begitu banyak daerah-daerah yang kumuh. Itu tanggung jawab kita semua. Saya juga tentu bertanggung jawab karena sudah hampir 8 tahun ada di pemerintahan.

Sementara, masalah itu tidak terjadi lagi di Singapura, Malaysia, di Thailand, di Vietnam. Urusan sandang pangannya sudah selesai. Papannya mungkin masih.

Artinya, negara yang kaya ini, apa masalahnya? Kenapa masalah-masalah itu masih terjadi? Masak cuma pangan selama 71 tahun tidak selesai. Artinya kita tidak mempunyai ketahanan pangan yang baik, juga perumahan yang baik.

Kemudian kita berbicara kebutuhan yang kedua, tentang infrastruktur, tentang energi. Kita lebih ketinggalan lagi. Kenapa negara yang sekaya ini ketinggalan?

Tentu banyak hal. Hal yang pertama kebijakan. Begitu banyak masalah kebijakan yang menyebabkan kita mengalami kemunduran. Kebijakan tentang keuangan sehingga kita harus membayar krisis yang mahal pada tahun 1998. Kebijakan yang tiba-tiba sangat sosialis, memberikan subsidi yang begitu besar, tentang BBM, dan sebagainya sehingga menimbulkan ribuan triliun menjadi asap saja selama 15 tahun. Tentu juga korupsi.

Itulah kehilangan-kehilangan besar di negeri ini sehingga kemajuan kita tertatih-tatih dibanding banyak negara lain di sekitar. Kita ketinggalan. Kebutuhan pokok saja masih ketinggalan.

Kalau kita bicara tentang organisasi, luar biasa hebatnya organisasi kita ini. Tadi saya mengatakan, bagaimana besarnya pengawasan, semua ada di sini. Malah pemeriksa saling memeriksa, saking begitu banyaknya. Belum lagi aparat penegak hukumnya. Ada KPK, ada polisi, ada jaksa, dan sebagainya. Semua berlapis-lapis.

Memang sering saya sampaikan tentang indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan kadang-kadang kita salah dalam menilai apakah kita berhasil atau tidak. Sering, tadi Kepala BPKP menggambarkan, sedemikian temuan yang didapatkan, seakan-akan itu indikator keberhasilan. Sebenarnya indikator keberhasilan ialah bekerja dengan baik dan temuannya kurang. Itu baru berhasil.

Kalau kerjanya kurang, tetapi temuannya banyak, justru itu tanda ketidakberhasilan. Berarti orang tidak insyaf-insyafnya, orang tidak jera. Sama dengan Kejaksaan, laporannya sekian triliun diselamatkan, tahun depan naik dua kali lipat, berhasilkah? Sebenarnya gagal. Karena, ternyata makin banyak orang yang korupsi.

Saya teringat, waktu awal BPKP, saya masih di swasta, masih kontraktor zaman 30 tahun lalu. Kepala BPKP-nya kalau pergi selalu bawa meteran. Lebarinya diukur, lalu ditumbuk. Aspalnya cukup tidak? Kalau tidak sesuai, kita diberi peringatan. Banyak, kontrak yang batal. Akhirnya kita lakukan proteksi sejak awal. Itu baru namanya mengawasi, bukan menangkap.

Itulah sejarah, dan itulah sistem kenapa internal audit berbeda dengan *post audit*. Kenapa BPKP berbeda dengan BPK, karena BPK lebih cenderung ke *post audit*. BPKP, Irjen itu internal audit yang meluruskan kalau ada yang bengkok. Tetapi kalau BPK, dia mematahkan kalau ada yang bengkok. Karena sudah terjadi.

BPK itu yang sudah terjadi. Semua internal audit di manapun ialah memeriksa yang sedang terjadi. Soal *tender* yang keliru, ya harus diperbaiki kekeliruannya, tidak dibawa ke polisi. Nah, apabila tidak dilaksanakan baru bawa ke polisi. Itu yang namanya pengawasan.

Kalau pemeriksa keuangan, memeriksa artinya nanti pekerjaan setelah terjadi, umumnya telah terjadi, walaupun bisa juga sedang berjalan. Jadi itulah harus dipahami seperti itu. BPKP, irjen, dan sebagainya mengawasi yang sedang berjalan atau sebelum berjalan, memberikan aturan-aturan, tetapi aturan harus jelas. Barulah kita melaksanakan fungsi yang baik.

Keadilan Harus Diusahakan

Karena Anda bukan akuntan publik yang memeriksa setelah terjadi di bidang keuangan, itu tugas BPK. Kenapa saya menyarankan adanya koordinasi secara baik antara BPK, BPKP, Irjen, dan daerah, agar pembagian tugas ini betul-betul terjadi. Jadi kenapa BPKP di bawah pemerintah? Karena menjadi tangan pemerintah untuk memperbaiki keadaan.

Itulah yang selalu saya gambarkan. Karena itu anggota BPKP bukan hanya mengerti tentang akuntansi, apa yang terjadi, tetapi juga memeriksa lapangan. Karena itu, ada keuangan dan pembangunan, jangan hanya cenderung keuangannya saja, tetapi pembangunannya berjalan atau tidak. Harganya apakah efisien, efektif, dan ekonomis.

Harus terjun sampai ke bawah melihat itu dengan baik, menegurnya, dan menyuruh memperbaiki, kalau tidak jalan. Itu tugas bersama-sama dengan Irjen dan di tingkat daerah. Karena tidak mungkin BPK memeriksa sampai ke camat, tetapi bagaimana membangun dan mengawasi sistem bersama-sama dengan inspektorat di daerah.

Jadi memang dibutuhkan banyak *effort*. Jadi pemeriksaan harus membudayakan agar aparat di bawah bekerja dengan baik. Tentu banyak sistem yang bisa dicapai, efisiensi sistem, bisa diperiksa dengan random, dan sebagainya.

Jadi BPKP, inspektorat di daerah, tentu bekerja dengan sistem yang sama. Bukan hanya memeriksa sistem keuangannya. Jangan lupa, BPKP, ada pembangunannya, memeriksa fisiknya. Supaya kemudian terjadi keseimbangan suatu pembangunan yang baik. Supaya kita keluar dari masalah-masalah yang dasar di republik ini. *

Disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Nasional
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2016
Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
di kantor BPKP Rawamangun Jakarta
24 Agustus 2016

Sering saya katakan, ada perbedaan yang sangat mendasar di negara-negara yang timpang. Kalau di Thailand juga timpang luar biasa, tetapi yang kaya dan miskin sama-sama Buddha. Di Filipina timpang juga. Yang kaya, kaya sekali dan yang miskin, miskin sekali. Cuma yang kaya dan miskin sama-sama Katolik.

Di Indonesia berbeda, yang sangat kaya dan sangat miskin sebagian besar beda agamanya. Ada juga pengusaha Islam yang mampu, yang kaya, tetapi tidak banyak. Kesenjangan itu bisa berbahaya apabila tidak diisi semangat untuk maju. Saya katakan, ini terbuka agar generasi muda memahami arti keadilan.

Keadilan bukan hadiah, tetapi harus diusahakan. Kalau sekiranya kita bisa adil dengan segala macam aturan, undang-undang, dan sebagainya, kita mudah membuatnya. Tetapi undang-undang, peraturan yang kita buat, tidak akan bisa terlaksana tanpa usaha keras, tanpa semangat untuk merebut keadilan itu.

Kalau semua generasi muda tidak berusaha untuk punya semangat, tidak jadi pedagang, atau tidak bekerja di bidang industri atau apa pun, kemajuan itu tidak akan bisa dicapai. Tetapi pendidikan bisa membawa kita ke situ.

Tadi di Mojokerto saya menghadiri upaya kita mendidik generasi muda bekerja di industri. Walaupun industri yang penting bekerja karena haruslah dimulai dengan semangat bekerja. Tanpa semangat, itu tidak ada.

Memang dibutuhkan perubahan mental yang sangat keras. Para alim ulama contohnya, selalu dalam perasaan kita, kenapa kalau zikir, tausiah, atau istighasah bisa sampai berjam-jam duduk tengah malam? Tetapi kalau bicara bagaimana berdagang, bagaimana pertanian kita dimajukan, bagaimana kebersihan, itu belum apa-apa sudah pada bubar.

Padahal bekerja sebenarnya kita digariskan, bertebaranlah kau di muka bumi untuk mendapat rezeki. Seperti kita tahu, sembilan dari 10 rezeki datang dari pedagang. Jadi bagaimana kita, khususnya NU dan Muhammadiyah, mendorong dan memberikan nasihat kepada generasi muda untuk merebut keadilan itu dengan cara bekerja keras. Bukan dengan demo, bukan dengan marah-marah.

Tidak ada keadilan dicapai dengan marah-marah. Tidak ada kemajuan bisa dicapai hanya dengan marah. Tidak ada kemajuan bisa dicapai hanya dengan demo. Kemajuan itu membekali ilmu dan semangat maju ke depan. Ilmu hanya instrumen. Tetapi instrumen itu harus didahului dengan semangat yang keras.

Rektor, saya harapkan seperti itu di universitas masing-masing. Didoronglah mahasiswa untuk berdiri sendiri. Dorong mahasiswa untuk berkarya, bekerja dengan kemampuannya. Diajarkan berusaha sejak awal, ditanamkan semangat sejak awal.

Tiap tahun alumni universitas berapa? Ada lebih sejuta setahun. Dari sejuta, diterima jadi PNS setahun maksimum 120.000 orang, sarjananya mungkin hanya 25.000. Jadi yang bisa diterima paling 25.000 di antara sejuta. Kecil sekali kemungkinan, hanya 0,5 persen.

Kita tutup semuanya, terkecuali tenaga kesehatan atau guru. Itu pun hanya mengganti yang pensiun, tidak menambah. Karena sudah 4,5 juta pegawai negeri, sudah kelebihan. Satu-satunya yang dapat hidup menjadi profesional atau mendorong berusaha, dari yang sekecil apa pun sampai yang besar. Itulah kemajuan.

Kalau ingin jadi politisi, nantilah setelah lengkap urusan hidup. Jangan dari awal sudah bercita-cita ingin jadi anggota DPR, walikota, dan sebagainya. Jadi lihatlah persentase ini. Kalau tidak, kita hanya jadi konsumen. Di kampus kita mendahulukan keilmuan. Pakailah ilmu itu. Karena memang, kita diajarkan orang yang berilmu diberikan derajat yang lebih tinggi daripada yang lainnya.

Tetapi ilmu berbicara masa depan. Sejarah masa lalu, tetapi dipakai bagaimana jangan terulang kesalahan atau bagaimana yang keberhasilan diulangi. Itu juga untuk ke depan. Bukan hanya menikmati masa lalu.

Kita selalu bangga kepada Ibnu Sina, bangga kepada *Al-Khawarizmi*, atau siapa pun ulama-ulama NU masa lalu. Tetapi kita ingin ada masa depan. Karena itu, ilmuwan harus menjadi bagian dari itu. Semangat masa depan ialah kemajuan itu sendiri. Bukan ilmu untuk ilmu saja, tetapi ilmu untuk kemajuan masa depan, baik pribadi, masyarakat, umat, dan bangsa ini. Itu baru menjadi bagian dari kemajuan kita.

Kita tidak bisa maju hanya dengan selalu menghafal mukadimah adil makmur. Itu penting, tetapi yang sangat penting melakukannya. Kita tidak ada lagi perbedaan laki-laki dengan perempuan. Apalagi sekarang kebersamaan, kesederajatan, sudah menjadi suatu keyakinan kita.

Pemerintah akan mengusahakan kebijakan afirmatif. Contohnya kredit murah kepada pelaku usaha yang memulai usaha. Syaratnya mudah. Juga kemudahan untuk petani memperoleh lahan, kemudahan mendapatkan subsidi. Semua

akan kita utamakan. Keutamaan untuk bekerja diproyek-proyek pemerintahan akan diberikan keutamaan-keutamaan itu agar ada keseimbangan. Karena tanpa keseimbangan, tanpa keadilan, akan menjadi masalah.

Di Timur Tengah sudah dibuktikan. Saat *gini ratio*-nya 4,5 persen, terjadi Arab Springs. Pemberontakan di banyak negara di Timur Tengah, mulai Tunisia di Mesir, Libya, Suriah, Irak, Yaman. Juga terjadi perubahan mendasar di Saudi. Itu akibat kesenjangan.

Kita tidak ingin bangsa ini seperti itu. Kemajuan tidak pernah datang dari langit. Selalu datang dari kerja keras, kerja terarah, dan kerja smart.

Kerja keras saja tidak cukup. Kalau kerja keras tidak ada kerja yang seberat jadi petani. Petani mencangkul dari pagi sampai sore, berkeringat diterpa matahari, tetapi tidak maju. Yang maju mereka yang kerja keras disertai ilmu, kemampuan inovasi, berpikiran maju. Itulah kunci kemajuan.

Walaupun punya ilmu, punya persediaan, punya banyak gelar-gelar, tetapi tanpa kerja keras, juga tidak akan bisa mempunyai hasil yang baik. Jadi kombinasi dari kerja keras, keilmuan, dan inovasi. Itulah kerja keras. ✱

Disampaikan pada acara
Kuliah Umum Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Jawa Timur,
28 Februari 2017

Kesenjangan Kita

Sejarah mencatat bahwa bisnis dan pemerintahan memiliki keterkaitan yang erat. Keberhasilan sektor swasta akan menentukan keberhasilan pemerintahan, dan demikian pula sebaliknya. Pemerintah mengandalkan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja, sebuah faktor yang penting dalam mengentaskan kemiskinan.

Melalui mekanisme pasar, sektor swasta menetapkan rantai pasokan yang memungkinkan adanya distribusi barang dan jasa yang efisien ke seluruh negeri. Pemerintah harus menciptakan lingkungan ekonomi yang menstimulasi, baik ekspansi bisnis maupun praktik bisnis yang sehat. Dalam kaitan ini, sangat diperlukan kerangka peraturan yang solid, infrastruktur yang efisien, serta situasi yang damai dan harmonis.

Setelah krisis ekonomi Asia, Indonesia memasuki salah satu babak tersulit dalam sejarahnya. Krisis tersebut telah menghancurkan banyak kemajuan ekonomi yang telah kami bangun selama beberapa dekade.

Kemiskinan dan pengangguran meningkat. Ketidakstabilan politik jelas terjadi. Pada awal 2000-an, konflik sosial meletus di banyak daerah di Indonesia, termasuk insiden besar di Poso, Aceh, dan Ambon.

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa ketidakseimbangan ekonomi dan politik dapat menciptakan

ketidakpercayaan dan ketegangan di masyarakat yang berpotensi untuk meningkat menjadi konflik. Indonesia mengakhiri berbagai konflik dengan memperkenalkan akses yang merata terhadap sumber daya ekonomi dan pembagian kekuasaan yang lebih adil dalam politik lokal. Kita tidak harus meniru demokrasi gaya Barat. Sebaliknya, kita harus menerapkan nilai-nilai lokal kita dalam proses demokrasi.

Kesenjangan, perdamaian, dan kemajuan ekonomi memiliki korelasi yang kuat. Singkat kata, kurangnya keadilan adalah akar penyebab konflik sosial yang memiliki efek yang merugikan pada perekonomian. Oleh karena itu, sungguh mengkhawatirkan kesenjangan pendapatan yang tinggi dan terus naik di banyak masyarakat, termasuk di Indonesia. Tidak diragukan lagi, upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memelihara keadilan politik, harus menjadi prioritas utama kita.

Salah satu cara Pemerintah untuk mengurangi kesenjangan adalah mendukung tumbuhnya Usaha Kecil dan Menengah, atau UKM, dengan menerapkan program kredit bunga rendah. Selain itu, kami juga mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk berkolaborasi dengan UKM guna memastikan peran UKM dalam rantai pasokan nasional.

Selama dua tahun terakhir, pemerintah telah mampu sedikit mengurangi disparitas pendapatan. Namun, capaian ini jauh dari memadai. Untuk itu pemerintah akan terus mendorong lebih lanjut. Untuk itu, awal tahun ini pemerintah Indonesia telah meluncurkan serangkaian kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi kesenjangan. Kebijakan-kebijakan tersebut. Terdiri atas sembilan bidang fokus utama, termasuk reformasi agraria dan reformasi pasar ritel.

Manfaat dari memelihara perdamaian akan melampaui batas-batas negara. Seperti yang ditunjukkan oleh ASEAN,

perdamaian bisa dengan mudah menyebar ke seluruh dunia melalui pengaturan kawasan yang baik.

Sayangnya, konflik juga dapat menyebar, bahkan lebih cepat, seperti yang ditunjukkan oleh krisis pengungsi dan imigrasi baru-baru ini di Timur Tengah dan Eropa. Inti pesan saya adalah, bahwa perdamaian dalam negeri itu penting untuk menjaga keharmonisan dan kemakmuran dunia.

Namun, kita tidak bisa mencapai perdamaian tanpa mengatasi akar penyebab konflik: kesenjangan ekonomi dan politik. Dalam upaya mencapai stabilitas politik, kita harus menciptakan kondisi yang baik bagi keharmonisan politik. Kita tidak harus mengadopsi demokrasi liberal mereka sepenuhnya, karena prinsip mereka yang berbunyi “sang pemenang mengambil semuanya (*the winner takes it all*)” tidak sejalan dengan budaya kita sendiri.

Sebaliknya, kita harus mewarnai demokrasi dengan nilai-nilai Asia, yang menekankan pentingnya rasa hormat pada orang lain. Demokrasi gaya Asia adalah cara kita di masa depan.

Dalam mengatasi kesenjangan ekonomi, kita perlu mengoptimalkan peran Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai landasan untuk kerja sama antara pemerintah dan pengusaha di kawasan. ASEAN menyediakan banyak peluang yang bisa diubah menjadi kesejahteraan bersama.

Kesenjangan ekonomi menciptakan garis pemisah yang menjauhkan orang kaya dari orang miskin, sementara ketidakseimbangan politik membuat situasi menjadi lebih sulit. Di banyak negara yang beragam seperti Indonesia, garis yang sama juga dapat memisahkan orang menurut etnis dan agama mereka.

Garis ini mengurangi kepercayaan masyarakat dan melemahkan jalinan sosial, padahal kedua hal itu, merupakan

aset yang tak ternilai yang menjadi pijakan kita dalam membangun bangsa.

Kesenjangan adalah tema utama pada era kita sekarang. Bagi Indonesia, ketidakseimbangan ekonomi dan politik tidak hanya menghambat kemajuan ekonomi dan mengancam tujuan utama Indonesia dalam mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua, tetapi juga dapat menempatkan bangsa Indonesia yang tercinta dalam risiko. *

Disampaikan pada saat menerima Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan dalam Administrasi Bisnis (Manajemen) Rajamangala University Of Technology Isan, Muang Nakhon Ratchasima Thailand, 21 Februari 2017

BAB 2

EKONOMI

APBN 2.000 Triliun

Hari ini kita berbicara tentang anggaran, tetapi sebenarnya yang kita bicara adalah masalah ekonomi nasional. Bagaimana ekonomi kita bisa lebih baik. Terlebih dahulu, selalu kita berbicara apa tujuan kita? Tujuan kita ialah kemakmuran yang adil, dan kemajuan bangsa.

Setiap kemajuan bangsa tentu mempunyai instrumen-instrumen maju. Salah satu ukuran suatu kemajuan adalah pertumbuhan. Diukur dari pertumbuhan ekonomi, juga diukur dari bagaimana keadilannya, pemerataannya, dan juga diukur sampai di mana kita mencapai tujuan yang adil dan maju itu. Tentu kita tujuan itu.

Seperti tubuh manusia, yang menghidupkan kita adalah darah. Nah, kalau kita lihat di negara, anggaran ibarat darahnya. Itu yang menentukan. Dari setitik darah, penyakit bisa diketahui. Sama dengan keuangan. Dengan mengetahui kondisi keuangan, kita bisa mengetahui apakah kita sedang maju, mundur, banyak utang, atau apa pun dari kondisi itu.

Kalau kita bicara pertumbuhan, tentu bukan hanya anggaran, tetapi bagaimana memakai anggaran. Karena kalau dari sisi itu, kemajuan ditentukan oleh investasi pemerintah, investasi swasta, dan investasi masyarakat. Atau bisa juga

kita balik, menjadi konsumsinya. Konsumsi pemerintah, masyarakat, dan konsumsi lainnya.

Kalau dari angka, ini hal yang perlu kita perhatikan. Setiap lima tahun anggaran kita itu, naik dua kali lipat. Sebagai contoh, tahun 2005 anggaran pendapatan negara itu kurang lebih Rp 500 triliun, Rp 495 triliun. Itu tahun 2005, cuma Rp 495 triliun anggaran pendapatan negara.

Lima tahun kemudian, tahun 2010 naik dua kali lipat, hampir Rp 1.000 triliun. Tahun 2015 kurang lebih Rp 1.800 triliun, hampir dua kali lipat dari 5 tahun lalu.

Belanjanya juga begitu. Belanja tahun 2005 sekitar Rp 500 triliun, tahun 2010 sekitar Rp 1.100 triliun, tahun 2015 kurang lebih Rp 2.000 triliun. Jadi setiap 5 tahun *rules stamp*-nya naik dua kali lipat.

Tetapi kenapa pertumbuhan tidak seperti itu? Tahun 2005 pertumbuhan kita sekitar lima persen, tahun 2010 sebesar 6,1 persen, tahun 2015 hanya 4,9 persen. Jadi artinya, besaran anggaran itu tidak linear dengan pertumbuhan. Itu karena unsur pertumbuhan ditentukan oleh investasi pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Sekarang, apa isi anggaran itu? Itu sangat penting. Tahun 1980, awal 1990-an, zaman itu masih disebut anggaran rutin, anggaran pembangunan. Itu lebih tinggi anggaran pembangunan dibanding anggaran rutin. Kalau sekarang, anggaran pembangunan kita bisa klasifikasi anggaran belanja barang dan modal, sekarang tidak lebih dari 30 persen.

Artinya, kenaikan anggaran yang begitu besar, empat kali lipat selama 10 tahun, itu yang naik lebih tinggi anggaran rutin, anggaran operasional pemerintahan. Itulah yang kita bicarakan hari ini, bagaimana anggaran itu meng-*create* pembangunan yang lebih tinggi, bukan hanya angkanya yang lebih tinggi.

Tahun lalu, anggaran pembangunan empat kali lipat dengan tahun 2005. Sepuluh tahun kemudian empat kali lipat. Walaupun tentu rupiah berbeda nilainya karena ada unsur inflasi dari dalam, tapi *gross*-nya hampir sama. Di situlah dibutuhkan efektivitas anggaran.

Efektivitas anggaran harus dinilai dari berapa manfaat anggaran itu untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kita tentu berkumpul di sini melakukan evaluasi ulang dari efektivitas anggaran tersebut. Ini penting, karena anggaran untuk pembangunan bangsa, bukan pembangunan kementerian.

Kedua, bagaimana agar efektivitas ini bermanfaat. Suatu anggaran yang akan dinilai, harus ada prosesnya. Kita tahu semua prosesnya. Prosesnya selalu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tetapi setiap anggaran harus mempunyai tujuan dan target. Dari semua itu, sebelumnya ada program, ada proyek dan programnya.

Jangan anggaran langsung ke proyek, tapi programnya apa? Peningkatan pangan? Apa proyeknya untuk pangan? Jalan, pengairan, listrik dan sebagainya, supaya tidak menjadi ego sektoral. Inilah yang kita harus pahami.

Tadi saya katakan, anggaran yang ukuran pembangunan tidak hanya anggaran negara, tetapi menyangkut pengusaha dan masyarakat secara keseluruhan. Jadi artinya, disamping bertugas menggerakkan anggaran, pemerintah juga menggerakkan masyarakat bagaimana membangun, menggerakkan pengusaha bagaimana membangun, karena pemerintah tidak bisa berdiri sendiri.

Sekiranya pembangunan ditentukan oleh besarnya anggaran pemerintah, maka pertumbuhan menjadi empat kali lipat dibanding satu tahun lalu, dikurangi inflasi. Tetapi tidak terjadi karena anggaran rutin kita, anggaran operasional pemerintah, lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan

dengan anggaran belanja modal yang bisa menggerakkan *multiplayer effect*-nya untuk pembangunan.

Kalau zaman dulu, setiap APBN Perubahan selalu memberikan harapan baru untuk anggaran yang lebih tinggi. Untuk pertama kalinya, APBN Perubahan nanti, maknanya adalah pengurangan anggaran. Ini harus. Kenapa kita kumpul, agar ada persiapan mental bahwa yang dimaksud APBN Perubahan pada tahun ini adalah pengurangan anggaran. Karena pengurangan anggaran maka semua departemen, semua kementerian, harus siap menyesuaikan diri. Penyesuaian diri itu ialah mengurangi anggaran-anggaran yang tidak urgen dan tidak prioritas.

Kenapa itu penting? Karena selama ini anggaran selalu seakan-akan dibuat berdasarkan persentase rata, *cost the board*, naik anggaran 10 persen, semua kementerian minta 10 persen tambahan. Kalau tidak ada yang bisa dibangun, perbaiki gedung, tambah AC, tambah perjalanan, tambah seminar supaya uang itu habis.

Seakan-akan yang dianggap prestasi adalah menghabiskan dana, padahal prestasi adalah meningkatkan nilai tambah dari apa yang dikerjakan. Kenapa kita selalu ada perhitungan tentang *multiplayer effect*? Untuk membedakan antara apa yang prioritas dan yang tidak prioritas dalam penggunaan dana.

Kalau kita berbicara tentang nanti, apa yang mesti diefisienkan, apa yang diefektifkan, tentu yang kurang mempunyai dampak luas. Yang selalu kurang dampaknya ialah anggaran operasional yang tidak penting. Jadi nanti akan dibagi kepada apa yang mutlak. Pasti yang mutlak adalah gaji, tunjangan, yang prioritas tentu banyak.

Sering perjalanan yang tidak penting, perjalanan ramai-ramai, perjalanan seminar, perjalanan konferensi, total harus dikurangi. Memang mempunyai dampak. Dulu dampaknya

bukan ke kita, ke hotel, sehingga yang protes hotel. Karena kita tahu juga, hotel juga ada kerja sama. Seminarsnya dua hari, hotelnya empat hari. Ya, itu kadang-kadang begitu. Tetapi sekarang tidak mungkin lagi, begitu juga dengan yang lain.

Kenapa kita moratorium pembangunan gedung, karena bukan hanya gedungnya yang ditambah, juga ongkosnya. Begitu tambah gedung, tambah AC, tambah biaya listrik, tambah *cleaning service*, tambah satpam, tambah lampu, tambah meja. Karena makin banyak kosong, tambah lagi pegawai honorer supaya kelihatan penuh. Jadi dipahami, mutlak moratorium, tidak boleh tambah.

Di mana-mana dikurangi pegawai. Kemajuan teknologi membuat kebutuhan pegawai menurun. Tentu tidak semuanya karena dulu ada bagian ketik, ada bagian arsip. Sekarang semua diarsipkan oleh Google, Microsoft. Tidak perlu lagi banyak lemari arsip, katakanlah di komputer masing-masing. Justru kita ingin seperti itu.

Tentu kementerian mempunyai sifat yang berbeda-beda. Kementerian mengetahui sendiri apa yang urgen apa yang tidak. Sekarang kita ingin mempunyai skala prioritas. Bisa saja ada kementerian yang tidak dikurangi, tetapi ditambah karena dia sangat prioritas. Tetapi bisa saja ada kementerian yang dikurangi karena banyak bagian yang tidak prioritas.

Kalau kita tidak jalankan hal itu segera, maka akan terjadi defisit yang lebih tinggi. Defisit itu bisa, Anda tahu semua undang-undang, undang-undang kita maksimum defisitnya tiga persen, tetapi tiga persen sepuluh tahun lalu dengan angka tiga persen sekarang berbeda. Tiga persen sekarang bisa jauh lebih besar daripada tiga persen yang lalu karena kita punya GDP sudah Rp 11.000 triliun, tiga persen tentu sangat tinggi. Inilah, tentu yang harus dipahami.

Spirit Saudagar Bugis Makassar

Sekali lagi, Anda yang melaksanakan tugas negara lewat kementerian, tidak boleh ada ego sektoral. Misalnya Kementerian PU turun 10, yang lain juga turun 10. Bukan itu. Mungkin saja kita perlu tambah jalan lebih banyak, tetapi kita kurangi biaya yang tidak perlu lainnya. Apa yang jadi prioritas, yang pertama bisa mengetahui adalah masing-masing kementerian, kemudian Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Karena itulah, kita meminta menteri-menteri dan eselon I untuk betul-betul mendalami anggarannya. Bukan hanya eselon II yang mengetahui anggarannya, bukan hanya Kepala Biro Perencanaan. Dirjen tinggal paraf, menteri teken. Kalau begitu, habislah kita. Karena itu, kenapa anggaran naik tetapi pertumbuhan tidak? Berarti ada sesuatu yang keliru dalam cara kita menerapkan anggaran yang tidak mempunyai nilai tambah yang tinggi. Itulah masalahnya. *

Disampaikan pada acara Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2016
Dengan Pejabat Eselon I kementerian dan lembaga
Di Auditorium kantor kementerian PU & PERA
Jakarta 22 maret 2016

Apa modal pengusaha yang paling besar? Cuma satu, semangat. Semangat lebih tinggi daripada kerja keras, pengetahuan atau pun sinergi. Karena semangatlah yang bisa menciptakan kerja keras, semangatlah yang bisa menciptakan kreativitas, semangatlah yang bisa menciptakan keberanian, semangatlah yang bisa menciptakan hubungan-hubungan yang lain itu, termasuk menanggung risiko.

Karena itulah akhir tahun 1980-an dan pada awal 1990-an, Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Achmad Amiruddin mempunyai konsep yang bagus, pewilayahan komoditas. Artinya wilayah-wilayah itu di bagi sesuai kemampuan dan agronominya. Ada daerah beras, ada daerah jagung, ada daerah ternak, ada daerah coklat, ada daerah kopi. Supaya fokus. Karena itu kita bikin pengusaha saya bilang agar masyarakat dalam berpartisipasi kepada konsep-konsep itu, sehingga ada kemajuan di bidang coklat, kopi, fokus, di bidang ternak.

Fokus di mana? Berasnya di mana? Hortikultural di mana. Kita fokus karena tidak mungkin suatu daerah maju apabila beragam-ragam, tidak jelas. Konsep itu kalau di dunia sekarang disebut “*one village one product*”, sebenarnya.

Jadi konsep itu sudah kita terapkan di sini. Sebagai Ketua KADIN, kita bikin pertemuan di mana saja, hampir 80 kali pertemuan, dan kita memilih. Saya bilang, “Apa yang harus kita pilih dan produk apa yang harus kita pilih?” Kita pilih yang ada hubungannya dengan makanan. Makanan dipilih tahan krisis. Makanan tidak akan pernah kurang permintaannya, dan pasti harganya akan naik.

Karena itulah dari sembilan itu, delapan makanan, padi, jagung, ternak, coklat, kopi, ubi kayu, dan sebagainya. Temu usaha itu menghubungkan petani, perbankan, dan eksportir. Ada 80 kali pertemuan di seluruh Sulawesi Selatan, dan tidak boleh mewah, tetapi menyeluruh. Ada Alwi yang mengatur-atur itu. Tidak boleh mewah, waktu itu, biaya tidak boleh lebih dari Rp 3 juta. Tidak boleh minta sumbangan pemerintah daerah. Masak pengusaha minta sumbangan, tidak boleh. Sebanyak Rp 2 juta disiapkan oleh pengusaha dan 1,5 juta oleh pusat, biaya APBD.

Kita cari uang, tidak boleh minta pemerintah daerah. Itu hukumnya. Karena itulah, harus sederhana. Temu kakao di kebun kakao. Jangan bicara kakao di sini, tempatnya tidak pernah lihat kebun kakao. Jangan bicara udang, tidak pernah lihat empang. Di empang kita bikin pertemuan 80 kali. Saya turut hadir kira-kira 30-40 kali bersama Pak Amiruddin. Saya bilang Pak Amir kalau bapak tidak hadir, saya tidak mau datang. Kita pergi kemana pun, naik helikopter menyebabkan spirit itu tumbuh.

Akhirnya pada waktu krisis 1998, saya katakan, di daerah pesisir di sini makmur. Saya penjual mobil tahu. Penjualan mobil turun di sini naik karena orang punya uang tiba-tiba karena pengusaha kopi kaya semua, harganya dari Rp 5.000 menjadi Rp 25.000 per per kg. Terkejut semua akhirnya. Penuhlah gudang di situ. Itu lokalnya, dan kita lakukan itu.

Dulu pernah saya bilang ke Zul, “Eh Zul kau bikin apa, saya bilang, harus spirit naik.”

Pertanyaan kedua, kumpul lagi kita, sebagai Ketua KADIN kumpul, ada juga teman-teman Husain Ibrahim. Pertanyaanya, bagaimana republik ini, bagaimana pengusaha nasional kita. Terjadi perbedaan besar dengan konglomerat waktu zaman konglomerat dengan pengusaha nasional pribumi. Jauh perbedaannya.

Apa solusinya? Solusinya semangat. Kita tidak kalah pintar, tidak ketinggalan otak, tetapi kita kalah semangat dan kemauan. Sekarang pun masih terjadi. Semangatnya, bicara teman-teman saya, teman-teman kita semua pengusaha-pengusaha Tionghoa, jauh lebih maju dari pada pengusaha pribumi. Kita tidak ingin turunkan, tidak. Jangan salah sangka. Tidak ingin turunkan pengusaha Tionghoa itu, tetapi kita ingin naikkan pengusaha pribumi. Kalau tidak berbahaya bangsa ini, begitu tidak stabil, tidak harmoni, berbahaya bangsa ini kalau tidak seimbang. Begitu tidak harmonis, berbahaya. Kalau mayoritas tidak maju, bahaya untuk keduanya.

Karena itu, kita harus memajukan tanpa kekerasan, tetapi dengan semangat. Di mana semangat itu datang? Dari dalam. Karena itulah mari kita majukan kembali semangat untuk maju, semangat untuk berusaha, pada masyarakat-masyarakat yang mempunyai kultur pengusahanya. Salah satunya Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan, yang mempunyai kultur yang dinamis, yang kuat. Mari kita kembangkan secara nasional kultur ini.

Dimilikilah, kita pada tahun 1990? Tahun 1992, pertemuan yang pertama. Pertemuannya itu di tempat ini. Pembukanya di sebelah, di gedung Manunggal, pertemuan-pertemuan kecilnya di hotel. Jadi dibuka di tempat ini. Itulah sejarahnya

dan yang buka Pak Jenderal Jusuf. Setengah mati saya bujuk. Beliau itu tidak mau macam-macam, akhirnya saya datang.

“Begini saya mau datang dengan syarat bukan pertemuan Bugis-Makassar. Terlalu kesukuan itu. Ya, biasa Sulawesi Selatan. Saya bilang, beda Sulawesi Selatan dengan Makassar. Sulawesi Selatan itu wilayah, saya mau semangat, ya tetapi kalau tidak mau, saya tidak mau hadir.”

Saya ubah hal kop surat, menjadi pertemuan pengusaha Sulawesi Selatan. Lupa saya bilang ke panitia bahwa spanduk diubah juga. Dia tidak ubah, tetap pertemuan Bugis-Makassar. Jadi bagaimana caranya ini dan Pak Jusuf tidak mau hadir kalau bukan pertemuan Sulawesi Selatan. Nanti kalau ada di daerah, tidak karena semangat ini. Karena bedanya kalau Sulawesi Selatan hanya pengusaha yang ada di sini. Bagaimana para pengusaha yang ada di Papua dan ada di Jawa? Dia sudah bukan orang Sulawesi Selatan. KTP-nya sudah KTP DKI, KTP Jawa Timur, KTP Papua.

Jadi saya bicara terus dengan Pak Jusuf supaya jangan melihat ke atas. Bicara saja terus sampai masuk. Mungkin dia sadar kenapa saya tiba-tiba bicara terus sama dia, saya bilang bukan itu, supaya dia lihat muka saya. Dia bilang, kamu mau maju untuk masyarakat tidak? Iya acaranya Sulawesi Selatan, tetapi semangatnya Bugis-Makassar. Akhirnya okelah, dia buka dengan sedikit marah-marah sama saya karena saya ingin mempertahankan semangat itu, bukan karena yang lain, semangat memajukannya, semangat energinya, semangat mau berkorban, semangat mau ambil risiko, semangat kreatif. Jangan kalah dari yang lain. Itulah yang kita harus harapkan.

Memang hanya tertulis Bugis-Makassar, tetapi maknanya luas. Pernah dulu mau ditulis, pertemuan Ssaudagar Bugis-Makassar-Mandar-Toraja, terlalu panjang 4 kota. Kita kumpul para ahli budaya. Sebenarnya apa akar budaya? Ya, budaya Bugis-Makassar, walaupun jangkauannya Mandar tetap

akarnya budaya itu. Ya, sudah akarnya saja kita sebut karena terlalu panjang nanti kalau kita sebut semuanya. Selayer juga ada lain lagi, tetapi bukan itu yang kita bicarakan, semangat itu, kemauan itu, rasa malu, rasa siri itu.

Itu saja. Menurut Anda saja-lah yang pasti lebih pintar, tetapi kembali kepada semangat yang tidak pernah menyerah, semangat kreatif, semangat inovatif, semangat lebih baik, semangat memberi, bukan hanya semangat untuk menerima.

Kenapa tidak pernah macet di sini waktu lebaran? Karena memang orang tidak balik. Balikinya setelah shalat Idul Fitri, begitu konsepnya. Itu ada hubungannya. Karena itu, di mana-mana di Indonesia ini, ada kampung Bugis dan kampung Makassar. Kemarin saya dari Sumbawa, ada juga kampung Bugis Sumbawa. Sumbawa malah merasa orang Bugis Sumbawa.

Apalagi di Pulau Komodo. Di pulau Komodo lebih banyak orang Bugis dari orang NTT. Akibatnya, ada juga tempat turis, tetapi di pinggir pantai semuanya banyak kotoran jadinya. Sambil jongkok, eh kenapa lagi ini, di pantai. Nah itu, yang mengajarkan cara bikin toilet orang Bugis. Karena orang Bugis datang ke situ tahun 50-an. Waktu itu, Makassar belum ada toilet. Dia pikir, di sini juga belum ada toilet, padahal salah dia.

Di tempat lain, juga bikin konsep, seperti kongres. Tidak bisa jalan karena pasti besar biayanya. Kenapa, kita dulu bisa bikin KADIN 80 pengusaha, karena biasanya orang menentukan biaya minimum. Kita kasih maksimum Rp 3 juta, tidak boleh lebih dari enam jam. Makannya hanya nasi boks semua dapat, dan tanda tangan.

Sekarang sudah mewah. Orang tidak melaksanakan lagi, harus berpikir datar. Yang penting isinya, yang penting isi pembicaraan. Itu ada aturannya juga. Tidak boleh bicara panjang kalau pertemuan, enam jam harus kelar. Jalan

semuanya itu. Jadi konsepnya harus konsep berpikir sebagai pengusaha. Nah, itulah yang kita ingin kembalikan, *spirit* itu karena hanya *spirit itu* yang bisa mengangkat pengusaha, bukan fasilitas, tetapi fasilitas tentu masih perlu diadakan.

Karena itu, pemerintah bertekad mendorong kembali keseimbangan usaha nasional. Bahaya bangsa ini, kalau tidak seimbang usaha nasional, berbahaya secara jangka panjang. Itu yang harus kita lakukan. Tetapi sehubungan dengan itu, saya juga menyampaikan, apa yang kita hadapi dewasa ini.

Sudah berkali-kali Presiden menjelaskan ini. Saya juga selalu menjelaskan bahwa ekonomi kita terpengaruh pada dua hal, pada saat globalisasi tidak ada lagi negara yang tidak tergantung satu sama lain. Ialah faktor ekonomi dari negara-negara yang sangat berpengaruh seperti Amerika, China, dan Eropa.

Kelompok itu yang mengalami masalah ekonomi dewasa ini. Akibatnya, permintaan turun. Kita sebagai negara yang mengeksport komoditas pasti mengalami dampak itu. Akibatnya, pendapatan di sektor mineral, tambang, kebun, mengalami sedikit penurunan. Tentu juga yang lain-lainnya. Pertumbuhan kita menurun akibat situasi itu.

Karena itu apa yang harus kita gerakkan, kembali lagi *spirit* dari dalam, semangat kekuatan dalam. Sama kalau Anda main yudo atau main karate. Kalau lawannya besar dan agak sulit, pakai tenaga dalam. Apa tenaga dalam? Apa kekuatan kita? Kekuatan kita adalah sumber daya yang ada dan penduduk yang besar, pendidikan yang cukup baik bisa menjadi produsen dan sekaligus konsumen yang baik.

Jadi kekuatannya dari dalam. Kemudian menggali kembali kekuatan yang telah keluar. Karena itulah, kita bikin *tax amnesty*, karena begitu banyak dana nasional dari sumber daya nasional yang dibawa keluar dan tidak kembali.

Tidak ada negara yang maju tanpa pengusaha yang maju, karena yang bayar pajak adalah perusahaan, yang menimbulkan nilai tambah adalah pengusaha, yang menggerakkan layanan pengusaha. Justru pemerintah itu, melayani pengusaha. Pengusahalah yang membayar gaji pegawai, apalagi pajaknya. Tetapi pemerintah juga harus memberikan fasilitas yang baik dan kebijakan yang baik.

Saya katakan, *tax amnesty* berarti sama dengan telah berbuat dosa. Saya ingin mengulangi apa yang saya katakan di Jakarta. Kalau manusia apabila berbuat kesalahan dengan sesama manusia, namanya minta maaf. Kalau ada utang ya dibayar. Kalau berbuat dosa kepada Tuhan, ya harus bertobat dan tidak melakukan lagi. Tetapi apabila berbuat dosa sekarang kepada negara hanya ada dua esensinya, masuk penjara atau membayar denda atau kedua-duanya. Kalau tidak mau penjara atau denda, ya bayar tebusan lebih dulu.

Nah itulah *tax amnesty*, hanya memaafkan orang yang telah bersalah. Itu banyak, karena berjamaah, karena itu umum, namanya *amnesty*. Jadi kalau ada di sini yang tidak bayar pajak dengan benar, harus bayar tebusan supaya tidak masuk penjara atau di denda. Sebenarnya, itu sederhana sekali prosesnya.

Kita di Sulawesi Selatan beruntung karena ada cokelat, ada kopi, macam-macam, yang tidak kena krisis. Kopi, udang, tetap harganya naik, dan permintaannya terlalu tinggi karena makanan. Kita kalau ada uang sejuta, ya kita makan, beli baju, macam-macam, jalan-jalan. Tetapi kalau turun jadi 500, makan tetap, tetapi mungkin beli baju tidak, mungkin jalan-jalan dikurangi. Jadi makan tidak pernah berhenti.

Jadi konsep yang kita pikirkan, sudah 25 tahun mendahulukan produksi yang ada hubungannya dengan makanan. Ternyata, luar biasa menolong daerah ini, tidak jatuh dari masalah. Itulah sebabnya, krisis nasional terlama, tidak

masalah di sini. Dalam artian pendapatan masyarakat tetap baik, sehingga semangat inilah yang harus menjadi bagian dari kita semua, di samping semangat yang memperbarui keberanian, memperbarui kreativitas, inovasi, dan semangat untuk bertarung dalam kemajuan tentang keilmuan. Itu harus tetap melekat dalam jiwa kita, di mana pun berada.

Saya punya dua wakil, Alwi dan Aksa, tiba-tiba berhenti kuliah. “Ya, karena kita berhenti sama-sama.” “Loh, saya kan sudah tamat, kamu tidak?” Ya, sudah kalau begitu. Mari kita bekerja di bidang yang mempunyai usaha yang panjang. Kemajuan bangsa ini, di bidang usaha. Kau ikut sama saya, kita bikin usaha dari bawah. Nanti kan dengan semangat itu, agar kita mencapai kemajuan.”

Setelah masing-masing mempunyai pengalaman, habis di perguruan tinggi sama-sama, minta pisah. Pisah dalam arti perusahaan, semangat tidak. Masing-masing bikin usaha dan semangat itu melekat.

Saya tidak membanggakan, gedung kantor yang tertinggi di Makassar, di bidang usaha yang pertama cuma ada tiga. Kantor saya, kantornya Alwi, dan kantornya Aksa.

Jadi semangat dari bawah itu bisa diarahkan ke mana-mana. Kita mengarahkannya di bidang usaha dan itu jalan. Tidak diarahkan ke jalan merusak-rusak, dan akhirnya menjadi Wapres.

Saya ingin sampaikan ulang cerita saya, waktu menjadi Ketua KADIN. Waktu saya lebih banyak mengurus KADIN daripada mengurus perusahaan. Jangan terlalu ditiru, tetapi tiru sedikit boleh.

Bayangkan 80 kali pertemuan ke mana-mana, keliling Sulawesi Selatan, keliling ke Jakarta untuk mewakili. Terus sampai direktur bertanya, “Pak, kita ini jual mobil kontraktor, tetapi jarang bapak di kantor, melihat-lihat kita?”

Saya tanya, “Siapa yang mau kredit mobilkah? Orang beli mobil itu masyarakat yang mempunyai uang. Jadi tugas saya membuat masyarakat punya uang agar mau beli mobil. Karena itu, dia mesti maju, produksi mesti maju, coklat mesti maju, semuanya maju, baru bisa beli mobil. Karena itulah, jalan untuk mobil harus lebih baik, mesti *balance*. ✱

Disampaikan pada acara Pertemuan Saudagar Bugis Makassar ke XVI dan Halal Bil Halal, Di Hotel Novotel Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, 25 Juli 2016

Tumbuh dari Bawah

Mengelola bangsa dengan penduduk lima juta, 10 juta, tentu tidak serumit kita. Kita 255 juta orang. Dengan orang yang punya kesempatan kerja 125 juta, dibutuhkan begitu banyak pengusaha kecil, besar, dan menengah yang dapat memberikan lapangan kerja. Tidak mungkin semua menjadi PNS, tidak mungkin semua menjadi dosen. Apalagi sekarang kita moratorium, maka satu-satunya cara dengan memperbesar kesempatan usaha.

Salah satu syarat usaha ialah pembiayaan. Bisa juga orang memulai usaha dengan modal sendiri, tetapi ingin lebih cepat tentu dengan pembiayaan yang baik. Nah, pembiayaan yang baik, juga sudah mulai, tetapi yang kecil. Karena kalau yang besar, tentu ditanya apa pengalamannya. Tentu banyak orang yang tidak punya pengalaman.

Jadi bukan hanya pedagang pasar, mahasiswa juga kalau ingin mempunyai usaha. Jangan lupa, banyak orang kaya di dunia ini dimulai saat dia mahasiswa. Bill Gates, Mark Zuckerberg, itu semua dengan *start up* yang kecil kemudian menjadi besar. Itu dengan ilmu.

Karena itulah, saat Pak Asmawi (Dirut BRI) menyampaikan bahwa perlunya kita mempunyai kelembagaan, saya sarankan berada di daerah yang mempunyai suatu kultur usaha, kultur

entrepreneurship dulu. Salah satu daerah yang mempunyai kultur entrepreneurship, adalah di Sulawesi Selatan. Bukan karena saya ketua alumni, bukan. Tetapi bahwa ada pengaruhnya, pasti. Tetapi yang kita dahulukan kultur sehingga memudahkan bekerja.

Sebenarnya sudah dimulai, juga ditawarkan ke Unand. Sudah ada perjanjiannya dengan Unand supaya penduduk 250 juta punya center-center. Kalau cuma 10, masih kurang. Bagaimana orang dididik, yang muda-muda, dimotivasi dan bagaimana mempermudah pekerjaan bank sehingga mereka sudah siap. Tidak perlu bertanya kanan-kiri dan sebagainya. Ini dia punya kantor, bukan hanya di sini, tetapi juga di pasar-pasar. Bagaimana dia mendidik orang. Saya bilang juga nanti bicara di masjid bagaimana supaya jamaah termotivasi usaha. Hanya itu caranya.

Kenapa? Indonesia salah satu bangsa yang paling mempunyai kesenjangan yang besar. Kesenjangan di Indonesia bisa kalau di *gini ratio* 0,4 itu dari konsumsi. Tetapi kalau dari sisi pendapatan bisa 0,7. Itu tinggi sekali dari sisi pendapatan. Karena kalau konsumsi ada batasnya, pendapatan hampir tidak ada batasnya sehingga kesenjangan tinggi sekali.

Bisa terlihat, khususnya di Jakarta. Saya kira rumah yang terhebat bisa ada di Jakarta, tetapi yang terkumuh juga ada di Jakarta. Itu hanya bisa diatasi apabila orang bekerja.

Ini prioritas sehingga pemerintah akan menerbitkan kebijakan bagaimana ekonomi yang berkeadilan. Kebijakan itu memberikan afirmasi kepada pengusaha kecil. Keutamaan diberikan kepada pengusaha kecil dan pengusaha daerah. Kita tidak ingin semua terpusat.

Ini akibat dari kebijakan liberal dan globalisasi. Selalu orang menyebutkan kebijakan pasar. Itu kalau ada ekonom mengatakan, pasar bagaimana? Itulah yang menyebabkan kesenjangan makin tinggi saat kita bicara masalah liberalisasi,

sehingga orang yang mempunyai usaha dengan jumlah besar akan jauh lebih cepat majunya dibanding pengusaha kecil.

Tetapi akibatnya, masalah sosial yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Kita tidak ingin kebijakan sosialis, kiri. Kita ingin jalan tengah yang berkeadilan. Berkeadilan itu tentu mempunyai makna yang lebih luas.

Berkeadilan ada dua, dari sisi fasilitas atau dari sisi hasil. Memang ada daerah atau orang dengan fasilitas dan bisa maju. Dalam kondisi saat ini, kita mempunyai ketimpangan seperti yang saya katakan tadi. Teman-teman kita masyarakat Tionghoa jauh lebih cepat maju daripada yang lain.

Tidak berarti kita ingin menurunkan pengusaha Tionghoa ke bawah. Tidak sama sekali. Tapi bagaimana yang di bawah naik. Itulah makna dari *center micro finance*, suatu center mendidik, mencari cara, melatih, dan juga bagaimana kita berbuat yang baik kepada pengusaha-pengusaha pasar, pengusaha-pengusaha kaki lima, pengusaha-pengusaha pemula, pengusaha-pengusaha di daerah yang kecil, perajin-perajin, pekebun-pekebun sehingga mendapat akses yang lebih besar dari sektor keuangan.

Tadi sudah disampaikan oleh rektor, gubernur, dan Dirut BRI, Pak Asmawi bahwa ini akan menjadi kepeloporan memperbaiki sistem yang pincang karena tidak ada cara lain selain meningkatkan semangat ini. Kalau tidak, akan mempunyai akibat jangka panjang.

Kedua bagaimana mahasiswa yang selesai pendidikannya. Setiap tahun ribuan orang. Mereka mau kemana? Pemerintah sudah moratorium. Terkecuali untuk tenaga kesehatan, sebagian penyuluh pertanian dan guru, cuma itu yang mau ditambah. Yang lain tidak boleh secara nasional sampai lima tahun. Pilihannya, bekerja di sektor sendiri —*start up* istilah anak muda—, atau bekerja secara profesional.

Tetapi kalau yang pengusaha, katakanlah pribumi, cenderung *start*-nya belum. Pengusaha Tionghoa cenderung juga yang profesional. Karena itulah, harus tumbuh semangat ini di bawah. Jangan semangat waktu mahasiswa dibawa ke luar tanpa arah, tetapi harus me-*reform* keadaan ini.

Saya bersama Pak Aksa dan Pak Alwi, selalu saya memberikan contoh bagaimana kita bertiga membawa diri dari aktivis mahasiswa jadi aktivis ekonomi. Karena itu, harusnya pengusaha bisa timbul dari bawah, dari menengah.

Kalau kasus yang saya alami, semua profesional yang bekerja sebagai staf, cenderung menjadi pengusaha sendiri. Dia tidak perlu tamat sekolah. Tetapi saya tidak ingin mengatakan yang mahasiswa jangan tamat sekolah, tidak. Jangan lupa, Bill Gates tidak tamat, Mark Zuckerberg juga tidak tamat.

Jadi orang yang *drop out* jangan dilecehkan. Dia bisa menjadi luar biasa karena punya semangat. Orang-orang terkaya di dunia tidak banyak yang sarjana. Coba lihat siapa yang sarjana, tidak banyak. Jadi seperti itu. Artinya ialah semangat itu.

Nah, center ini membalik teori. Bukan teori ke praktik, tapi praktik ke teori. Dari praktik yang ada menjadi proses yang ingin dicapai. Kemudian proses itu yang menjadi praktik lagi.

Jadi mengumpulkan pengalaman perbankan nasional, khususnya BRI menjadi suatu sistem pengajaran, suatu sistem pelatihan sehingga menjadi praktik yang lebih gampang, supaya jangan orang mulai dari nol lagi. Karena itu, saya harap center ini menjadi seperti itu, menjadi bagian dari pembelajaran. Bentuknya futuristik.

Mudah-mudahan di sini sebagai perintis. Dari sistem ini, akan menghasilkan pengusaha-pengusaha yang tangguh

karena tidak ada pengusaha yang langsung besar. Selalu mulai dari bawah.

Untuk itu jangan dipersiapkan mereka menjadi PNS, tetapi dipersiapkan untuk menanganai pasar, menanganai toko, industri kecil, dan sebagainya. Itulah harapan kita sehingga mempunyai manfaat yang besar. Tanpa itu, sulit membuat entrepreneur baru. ✱

Disampaikan pada acara
Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Center of Micro-Finance BRI
Universitas Hasanuddin Makassar,
di Makassar, Sulawesi Selatan
27 Februari 2017

Hidup dari Pengusaha

KADIN selalu mengharapkan kerja sama pemerintah. Khawatir kalau pemerintah tidak kerja sama, bagaimana KADIN nantinya. Padahal sebenarnya sebaliknya, justru pemerintahlah yang minta kerja sama dengan KADIN.

Memang pemerintah sudah menjalankan kebijakan, tetapi pemerintah hidup dari pengusaha. Tanpa pengusaha yang membayar pajak, bagaimana pemerintahan bisa berjalan? Para pengusaha itu kalau salah pun, para pengusaha main-main pun, lama-lama kita ampuni juga. *Tax amnesty* itu kan pengampunan, dimaafkan kalian yang salah-salah? Begitu sayangnya pemerintah kepada pengusaha. Apalagi kalau benar, lebih sayangi lagi. Salah pun kita sayangi, ini yang masalah.

Pemerintah justru lebih banyak berkepentingannya kepada pengusaha, di samping itu, tentu pengusaha berkepentingan kepada pemerintah. Jadi jangan pernah khawatir, pemerintah pasti selalu memperhatikan.

Tahun ini, di dunia, saya kira yang kurang itu, senyum. Di seluruh bagian di dunia ini, yang kita dengar beritanya, kesulitan demi kesulitan. Demokrasi di Inggris keputusannya seperti itu, keluar. Mula-mula senang, tiba-tiba dia sadar, ini

salah. Semua orang khawatir, berita buruk lagi, bukan berita baik.

Demokrasi pun bisa menghasilkan berita buruk, efeknya kemana mana. Masalah di Amerika punya efek ke mana-mana, China punya efek ke mana-mana, termasuk kita. Jadi, berita yang baik agak berkurang tahun ini.

Tetapi bagi para pengusaha harus siap menghadapinya. Yang tersenyum siap dihadapi, yang kurang tersenyum siap dihadapi, yang sulit harus siap juga. Memang itulah tugas kita sebagai pengusaha untuk menghadapi masalah yang baik dan masalah yang kurang baik. Kita harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada di dunia. Apabila terjadi masalah di Eropa, di China, di Amerika, pastilah kita semua menghadapinya.

Tetapi ada satu hal yang sangat penting menghadapi situasi seperti itu, bagaimana meningkatkan kekuatan dari dalam suatu negara. Sama kalau orang main silat, main judo, kalau memang lawannya berat pasti tenaga dalam yang harus dikeluarkan. Karena itulah tenaga dalam negeri ini harus dimunculkan. Tenaga itu dari para pengusaha.

Pemerintah mengharapkan pengusaha maju. Tidak pernah ada pemerintah yang mengharapkan perusahaan rugi. Karena seperti yang kita ketahui, semua perusahaan Anda saham pemerintah 25 persen. Artinya kalau ada untung, setor kemari 25 persen.

Jadi seperti itulah sehingga pasti pemerintah mendorong. Tidak usah dikhawatirkan. Karena agak berbeda kalau partai. Ketua DPR cuma satu, gubernur cuma satu. Jadi kalau dia pecah siapa yang dapat ini. Tetapi kalau bisnis, kesempatannya banyak sekali. Kalau *you* ambil ini, kita ambil yang lain. Jadi jangan khawatir persaingan. Tetapi, pemerintah menyadari bahwa kekuatan dari dalam lah yang harus kita munculkan, banyak kesempatan.

Memang kalau terjadi masalah, kita sudah setiap 10 tahun ada masalah. Pada 1998 ada masalah, kita krisis, pada 2008 ada masalah, ya mudah-mudahan tahun ini agak lebih amanlah, walaupun di negeri lain juga seperti itu. Ada siklusnya krisis. Walaupun tidak ada rumusnya, historisnya ada masalah. Yang paling penting memperkuat diri masing masing dan memperkuat bangsa ini.

Kita tidak perlu khawatir dengan keadaan. Kita berada di bagian tengah. Kita pertumbuhan tidak semaju katakanlah *gross*-nya, mungkin India lebih tinggi, ataupun beberapa negara di Asia. Toh kita tidak rendah juga. Kita selalu ada di tengah. Karena itulah kita mempunyai daya tahan yang baik selama kita rasa bersatu.

Pandangan pengusaha selalu terbalik dengan pandangan birokrat atau atau akademisi. Setiap kesulitan kadang-kadang justru di situ kesempatannya. Contohnya kalau orang semua berbicara harga daging yang naik, saya katakan pasti ada yang rugi ada yang untung kan? Artinya, sebagai pengusaha jangan bersedih. Pemerintah boleh khawatir, kenapa harga naik? Bagi pengusaha, ini kesempatan. Ternyata kita beternak sapi saja karena menguntungkan, selalu harus terbuka begitu.

Kalau harga gula naik, jangan bersikap seperti pemerintah, "Wah harga gula naik, susah dijual, nanti orang marah." Selalu Anda berpikir sesuai dengan alam pikiran pengusaha, solutif, jangan berpikir pemerintah yang regulatif. Kita naik harga, bikin aturan. Pengusaha tidak bisa begitu, harus terbalik pikirannya.

Karena itulah saat orang susah, Anda lagi berpikir. Jangan ikut berpikir seperti pemerintah? Berpikirlah bagaimana baik kemudian bertindaklah sebagai pengusaha. Makin banyak impor berarti makin banyak pasar bisa terbuka. Jangan berpikir kalau bawang diimpor, Anda juga ikut protes,

tanam bawanglah? Kalau ayam susah, tanam jagung supaya makanan ayam cukup.

Apalagi apabila terjadi masalah di dunia ini. Pengalaman 1998, pengalaman 2008, yang bertahan bisnis makanan. Mungkin kita kurangi beli baju, kurangi beli mobil, kurangi beli motor, tetapi kita tidak kurangi beli beras, beli gula, beli kopi, beli coklat. Pasti tidak.

Ternyata kalau kita lihat di Bloomberg atau CNBC, komoditas, *mining* semua merah. Yang hijau kopi, coklat. Begitu terjadi masalah Brexit semua merah terkecuali emas dan perak. Nah, kita kebetulan punya semua emas dan perak di Indonesia. Jadi mari kita optimistis dalam kesulitan. Jangan ikut menangis, sedih atau susah.

Kita memang susah karena pasti didemo kalau ada masalah. Anda kan tidak didemo? Jadi masalah-masalah itulah kita harus atasi supaya ada harmoni antara pemerintah dan pengusaha. Saat kesulitan, pengusaha yang mesti menyelesaikan soal itu dengan cara berpikir *entrepreneurship*.

Memang kita harus banyak memperbaiki situasi. Kita kebetulan berada dalam suasana yang kurang enak satu bulan terakhir ini. Saat harga komoditas turun, eh harga pangan naik. Jadi apabila itu berlanjut terus, bayangkan berapa kemiskinan bertambah. Pada saat pendapatan orang turun, pengeluarannya naik. Maka marilah kita bekerja bersama-sama.

Pemerintah berusaha memperbaiki semua kondisi-kondisi, aturan, deregulasi, debirokratisasi. Tentu dibutuhkan juga saran-saran yang baik dari pengusaha, dari KADIN. Karena saran yang terbaik itu, datang dari pelakunya. Anda yang yang paling mengetahui, apa yang berlebihan, apa yang kurang. Begitu juga, hal-hal yang dapat meringankan beban.

Tapi ketimpangan itu, tidak bisa diperbaiki hanya dengan aturan. Banyak orang berpikir begitu ada Keppres, Perpres, selesai persoalan, Padahal yang menyelesaikan persoalan itu adalah tindakan. Tindakan itu datangnya dari pengusaha. ✱

Disampaikan pada acara
Dialog dan silaturahmi dengan jajaran pengurus dan anggota Kadin
di Cendrawasih Room Hall A,
Jakarta Convention Center (JCC) Senayan
Jakarta 28 Juni 2016

Hunian Vertikal

Kita selalu mempunyai dilema. Pada 50 tahun lalu, 30 persen–40 persen penduduk dunia ada di perkotaan. Sebanyak 70 persen berada di pedesaan, sejalan dengan pertanian yang masih menjadi bagian yang tinggi daripada lapangan kerja.

Dewasa ini mayoritas penduduk dunia sudah hidup di perkotaan. Di Indonesia diperkirakan pada 30 tahun yang akan datang 60 persen–70 persen penduduk Indonesia akan tinggal diperkotaan.

Kenapa itu terjadi? Tentu kita menyadari, di samping penduduk dunia semakin bertambah, dewasa ini 6,7 miliar penduduk dunia, 30 tahun lagi diperkirakan menjadi 99 miliar. Pada saat yang sama, pertanian di samping tetap dibutuhkan lebih banyak lagi untuk makanan penduduk ini, tetapi tingkat efisiensinya semakin baik, sehingga kalau di Indonesia pada beberapa puluh tahun yang lalu 45 persen bekerja di sektor pertanian, sekarang sisa 33 persen.

Di negara-negara maju pasti lebih sedikit lagi, seperti di Amerika hanya sekitar 5 persen penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Artinya semakin banyak berhasilnya pertanian, berarti mekanisasi pertanian semakin besar, lapangan kerja lebih sedikit, orang pindah ke kota untuk

mencari pekerjaan yang lebih baik lagi. Di lain pihak, apabila pertanian gagal tentu lapangan kerja berkurang juga sehingga mereka pindah ke kota. Jadi apa pun situasinya akan terjadi urbanisasi di dunia ini.

Karena itulah, bertambahnya penduduk di perkotaan adalah suatu kepastian yang akan terjadi di mana saja. Tantangannya bagaimana kota dapat menjadi pemukiman yang baik dan menyenangkan semua orang, dari pikiran-pikiran-pikiran negatif menjadi positif.

Selama ini urbanisasi banyak dipikirkan menjadi hal negatif. Bagaimana kehidupan urbanisasi itu menjadi positif dan berguna untuk semua orang. Sama saja pemikiran pada masa lalu penduduk yang besar merupakan beban, tetapi ternyata China dengan penduduk yang besar dapat maju dengan baik karena sebagai konsumen dan produsen yang baik.

Itulah kondisi yang kita hadapi dan suatu dilema yang harus dibawa ke positif. Dan tentunya bagaimana kehidupan kota, pemukiman kota, harus lebih menyenangkan dan lebih aman. Inilah habitat menjadi bagian dari sistem *sustainable development goals* yang tahun lalu kita proklamasikan di PBB.

Program kesebelas dari MDG's yang meminta kita semua atau menjadi program dunia agar kota haruslah inklusif atau mengakomodasi semua orang. Larangan ke kota sudah tidak lagi menjadi efektif. Contohnya seperti di Jakarta. Kota harus tangguh menghadapi banyak masalah. Masalah bencana, masalah stres, dan masalah-masalah lainnya. Itu harus dipersiapkan. Kota harus aman karena kita menghadapi tantangan. Dewasa ini, tantangannya kriminal, terorisme, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Itu menjadi bagian dari upaya kita harus memperbaiki situasi kota yang lebih baik lagi.

Tentu kota harus menjadi *sustainable*. Artinya harus memenuhi syarat-syarat kehidupan yang baik, yang sehat, karena fungsi daripada habitat dalam MDGs tentu saja

Efisien yang Menang

saling melengkapi, mengurangi kemiskinan, pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, dan hal-hal yang penting untuk pembangunan suatu bangsa. Karena itulah, pertemuan hari ini di Surabaya, *road to Quito*, tentu bagian yang sangat penting dari kehidupan kita di dunia ini pada masa datang. Artinya bagaimana dunia bekerja sama untuk menghadapi masalah-masalah dilema yang terjadi, dari dilema yang selama ini dipikirkan sebagai negatif harus menjadi positif.

Kita tahu, kehidupan vertikal haruslah menjadi bagian yang sangat penting. Tidak mungkin lagi semua orang mendapat lahan yang besar. Kehidupan vertikal yang menjadi solusi di mana pun di dunia ini. Karena itulah menjadi program. Di samping itu, bagaimana kota lebih nyaman, lebih banyak bertempat hijau yang sangat penting di kehidupan. Perencanaan yang baik, tentulah menjadi bagian dari para ahli di bidang ini, dan harus dijalankan secara baik.

Untuk semua itu, membutuhkan kerja sama, membutuhkan biaya yang besar. Karena kita tahu, untuk habitat, perumahan, dibutuhkan dana jangka yang panjang, dibutuhkan dana yang panjang, berarti dibutuhkan kerja sama yang besar. Tetapi kita semua tahu, dewasa ini, di banyak bagian dunia, untuk menyimpan dana bunganya negatif.

Artinya, jauh lebih efisien memberikan dana itu, memberikan bantuan atau juga kredit kepada negara-negara yang membutuhkan dengan membayar bunga yang pantas, yang kecil, daripada bunga yang negatif diperbankan di negara maju. Karena di samping menggerakkan ekonomi dunia, perumahan juga salah satu hal yang penting dalam kemajuan suatu negara. ✱

Disampaikan pada acara
"The third preparatory committee meeting for habitat III"
Di Grand City Convex "Surabaya, Jawa Timur
25 Juli 2016

Kita tengah memasuki suasana persaingan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kita bekerja sama, tetapi bersaing juga. Itu merupakan langkah yang membuat ekonomi ASEAN, skalanya menjadi besar dan kita harapkan menjadi lebih efisien di dalam banyak hal.

Kita mengetahui tantangan-tantangan awal tahun seperti persoalan harga komoditas yang tetap, harga minyak lebih turun. Belum lagi jika dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi di China, di Timur Tengah, dan di Amerika Serikat. Serta tentunya tantangan-tantangan baru yang menjadi bagian persoalan ekonomi dunia lainnya.

Kita di Indonesia juga banyak menghadapi tantangan. Tantangan itu ada hal yang negatif bagi orang lain, tetapi, bagi pengusaha hal itu menjadi positif. Contohnya, liburan akhir tahun kemarin, di mana-mana macet sampai Dirjen Perhubungan Darat harus mundur. Orang menjadi marah. Akan tetapi, pengusaha yang baik tentu melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk bangun jalan tol.

Yang tidak disangka ternyata jalan tol itu macet, artinya berapa pun jalan akan di bangun tetap satu tujuannya, dan itu artinya infrastruktur itu sangat penting, dan itu peluang bisnis

yang terjadi di Indonesia. Jadi, hal-hal yang kelihatannya masalah justru sebenarnya kesempatan.

Pemerintah menyadari beberapa hal yang selalu menjadi bagian yang menyebabkan persaingan ekonomi di Indonesia banyak menjadi pertanyaan. Kita dapat melihat apabila ekonomi dunia seperti ini, maka akan timbul suatu hak di mana semua negara harus mengeluarkan kekuatan dalamnya. Dalam dunia persilatan kita harus mengeluarkan kekuatan internal kita, kekuatan dalam kita, dan kita bersyukur Indonesia mempunyai kekuatan itu. Mungkin berbeda banyak negara lain.

Kita sering menyebut bahwa kita mempunyai pasar yang luas. Mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang cukup, sekaligus mempunyai sumber daya alam (SDA) yang cukup. Jadi, pada dasarnya Indonesia mempunyai kemampuan untuk menggerakkan ekonomi nasionalnya lebih baik dan lebih cepat dibanding banyak negara yang bermasalah.

Kita menyadari juga, bahwa dengan kondisi seperti ini, persaingan akan lebih ketat. Persaingan selalu dimenangkan siapa yang paling efisien. Kita menyadari, bahwa dengan ekonomi di banyak Negara ASEAN yang menurun, artinya ekonomi di Tiongkok *over capacity*, artinya dia bisa menjual sesuatu dengan lebih murah, pasar Indonesia berarti bagian pasar yang baik, tetapi Indonesia mempunyai kelebihan, karena itu kita sebenarnya mempunyai kekuatan dari dalam yang lebih baik pula.

Saya katakan ada empat hal yang harus kita perbaiki untuk membuat ekonomi Indonesia efisien. Yang pertama adalah pihak modal Indonesia lebih mahal dibanding dibanyak negara lain di sekitar kita. Orang makin lebih senang memetik bunga daripada menanam pohon, karena itulah maka bungannya harus dkecilkan supaya orang menanam pohon yang lain.

Maka yang pertama pemerintah lakukan, bunga harus *single digit* dan kita sudah jalankan itu di tingkat ekonomi retail. Lalu kalau mau investasi perbankan dengan bunga tinggi, *no more*. Ini peringatan yang kita harus sampaikan. Jangan mengharap lagi ke Indonesia untuk menanam modal untuk mendapat bunga tinggi, bukan zamannya lagi.

Yang kedua, biaya logistik Indonesia tinggi karena infrastruktur kurang. Kalau Anda lihat berita setiap hari, maka yang dimulai dan diresmikan hampir semua jalan, jembatan, perlabuhan. Dan itu akan terus ditingkatkan setiap tahun. Angka APBN Indonesia pada tahun 2016 khusus untuk infrastruktur itu naik 50 persen dibanding dengan tahun yang lalu. Total di APBN kita Rp 310 triliun untuk infrastruktur itu dari APBN.

Kita mengharapkan investasi dari swasta masuk ke listrik, ke jalan tol, sehingga kita harapkan pada tahun 2017 investasi itu bisa sampai Rp 360 triliun hanya untuk infrastruktur. Jadi itu pada tahap yang pertama. Pada tahun yang lalu ekonomi kita hanya tumbuh 4,7 persen, karena di samping anggarannya kecil juga waktunya yang mundur, akibat keterlambatan penyelesaian anggaran, karena pemerintah yang baru. Sekarang kita lebih cepat lima bulan memulai pelaksanaan proyek.

Kalau tahun yang lalu kita mempunyai proyek di mulai pada bulan Mei atau Juli sekarang di mulai pada bulan Januari, 5 bulan lebih awal, artinya proyek jalan, pabrik semen jalan, baja akan jalan, kontraktor akan jalan lebih cepat, pabrik sepatu, pabrik plastik, segala macam akan jalan lebih awal, dibanding yang lalu.

Yang ketiga, masalah energi. Energi selalu ada hubungannya dengan listrik dan juga tentu yang lain-lain. Pembangunan listrik itu adalah yang sangat prioritas. Tahun yang lalu sudah ditandatangani 19 triliun *mega watt* listrik

baru, maka pada tahun ini akan ditandatangani kurang lebih 20 ribu lagi kontrak baru untuk listrik baru.

Keempat, yang selalu menjadi kritikan adalah birokrasi. Birokrasi yang lamban akibat aturan-aturan yang panjang dan juga kadang-kadang melelahkan. Karena itulah kita memotong banyak langkah-langkah itu dengan paket-paket kebijakan yang dikeluarkan setiap dua minggu agar tecermin kita konsisten memperbaiki birokrasi pemerintahan yang lebih efisien dan cepat. *

Disampaikan pada saat Menghadiri Acara Grand Launching Program Layanan Izin Investasi 3 jam (8+1) dan Fasilitas Importasi Barang Melalui Percepatan Jalur Hijau Ruang Nusantara BKPM Jakarta 11 Januari 2016

Tenaga Dalam

Berbicara negara berarti kita bicara ke depan. Apa yang kita hadapi dan apa yang dapat kita perbuat dalam rangka ke depan. Memang, terus-terang, rasa-rasanya di dunia ini tidak banyak berita gembira. Hampir semua berita yang ada, agak menyulitkan. Kita baru saja mendengar Eropa, Brexit, isinya jauh lebih banyak berita-berita kesulitan daripada daripada berita orang yang menyambut dengan gembira.

Kita ke Timur Tengah, lebih parah. Kita ke Amerika, tinggal waktu saja untuk *crash*, untuk resesi besar. Kita ke China, juga hal yang sama, tinggal menunggu waktu, mereka juga mengalami kesulitan-kesulitan. Kita ke Asia, di sini juga menghadapi masalah yang tentu harus kita tanggulangi. Kalau masalah politik sosial, *Alhamdulillah*. Akan tetapi kita juga melewati perjuangan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang bisa terjadi akibat faktor luar dan sebagian kecil dari faktor dalam. Tetapi banyak dari faktor luar, yang kita tidak bisa pisahkan.

Karena itulah, untuk mengatasi masalah ekonomi, yang terpenting adalah memperkuat diri. Saya selalu katakan, bagaimana kekuatan dari dalam muncul. Kekuatan dari dalam itu, kayak orang bermain silat. Kalau baru bisa,

kalau lemah, membutuhkan tenaga dalam. Tenaga dalam itu, harus muncul. Tenaga dalam itu, dari semangat dan kemampuan kita. Kita tidak bisa mengharapkan lagi bantuan dari luar, apabila ada masalah. Kita tidak bisa mengharapkan lagi bantuan dari Amerika, dari Eropa, dari China. Jangan mengharapkan lagi karena masalah mereka juga lebih sulit daripada kita.

Kita bersyukur, banyak kemampuan yang bisa kita perbaiki. Kemampuan manajerial kita, kemampuan sumber daya alam kita yang harus kita kelola, kemampuan daerah kita yang harus kita tingkatkan. Itu yang kita harus sama-sama kita tingkatkan. Karena itulah perjuangan untuk mencapai kesejahteraan.

Artinya, ada berbagai cara. Ada upaya *entrepreneur*. Masalah peningkatan kemampuan orang, masalah pendidikan.

Kalau soal-soal lain, *alhamdulillah* kita jauh lebih baik. Kalau malam saya undang duta besar berbicara. Masalahnya, ternyata jauh lebih dalam, apa yang terjadi di negara-negara seperti negara Arab. Negara-negara Afrika, jauh lebih dalam masalahnya. Mereka tidak bisa bergerak apa-apa.

Jika kita belajar dari Venezuela, kita dapat mengetahui bahwa negara itu mempunyai cadangan minyak yang terbesar di dunia. Arab Saudi kalah. Akan tetapi, dewasa ini, negara itu menjadi termiskin di Amerika Selatan karena salah kelola. Cavez bagi-bagi minyak, kasih *free*, kasih ke Argentina, kasih ke mana-mana. Harga bensin Rp 1.000–Rp 1.500 sampai sekarang. Bagaimana mereka tidak bangkrut? Jadi faktor untuk maju di samping kekayaan, ternyata ada dua. Pertama manajemen bangsa itu. Belajar dari faktor-faktor seperti di Venezuela. Di Timur Tengah, kurang kaya apanya Irak? kurang kaya apanya Iran? kurang kaya apanya Arab Saudi? apa kekurangan Libya? Semua negara kaya itu tiba-tiba jatuh

miskin hanya karena salah kelola dan kepemimpinan yang tidak mementingkan kepentingan rakyatnya.

Dari situlah kita banyak belajar, bahwa yang terpenting dari suatu negara adalah cara negara tersebut menjalankan pemerintahannya dengan benar, cara menggerakkan rakyatnya, karena suatu saat kekayaan habis. Contoh Venezuela, contoh Libya. Libya yang begitu kaya minta bantuan. “Tolong bagaimana bisa makmur.”

Di Irak ada pengusiran sampai empat juta rakyatnya, padahal produksi minyaknya empat juta barel per hari, bahkan dulu tujuh juta. Kita cuma 700 barel, dia empat juta barel. Penduduknya cuma 50 juta, tetapi bertempur habis-habisan.

Artinya, bagaimana membina persatuan. Kita sudah di jalan yang benar dalam hal persatuan. Indonesia sebagai negara plural, menghormati satu sama lain, itu harus dijaga. Saya sering katakan, apa hebatnya Indonesia yang tidak dipunyai negara lain? Kita sebagai mayoritas Islam, ada 88 persen.

Akan tetapi kalau kita kampanye ke luar negeri untuk pariwisata, yang dimunculkan Bali yang Hindu dan Borobudur yang Buddha. Tidak ada Istiqlal. Sama dengan India, mayoritas Hindu yang dikampanyekan Taj Mahal, lambang keislaman.

Kita mempunyai kelebihan itu. Tidak ada negara lain yang lainnya seperti itu. Semua bingung kalau datang ke negara ini. Kok Borobudur. Kalau di Timur Tengah sudah dihancurkan, dibom. Rasa persatuan macam beginilah, modal utama yang tidak terjadi di negara lain. Ini yang kita harus perbaiki betul secara keseluruhan.

Semua itu, baru bisa diwujudkan apabila kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi. Kebutuhan pokoknya, keadilannya, dan harapannya. Itulah kita harus memberikan

harapan dengan bekerja, bukan harapan kosong. Berikan harapan, janji maksimum bisa setahun. Kita bertahap dewasa ini, sudah tidak bisa lagi berjanji.

Di pemerintahan inilah yang kita pikirkan bersama Presiden, bagaimana merealisasikan semua ini. Karena apapun, masyarakat ingin pembuktian yang baik. *

Disampaikan Pada Acara
Silaturahmi Tim Jenggala Center Dengan Wapres
Kantor Jenggala, Jl. Ciasem, Kebayoran Baru
Jakarta 25 juni 2016

Belajar dari Venezuela

Melihat perkembangan ekonomi dunia saat ini, Indonesia harus bersyukur karena berada di tingkat menengah. Menengah pertumbuhannya, *gross*-nya juga menengah. Stabilitasnya lebih-lebih di atas tinggi. Jadi kondisi kita tidak sakit, tetapi tidak juga kita kuat berlari.

Posisi pertumbuhan kita berada di angka 5 persen, berarti kita lebih tinggi daripada Singapura, Malaysia, dan Thailand. Tetapi kita masih lebih rendah dibanding India, Filipina, dan China. Jika tingkat pertumbuhan negara maju diukur, memang tidak terlalu tinggi. Misalnya, Singapura pertumbuhannya 3 persen, tetapi 3 persen itu diukur dari 50 ribu dolar *income*-nya, Indonesia 5 persen dari *income* 3.500. Ada juga negara-negara yang selama ini kaya, tetapi jatuh miskin atau miskin. Misalnya, Venezuela.

Saya kebetulan 2 bulan lalu baru dari Venezuela. Negara yang begitu kaya, tiba-tiba menjadi begitu miskin. Miskin dalam arti kata, kalau di Indonesia Anda ingin membeli 1 boks tisu, tinggal suruh orang atau beli 2-5 boks. Itu tinggal di minimarket atau warung langsung dapat dibeli. Di Venezuela untuk membeli 2 boks tisu, harus antri mulai dari jam 5 pagi dan mungkin dapatnya jam 11 siang hanya maksimum

2 boks tisu. Jangan lagi disebut obat, apalagi yang lainnya. Itulah suatu transformasi dari negara kaya ke miskin akibat kesalahan kebijakan dalam mengelola sumber daya alamnya dan juga korupsi.

Nah sekarang, kalau kita bicara di Indonesia, apa masalah kita? Masalah kita bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat, lapangan kerja, sosialnya, kebutuhan pendidikannya, dan juga pertumbuhan ekonominya agar orang bayar pajak, supaya negara bisa jalan. Tetapi sebelum ini, satu pertanyaan, kenapa Indonesia tidak semaju Malaysia, Thailand? Singapura tidak perlu kita hitung karena dia terlalu jauh dari kita.

Ada 3 kebijakan pokok yang menyebabkann kemajuan kita terhalang. Pertama waktu krisis tahun 1998, ongkosnya terlalu tinggi. Ongkosnya bisa menjadi Rp 600 triliun. Tetapi kalau dihitung dengan uang sekarang, termasuk bunganya, saya kira itu sudah hampir Rp 3.000 triliun. Kesalahannya hanya satu, mempercayai, meng-*grantee* semua yang salah. Akhirnya orang membuat pengelembungan atau perampokan dari kebijakan yang dibuat.

Kedua, kita terlalu memboroskan sumber daya alam. Itu sama yang dibuat Venezuela, tetapi kita masih lebih sopan dibanding Venezuela. Kalau Venezuela semua tergantung Chavez. Berapa pun ke Kuba diambil, dikasih *free*, apalagi negara sekitarnya. Kita dalam waktu 10 tahun saja subsidi BBM hampir Rp 1.500 triliun. Yang terbesar, minta maaf, kabinet yang sebelum ini. Waktu zaman saya di kabinet, alhamdulillah naik harga BBM 3 kali dengan keras.

Ketiga, kita keliru dalam menata pemerintahan dari sentralistik ke otonomi, tetapi kita tidak mengelola dengan efisien birokrasi kita. Ongkos birokrasi hari ini 7 kali lipat

dibandingkan 10 tahun lalu. Sekarang biaya pegawai Rp 720 triliun, padahal tahun 2010, itu masih 70-an, tinggi sekali.

Akibat 3 hal ini, terjadilah pergeseran belanja dari dulu waktu zaman Orde Lama 50 persen biaya pembangunan. Sekarang belanja modal dan barang tidak lebih dari 20 persen. Modalnya hanya kurang lebih 9 persen belanja barang, karena belanja modal dan baranglah sebenarnya bisa mendorong pertumbuhan yang punya multiplier efek, yang bisa menumbuhkan.

Sebenarnya melihat keadaan di sekitar kita, kemudian melihat keadaan internal kita, yang terjadi tinggal mengkoreksinya. Semua sudah dikoreksi. Di bank itu sudah terjadi. Tidak ada urusannya dengan pemerintah, mau bangkrut bangkrutlah. Karena itu tidak ada lagi *bailout*. Jadi kalau ada bank rusak, pemegang saham tanggung jawab. Tidak ada urusan lagi dengan Bank Indonesia (BI), tidak ada urusan lagi dengan pemerintah karena itulah yang menyebabkan kita ditipu mentah-mentah, menghabiskan uang. Subsidi, alhamdulillah sekarang sudah kita turunkan.

Listrik saja dulu 100 sekarang saya kira 40-an. BBM karena turunnya harga BBM, otomatis secara alamiah subsidi juga menurun. Jadi ini sudah 2 dihindari. Biaya birokrasi yang agak tinggi, tetapi efeknya yang lainnya utang banyak, bayar cicilan, bayar pokok. Tahun depan kira-kira hampir Rp 500 triliun, 20 persen dari anggaran.

Itu untuk bayar cicilan dan utang. Akibatnya memang APBN yang menjadi Undang-Undang kemarin tidak mampu mendorong ekonomi dari sektor pembangunan yang lebih *accelerated*.

Itu keadaan yang kita hadapi hari ini. Artinya, solusinya semua harus berhemat. Gubernur harus diperintahkan mengurangi biaya yang tertuju kepada lebih banyak pelayanan

internal birokrasi, tetapi hal yang naik subsidi masyarakat, biaya kesehatan bebas, BPJS Kesehatan, pendidikan gratis, dan sebagainya. Itu juga menjadi bagian untuk menutup gap keadilan. Di lain pihak tentu mengurangi anggaran untuk pembangunan, tetapi ini untuk menjaga keadilannya.

Jadi inti dari keadaan ini, kalau Anda bicara dan lihat APBD, lebih banyak anggaran yang harus dikeluarkan tidak ada lagi deskripsi. Pendidikan 20 persen, kesehatan 20 persen, subsidi untuk bayar ganti Rp 300 triliun, bayar utang dan bunga Rp 500 triliun. Jadi ruang fiskal untuk pembangunan itu tidak harus lebih baik, walaupun defisit kita masih di bawah Undang-Undang.

Berbeda dengan negara lain. Malaysia saja defisit 10 persen, tetapi demikian menutup fiskal untuk yang lain. Apa solusi yang akan datang? Ya, investasi dari pihak pengusaha. Hanya itu ruang yang terbuka, yang kita mempunyai suatu kesempatan yang besar. Dengan konsumsi penduduk 250 juta, ini terbuka. Berputarnya kembali lagi.

Karena itu ada 4 hal yang kita sangat serius perbaiki, yang selalu menyebabkan investasi dalam negeri terhalang, mahal. Pertama biaya modal, bunga. Kita bertekad, bunga tahun ini harus tiga digit secara umum akhir bulan. Insya Allah akan tercapai secara umum.

Mungkin satu lubang kecil masih tinggi, tetapi kita *mainstream*-nya itu harus di bawah 10 persen atau di bawah 15 persen. KUR sudah, tetapi itu pakai subsidi sedikit. Bunga harus turun. Efeknya deposito juga harus turun lebih dulu.

Ternyata yang mengangkat deposito itu pemerintah sendiri, lembaga keuangan pemerintah. Akibat persaingan yang terlalu banyak, maka terjadi persaingan. Sekarang kita turunkan dengan kewajiban tidak boleh lebih dari 50 basis poin daripada BI rate yang 7 hari repo. Sekarang 4,5.

Jadi deposito untuk pemerintah tidak boleh lebih dari 5 persen. Akibatnya, bank harus lebih efisien dan pemerintah memelopori. Itu sudah dijalankan. Tidak boleh lagi uang Pemda ditawarkan kiri, kanan, siapa yang kasih bunga tinggi. Tidak boleh lagi dana-dana Taspen, dana BPJS, dana asuransi, macam-macam, lebih dari 5 persen deposito. Itu akan menyebabkan bunga akan turun.

Karena itu untuk mengurangi, target kita tahun depan 7 persen. Kenapa 7 persen, karena disitu bunga umumnya di Thailand. Jadi kita tidak boleh lebih tinggi daripada Thailand. Kita ambil *benchmarking*-nya Thailand saja supaya tingkat persaingan kita di tempat yang sama, di tarif yang sama.

Yang tidak efisien lagi logistik. Karena kita negara kepulauan, ini masalah. Negara kepulauan logistiknya kalau tidak dikelola memang cenderung lebih tinggi dibanding daratan. Karena itulah, kalau yang dikenal tol laut maksudnya adalah kelancaran transportasi. Tentu juga dibarengi dengan pembangunan pelabuhan di mana-mana. Ini memperkuat *dwelling time*. Jadi kadang-kadang orang bertanya, kenapa itu semua *dwelling time*, ini untuk mengefisienkan dan mengadakan negeri ini.

Kalau angkutan laut berjalan sesuai dengan apa yang ada, timbul ketidakadilan yang besar. Barang-barang dari Timur, apakah kopi, coklat, atau beras, itu sampai Jakarta dengan harga pasar Jakarta, dipotong ongkos angkut. Kalau ongkos angkutnya tinggi, makanya yang diterima petani rendah. Tetapi barang-barang kebutuhan hasil industri di Jawa selalu ditambah dengan ongkos angkut ke Timur atau ke Barat. Kalau ongkos angkut mahal, penduduk masyarakat di Timur mendapatkan hasil lebih kecil, membayar kebutuhannya lebih tinggi sehingga *term of trade* dari pertanian tidak adil. Begitu juga investasi-investasi bagaimana terjadi di situ.

Ketiga energi. Energi ini ada 2 hal, energi listrik dan peran energi yang lainnya seperti migas, batu bara, dan sebagainya. Karena itulah, program 35 ribu megawatt untuk menekan semua daerah-daerah tidak memakai diesel. Karena diesel yang selalu mahal ongkosnya kepada PLN dan harus ditambah terus-menerus.

Tentu ada saja halangannya, pasti. Kita akan selalu pebaiki halangan-halangan itu sehingga ini bisa dicapai. Lima tahun lagi bikin 35 ribu mega watt lagi, karena tingkat elektrisitas kita masih rendah dan tingkat utilisasi masih rendah.

Yang terakhir birokrasi. Kalau Anda lihat apakah korupsi, pungli, ini diadakan langkah operasional yang tegas dan kuat. Jadi empat macam yang selama ini menjadi hambatan investasi, biaya kapital jadi turun, energi akan lebih baik listrik dan sebagainya, birokrasinya diharapkan lebih baik, termasuk bagaimana dalam waktu 8 tahun akan berkurang birokrasi kita menjadi hanya kurang lebih 3,5 juta orang. Target kurang sejuta, tetapi secara alamiah, kita tidak akan gegabah.

Itu antara lain bagaimana mengurangi eselonisasi sehingga 1 surat dari dirjen biasanya 4 parafnya. Kita mengurangi 1 paraf saja. Itu antara lain mengurangi tingkat birokrasi. Dengan upaya seperti itu kita harapkan ada perbaikan karena modal kita kan konsumen yang besar. Artinya juga tenaga yang besar, tentu perbaikan produktivitas.

Khusus produktivitas ini, kita akan rombak sistem pertanian. Jadi produktivitas pertanian harus dinaikkan supaya impor beras, gula, dan lainnya tidak berlangsung secara permanen karena itu yang menghalangi penduduk. Siapa pun yang memproduksi beras dengan sistem sekarang, petani beras kita tidak akan pernah makmur. Sejelek apa pun industri itu UMR-nya sekitar Rp 2 juta. Pendapatan petani rata-rata per bulan kalau dia punya satu hektar sawah,

itu hanya Rp 1 juta per bulan. Jadi produktivitasnya harus diperbaiki, industri yang lebih baik.

Dengan kombinasi ini kita ingin lebih banyak harapan untuk hal tersebut. Karena kita berada di posisi tengah, bukan yang rendah, bukan juga yang tinggi. ✱

Disampaikan pada Acara
Tempo economic Briefing
Di Hotel the Westin Jakarta
27 Oktober 2016

Belajar dari Kesalahan

Kita bersyukur telah melalui tahun 2016 dengan baik di tengah dunia yang kurang senyum. Berbeda dengan di Amerika, Eropa, Asia, China, dan sebagainya, apalagi Timur Tengah. Tetapi kita melampauinya dengan pertumbuhan yang lebih baik dari sebelumnya, walaupun sedikit.

Tentu, itu hasil dari prestasi kita semua, khususnya lembaga keuangan karena lembaga keuangan atau sektor keuangan ibarat darah di tubuh kita. Tanpa darah, tubuh tidak akan bisa bergerak dengan baik. Hampir semua penyakit ataupun kesehatan dapat diukur dengan darah. Begitu juga ekonomi suatu bangsa. Maju mundurnya, sebagian besar diukur dari keuangan. OJK tentu dibentuk untuk itu, bagaimana mempersatukan seluruh kekuatan, sektor keuangan dan mengkoordinirnya.

Apabila kita berbicara tentang optimistis, ke depan, tentu kita berbicara lagi tentang berada di mana. Dan apa pengalaman kita pada masa lalu untuk kita perbaiki, dan kita jalankan untuk perkembangan masa depan yang lebih baik. Tentu masa depan banyak hal yang memengaruhinya, masa lalu menjadi bagian pembelajaran.

Kita telah mengalami pada hampir 20 tahun lalu, krisis keuangan yang dahsyat, dimulai dari krisis perbankan, krisis moneter, kemudian menyangkut seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa, merusak seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa. Itu artinya perbankan atau lembaga keuangan yang lain, yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan kerusakan seluruh sendi-sendi bangsa ini.

Bagaimana kita mengalami yang lalu itu, masih berakibat sampai sekarang. Karena itu, kita harus menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya masalah-masalah di sistem keuangan kita yang berakibat jangka panjang dan tentunya juga mempunyai efek yang luar biasa dalam kehidupan nasional kita.

Itu pelajaran yang pertama, kehati-hatian, pengelolaan yang baik, dan tidak memberikan tanggung jawab kepada orang lain.

Artinya, kita harus memperlihatkan kemandirian perbankan, kemandirian lembaga keuangan secara lebih baik. Bahwa OJK membantu, OJK memfasilitasi, ya. Tetapi tidak dalam tanggung jawab negara. Apa yang terjadi apabila ada masalah-masalah di sistem keuangan seperti itu? Pemegang sahamlah yang bertanggung jawab, bail in, bukan bail out.

Kita sudah merasakan getirnya apa yang telah kita lakukan pada masa lalu akibat ketidakhati-hatian. Itu menjadi pengalaman pertama dan menjadi solusi untuk jangka panjang. Hampir semua negara juga memperlakukan seperti itu.

Pelajaran berikutnya, sektor keuangan sangat rentan kepada pengaruh luar. Pada 1998, mulai dari Thailand, Korea, dan sebagainya. Jadi sangat global. Pengaruh global yang tidak bisa dihindari. Sama dengan 1998, faktor pengaruh di Amerika dan di tempat lain. Sekarang tentu pengaruhnya

tetap, kelemahan di tempat lain, di Amerika, di Eropa, di China, kemudian menjadi juga akibat kelemahan kita.

Artinya, kita tidak bisa terhindar dari pengaruh-pengaruh itu. Tetapi sama dengan diri kita, memang orang bisa kena virus, tetapi kekuatan badanlah, kekuatan jiwalah yang dapat menghindari. Apabila kita sehat, apabila kita mempunyai daya tangkal, kita dapat terhindar seluruh kemungkinan yang terjadi darimana negara.

Apabila kita ingin optimistis, kekuatan dari dalam negeri harus kita perkuat. Kita sudah belajar dari pengalaman lalu. Karena itulah, perbankan kita dalam situasi ini tentu masih perlu banyak perbaikan.

Kita tidak maju dengan bank yang banyak. Pada saat kita mau, sistem liberalisme, liberalisasi perbankan, kita beranggapan makin banyak bank, kita makmur. Ternyata teori itu keliru. Makin banyak bank makin menyusahkan kita.

Makin bersaing dan juga makin terlibat kepada luxury pada masa lalu itu. Karena itulah belajar dari situ, yang baik adalah banyak bank yang baik dan sehat. Bukan jumlahnya yang kita butuhkan, tetapi sehat dan kuatnya yang kita butuhkan di sistem perbankan nasional kita. Begitu juga lembaga keuangan yang lain.

Kita juga mengharapkan pasar modal menjadi kuat. Tetapi selalu saya katakan kepada Ketua OJK, bahwa antara perbankan dengan pasar modal itu bisa saling bersaing atau saling membantu. Pasar modal tidak mungkin berkembang dengan baik apabila bunga tinggi karena orang akan lebih tertarik ke deposito daripada membeli saham.

Selalu saya katakan teori itu. Karena itulah solusi yang terbaik bagaimana kita mempunyai tingkat bunga yang efisien, kurang lebihnya sama dengan negara-negara di sekitar kita sehingga orang akan tertarik berinvestasi di pasar modal juga.

Karena itulah, kita tidak bisa menghindari pasar modal kita lebih dari 60 persen dikuasai asing. Artinya apa? Sehebat-hebatnya, apabila sehat emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan dalam negeri, devidennya lari keluar apabila pasar modal kita mayoritas dari luar.

Itu akibat karena kita tidak mungkin bersaing dengan tingkat bunga yang ada dalam negeri. Karena sudah di bawah satu kendali, tentu antara perbankan dan pasar modal juga harus mempunyai sinkron dan sinergi yang baik untuk menghindari saling membunuh atau saling bersaing yang tidak mendukung.

Tentang asuransi, tentu kita gembira, kita menghargai karena kita negara yang terbuka untuk menerima layanan asuransi yang besar dari luar dengan baik karena memang itu kebutuhan masyarakat. Tapi kita menyayangkan juga, dana masyarakat tidak tersalur secara nasional dengan baik.

Ini memerlukan upaya yang keras dari kita semua. Kita bukan sok nasionalis, tetapi segala upaya kita, haruslah menguntungkan secara nasional, apa pun upaya kita.

Karena itulah, dalam berbagai kesempatan, saya sampaikan, apabila suatu situasi tidak menolong atau mengalami kesulitan, kenapa Indonesia bisa lebih *survive* dibanding banyak negara? Karena kita mempunyai kekuatan dalam yang baik, lebih baik daripada yang lain.

Apa kekuatan dalam Indonesia? Sederhana saja. Kita mempunyai penduduk yang besar, yang merupakan sumber daya dan sekaligus konsumen yang baik. Kita mempunyai golongan menengah, kita mempunyai sumber alam yang lebih baik daripada banyak negara.

Tetapi pertanyaan, mengapa kita tidak semaju daripada banyak negara di sekitar kita? Kita kalah maju dengan Malaysia, kita masih di bawah Thailand, apalagi Singapura.

Karena itulah, kita mempunyai upaya ke depan yang harus lebih baik daripada sebelumnya.

Untuk meningkatkan kekuatan dalam negeri ini, kita harus mempunyai inovasi dan usaha-usaha yang baik. Kita masih banyak mengimpor. Artinya, pasar kita terbuka dalam negeri untuk produksi-produksi yang ada. Kita mempunyai kemampuan-kemampuan itu. Karena itulah, peranan lembaga keuangan, peranan perbankan, haruslah kembali bagaimana memberikan kekuatan ini terjelma.

Itulah gunanya perbankan, bagaimana menjadi agen pembangunan yang selalu kita sebut dengan mudah. Bagaimana memberikan dana kepada pembangunan kita secara keseluruhan dengan baik. Tentu di samping bagaimana memberikan peranan, juga menjadi penyimpan kekayaan bangsa ini.

Kita baru saja melewati program *tax amnesty* tahap pertama dan kedua. Antara berhasil pada awalnya, kemudian agak sedikit menurun pada yang kedua. Artinya, kita mempunyai banyak kesalahan masa lalu yang harus kita perbaiki. Sistem perpajakan, sistem devisa yang menyebabkan kekayaan-kekayaan bisa bebas bayar pajak sekaligus lari keluar.

Yang kedua, kenapa amnesti pajak dibutuhkan. *Tax amnesty* artinya mengampuni dosa. Kita melihat itu hal positif untuk mengumpulkan dana untuk pembangunan. Itu yang utama. Walaupun kita mengetahui banyak perubahan, tetapi apabila kita melihat, inilah kondisi hari ini dan masa lalu. ✱

Disampaikan pada acara
Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2017
"menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan membangun optimisme untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat"
Di hotel Fairmont senayan jakarta
13 januari 2017

Makna Independensi BI

Bagi pemerintah, Bank Indonesia merupakan mitra untuk menjalankan kegiatan nasional. Khususnya di bidang ekonomi, menuju masyarakat adil dan makmur.

Karena Bank Indonesia bagian dari negara yang dikepalai oleh seorang Presiden, maka hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah adalah independen dengan musyawarah.

Hubungan yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Nomor 3 Tahun 2004 (hasil revisi) khususnya Pasal 7 yang menjelaskan; dalam pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia, kebijakan moneter harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Sedangkan pada Pasal 54 Ayat 1 ditegaskan bahwa pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam Sidang Kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas BI atau masalah lain yang termasuk kewenangan BI.

Jadi hubungan BI dengan pemerintah terjalin dalam ikatan formal, suatu hubungan yang luar biasa, bahwa yang satu wajib mendengarkan pemerintah, sedangkan pemerintah wajib mengundang BI pada setiap sidang kabinet.

Bagaimana menyeimbangkan keduanya; stabilitas mata uang rupiah dan inflasi pada saat yang sama meningkatkan pertumbuhan dan memperbesar lapangan kerja. Inilah yang menuntut pemerintah dan BI harus selalu berkoordinasi, agar tujuan tersebut dapat tercapai.

Pemerintah dan BI, tidak bisa melaksanakan kebijakannya secara sepihak atau independen tanpa musyawarah, karena terikat Undang-undang dimana Bank Indonesia dituntut mendengarkan pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya. Sebaliknya pemerintah harus mendengarkan Bank Indonesia dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah.

Di tengah perlambatan ekonomi, penting mengetahui kekuatan dan kelemahan faktual Indonesia. Kekuatan Indonesia adalah pasar dalam negerinya yang besar dan konsumtif, tetapi daya beli rendah karena pendapatan kecil. Artinya daya beli dengan produktivitas, serta daya saing harus dipacu.

Adapun titik lemah Indonesia bersaing dengan negara lain, yaitu pada sektor keuangan, logistik, infrastruktur, serta birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Namun kita fokus ke sektor keuangan, kelemahan utama Indonesia di sektor ini karena tingkat suku bunganya yang tertinggi dibanding negara-negara di sekelilingnya.

Suku bunga perbankan di Indonesia berkisar pada angka 10 hingga 12 persen, sedangkan di Malaysia hanya 5 persen, apalagi dengan di China. Guna memperkuat daya saing Indonesia, berarti persoalan sektor keuangan ini harus dirancang lebih kompetitif dengan Negara-negara tetangganya.

Kelemahan lain adalah, pembiayaan pembangunan ekonomi Indonesia 90 persen mengandalkan dana perbankan dan hanya 10 persen dari saham, akibat suku bunga yang tinggi. Suku bunga deposito di Indonesia mencapai 8 hingga

10 persen, membuat angka ini jauh lebih menarik dan memberi kepastian keuntungan dari pada membeli saham dari lantai bursa yang tidak memberi jaminan besaran keuntungan.

Bandingkan dengan Malaysia dan Singapura, bunga depositonya jauh lebih rendah hanya berkisar empat hingga lima persen. Rendahnya suku bunga di negeri jiran tersebut, membuat pelaku bisnis di sana lebih tertarik menginvestasikan dananya di lantai bursa. Karena itu, harus ada pilihan, sebab tidak mungkin berharap perdagangan saham menjadi besar pada saat bunga deposito masih tinggi.

Penurunan suku bunga saat ini menjadi perhatian pemerintah, khususnya suku bunga kredit UKM dan KUR. Selain bertujuan membuka akses bagi pengusaha kecil dan menengah menikmati modal perbankan yang terjangkau, juga untuk menciptakan keadilan, mengingat selama ini terjadi perlakuan tidak adil antara pengusaha kecil dengan korporasi.

Perbankan memberikan kelonggaran bunga pinjaman 10 sampai 12 persen untuk korporasi, sedangkan kepada pengusaha kecil dan menengah dibebankan bunga pinjaman hampir dua kali lipat sebesar 22 persen.

Bagi pemerintah, ketidakadilan ini harus diakhiri, sehingga berapa pun biayanya suku bunga untuk usaha kecil dan menengah tersebut, sedapat mungkin diturunkan dari 22 persen menjadi 9 persen pada tahun 2016.

Agar ketimpangan ini tidak terjadi lagi, BI serta OJK perlu mengontrolnya, jangan membiarkan ketidakadilan itu karena rakyat tidak akan marah akibat dari pertumbuhan ekonomi yang rendah, tetapi ketidak-adilan dapat memicu kemarahan rakyat.

Pada akhirnya, yang harus ditekankan apabila kita ingin melakukan perbaikan dengan potensi yang ada, maka

jalannya melalui pertumbuhan dengan investasi. Karena dengan kebijakan moneter saja, tidak menjamin terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Di mana pun di dunia ini, pertumbuhan ekonomi diraih dengan produktivitas. Adapun kebijakan moneter, itulah yang harus mendukung produktivitas, karena tujuan kita adalah produktivitas. ✱

Disampaikan pada acara
Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2015
Di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta
24 November 2015

Mengejar Pertumbuhan Ekonomi

Setiap hari kita memperhatikan berapa pertumbuhan ekonomi kita. Apakah sudah mencapai 7 persen? Semua negara memperhitungkan itu, dengan mengaitkan pada tingkat lapangan kerja, pengangguran, dan kemiskinan. Hal inilah yang menjadi tujuan, dari semua sistem ekonomi yang ada, termasuk perbankan dan lembaga keuangan yang lainnya.

Dunia semakin memperhatikan dua hal ini setelah melihat perkembangan bahwa banyak ketimpangan dan kesenjangan terjadi termasuk di Indonesia. Kesenjangan ini, haruslah diatasi. Antara lain dengan sistem keuangan yang lebih baik, dan lebih merata atau yang kita sebut inklusif.

Inklusif itu lawan dari eksklusif, yang artinya kekhususan atau terbatas. Inklusif artinya tidak mempunyai batas khusus dan harus mencapai level yang di bawah, yang lebih miskin, yang lebih tidak mampu dan sebagainya.

Apalagi setelah krisis 1998 di dunia ini, yang kemudian diikuti oleh banyak sekali protes tentang kelompok satu persen yang menguasai aset seluruh bangsa lebih besar dibandingkan 99 persen.

Jadi gerakan 99 persen, antara lain menghasilkan kesadaran dunia akan perlunya suatu gerakan keuangan,

lembaga keuangan inklusif untuk mencapai pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan di dunia ini.

Kita merilis survei Indonesia, juga harus seperti itu, satu persen menguasai 50 persen aset bangsa. Jadi 90 persen berada di tingkat 50 persen lagi. Artinya adalah dibutuhkan banyak upaya pemerataan di bidang ekonomi.

Salah satunya adalah bagaimana kita mensinergikan perekonomian, industri, perdagangan dan juga lembaga keuangan.

Kita menyadari lembaga keuangan adalah motor gerakan ekonomi yang lebih baik. Maka lembaga keuangan dan juga lembaga ekonomi lainnya, haruslah berdasarkan pemerataan, atau yang kita sebut inklusif, di samping gerakan mikro.

Di Indonesia hal ini bukanlah sesuatu yang baru. Kita sudah pernah mempunyai suatu lembaga keuangan mikro. Kita punya Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja permanen (KMKP), kita punya Kredit Canda Kulak (KCK) pada era Orde Baru. Kita punya Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes) yang memberikan kredit-kredit pedesaan yang lebih mudah, kemudian ada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tumbuh di mana-mana, Ada Bank Pasar yang tumbuh.

Namun ada masalah yang timbul karena kita tidak mempunyai sistem yang baik, yakni suku bunga yang tinggi.

Akibatnya, justru kembali menjadikan ketidakadilan baru, pengusaha besar mendapatkan bunga yang rendah, koperasi, usaha kecil justru mendapat kredit yang kadang-kadang dua kali lipat mahalnya dibanding dengan kredit yang besar. Ini menimbulkan ketidakadilan baru.

Selalu dasar berpikirnya keliru. Dasar berpikirnya selalu mengambil dasar rentenir. Maka dari itu, pengusaha yang tidak mendapat akses kredit akan ke rentenir dengan suku bunga pinjaman 30 persen, bahkan 40 persen.

Seharusnya bunga kredit yang diberikan kepada UKM kita hanya di kisaran 10 persen per tahun, Dengan demikian mereka masih dapat membeli kios. Namun karena bunga yang harus dibayar sangat mahal, mereka tidak akan pernah punya kios. Mereka hanya bisa berdagang, tetapi dia tidak punya aset.

Di sinilah peran pemerintah untuk merevolusi sistem tersebut. Misalnya mengubah sistem kredit ini menjadi jauh lebih adil, bahwa justru yang lemah harus mendapatkan layanan yang lebih baik daripada yang kuat.

Pelaku UKM harus mendapat bunga yang lebih efisien dan rendah dibanding yang kuat. Yang kuat tidak perlu dibantu, tetapi yang lemah yang harus dibantu dengan subsidi. Itulah kebijakan yang harus kita ambil, dan segera harus kita ambil saat ini.

Dalam situasi yang tidak adil ini, maka ada dua langkah penting yang harus dibuat. Kesenjangan yang besar di dunia ini, juga terjadi di negeri ini.

Maka yang terjadi adalah yang besar harus membayar pajak dengan baik, yang menengah harus didorong menjadi lebih tinggi, yang di bawah harus dibantu. Itulah prinsip pokok dalam sistem keuangan kebijakan negara dan sistem keuangan yang kita punyai.

Sekali lagi, negara mempunyai fungsi memajukan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. *

Disampaikan Saat Meresmikan
Peluncuran Pusat Pengembangan keuangan Mikro dan Inklusi OJK (OJK PROKSI) serta
Pembukaan Seminar Internasional "bringing indonesia's microfinance and finance
inclusion to the world"
Hotel Grand Sahid Jakarta 15 maret 2016

Investasi Infrastruktur

Ukuran baik-buruknya sistem transportasi, setidaknya tidaknya ada dua, kelancaran dan keamanannya. Kelancarannya dapat dihitung kalau di kota, berapa rata-rata kecepatan yang bisa ditempuh, berapa kilometer. Dulu bisa 30 km per jam, sekarang sebagian besar kota di bawah 20 km per jam. Malah, barangkali kalau di Jakarta sedang macet, lebih lambat lagi.

Ukuran kedua, tingkat kecelakaan. Tahun lalu terjadi kenaikan tingkat kecelakaan yang dicatat Kepolisian tahun 2016, hampir 100.000. Yang meninggal di jalan raya lebih 23.000 jiwa.

Ini meningkat lebih dari 23.000, meningkat hampir 1.000 orang dibanding tahun lalu. Artinya, masih banyak hal yang harus kita perbaiki dalam sistem transportasi.

Tentu, ini bukan hal yang mudah karena setidaknya-tidaknya ada delapan faktor yang memengaruhi sistem transportasi, baik atau yang kurang baik. Pertama jumlah penduduk. Ini naik terus, berarti kebutuhannya naik terus. Kedua jumlah kendaraan, juga naik terus. Mobil naik sejuta per tahun, sepeda motor kira-kira naik delapan juta. Itu lebih tinggi daripada jumlah penduduk.

Faktor ketiga, pertumbuhan ekonomi. Orang beli mobil kalau pertumbuhannya lebih baik. Apabila pertumbuhan ekonomi naik, arus barang juga bertambah. Itu tentu sangat dipengaruhi oleh infrastrukturnya, panjang jalan, kualitas jalan.

Kalau jumlah penduduk naik dan kendaraan naik tapi panjang jalan tidak ditambah, pasti akan terjadi kemacetan yang panjang, termasuk kualitasnya. Kalau jalan bolong-bolong pasti memperlambat. Potensi tabrakan lebih tinggi. Jadi ini semua berpengaruh.

Kelima, berapa besar angkutan umum yang ada. Ini sangat penting. Makin besar kapasitas angkutan umum, semakin baik. Jadi angkutan umum di daerah yang kecil-kecil, sebenarnya justru kadang-kadang memperpanjang masalah.

Angkutan umum kalau semuanya kayak opelet, kecil-kecil, ya akan menambah kemacetan. Kalau *rail* pasti lebih bagus lagi. Ini hubungannya dengan investasi di bidang angkutan oleh swasta.

Yang berikutnya, *traffic management*. Ini kadang-kadang sepele, tetapi sangat memengaruhi. Coba lihat pembangunan MRT di Jalan Thamrin-Sudirman, tidak menyebabkan kemacetan. Itu manajemen trafiknya bagus. Dihitung di mana duluan dikerjakan, mana belakangan, di mana lewatnya sehingga tidak ada kemacetan walaupun jalan dipersempit.

Itu dikerjakan oleh orang Jepang. Kalau kita yang membikin proyek itu, barangkali sudah penuh pasir, penuh lumpur sebelah situ, orang terpeleset. Ini bersih sama sekali, tidak macet, tidak kotor, padahal kerja tanah.

Coba bandingkan kalau orang Indonesia yang kerja proyek. Kalau tidak berlumpur bukan proyek namanya. Ini penting kita belajar dari hal tersebut, sehingga kita pikir nanti Jalan Thamrin pasti macet, ternyata tidak. Itu karena *traffic management* yang bagus dan pengelolaan yang bagus.

Berikutnya, disiplin masyarakat. Ini harus diajarkan. Kalau disiplin masyarakat, lampu merahpun jalan, ya pasti kecelakaan bisa timbul. Atau tidak memperhatikan rambu-rambu. Juga disiplin petugas. Ini tentu sangat memengaruhi terakhir sumber daya manusia.

Jadi, baik-buruknya transportasi, banyak faktornya. Faktor itu berpengaruh satu sama lain. Ujungnya seperti itu, berapa kecepatan per km rata-rata, dan berapa kecelakaan yang terjadi.

Karena penduduk dan kendaraan bertambah, sedangkan tidak mudah menambah jalan di kota. Solusinya angkutan umum yang kapasitas besar dan cepat. Ujungnya haruslah di atas *rail* atau bus besar.

Tidak ada lagi kota di Indonesia yang tidak macet. Kemacetan hubungannya dengan penduduk, jumlah jalan, dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita tinggi. Tidak ada negara miskin yang macet. Jadi salah satu tanda kemakmuran, juga kemacetan, di tengah kemiskinan infrastruktur. Orangnya makmur, infrastrukturnya tidak maju, itulah kemacetan namanya.

Kalau kita miskin sekitar tahun 50-an, 60-an, kurang mobil, mobil hanya berapa. Itu pasti tidak menimbulkan kemacetan. Jakarta tahun 70-an masih lancar, masih rata-rata 30 km per jam di dalam kota.

Dulu di Jakarta tahun 70-an, 80-an, kita bisa punya satu mobil cukup, antar anak ke sekolah setengah jam kembali. Antar bapaknya ke kantor, sampai di kantor, mungkin sekali-sekali ibu pakai pergi belanja atau ke mana. Mobil bisa berfungsi sekaligus tiga.

Sekarang, karena macet, anak sekolah mobilnya dua jam baru kembali. Bapaknya bagaimana ke kantor? Terpaksa tambah lagi mobil untuk anaknya. Ibunya pergi arisan, mobil belum kembali, tambah lagi mobil.

Jadi di Jakarta ini orang golongan menengah yang pertama dibesarkan garasi, kan. Saya kira di daerah juga hampir semua bapak-bapak rumahnya punya mobil lebih dari satu akibat kemacetan dan banyak urusan. Coba kalau tidak macet, kayak tahun 70-an, 80-an, satu mobil cukup.

Jadi kita harus bekerja dengan betul, dengan konsep karena yang dua hal tidak bisa dipotong. Penduduk tidak bisa, pertumbuhan ekonomi mutlak. Jumlah kendaraan naik, infrastruktur dan manajemen yang bisa mengatasi. Hanya infrastruktur dan manajemen kreatif, termasuk investasi di bidang infrastuktur transportasi.

Karena itulah, pemerintah mendorong membangun *Light Train* atau *Monorail*, mulai di Jakarta dan Palembang. Sekarang sudah ada konsep baru yang dibikin. Kita menyadari, kota atau perusahaan, sulit sekali untuk menginvestasi. Di lain pihak mahal, masyarakat ingin tarif murah. Ini yang mustahil. Proyek tidak jadi-jadi, sehingga harus ada investasi pemerintah. Di Jakarta, itu investasi pemerintah.

Bagi daerah, tentu masih telat. Ada skala, pemerintah menanggung setengah atau sekian persen. Kalau ada swasta mau, pemerintah membantu modal berapa bagian, katakanlah setengah, supaya tarifnya tetap dapat dijangkau oleh masyarakat.

Itulah yang kita hadapi. Memang banyak dilema tetapi harus. Kalau tidak, risikonya kecepatan kendaraan menurun, kecelakaan bertambah. Coba kita hitung berapa kerugian akibat gangguan kecepatan dan kecelakaan?

Kalau kecepatannya di kota hanya 20 km per jam, orang terpaksa di jalan rata-rata sehari satu jam untuk dalam kota, satu jam pergi ke kantor, satu jam pulang bertambah. Bertambah dua kali.

Berapa BBM yang habis, berapa jam kerja yang habis? Berapa pengausan mobil yang habis? Itu triliunan ongkosnya di satu kota saja per tahun akibat kemacetan.

Bagi kota-kota yang belum macet, tentu harus disiapkan fasilitas. Tetapi penduduk bertambah setiap saat. Karena itulah investasi infrastruktur tanpa henti, tidak pernah berhenti.

Angkutan, hak otonomi daerah. Tentu yang harus mengambil peran pemerintah daerah. Pemerintah pusat pasti mendukung, baik infrastruktur jalan, juga penyediaan manajemen atau apapun yang dibutuhkan secara nasional. *

Disampaikan pada acara
Penyerahan Penghargaan Bidang Perhubungan Darat Tahun 2016
di Istana Wakil Presiden Jakarta
31 Januari 2017

BUMN

Siap Bersaing

GBHN selalu berbunyi tiga pilar ekonomi nasional yaitu, swasta, BUMN, dan koperasi. Atau bisa saja koperasi, BUMN, dan swasta. Jadi artinya, memang sampai sekarang juga kita harus memahami bahwa pilar atau bagian penting dari ekonomi kita, bagaimana membutuhkan keberintisan, bagaimana membutuhkan kepeloporan, bagaimana investasi yang besar, bagaimana efisiensi, bagaimana mengembangkan ekonomi yang cepat.

Tentu dibutuhkan perusahaan yang besar sebagai penggerak dari itu. BUMN mestinya masuk dalam bagian yang besar itu. Itulah konsep awal dari pemikiran-pemikiran bagaimana BUMN tetap dibutuhkan dan dipertahankan dalam kehidupan ekonomi kita.

Kita mengetahui sejarah BUMN tumbuhnya terdiri atas 3 sumber. Tadi dikatakan BUMN bersumber dari nasionalisasi, sebenarnya tidak. Dimulai justru dari keinginan kita membuat kepemilikan dalam Negara. Karena itu, ada beberapa BUMN besar yang dibuat sebelum nasionalisasi, seperti BNI, Pusri, Gresik.

Itu BUMN awal yang 100 persen, didirikan oleh pemerintah. Tetapi tahun 1957, nasionalisasi yang besar-besaran setelah dekrit, maka timbullah hampir semua perusahaan-

perusahaan, khususnya *the big nine*. Dan perusahaan-perusahaan lainnya menjadi bagian dari BUMN.

Tentu, akibatnya timbullah inefisiensi di mana-mana karena perwira militer, contohnya yang tidak mengerti sistem tiba-tiba jadi dirut. Pegawai-pegawai tiba-tiba jadi pemimpin perusahaan. Semuanya dimulai dengan uji coba. Jadi ongkos belajarnya BUMN itu sudah sangat banyak, sudah tinggi sekali karena dilakukan secara tiba-tiba. Nasionalisasi besar-besaran tahun 1957 sampai tahun 1960 itu, timbullah BUMN sampai sekarang. Dari kedua macam itu, timbullah yang ketiga, anak dan cucu dari dua perusahaan yang didirikan oleh negara awalnya. Kemudian juga nasionalisasi timbullah anak pinak dari perusahaan ini.

Harapan kita, seperti niat atau rencana pemerintah sebagai pilar ekonomi bangsa, BUMN harus berperan dalam ekonomi yang luas. Kita memahami ekonomi bangsa ini mempunyai juga masa-masa yang berbeda-beda.

Ada masa monopoli sampai tahun 60-an, di atas tahun tahun 60-an. Ada masa, sekarang ini yang semi monopoli, ada masa konglomerasi, yang akhir-akhir tahun 90-an, kemudian masa keterbukaan. Karena itu persaingan sekarang seperti itulah yang terjadi.

Pada hal-hal khusus seperti BUMN, disuntik agar performanya makin tinggi pada masa itu dibolehkan. Tetapi dewasa ini, waktunya untuk BUMN memberikan kontribusi yang lebih besar lagi. Kalau pajak turun, kontribusi BUMN juga turun. Ekonomi kita harus kita balik kembali dengan upaya modal dalam negeri.

Ekonomi nasional mempunyai modal yang besar, orang, dan pasar yang besar. Negara lain boleh punya modal, tetapi pasarnya kecil. Atau ada yang pasar juga besar tetapi *skill*-nya kurang atau tenaga kerjanya kurang. Kita punya segala-galanya. Yang kita butuhkan kemauan dan efisiensi nasional.

Artinya perusahaan apa pun yang ingin berkembang dengan baik harus siap dengan persaingan. Persaingan harus siap dengan efisiensi, karena inti dari persaingan ialah siapa yang paling efisien. Tentu tetap ada saja bagian-bagian memberikan monopoli, khususnya untuk *public service*, PLN, PT. POS. Kita punya perusahaan-perusahaan lain yang monopolistik, tetapi tentu tetap dibutuhkan efisiensi sehingga berjalan sebagaimana adanya.

Sementara keterbukaan itu, untuk persaingan luar dan dalam. Kalau zaman dulu persaingan lebih banyak ke dalam, sekarang persaingan antarperusahaan juga terjadi. Contohnya bersaing dengan perusahaan swasta, antara BUMN dengan BUMN juga terjadi persaingan, antara BUMN Indonesia dengan BUMN Singapura, Malaysia. Artinya persaingan itu dengan segala level terjadi di bangsa kita. Jadi sekali lagi, pemenangnya adalah efisiensi.

Efisiensi tentu juga didasari oleh profesionalisme. Karena itulah yang hadir di sini tentu yang terpilih, yang siap bertarung di medan ekonomi nasional, regional dan internasional. Siap bersaing dengan dasar efisiensi, dengan dasar profesionalisme, dengan pasar.

Kalau tahun-tahun terakhir ini, pemerintah masih sanggup memberikan, mendorong kemajuan ekonomi sekaligus mendorong kemajuan BUMN, tahun-tahun depan masanya justru BUMN harus membayar pajak dan terus lebih banyak lagi kepada ekonomi nasional. Apabila tidak, maka justru pasar semakin sempit, efisiensi semakin lambat, dan kita semua akan menghadapi masalah ekonomi nasional. Di mana pun, terjadi. Di Asia dan di ekonomi kita.

Kita sudah merdeka 71 tahun, masih banyak hal-hal dasar yang kita belum penuhi. Itu kewajiban *agent of development*. Kalau BUMN tentu bagian dari pembangunan nasional, bagian dari kepeloporan nasional. Karena itu, ada prinsip-

prinsip pokok. Kalau kepeloporan itu yang lain sudah maju, maka kepeloporannya harus ke tempat lain lagi. Namun tetap dibutuhkan di tingkat persaingan-persaingan yang ada.

LKBN Antara tentu harus bersaing, berapa banyak kita baca Antara dibanding dengan Kompas, atau detik news, dan sebagainya. Tentu dibutuhkan kecepatan, dibutuhkan hal-hal yang lebih profesional dibanding dulu. Kalau dulu kita dipaksa membaca, bukan terpaksa membaca Antara karena tidak ada sumber lain.

Sekarang setiap detik ada sumber lain. Karena itulah tingkat persaingan makin baik. Kita tidak bisa dipaksa-paksa lagi kayak zaman dulu, membaca, melihat, menonton TVRI. Ada sumber lain.

Jadi kemajuan itu, didukung oleh suatu tingkat efisiensi. Kalau dulu selalu dianggap swasta lebih efisien daripada BUMN, terbukti saat krisis 1998 ternyata tidak benar. Lebih banyak perusahaan swasta yang jatuh dibanding BUMN. Artinya tergantung siapa yang menjalankan perusahaan itu, bukan apa perusahaannya, cara manajerialnya, dan sebagainya. Karena itu terjadi keterbukaan.

Karena itulah, acara ini tentu ingin diperlihatkan sampai sejauh mana kita mencapai tujuan awal dari ekonomi nasional. Seperti saya katakan tadi, kita sudah 71 tahun merdeka, tapi masih banyak hutang-hutang dasar yang belum kita selesaikan.

Kalau dulu pemimpin kita mengatakan kebutuhan dasar kita sandang, pangan, papan. Baru sandang yang kita bisa selesaikan. Pangan belum. Kita masih berkelahi soal daging, masih berkelahi soal harga beras, masih berkelahi soal harga jagung, padahal banyak BUMN yang bergerak di bidang pertanian.

Contohnya di bidang bibit. Gula kita masih impor padahal dulu PTPN begitu banyak tetapi pabriknya makin

tua rendemennya makin turun. Kita mau mengharap apa dari persaingan dalam tahap-tahap seperti itu. Maka dari itu, kita kaji. Dan kalau perlu, total membikin suatu perubahan yang besar. Itulah dasar-dasar ekonomi besar, tantangan-tantangan ekonomi kita makin sangat besar. Tantangan ke dalam dan tantangan keluar.

Efisiensi nasional adalah fondasi dari profesionalisme. Karena itulah, diharapkan direksi-direksi BUMN mempunyai profesionalisme. Tetapi profesionalisme juga mempunyai dinamika yang tajam. Informasi lebih cepat. Perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai sistem informasi yang betul, akan ketinggalan. Punya produk tidak sesuai pasar, akan ketinggalan.

Jadi harapan kita, BUMN bukan yang penting hanya jumlahnya, tetapi apa yang dibuat untuk ekonomi nasional. Kita butuh keterbukaan, kita butuh persaingan, kita butuh ekspor. Jangan kita punya lahan luas, tetapi rendemen lebih besar daripada swasta, ekspor swasta lebih besar daripada BUMN.

Tentu butuh perbandingan, bukan hanya luasnya yang dipertaruhkan, tetapi berapa eksponnya, berapa *renew*-nya, berapa labanya, dan sebagainya. Tentu dibutuhkan pembandingan-pembandingan yang seperti itu. *

Disampaikan Pada Acara Pembukaan Indonesia Business And Development EXPO (IBDEXPO) 2016
Di Plenary Hall Jakarta convention center senayan
Jakarta 8 september 2016

Negara Moderat Pajak

Pajak merupakan sesuatu yang sangat penting untuk negara. Walaupun sebagian besar orang menghindari dan tidak suka pajak. Kondisi pajak (*tax ratio*) kita masih 11 persen. Penerimaan kita tidak sebesar dengan negara-negara lain. Tarifnya juga menengah, tidak serendah Singapura, dan tidak setinggi negara-negara Skandinavia atau Amerika Serikat.

Pepatah Romawi Kuno mengatakan, suatu negara untuk kuat butuh tentara. Tentara yang kuat butuh kuda yang baik, yang banyak. Untuk membiayai serdadu dan kuda harus ada yang bayar, dan yang bayar itu lewat pajak. Itulah pentingnya pajak, agar negara kuat. Sekarang tentu pajak bukan hanya untuk bayar kuda dan tentara, tapi bayar apa saja, gaji pegawai, bayar jalan, bayar pelabuhan, infrastruktur, dan sebagainya, sehingga tentu kita melihat bagaimana pentingnya pajak ini.

Akan tetapi, ada juga negara yang tidak mementingkan pajak, jika negara tersebut sangat kaya, seperti Arab Saudi, dan Kuwait. Akan tetapi, biasanya mereka akan ingat pajak jika mereka mengalami kesusahan. Sekarang negara seperti Arab Saudi, Kuwait dan sebagainya, baru melihat pentingnya pajak. Hal ini terjadi tidak terlepas dari turunnya harga

minyak dunia. Karena selama ini mereka hanya mengandalkan pendapatan negaranya dari minyak.

Karena kita berbicara *tax investment* dan bisnis, berarti membicarakan keseimbangan. Pajak yang terlampau tinggi akan merusak suasana investasi. Tetapi, di sisi lain, untuk menarik investasi membutuhkan perbaikan infrastruktur, perbaikan iklim usaha, dan perbaikan macam-macam. Semua itu butuh dana, berarti butuh pajak. Begitu juga dengan bisnis, kalau ketinggian pajak, bisnis larinya ke tempat yang rendah. Tapi jika pajak nya rendah maka fasilitas pun tidak ada.

Jadi pada dasarnya, formula pajak adalah bagaimana membuat keseimbangan. Keseimbangan antara penerimaan dan investasi. Keseimbangan untuk menjaga keadilan antara orang mampu dan orang yang kurang mampu. Keseimbangan untuk menjaga daerah yang mampu dan daerah tidak mampu.

Seiring perkembangan, banyak perubahan-perubahan, khususnya kemajuan teknologi. Begitu juga tingkat kesejahteraan masyarakat. Negara-negara makin maju, makin sehat orang, makin lama hidupnya. Berarti negara makin banyak menanggung sosialnya, makin sedikit orang bekerja, karena itu maka terkadang butuh pajak yang tinggi, menanggung orang yang tidak bekerja. Semua itu membutuhkan keseimbangan.

Seperti yang saya katakan kita tidak butuh keseimbangan antara yang mampu dan tidak mampu, sehingga timbul pajak progresif yang kemudian orang rata-rata saja. Ada juga keseimbangan daerah sehingga perlu perbedaan-perbedaan dan juga bagaimana menjadikan pajak bukan hanya menjadi penghalang tapi menjadi insentif, *tax holiday*, dengan penempatan yang tepat.

Karena jika tidak tepat maka akan terjadi ketidakadilan. Misal, kenapa saya berusaha kena pajak? kenapa si B yang berusaha di tempat lain tidak kena? Bagaimana *labour*

intensive kita ringankan pajaknya dibandingkan *capital intensive*? Itu semua juga menjadi bagian daripada pemikiran.

Karena itulah maka salah satu masalah yang kita ingin atasi di Indonesia adalah bagaimana peningkatan informasi dan data pembayar pajak dengan IT yang baik. Karena dulu transaksi terbatas, sekarang transaksi sudah jutaan, ratusan juta mungkin miliar transaksi perhari. Tidak mungkin lagi dengan manual, maka semuanya dengan IT.

Salah satu program pemerintah yang harus dilaksanakan dalam waktu singkat ialah perbaikan IT pajak. Dengan perbaikan IT pajak, pemerintah, kantor pajak dapat mengatur pajak itu sebaik-baiknya, sehingga terjadi suatu pertumbuhan yang adil. *

Disampaikan pada saat Menghadiri
13th Annual Asia-Pacific Tax Forum, International Conference on Tax,
Investment and Business
Kantor Kemenkeu
Jakarta 23 Mei 2016

Tax Amnesty

TAX Amnesty (pengampunan pajak) tiba-tiba menjadi kata yang sangat familiar dalam satu tahun terakhir. Kini sektor pajak menjadi tumpuan utama penerimaan negara kita setelah di era 1970-an hingga 1980-an. Pajak hanya menjadi nomor dua sebagai sumber penerimaan negara. Sektor andalan penerimaan negara kala itu adalah migas.

Oleh karena itu, dari APBN kita, pendapatan pajak itu hanya 76 persen dari seluruh penerimaan. Artinya, kekuatan negara sangat tergantung kepada kemampuan anggarannya, dan anggaran negara sangat tergantung pada penerimaan pajak. Pajak bersumber dari kekuatan ekonomi. Maka ekonomi harus kuat. Ada saling ketergantungan di mana kita harus bekerja sebaik-baiknya untuk mencapai target pendapatan pajak tersebut.

Pendapatan pajak pada akhirnya kembali kepada rakyat yang membayarnya. Misalnya jalan yang dibangun akan membantu pengusaha dalam melancarkan bisnisnya.

Pengusaha mobil juga akan laris bila jalannya baik. Sebaliknya, bila jalan rusak di mana-mana tentu penjualan mobil akan menurun. Karena itu, harus ada pajak untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kalau daerah atau provinsi ingin maju maka anggarannya harus besar, baik dari pendapatan asli daerah ataupun dana dari pusat (APBN). Karena itulah, pemerintah daerah harus memberikan layanan yang baik kepada pengusaha agar mereka berusaha dengan baik.

Ketika masih aktif sebagai pengusaha, pertanyaan saya kepada manajemen cukup sederhana. Berapa pajak yang dibayarkan dan berapa zakat yang ditunaikan? Tidak perlu menanyakan keuntungan perusahaan karena dengan mengetahui jumlah pajak dan zakat yang dibayarkan maka keuntungan perusahaan sudah bisa ditaksir.

Dalam kondisi ekonomi yang melemah, target pajak pasti tidak setinggi dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, maka diperlukan kedisiplinan yang lebih tinggi lagi.

Pemerintah akan memperbaiki sistem pajak negara ini. Ditjen Pajak akan menjalankan norma-norma dan aturan yang berlaku, serta membuat basis teknologi informasi yang lebih maju.

Sebab harus diakui bahwa sistem perpajakan Indonesia masih tertinggal dari Malaysia, dan Thailand, utamanya dalam teknologi informasinya.

Dalam waktu beberapa tahun ke depan sistem perpajakan akan terus dimodernisasi. Semua transaksi itu dapat diketahui sehingga para wajib pajak dapat mengetahui berapa jumlah pajak yang seharusnya mereka bayar.

Tidak akan ada lagi rasa was-was, dan semua harus taat membayar pajak. Kalau ini terjadi maka kita tidak perlu lagi *tax amnesty*. Karena *tax amnesty* sesungguhnya memaafkan wajib pajak yang memiliki banyak “dosa” karena pajak adalah kewajiban.

Jika tidak memenuhi kewajibannya, maka pemerintah terpaksa memaafkan mereka itu dengan catatan harus membuka semua hartanya yang belum dikenakan pajak

karena disembunyikan. Hasil dari tebusan *tax amnesty* itulah yang masuk ke sistem ekonomi nasional kita. Namun kebijakan ini, tentu ada batasnya. Tidak bisa dilakukan secara terus-menerus karena itu sama saja tidak menghargai mereka yang sudah jujur dan transparan dalam melaporkan atau membayar pajaknya.

Dari sisi target pajak, kita tahu betul bahwa ini, mencapai targetnya tidak mudah pada dewasa ini. Namun kalau bicara tentang provinsi tadi, di sini ada kenaikan 40 persen, 38 persen, hampir 40, 38 persen. Kenapa Sulawesi Selatan bisa lebih baik pertumbuhannya dan yang lain tidak?

Usaha yang baik itu harus bermanfaat bagi negara dan rakyat secara umum. Keuntungan untuk pengusaha adalah hal yang ketiga. Kalau pengusaha yang pertama kali mendapatkan keuntungan, berarti ada yang tidak disiplin.

Dalam semua usaha itu, negara mempunyai saham 30 persen. Semua perusahaan apapun di Indonesia itu hampir sama dengan BUMN.

Artinya pajak yang disumbangkan untuk negara minimum 30 persen. Ini masuk dalam Pph (pajak penghasilan) dan PPn (pajak pertambahan nilai). Maka perusahaan yang tidak bayar pajak dapat disita oleh negara melalui kantor pajak karena ada hak negara di perusahaan tersebut. *

Disampaikan pada saat Menghadiri Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan Tahun 2015
Wisma Kalla Makassar, 4 maret 2016

50 Persen PAD

Industri kendaraan mempunyai *multiplayer effect* dari hulu hingga ke hilir yang besar sekali. Apabila industri mobil berkembang, ribuan industri kecil lainnya atau pendukung lainnya akan berkembang secara bersamaan. Hilirnya dibutuhkan begitu banyak *after sales service*, begitu banyak *partshop* yang harus bekerja terus-menerus untuk mendukung hal tersebut.

Kenapa di Amerika ekonominya selalu hanya diukur dari 2 hal, berapa kemajuan mobil dan berapa kemajuan perumahan? Kita tentu juga pada masa yang akan datang dapat diukur pada hal-hal tersebut.

Kita mengalami empat *step* perkembangan dalam bisnis mobil di Indonesia. Kalau 50 tahun lalu kita masih mengimpor mobil sebagian dalam bentuk *build up*, tentu masuk biaya yang tinggi waktu itu. Kita masuk kemudian ke sistem semi *knocked down* (SKD), kemudian *completely knock down* (CKD). Sekarang ini kita masuk ke dalam manufacturing.

Perkembangan itu, tentu menggembirakan. Apalagi penjualan melebihi satu juta unit per tahun, tetapi kapasitasnya sudah hampir dua juta. Artinya, kita sudah siap untuk melayani permintaan yang lebih besar lagi dalam kondisi ini.

Ada dua hal yang harus kita capai, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan juga pertumbuhan ekonomi dunia yang dapat meningkatkan ekspor produk kendaraan. Di samping sebagai industri yang mempunyai *multiplayer effect* dari hulu hingga ke hilir yang besar, tentu juga membutuhkan kemajuan logistik yang baik untuk mencapai itu.

Karena itulah, pemerintah segera merealisasi pembangunan pelabuhan baru yang berada di Timur Jawa Barat agar industri mobil yang berada di sekitarnya, logistiknya lebih mudah dibanding sebelumnya.

Itu salah satu alasan yang mendorong pemerintah harus memajukan pelabuhan. Tujuannya untuk mempercepat distribusi kendaraan, di samping industri lainnya. Tetapi khususnya kendaraan, daya saingnya yang sangat penting apabila logistiknya kita permudah.

Bagi pemerintah, apalagi pemerintah daerah, salah satu sumber pendapatan atau pendapatan asli daerah atau pajak nasionalnya yang sangat penting adalah pajak kendaraan. Kalau Gubernur Banten kita ingin kurangi kegiatannya, kita potong pajak penjualan kendaraannya, selesai langsung masalah. Karena untuk provinsi, kadang-kadang lebih dari 50 persen PAD-nya hanya dari pajak kendaraan. Jadi memberikan suatu indikasi lagi, bagaimana pentingnya peranan mobil atau industri mobil untuk nasional kita.

Membuat mobil banyak yang bisa, menjual masih kurang yang bisa. Membuat mobil lebih mudah daripada menjual. Menjual menyangkut banyak akses lainnya. Memang dibutuhkan sistem perbankan yang baik, sistem logistik yang juga harus baik, tetapi tahapan memeliharanya yang lebih rumit daripada lainnya. Tentu itulah bagian dari upaya saudara-saudara yang menggeluti dunia industri mobil.

Karena itulah, pada akhirnya suatu negara apabila ingin memajukan industrinya, skala prioritasnya lebih penting

untuk dipahami. Skala itu sangat penting, karena itulah merger antara industri mobil banyak terjadi di dunia ini. Dalam industri mobil dibutuhkan *trust*, dibutuhkan ketekunan, juga dibutuhkan konsistensi yang baik. Siapa yang dapat memeliharanya, siapa yang konsisten, siapa yang dapat memberikan suatu bukti yang baik, saya kira itulah yang dapat maju dalam industri ini.

Kita harus mengenal bagaimana hal yang terjadi di Amerika, bagaimana VW harus membayar mahal akibat kehilangan *trust*. Mudah-mudahan kita di sini dapat belajar dari kegagalan industri mobil di luar negeri. Tetapi, kita juga tidak boleh tak mengikuti arus dunia dalam teknologi, *fashion*, model, atau tren generasi muda.

Walaupun dari sisi pemerintah mobil juga memberikan masalah. Ada dua masalah yang selalu menjadi beban pemerintah. Makin banyak mobil dijual, makin banyak masalah di pemerintah. Subsidi BBM selalu menjadi masalah. Sekarang alhamdulillah subsidi sudah sangat kecil. Jadi pemerintah tidak terbebani akibat kesuksesan pelaku bisnis mengembangkan sektor ini.

Kedua, tentu kemacetan. Kemacetan tentu bagian dari kelambatan kita, khususnya pemerintah untuk membangun infrastruktur yang lebih baik. Untuk mengatasi kemacetan, pemerintah harus banyak mengurangi kendaraan yang berada di jalan.

Karena itu harus ada *public transport*, dan sebagainya. Saya kira memang setiap kemacetan kadang-kadang menguntungkan industri mobil. Karena itu, kita berbeda pandang di sini dari sisi pemerintah.

Makin macet, makin laku mobil. Dulu orang hanya butuh satu mobil, karena macet, butuh dua mobil. Makin macet butuh tiga mobil untuk anaknya, dan sebagainya. Tetapi saya kira itu bukan tujuan pelaku bisnis mobil. Tujuan

kita, bagaimana memberikan pemerataan yang baik kepada masyarakat agar industri mobil memberikan keuntungan, baik kepada masyarakat penggunaanya, kepada pengusahanya, dan kepada industrinya secara bersambung. Juga tentu bagaimana membawa kemajuan, baik kemajuan teknologi, kemajuan dari kecepatan logistik, juga perdagangan, dan tentu kemajuan pendapatan pemerintah dari segi pajak yang baik. ✱

Disampaikan pada acara
Peresmian pembukaan the 24th gaikindo international auto show
Di convention hall, indonesia convention
Jalan bsd grand boulevard bsd city,
Tangerang provinsi banten
11 agustus 2016

Mengurangi Risiko

Kehidupan itu penuh risiko di mana saja, di rumah bisa ada risikonya, bisa juga orang meninggal di rumah, keluar rumah bisa ke tabrak mobil, di kantor bisa ada kebakaran. Di mana pun ada risikonya. Seandainya dunia ini tanpa risiko, saya kira kita tidak perlu perusahaan asuransi.

Karena itu, kalau mau cari marketing maka cari orang asuransi, karena orang asuransi angin pun dia bisa jual. Yang dijual oleh agen asuransi adalah nasib orang. Tetapi seorang agen asuransi haruslah diajarkan bahasa yang santun karena tidak mudah menjelaskan ke orang dengan bahasa yang baik mengenai nasib buruk yang bisa saja dialaminya. Misalnya bagaimana menjelaskan ke seorang bapak, tentang nasib anak-anaknya ketika ia tiba-tiba meninggal. Dia bisa kena marah kalau salah menjelaskan.

Jadi agen asuransi itu harus punya tata bahasa yang terbaik dan terpilih, dan mempunyai psikologis yang baik.

Karena itulah maka, di mana pun sekarang orang makin lama makin aneh ikut produk asuransi. Bintang film kadang mengasuransikan anggota tubuhnya seperti dia punya betis, tangan dan sebagainya. Jadi itulah asuransi anggota tubuh pun di asuransikan.

Jadi karena hidup penuh risiko, maka orang memperkecil risiko dengan kepercayaan. Kenapa si A contohnya dia mengasuransikan rumahnya dari kebakaran, atau perampokan. Puluhan tahun dia tidak mengalami kebakaran, atau perampokan, tetapi dia tetap bayar terus? Itu karena ia ingin dunianya enak, ingin mengurangi risikonya. Itulah tentu bisnis asuransi bisnis risiko.

Karena itulah, maka bagaimana sebenarnya apa yang dilakukan? Bagaimana menyadarkan orang mengurangi risiko. Kalau saya perusahaan asuransi, saya akan ajarkan orang pasang listrik dengan baik. Kemudian bikin kerja sama PLN untuk lakukan inspeksi, biaya ditanggung perusahaan. Pokoknya setiap bulan, inspeksi kawat-kawat kabel listrik ini, biar risikonya tidak ada.

Jadi sebenarnya risiko asuransi yang baik ialah bukan hanya mengajak orang berasuransi, tetapi mengajak orang caranya mengurangi risiko. Itulah yang tentunya menjadi bagian daripada ini. Memang perusahaan asuransi kadang kadang tidak mau menerima asuransi pasar karena sering terbakar. Karena itulah Kalau ada kebakaran toko saya tidak terlalu sedih, tetapi kalau pasar yang terbakar, saya langsung sedih, karena pasti tidak ada asuransinya.

Jadi inilah yang semuanya kita ingin di dunia hidup 250 juta orang penduduk ya pasti tiap kali kita kena risiko, apalagi dengan kota yang macet, seperti ini pasti ada mobil kesenggol, atau macam-macam, ada orang tabrakan. Semua itu adalah pada dasarnya kita hindari, tetapi pada dasarnya lahan daripada asuransi.

Kemudian apa yang dipertaruhkan orang asuransi? Yaitu *Trust*, bukan kecepatan menagih premi tetapi kecepatan membayar tanggungan. Saya punya pengalaman pribadi waktu masih di bisnis. Ketika kapal “Tampomas” tenggelam, 200 mobil saya ada di situ, dan asuransinya berputar-putar, mulai

dari register, kemudian menunggu keputusan pengadilan siapa yang salah. Saya capek mendengarkannya, tiga sampai empat bulan belum bayar. Nanti saya bermacam-macam, mau panggil wartawan langsung dua hari kemudian dia bayar. Dan setelah itu saya tidak mau berhubungan lagi dengan asuransi ini. Berarti dia tidak memegang kata-kata. Tentu saya tidak harus sebutkan asuransinya.

Yang jadi pertanyaan, kenapa asuransi sekarang di Indonesia seperti asuransi jiwa, asuransi nasional itu menurun peranannya dibanding asuransi asing. Tentu ada dua hal yakni kecepatan dalam membayar premi dan kecepatan dalam membayar klaim.

Kita juga sekarang punya asuransi yang hampir terbesar di dunia, BPJS Kesehatan. Tidak ada asuransi yang bisa punya kliennya 200 juta, sekarang sudah 160 juta. Bayangkan! Ada tidak asuransi yang punya pesertanya. Tentu kita sekarang sedang membicarakan bagaimana mengenai laporan asuransi sebesar itu, karena semuanya menyebabkan kita semua aman, begitu kena penyakit, maka mungkin juga pada dunia.

Karena itulah, maka bagaimana masyarakat kita mengerti tentang cara mengatasi risiko.

Mengapa ada orang sudah 10 tahun rumahnya tidak terbakar, tidak pernah di rampok, tetapi tetap rajin membayar tagihan asuransi, dan dia memahami pentingnya arti daripada kelangsungan hidup jangka panjang dengan penduduk di situ.

Dunia asuransi mempunyai peluang yang besar, karena tidak ada hidup tanpa risiko, tetapi risiko yang terjamin itu harus disertai dengan yang baik-baik, dan disertai rasa aman yang baik. *

Disampaikan pada acara
Peringatan Hari Asuransi (Insurance Day) 2016
Di gedung II Istana Wakil Presiden RI
Jakarta 11 november 2016

Jangan Hamburkan Uang

Hal yang memperkuat bangsa ini sehingga berbeda dengan bangsa lain adalah kekuatan kita, karena berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika. Itu, kekuatan kita, kita kuat karena berbeda tetapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika.

Oleh karena itu, kalau melihat di semua kantor. Selalu sebelah kanan ada foto Presiden, sebelah kiri foto saya, tetapi di atasnya yang lebih tinggi, selalu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Indonesia adalah bangsa yang besar terdiri daripada ratusan suku bangsa, ribuan pulau, ratusan bahasa. Karena itu, ratusan tata cara, adat dan kebiasaan di antara kita, dan justru karena begitu banyaknya adat dan istiadat, kita saling mengisi. Dan saling mengisilah maka kita menjadi kuat.

Coba kalau bangsa ini semua seperti orang Batak, ngomong keras, saya kira ini kita berkelahi terus. Atau kalau semua bangsa ini seperti orang Jawa, ya agak tenang, akhirnya tidak ada kemeriahan. Jadi karena itulah, saling mengisilah, maka bangsa ini besar.

Kita semua mengenal sifat-sifat itu, dari berbagai suku bangsa, khususnya Batak ini, pekerja keras. Jadi bukan hanya ngomong keras, tetapi pekerja keras juga, teguh, berani dan

mau belajar. Tidak semua suku bangsa seperti itu. Tetapi itulah yang mempersatukan bangsa ini, kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang berbeda-beda dan kita harus hormati.

Karena itulah, maka dalam sejarah Indonesia, kita tahu semua, peranan masyarakat atau tokoh-tokoh Batak sangat besar sekali, karena sifat-sifat dan keteguhan seperti itu. Yang dulu di bidang kenegaraan, di bidang militer, ada pak Nasution, pak Panggabean sampai sekarang Luhut Panjaitan.

Di pemerintahan, sejak pak Adam Malik tentu, dan banyak lagi. Di bidang ilmu pengetahuan begitu banyak *scientist* dan orang cendekiawan dari sini Sampai sekarang, dari empat menko di Republik ini, dua orang Batak. Kalau dibanding orang Bugis, cuma satu menterinya (Amran Sulaiman, Menteri Pertanian), tetapi wakil Presidennya orang bugis. Karena itulah, maka setiap langkah, kita haruslah mempunyai satu tujuan, bagaimana kita membesarkan bangsa ini.

Kita boleh berbeda bahasa, kita bisa berbeda agama, tetapi semua saling menghormati, satu sama lain. Walaupun, pada akhirnya nanti, sisi suku bangsa itu, akan pelan-pelan tergerus karena kawin mawin. Misalnya, saya orang Bugis, istri saya orang Minang, maka anak saya akan bingung ketika ditanya dia orang apa. Tetapi cucu saya lebih bingung lagi, karena bapaknya orang Jawa, jadi akhirnya dia orang Indonesia asli.

Tetapi mereka harus tetap mempunyai dasar budaya yang melekat pada dirinya, tergantung mau pilih apa, karena dasar budayalah yang memberikan semangat hidup bangsa ini dan dorongannya.

Karena adat itu dari dalam, ilmu dari luar, masuk dan mengisi kita. Tetapi adat, lahir dari batin, keluar mengisi jiwa, kebiasaan itu, melihat sehari-hari. Karena itu, tentu dinamis juga, dia akan berubah juga, secara dinamis, karena pertemuan-pertemuan.

Namun tentu adat dan kebiasaan kita, harus dipergunakan untuk kebutuhan hari ini dan masa depan. Kita tidak boleh hanya bangga kepada masa lalu, karena itu milik masa lalu.

Karena itulah, kita bangga kepada teman-teman, masyarakat Tapanuli ini yang sangat keras dalam mencari ilmu, karena dengan mencari ilmulah maka kita bisa melihat masa depan. Apabila kita selalu membanggakan masa lalu, sama saja berarti kita menjadi hidup di museum, karena hanya museumlah yang selalu mengingat masa lalu. Sedangkan ilmu melihat masa depan. Karena itulah, kita harus memiliki ilmu.

Nah, apa yang kita hadapi ke depan? Yang kita hadapi ke depan ialah tuntutan kemajuan, khususnya kemajuan di bidang kehidupan ekonomi dari masyarakat kita semuanya. Tentu, itulah yang menjadi tuntutan semua orang masyarakat ini.

Itulah yang menjadi bagian daripada harapan masyarakat yang besar, yang ingin lebih sejahtera, ingin lebih baik. Dan hanya itulah, usaha keras daripada meningkatkan produktivitas bangsa ini, masyarakatnya, alamnya, keilmuannya, penemuannya. Bisa menjadikan bangsa ini bersaing dan maju seperti bangsa-bangsa lain. Karena itulah, yang sangat penting adalah spirit untuk maju.

Jadi bukan hanya berbicara adat sebagai peninggalan, tetapi berbicara adat sebagai dorongan kemajuan ke depan. Tentu penting memelihara adat itu, tetapi jangan pula kita menghabiskan modal kita. Hanya untuk kepentingan adat, lalu kita cari bertahun-tahun.

Daripada digunakan untuk acara adat, ada baiknya modal itu dipakai untuk berdagang, membangun industri pariwisata, bikin hotel di sini, karena kalau tidak, maka itu akan ditinggalkan oleh dunia yang lain. Kita akan dikalahkan Malaysia, Singapura, Thailand, apabila kita habiskan waktu dan potensi kita untuk hanya memelihara adat itu.

Penting sekali, tetapi banyak juga sekarang cara untuk mengatur sedemikian rupa, adat sebagai simbolis.

Dulu kalau perkawinan sehari-hari, sekarang simbol-simbol saja cukup dua jam selesai, dan puas. Saya tahu kalau menghadiri perkawinan teman-teman orang Batak, berjam-jam habis. Begitu halnya juga di Padang, semua pantun keluar, namun makan belum keluar.

Nah, itu bagian dari sisi yang positif, apa yang perlu, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita ambil dalam setiap hal-hal tersebut, karena dunia saling bersaing. Ekonomi dunia merosot, apa yang harus kita perbuat?

Bagaimana, kekuatan dan sumber daya dalam negeri ini yang dimunculkan, sehingga menjadi kekuatan yang besar. Bagaimana pertanian, kenapa dulu kita banyak mengekspor sayur? kenapa sekarang kita tidak lagi. Bagaimana di sini dikembangkan berbagai hal. Begitu juga soal yang sekarang menjadi bagian usaha kita memperbaikinya, turisme, wisata.

Karena itu, salah satu usaha dalam bidang ekonomi yang paling murah ialah turis, wisata. Karena modal telah diberikan oleh Tuhan, tidak perlu kita minta kredit dari bank untuk mendapat modal itu.

Apa modal itu? Cuaca yang baik, air, pemandangan, laut, danau, itu semua modal yang tidak ternilai yang telah diberikan Tuhan. Dan orang akan datang melihat dan membayar untuk itu.

Tentu bukan hanya dibutuhkan banyak sisi-sisi lain, sisi pelayanan, sisi kebersihan, sisi infrastruktur, sisi makanan yang enak, dan sisi senyum. Kenapa saya katakan ini? Karena orang Makassar dengan orang Batak hampir sama susah senyum.

Dahulu di Makassar, kalau pelayan dimarahi, malah diprotes, dan justru dia memarahi langganannya. Saya kira, dahulu di sini juga hampir sama. Tiga daerah yang juga

hampir sama, di sini, di Makassar dan di NTT. Pokoknya sebelum dikomplain, dia komplain dulu orang.

Tetapi sekarang, tentu sudah banyak berubah, itu harus diubah. Senyum itu murah, paling gampang. Tidak ada ongkosnya, tetapi memang kadang-kadang muka kita memang agak beda-beda dengan di Jawa. *

Disampaikan Pada Acara
Musyawarah Masyarakat Adat Batak Serta Restorasi Kawasan Wisata Danau Toba
Di kawasan Danau Toba, kab. Parapat, prov. Sumatera utara
30 Juli 2016

Bisnis Pariwisata

Sebenarnya, usaha wisata itulah yang paling murah karena yang kita jual sudah diberikan Tuhan, yakni keindahan pantai, gunung, matahari, angin. Semua itu adalah pemberian Tuhan, kita manusia cukup memeliharanya.

Di samping itu ada budaya, tetapi kalau budaya, rata-rata orang tidak ingin melihatnya berkali-kali, sekali saja sudah cukup.

Itulah kenapa lebih banyak yang ke Bali daripada ke Borobudur. Karena orang ke Bali untuk menikmati suasana, pantai, pegunungan dan kuliner. Jadi lebih banyak yang ke Bali padahal yang kita jadikan ikon wisata kita adalah Borobudur. Tentunya, jika kita ditanya apakah ada yang berkali-kali mengunjungi Borobudur, saya rasa hanya sedikit yang menjawab ya. Saya pun cuma sekali, yakni 30 tahun yang lalu. Waktu libur tahun baru saya ke Jogja, namun saya tidak ke Borobudur lagi, karena sudah pernah lihat, saya memilih ke Prambanan.

Sesungguhnya Bali menjual hanya dua hal sehingga orang betah datang, yakni suasana keindahan dan *hospitality*, atau keramah tamahan, serta makanan yang enak.

Tujuan setiap orang berbeda-beda dalam hal berwisata, orang Jepang, tentu jalan-jalan, orang China lebih banyak sukanya makan, dia tidak pernah ke Pura.

Berbeda halnya kalau orang Indonesia keluar negeri, 50 persen tujuannya adalah belanja. Ke Singapura mereka belanja, padahal barang di Tanah Abang lebih murah. Pergi umrah atau haji, juga belanja, meski kadang yang dibelinya barang buatan Indonesia.

Sekarang ini ada dua daerah di Indonesia yang jumlah wisatawannya menurun, yaitu di Toba dan di Toraja. Apa yang keliru? Kalau di Toraja di kampung saya, sering saya marah-marah sama mereka, karena yang dijual ialah hal yang mengerikan. Masuk kuburan, kemudian potong kerbau, dengan cara sadis. Mungkin bagus untuk orang Toraja tetapi bagi orang asing merasa itu mengerikan, jadi hanya sekali orang mau datang, tidak berkali-kali.

Tetapi sekarang sudah berubah, Toraja sudah menjual keindahan alamnya, di sana ada negeri di atas awan sangat indah sekali, serasa berada di atas awan.

Kalau Toba danaunya yang rusak, karena orang tidak jaga, dia pakai budidaya ikan. Akhirnya air tidak bagus lagi kalau berenang, kita bisa gatal-gatal. Kemudian yang dijualnya Tor-tor, orang tentu tidak ingin berkali-kali nonton tarian Tor-tor.

Kemudian *Hospitality*-nya kurang sedikit, kadang-kadang banyak, sebelum tamunya marah, dimarahin lebih dulu kan. Sama di Makassar, dulu juga begitu, sekarang sudah banyak berubah.

Jadi banyak tempat tetapi *hospitality*-nya yang kurang bagus. Kalau saya bilang Bali paling lengkap karena pemandangan bagus, budayanya ada, *hospitality* ada. Kita hampir tidak pernah melihat orang Bali marah kalau ada yang *complain*.

Terkait masalah *Hospitality*, jadi ada cerita dari Gubernur NTT tentang keadaan kita. Dia bilang, ada turis Jerman minta bir di hotel, bir dingin, setengah jam minta lagi satu botol lagi, sudah agak sedikit itu kurang senyum ini pelayannya, setengah jam lagi minta satu lagi.

Terus dia bilang, mister, kenapa tidak sekaligus minta tiga tadi kan? Capek kita bawa kan. Akhirnya, tentu mentalitas servisnya yang harus diperbaiki. Dulu saya kampanyekan Komodo, luar biasa, kita semua ada juga yang ikut kirim SMS tentang Komodo, terbesar di dunia barangkali SMS dalam 24 hari, 300 juta SMS masuk untuk mendukung Komodo, akhirnya jadilah Komodo menjadi daerah *Seven Wonder* di Dunia.

Tetapi jualan tidak bisa Komodo saja, karena waktu di Komodo cukup lima sampai enam jam untuk keliling pulau, sudah selesai. Tahun depan ke Komodo mau apa lagi, kita mau lihat, ternyata cuma lihat itu. Jadi yang dijual pantainya, *beach*-nya, menyelam, makan makanan yang enak, rileks, itu yang dijual.

Karena itulah, memang justru karena itu, investasi di bidang pariwisata itu paling murah, karena tanpa ongkos sebenarnya. Kita dikaruniai negeri yang indah seperti itu, tetapi ya memang harus lengkap, harus ada listrik yang baik, kalau mati lampu, AC mati, tamu pulang kan?

Harus bersih, harus ada toilet yang baik. Karena itulah kita perbaiki empat daerah wisata sekarang ini, tetapi konsultannya dari luar.

Kita sering keliru, menjual sesuatu sesuai dengan perasaan kita, padahal yang membeli orang lain. Jadi harus sesuai dengan perasaan tamu. Contoh paling sederhana dulu, hotel-hotel, losmen itu pakai WC jongkok, bingunglah orang Barat.

Kita lupa bahwa mereka berbeda kebiasaan, tidak ada yang lain. Tidurnya mereka tidak kenal guling, beda dengan kita kalau tidak ada bantal guling tidak tidur namanya.

Di samping itu, kita pernah punya kesalahan, karena selalu menjual budaya saja, dan kita menjual budaya yang ketinggalan zaman.

Jadi pernah suatu kali, saya pergi kampanye besar-besaran, pasca peristiwa Bom Bali I. Saya minta dibuatkan iklan untuk menarik wisatawan masuk. Setelah satu bulan jadilah iklan audio visual, ketika diperlihatkan ke saya, saya bilang, “wah apa ini, semua yang muncul ada tari pedang, panah-panah dari Papua, pakai baju-baju apa, kemudian Nias lompat, jadi pandangan orang luar negeri itu, wah rupanya di Indonesia ini masih zaman batu ya.”

Kita keliru itu bahwa orang tidak datang, satu kali iya, tetapi untuk berkali-kali tidak, sekarang sudah bagus istilahnya tempat wisata itu, ke pantai, nyiur melambai, angin yang baik. jadi yang dijual itu, perasaan dia, jangan perasaan kita yang masuk ke situ.

Masalah menjual selera ini, saya ingin memberi contoh mangga Filipina yang selalu lebih laku diekspor daripada mangga kita, mangga harum manis. Kenapa mangga kita malah paling bagus di dunia, Harumanis, malah susah lakunya?

Datanglah pejabat Dirjen Perkebunan ke Manila, ternyata mangga Filipina itu kecut. Justru, itu yang orang Amerika suka, dan Jepang juga tidak suka terlalu manis. Tetapi yang justru kita jagokan adalah manis, jadi malah tidak sesuai pasar. Demikian juga kalau Filipina jual mangga ke Indonesia tentu tidak laku. dan mangga Indonesia susah laku di Jepang

karena terlalu manis. Artinya jangan jual selera kita, tetapi jual selera mereka. Siapkan apa yang mereka sukai. ✱

Disampaikan Saat Memberikan
Kuliah Umum Kepada Para Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan Ke-54 Dan
Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan Ke-55
Lemhanas RI Tahun 2016
Di Istana Wakil Presiden
Jakarta, 30 Agustus 2016

Segudang Masalah Pangan

Saya sempat menjadi Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), yang tersingkat, yakni hanya enam bulan. Meskipun resminya hanya empat bulan, karena yang dua bulan bisa dikatakan ilegal. Saya menjadi Kepala Bulog pada saat digabungnya Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Begitu saya diangkat Menteri Perindustrian dan Perdagangan, saya langsung diminta menjadi Kepala Bulog.

Pada tahun 60-an atau 70-an, kita berbicara masalah sandang dan pangan, namun sekarang kita tidak pernah bicara masalah sandang lagi. Masalah ini dianggap selesai. Mau beli baju di mana pun harganya murah, tersedia di mana saja. Akan tetapi, masalah pangan sejak dulu sampai sekarang selalu kita bicarakan. Masalah ini selalu timbul. Semua negara menghadapi hal ini. Apakah itu Amerika atau di mana pun, khususnya pada masa-masa yang akan datang.

Kenapa bahan makanan selalu menjadi masalah? Pertama, karena penduduk terus bertambah. Kedua, lahan yang semakin terbatas akibat pertambahan penduduk itu sendiri. Selanjutnya ditambah lagi dengan masalah perubahan iklim.

Pertanian bergantung kepada iklim. Ada juga masalah pola makan yang berubah. Dahulu kebutuhan beras mungkin tidak sebesar sekarang.

Di Papua dan di Maluku orang makan sagu. Sekarang semua makan beras. Kalau dahulu, mungkin orang terbiasa makan pagi dengan ubi. Sekarang makan nasi. Kemudian persoalan lingkungan, hutan kita babat, air menjadi berkurang, pengairan pun menjadi rusak. Akibatnya, berujung pada masalah produksi pangan.

Sekarang, jika kita berbicara tentang Bulog, artinya kita berbicara tentang distribusi. Pertanyaannya, apa yang didistribusikan? Masalah Bulog sebenarnya bukan masalah kompeten atau tidak kompeten. Masalahnya, ada barangnya atau tidak? Itu masalah sebenarnya. Jadi, kita tidak bisa membahas masalah Bulog secara terpisah dengan masalah ketersediaan pangan.

Ketika Bulog didirikan tahun 1967, penduduk waktu itu, sekitar 150 juta sampai 160 juta. Sekarang sudah 250 juta penduduk. Berarti sulit dibandingkan kehebatan Bulog waktu itu dan sekarang, karena yang diurus lebih banyak.

Pada saat yang sama areal sawah semakin turun. Sebagai contoh, kalau kita jalan ke Karawang, saya kira apa yang kita lihat hanya pabrik dan rumah. Jadi perubahan-perubahan itu menyebabkan banyak masalah di bidang pangan.

Masalah distribusi pada dasarnya tidak bisa lepas dari masalah suplai. Negara kepulauan membutuhkan sistem logistik yang lebih rumit dibandingkan negara kontinental.

Dibanding Malaysia dan Thailand, kita memiliki masalah yang sama dengan Filipina. Misalnya begitu kapal terlambat, semuanya telat. Dengan demikian, itulah sebabnya mengapa harga makanan pokok mesti dikontrol.

Kebijakan pokok pemerintah adalah bagaimana menyeimbangkan kepentingan konsumen dan produsen. Apabila tidak menarik untuk produsen maka orang berhenti berproduksi.

Itu yang terjadi di Mesir. Dahulu Mesir pengeksport gandum yang terbesar. Akan tetapi, tiba-tiba sekarang menjadi pengimpor gandum yang terbesar di dunia ini.

Pada zaman Mesir Kuno gandum menarik, namun pada saat pemerintah mengontrol ini terlalu rendah, petani tidak tertarik lagi menanam gandum. Akhirnya Mesir sampai sekarang mensubsidi dengan mengimpor dari Prancis, Turki, Rusia dan dari mana saja.

Belajar dari pengalaman Mesir itu, artinya ada yang salah dalam keseimbangannya. Karena itulah perlu keseimbangan kebijakan.

Kemudian, keseimbangan antara orang mampu dan tidak mampu. Konsumen yang mampu makanannya maksimum 20 persen daripada pendapatannya.

Akan tetapi, seorang yang pendapatannya di bawah, seperti buruh dan sebagainya, konsumsi makanannya 60 persen. Begitu harga pangan naik, maka mereka langsung bermasalah.

Akan tetapi, bukan menjadi persoalan bagi orang yang mampu. Karena itulah, pemerintah menetapkan suatu batasan, bawah-atas untuk menjaga keseimbangan.

Begitu juga soal petani. Pendapatan petani padi tidak pernah lebih tinggi dari upah minimum provinsi (UMP). Bahkan, di bawah upah minimum tersebut.

Katakanlah kalau seorang petani punya satu hektar, mendapat lima ton padi, kalau harganya Rp 4.000 per kg maka pendapatannya Rp 20 juta. Ongkosnya, mungkin 40 persen, jadi laba mereka Rp 12 juta. Biaya hidup empat orang, berarti pendapatan sejuta perbulan, di bawah UMP.

Pengalaman Indonesia, dua kali pemerintahan jatuh karena pangan. Tahun 1965 kesulitan pangan terjadi, orang antre. Pada puncaknya menjadi gabungan antara krisis politik dan ekonomi. Kalau krisis politik saja, pemerintah masih bisa

bertahan. Akan tetapi, kalau menggabungkan krisis politik dan ekonomi maka jatuhlah pemerintahan Bung Karno.

Begitu juga pada tahun 1998, krisis ekonomi dan dampak bencana el nino. Kemudian kita mengimpor enam juta ton, harga naik, pemerintah tidak bisa menjaga keadaan maka terjadilah masalah di bidang pemerintahan.

Jadi itu begitu hebatnya efek-efek yang terjadi pada masalah pangan ini. Pada akhirnya masyarakat juga yang disulitkan. Masalah ini bisa menjatuhkan pemerintahan kalau tidak dikelola dengan baik.

Pada saat saya Kepala Bulog, saya ingat betul, harga beras impor 180 dollar AS per ton. Sekarang sudah antara 400-500 dollar AS. Harga beras pemerintah Rp 2500, sekarang ini sudah kurang lebih Rp 10.000. Jadi sudah empat kali naik selama inflasi 15 tahun.

Ini harus kita perbaiki, kebijakan yang seimbang, dan itu memang tugas pemerintah dalam hal ini operatornya Bulog. Namun, ini harus diketahui oleh kita semua, supaya kita tidak berlebihan memberikan tanggung jawab lagi ke Bulog.

Selama ini Bulog hanya membeli tujuh hingga delapan persen dari produksi pangan atau produksi beras khususnya. Jadi artinya, 93 persen beras di masyarakat berasal dari pedagang.

Jadi kita makan beras bukan dari Bulog. Kita makan beras dari pedagang. Artinya begitu pedagang itu terganggu maka justru akan terganggu, tujuh hingga delapan persen hanya untuk penyeimbang saja, bukan untuk dimakan semua orang, yang hidup tetap dari hasil penggilingan swasta, pedagang beras, pasar Cipinang dan sebagainya.

Itu untuk kita pahami bahwa Bulog itu hanya sanggup membeli antara tiga sampai empat juta ton, atau setara antara tujuh hingga delapan persen.

Saya minta maaf kepada Kepala BPS karena angka BPS rancu menurut saya. BPS selalu menghitungnya 75 juta konsumsi beras, ada pertanyaan, itu sama dengan kurang lebih 48 juta ton beras, sedangkan konsumsi kita tiap tahun makin menurun, perorang, per kapita.

Kita ini gampang gambarkan, ada tiga angka, kadang-kadang di situ 150 kilogram pertahun. Saya sudah coba, masak yang itu, artinya hampir 400 gram perhari, itu luar biasa besarnya. Petani pun, tentara pun tidak akan makan sebanyak itu.

Kita juga mengimpor gandum tujuh juta ton setahun, menjadi Indomie, roti dan kue. Saat kita mengimpor satu juta ton beras semua pada ribut seluruh Indonesia.

Padahal, mengubah pola makan dari beras ke mie sebenarnya secara ekonomi lebih berbahaya, karena kalau beras masih kita produksi. Gandum secara agronomi sulit. Walaupun bisa, tetapi tidak ekonomis untuk diproduksi di sini karena iklim.

Jadi memang ada pola makan yang berubah. Kita menyuruh semua orang untuk makan beras. Pada akhirnya justru membuat kita kesulitan. Padahal dulu orang Maluku dan Papua makan sagu, sekarang ganti beras. Di Sulawesi Selatan justru ada daerah yang makan pisang, kemudian ganti juga dengan beras. Kita sendiri yang mengubahnya tanpa mempertimbangkan akibatnya. Kita terlalu menganggap apa yang kita suka berarti semua orang suka di negeri ini.

Suatu hari, waktu saya Ketua PMI, terjadi gempa di Mentawai. Muncul pemberitaan, orang Mentawai kasihan, sudah makan ubi, saya ke Mentawai, saya tanya apakah makan ubi. Mereka tertawa semua. Mereka menjawab makanannya memang dari dulu ubi, hanya ketika pemerintah memberi raskin, mereka ambil.

Ke depan yang sangat penting dilakukan adalah meningkatkan produksi dengan teknologi, bukan memperluas lahan. Lahan tidak mungkin diperluas. Semakin diperluas, maka semakin merusak karena kita butuh air, sedangkan hutannya dibabat.

Kita sudah mencoba, Pak Harto mencoba satu juta hektar sawah di Kalimantan dan gagal. Program ini justru merusak dan ongkos memperbaikinya berkali-kali lipat dibanding dengan ongkos membuat atau memulai yang satu juta hektar itu. Ongkos merestorasi bisa 10 kali lipat dari waktu dimulai.

Kekuatan kedua, masalah distribusi. Masalah distribusi adalah ketidakseimbangan penduduk dengan lahan. Penduduk 60 persen ada di Jawa, yaitu sebesar 160 juta jiwa. Akan tetapi, lahan di Jawa makin semakin menyusut. Sehingga beras seharusnya diproduksi di luar Jawa.

Namun, hal ini pun tidak mudah. Semua orang berpikir kita bangun di Papua. Akan tetapi, saya bilang ongkos logistik ke Papua itu bisa lebih mahal daripada berasnya sendiri.

Jadi lupakan konsep membikin *rest estate* di Papua, di Manokwari. Pulang perginya itu bisa satu ton. Jadi lebih mahal dibanding harga berasnya itu sendiri.

Jadi intinya adalah agar pangan kita aman, maka kita harus bisa meningkatkan produksi dari lima ton rata-rata pada hari ini, menjadi enam atau tujuh ton. Untuk itu, teknologi sudah tersedia dengan bibit yang baik, dan dengan sistem pengairan yang baik.

Tugas Bulog saya kira sampai kapan pun tidak berubah, menjaga stabilitas. Bulog bukan memproduksi. Bulog hanya mendistribusikan tujuh persen.

Jadi, bukan juga sebagai distributor, karena distributornya pedagang itu sendiri. Karena itu saya selalu meminta Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian untuk jangan terlalu mudah untuk mencap pedagang itu mafia.

Jangan karena kesalahan kita, karena produksi turun, lantas yang disalahkan distribusi. Beras itu tidak mungkin, dan tidak mudah untuk ditimbun karena tidak bisa tahan lebih dari 1 tahun. Dan tidak banyak orang punya gudang yang besar seperti Bulog.

Soal ada yang bermain harga, itu pasti. Akan tetapi, tidak sejahat dari apa yang kita dengar. Masalah yang selalu timbul adalah tingkat produksi dan kelancaran logistik. Itu untuk dipahami dulu sebelum kita selalu menyalahkan orang lain.

Bulog juga membutuhkan sebuah sistem informasi yang baik. Indonesia lebih mudah dengan sistem logistik negara kepulauan. Bisa saja di Sulawesi kelebihan, namun di Kalimantan kesulitan. Tanpa sistem informasi yang baik dan tanpa transportasi yang baik, akan tetap menjadi masalah.

Yang ketiga, dibutuhkan penyimpanan yang baik. Sudah waktunya kita meningkatkan gudang agar bisa menyimpan sampai dua hingga tiga tahun seperti di China dan Thailand. Walaupun Bulog juga belum tentu mampu untuk berdagang daging karena tidak punya *cool storage*, tidak mudah untuk menyimpan bawang karena butuh juga manajemen yang lebih ahli.

Begitu juga gula. Dahulu Bulog memegang gula, tetapi karena jaringan dipegang pengusaha lain maka Bulog bergantung kepada pengusaha itu kembali. Akhirnya di Bulog hanya semacam agen saja.

Cita-cita kita, selalu ingin swasembada. Swasembada beras sebenarnya tidak terlalu sulit. Untuk menuju swasembada beras beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sistem yang baik, pupuk yang tersedia dan pengairan yang baik. Waktu krisis pangan dunia pada tahun 2008, harga beras Thailand 900 dolar AS. Kita bersyukur pada tahun 2008-2009 kita swasembada, sehingga kita tetap bertahan bisa jual beras Rp

6.000 sampai Rp 7.000. Di Filipina harga beras sekitar Rp 10.000 per kilogram.

Jadi Bulog, intinya adalah teknologi bibit, pengairan, pupuk yang seimbang dan sebagainya. Kalau mau bebannya Bulog baik maka Bulog harus membiayai penelitian bibit. Yang diperbaiki jangan cuma bagian akhir, tetapi juga tahap awal. Perlu juga kerja sama dengan IPB atau lembaga mana pun untuk penelitian, sehingga peningkatan produksi. Sehebat apa pun prioritas kalau tidak ada berasnya mau apa? Jadi, jangan hanya apa tugas utamanya, bagaimana tugas itu berhasil dengan naik produksi. Dan yang paling sederhana ialah bibit dan fasilitas yang lainnya. *

Disampaikan Saat Menghadiri
Kuliah umum Dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun ke-49 Perum Bulog
Jakarta Kantor Perum Bulog 10 Mei 2016

BAB 3

ENERGI DAN LINGKUNGAN

Tidak Boleh Padam

Masa lalu, 50 tahun lalu, katakanlah tahun 1950-an, 1960-an, listrik sebagian besar hanya di perkotaan. Bagi masyarakat pedesaan listrik adalah kemewahan. Sekarang semuanya telah berubah sejalan dengan kemajuan zaman. Kalau dulu kebutuhan dasar kita hanya berbicara sandang, pangan, dan papan, saat ini saya kira listrik sudah menjadi bagian dari kebutuhan dasar di Indonesia. Karena listrik sudah bagian dari kehidupan.

Hampir tidak ada kehidupan tanpa listrik. Mau membaca malam, belajar, butuh listrik. Mau meningkatkan pendapatan industri, mau berkomunikasi, harus ada listrik. Mau mendapat informasi harus pakai listrik.

Listrik sudah merupakan kebutuhan dasar keempat bagi kita. Karena kebutuhan dasar, berarti harus kita penuhi dengan tanggung jawab karena listrik merupakan suatu kehidupan, sumber pendukung kehidupan dasar, tentu juga prioritas dasar bagi kita.

Walaupun listrik kemudian sudah harus mempunyai kualitas yang baik. Kalau dulu mati lampu, masyarakat menganggap hal yang lazim, sekarang mati lampu sejam orang akan protes. Kalau dulu kualitas listrik turun, naik *voltage*-nya juga biasa-biasa saja, sekarang semua akan merusak

komputer. Kalau sudah begitu semua orang minta ganti rugi. Artinya, memang kita harus menjaga semuanya. Jumlahnya, kualitasnya, keterlanjutannya, dan juga kesinambungannya.

Begitu juga *prime energy* harus selalu menjadi perhatian kita. Kalau dulu, negara yang maju, salah satu tandanya asap ada di mana-mana. Sekarang apabila ada yang mengeluarkan asap industri, merupakan musuh bersama masyarakat. Artinya tanggung jawab membangun kelistrikan makin besar, baik jumlah, cara, dan kualitasnya.

Juga cara kita berkompetisi. Listrik merupakan salah satu komponen untuk memenangkan kompetisi, baik antarnegara, antardaerah, maupun atau antarindustri sendiri. Kalau harga listrik kita tinggi, tentu tidak bisa bersaing dengan negara-negara yang lebih rendah seperti Vietnam, Thailand, dan sebagainya.

Karena itulah kita membangun listrik, bukan hanya soal persentase elektrifikasi yang hampir 96 persen pada tahun yang akan datang, tetapi juga tentang kualitas keberlanjutan dan sumber energinya. Kita telah menetapkan target. Listrik adalah suatu bisnis ataupun infrastruktur yang tidak pernah berhenti untuk dibangun.

Pertama karena penduduk bertambah 1,5 persen per tahun. Kedua, industri makin berkembang. Memang ada tren di dunia ini bahwa pada awal-awal industrialisasi, kebutuhan pertumbuhan bisa tiga kali lipat, kebutuhan listrik bisa 2,5 kali lipat daripada pertumbuhan industrinya. Kalau sudah stabil, bisa lebih kecil dari itu. Sekarang kita dalam tahap pertumbuhan industri. Berarti kebutuhan listrik akan lebih tinggi dua kali lipat daripada pertumbuhan itu sendiri.

Dengan pertumbuhan-pertumbuhan itu, saya kira yang paling populer diucapkan oleh pejabat angka 35.000 megawatt. Itu harus kita selesaikan agar tidak mengulangi sejarah kesalahan masa lalu.

Apa yang menyebabkan ekonomi kita tidak semaju negara lain? Kita sebut kemampuan kita dalam membangun infrastruktur. Kenapa? Antara lain karena salah satu sumber kelemahan kita terlalu banyak memberikan subsidi. Salah satu subsidi yang terbesar ialah subsidi energi. Puncaknya pada tahun 2014, subsidi kita Rp 390 triliun. Bayangkan jumlahnya dan Rp 330 triliun subsidi energi, baik bahan bakar dan juga listrik.

Listrik memakan Rp 100 triliun waktu itu. Kenapa itu terjadi? Karena kelambatan membangun listrik sehingga untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, supaya jangan mati lampu, jangan citra berkurang, jangan orang marah, maka dibangunlah, diesel-diesel dari mana-mana. Itulah terjadi pemborosan luar biasa.

Seciranya kita mengikuti program yang awal, dengan Rp 100 triliun kita bisa membikin 10.000 megawatt langsung oleh PLN. Jadi ongkos keterlambatan adalah larinya ke subsidi dan kadang-kadang tidak disadari oleh masyarakat industri, tetapi disadari pembayar pajak karena semua itu dibayar oleh masyarakat. Di samping itu, kita mendukung masyarakat yang kurang mampu dengan membuat kebijakan pemerintah menjual listrik murah. PLN menjual murah, tetapi dibayar oleh pemerintah.

Sekarang, secara transisional, tahap demi tahap agar rakyat merasakan bahwa listrik jangan dihamburkan dengan tarif murah. Belajar dari banyak negara yang begitu banyak subsidi, dia akan mengalami dilema yang tidak bisa bergerak.

Dua minggu lalu, saya baru pulang dari Venezuela, bagaimana negara yang begitu kaya sumber daya alamnya, mempunyai aset minyak yang terbesar di dunia, tetapi orang mendapat listrik hanya lima hari seminggu, dua hari padam. Padahal dia mempunyai sumber daya yang begitu kuat.

Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia menjual murah energinya, termasuk ke rakyatnya.

Akibat menjual murah, orang tidak mau berhati-hati memakai energi. Kita tentu bukan mau menjual dengan harga mahal, tentu tidak. Tetapi kita ingin rakyat kita berhemat energi. Begitu keluar kamar, matikan lampu. Begitu keluar rumah, matikan TV. Hanya itu yang diharapkan, penghematan, dan sebagainya, sehingga semua orang memahami. Kalau listrik dijual terlalu murah, orang tidak peduli. Jadi kita ingin mendidik rakyat agar menghargai apa yang diberikan oleh negara.

Memang kita sudah banyak melakukan usaha. Salah satu yang ingin saya sampaikan, hampir semua orang memakai batik. Itu asalnya apa. Saya ingin ceritakan, apa upaya kita tahun 2005, kalau ada yang ingat. Setelah saya bertanya, apa pemakaian listrik yang paling banyak di kantor-kantor, jawabnya AC.

Karena kalau siang, otomatis lampu kita matikan, kecuali yang dibutuhkan. Karena itulah saya bertanya, lalu bagaimana cara menghemat AC, jawabnya jangan terlalu dingin. Karena itu, kita putuskan agar AC cukup 25 derajat. Tidak boleh ada lagi ruangan yang kurang dari 25 derajat. Karena itu, orang tak bisa lagi pakai jas, jadi pakai batik. Itulah asal sejarah kenapa kita pakai batik. Itu cara untuk menghemat energi.

Saya ingat, terakhir waktu Pak Sofyan masih Dirut BRI? Saya datang semua pakai jas hitam. Saya pakai batik, biasa saja. Tidak ada hubungan antara jas dan bank. Bank di Singapura begitu majunya, dia tetap pakai kemeja biasa saja. Anda ini, bank rakyat lagi, bank pedesaan, memakai jas semua. Itulah salah satu cara kita menghemat listrik.

Nah, sekarang apa yang keliru sehingga tahun 2004 subsidi listrik naik dari Rp 40 triliun ke Rp 100 triliun karena ketidakadaan rencana jangka panjang. Karena itulah,

kita harus membikin rencana jangka panjang. Pada saat pemerintah ingin membangun 10.000 megawatt tahun 2005, 2006, saya datang ke PLN. Ada seorang direksi PLN menantang, tidak butuh 10.000, butuh 3.000 megawatt. “Hei, diam kau. Saya bilang. Ini 10.000 kita butuhkan. Laksanakan saja, ini perintah.”

Coba bayangkan kalau tidak bikin 10.000 megawatt waktu itu. Saya kira kita masih pakai diesel berapa? Kita masih mensubsidi berapa? Akhirnya, yang kita butuhkan diesel-diesel itu atau kita mati lampu.

Sama dengan sekarang, kalau tidak kita selesaikan 35.000 megawatt, tahun 2019, akan juga ada masalah. Atau kita kontrak kapal-kapal atau gas turbin. Namanya gas turbin, tetapi sebenarnya diesel turbin.

Namanya gas turbin, tetapi semua diesel karena tidak ada gas. Tidak hanya sampai ke situ. Harganya tetap 20 sen/kWh atau 17 sen/kWh, subsidi lagi. Pemerintah lagi, pembayar pajak lagi yang membayarnya.

Karena itulah kita menyadari itu. Begitu juga tentang bauran energi. Kita memahami bauran energi di mana pun dibutuhkan agar kalau salah satu bagian mengalami masalah, maka *prime energy*-nya dapat dibantu oleh yang lainnya.

Kita sudah putuskan bauran energi kita 50 persen batu bara, 25 persen gas, dan 20 persen *renewable energy*. Artinya kalau di sini bicara tentang energi bersih, berarti 50 persen energi bersih, tetapi batu bara juga bisa bersih apabila ditempatkan di *mine mouth*, di mulut tambang.

Karena itulah, mengapa pemerintah memutuskan agar sebagian besar harus dibangun di mulut tambang karena di mulut tambang jauh dari daerah-daerah. Apalagi, apabila dengan teknologi yang lebih bersih tentu tidak menimbulkan masalah. Karena bagaimanapun kita memahami Indonesia salah satu produsen batu bara yang besar. Karena semuanya

harus dipercepat. Karena itulah 35.000 megawatt itu tentu dipahami.

Saya ingin mengingatkan kembali, karena 10.000 megawatt semuanya defisit PLN sebelum membangun bisa teratasi. Jadi kalau ada keterlambatan, itu tanggung jawab PLN. Memang kita pahami waktu itu, karena tender-tender banyak yang tidak mengestimasi, kemurahan, jual di luar-luar daerah, logistik susah. Itu yang terjadi. Tetapi dengan bauran energi itu, agar saling-silang masalahnya.

PLTU bisa murah karena harga batu bara murah. Akibatnya, harga sekarang 50 persen daripada harga lima tahun lalu, tetapi bisa saja pada suatu saat naik lagi. Yang terpenting ada jaminan atas pelayanan yang baik.

Kita ingin agar ada listrik yang lebih bersih di kota-kota besar. Tentu dibutuhkan infrastruktur yang sesuai untuk itu. Tanpa infrastruktur, kita hanya menyebutnya PLTGU, padahal isinya diesel atau MSO. Ini penting untuk kita sadari. Karena itulah semua sistem ini, kita sadari bahwa tanpa bauran yang baik, jangka panjang energi listrik kita tidak akan terjamin.

Ketiga, energi biru. Kita bersyukur akan rahmat Tuhan, tidak banyak negara yang diberkati segala sumber energi yang baik. Kita punya sumber batu bara, ada sumber gas, matahari otomatis, kita berada di tropis, kita punya sumber *geothermal*, kita ada sumber air yang cukup, kita ada angin otomatis, dan kita ada *biodiesel* yang cukup. Namun, semua tergantung pada sistem yang ada.

Harga kompetisinya, keberlanjutannya, dan *renewable energy* yang ada itu. Semuanya itu harus dikembangkan. Memang ada harga yang berbeda-beda. Itulah *renewable energy*, mau bayar sekarang ongkosnya atau bayar di belakang ongkosnya.

Kalau PLTU murah, murah awalnya, tetapi akibat di belakang hari bisa terjadi masalah kesehatan, bisa seperti di

China. Bayangkan ongkosnya Beijing untuk membersihkan Beijing dan Shanghai dari segala macam polusi akibat itu. Jadi pada akhirnya memang secara negara dia akan sama. Secara bisnis mungkin berbeda karena ada jangka pendek, tetapi kita berbicara negara.

PLN, Perusahaan Listrik Negara. Jadi harus bicara konsep negara dan lain-lainnya. Itu yang terjadi dan harus kita lihat kenyataannya. Tadi dijelaskan tentang listrik kecil yang ada di daerah-daerah. PLTA yang kecil-kecil. Itu yang harus menjadi bagian karena kenapa pentingnya *geothermal* dengan PLTA menjadi bagian dari sumber energi yang baik. Karena otomatis hutan terjaga. Apabila kita memusatkan tentang *geothermal* dengan PLTA, mengelola kurang bagus hutannya, habislah sumber energinya. Karena itulah diberikan tanggung jawab juga kepada pengembang.

Di samping izinnya, dia harus bertanggung jawab pada reboisasi, penghijauan hutan di atasnya. Karena apabila kehabisan hutan, geo panas buminya akan habis. Begitu juga karena sumber airnya habis, begitu juga tentang *hydro*. Semuanya dijaga dengan baik. Dengan begitu, kita akan mencapai suatu elektrifikasi yang baik, yang bersih, dan berkelanjutan, sekaligus kompetitif.

Walaupun kita mempunyai listrik yang cukup, tetapi tidak kompetitif, industri akan lari ke negara-negara yang listriknya kompetitif. Tetapi apabila kita hanya mengukur dari kompetitifnya, contohnya semuanya PLTU dengan enam set atau lima set, akibatnya Jawa akan menjadi hitam, polusi-polusi udara, sama dengan Shanghai dan Beijing. Jadi kombinasi daripada semua, itulah manfaat yang bisa menjadikan elektrifikasi di Indonesia menjadi sangat baik.

Nah, dengan harapan itulah saya mengharapkan kita semua, masyarakat kelistrikan mempunyai bagian yang utuh. Begitu juga listrik harus mempunyai suatu *multiplier*

effect yang baik. Artinya pengembangannya haruslah punya kemampuan teknologi dan industri penunjang.

Waktunya kita harus menjalankan kebijakan lokal konten yang baik, tetapi kompetitif. Kita juga bisa memaksakan lokal konten, tetapi tidak komparatif juga jadi masalah. Lokal konten yang komparatif hanya bisa dijalankan apabila ada rencana jangka panjang yang jelas. Kebijakan pemerintah, kebijakan PLN haruslah konsisten, jangan apabila ada saat-saat tertentu, lain orang, lain pula kebijakan. Akhirnya pengusaha menjadi bingung melaksanakannya.

Begitu juga *screen of time* harus jelas, karena begitu kita terlambat menyelesaikannya, rakyat menuntut, maka kita angkat lagi *power generator* dari luar. Memang berbeda dengan telekomunikasi, berbeda dengan listrik. Pada dasarnya, teknologinya masih bertahan sampai 100 tahun. Berbeda dengan telekomunikasi, telepon. Setiap dua tahun sistemnya berubah. Sebelumnya 3G, sekarang 4G sudah masuk, 5G masuk lebih cepat, sehingga *tab capital investment*-nya tinggi sekali. Tetapi listrik 100 tahun lalu tetap saja generator, transmisi trafo masuk ke rumah, 100 tahun tetap seperti itu. Saya tidak tahu kapan, mungkin pada waktunya nanti ada juga *wireless electricity*. Mungkin saja, tetapi sampai sekarang ini belum banyak yang bisa mewujudkannya. ✱

Disampaikan pada Pembukaan Seminar dan Pameran Ketenagalistrikan Hari Listrik Nasional ke-71 Tahun 2016 serta Penancangan Program PLTU Nasional Jakarta Convention Center, Jakarta
28 September 2016

Kadang Listrik Lebih Penting dari Sembako

Kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dari listrik. Apa pun pekerjaan kita. Saya kira, kalau pulang kantor, hal pertama yang Anda lakukan biasanya mencari colokan untuk *handphone*. Itulah yang paling kecil. Menyalakan televisi, semuanya listrik.

Karena itulah energi listrik sudah menjadi kebutuhan yang sangat dasar. Kalau dulu kita bicara sembako, listrik belum masuk. Sekarang, kadang-kadang lebih penting dari sembako karena orang kampung pun tanpa listrik marah-marah. Saya ingin mengatakan, listrik suatu kebutuhan pokok yang sangat mendasar, termasuk kita di Indonesia.

Di balik itu kita juga bersyukur sebenarnya. Hampir tidak banyak negara di dunia yang mempunyai sumber energi begitu lengkap dibanding Indonesia. Hampir semua tren energi, apabila kita berbicara listrik, kita punya. Kalau kita bicara fosil, *oil*, kita punya batu bara yang melimpah, kita punya gas, kita punya *oil*. Berbicara *renewable energy*, saya kira hampir semua *renewable energy*, apakah itu *geothermal*, *hydro*, bio, gas, sampah, dan sebagainya, itu berlimpah di negeri ini.

Jadi apa yang keliru sehingga elektrifikasi kita dan tingkat konsumsi listrik masih termasuk terendah di beberapa negara

di Asia? Padahal sumbernya begitu hebat, begitu banyak orang yang berinvestasi seperti hari ini. Makanya, tentu yang kita perlu atau harus pelajari ialah kebijakan, perencanaan, dan kerja keras. Sebenarnya, itu saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan listrik karena segala sumber sudah tersedia.

Berbeda dengan negara-negara lain. Katakanlah negara maju kayak Jepang, Korea, dia tidak punya sumber-sumber yang lengkap seperti itu, tetapi mereka mempunyai listrik yang lengkap. Artinya, sesuatu harus mempunyai suatu titik tolak yang keras. Bagaimana upaya kita untuk melaksanakan peningkatan elektrifikasi kepada masyarakat dan pemenuhan-pemenuhan dasar masyarakat.

Selalu terjadi korelasi yang kuat antara energi dan kemajuan, energi dengan industri. Dalam statistik kita tahu, yang paling pertama membutuhkan energi adalah industri, kurang lebih 34 persen, kemudian transportasi 18 persen, perumahan residensial 30 persen, dan lain-lainnya.

Jadi apabila terendah tingkat kemampuan listrik kita, berarti kita juga terendah di tingkat industrinya. Itulah hubungan yang mendasar dari kemajuan dengan keharusan kita meningkatkan kemampuan di bidang listrik. Apalagi di Indonesia dengan penduduk 255 juta jiwa yang terus-menerus bertambah tentu membutuhkan energi yang lebih banyak lagi.

Hal kedua, kegunaan listrik di kota-kota jauh lebih besar daripada di desa, sedangkan urbanisasi di Indonesia pada 20 tahun yang akan datang 65 persen orang akan hidup di kota, dan 70 persen listrik dibutuhkan di kota-kota atau di industri sekitarnya. Itulah sebabnya, listrik sesuatu yang mutlak kita kembangkan. Itu mutlak. Itulah garis besar dari apa yang kita butuhkan.

Karena itulah pemerintah setiap lima tahun mempunyai program yang cukup ambisius. Sebagian orang mengatakan ambisius. Padahal itu sebenarnya belum ambisius. Hanya dibutuhkan. Karena kita memang mengalami masih di bawah tingkat negara yang maju di Asia, baik dari sisi elektrifikasi, juga dari sisi konstruksi per kapita.

Kita inginkan cepat tercapai 35.000 megawatt. Itulah suatu keharusan. Itu kebutuhan, apabila kita ingin sejajar dengan negara-negara lain di Asia atau maju seperti negara lain. Dan juga ingin memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih 80 persen tingkat elektrifikasinya. Ini yang tidak mungkin kita tunda dan tidak mungkin tidak melaksanakannya untuk kemajuan negeri ini. Persoalan kedua, tentu pilihan peran energi apa yang kita tentu harapkan. *

Disampaikan Pada Acara Pembukaan the 4th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE)
Jakarta convention center
Jakarta, 10 agustus 2016

Sumber Energi Harus Kombinasi

Kalau kita bicara dulu tentang energi, maka yang jadi pertanyaannya apa energi itu? Energi itu seperti saya mengangkat sesuatu, maka saya butuh kekuatan untuk mengangkat sesuatu tersebut. Ketika gelap dan butuh cahaya, maka apa yang menggerakkan cahaya itu? Ialah energi. Ketika mobil bergerak, apa yang menggerakkannya? Ialah energi. Jadi energi adalah sumber kekuatan, tanpa energi tidak ada kekuatan.

Kita patut bersyukur, hampir tidak ada negara seperti kita yang mempunyai sumber energi yang begitu lengkap di dunia ini. Mulai dari energi fosil, seperti minyak, gas, batu bara. Karena ia berasal dari fosil, maka suatu saat ia akan bisa habis.

Untuk itu, ada sumber energi yang dapat diperbarui, seperti *geothermal*, selama panasnya di gunung itu ada, maka ia akan tetap ada. Kemudian air, yang memanfaatkan hukum gravitasi, angin yang memakai hukum gerak, dan tentu saja matahari. Dan sebenarnya kekuatan energi yang paling besar itu matahari, cuma teknologinya masih mahal dibanding yang lain. Ada *biofuel*, dari tumbuhan, ada sampah malah bisa jadi energi. Jadi berbagai sumber energi yang menyebabkan dunia ini bergerak.

Di Indonesia ini kita punya semua sumber energi tersebut, Fosil ada, ada minyak, ada batu bara, matahari kita ada di daerah khatulistiwa, air kita banyak sungai, *geothermal* kita banyak gunung berapi, energi angin tentu melimpah karena kita berada di kepulauan berarti banyak angin. Jadi kita paling lengkap.

Tetapi kenapa kita tetap masalah? *Pertama* ada pada masalah kebijakan, kita pernah berada di suatu masa di mana kita menjual murah energi kita, menganggap energi itu barang sosial sehingga dikasih subsidi besar selama puluhan tahun. Untuk itu ketika saya menjabat Wapres yang pertama kita turunkan berkali-kali subsidi, dan naikkan harga BBM dan saat ini juga kita naikkan harga BBM. Kalau kita tidak lakukan itu, maka hancur negeri ini. Karena kita menganggapnya energi itu barang sosial, padahal itu barang langka dan akibatnya kita boros.

Kedua, kita agak terlambat untuk mengelola sumber energi lainnya, agar jadi dobel energi. Karena itulah sekarang listrik sebagai salah satu bagian dari energi harus kita bangun secepatnya. Tetapi di lain pihak juga, sekarang sumber energi di dunia masih lebih banyak konvensional, yang terbesar dipakai ialah minyak karena salah satu pemakai energi yang paling besar adalah transportasi. Memang untuk sumber energi, transportasi belum bisa diganti, kecuali ada konversi ke gas, namun baru beberapa bagian dunia ini yang melakukannya.

Kemudian batu bara, 28 persen dunia masih menggunakan batu bara, dan minyak masih 34 persen dipakai di dunia ini. Pemakainya yang pertama industri, kedua transportasi, baru perumahan. Jadi kenapa kita itu, karena di Indonesia industri belum berkembang maka terbalik. Kalau di Jepang, kebutuhan listrik tertinggi, sama siang dan malam hampir

sama, tetapi kita malam yang tertinggi karena rumah lebih banyak. Dan setiap negara yang makin tinggi pendapatan suatu negara, kebutuhan energinya makin tinggi, lebih cepat tingginya. Contohnya kita saja, kita sekarang ini tak pernah berada di ruangan yang tanpa AC, sekarang semua ada AC.

Anda kembali sekolah pasti pakai AC, di kamar pakai AC, di mobil ada AC-nya sehingga keperluan energinya jadi makin tinggi. Karena itu solusinya harus makin hemat, kalau tidak, kebutuhan tinggi tanpa hemat, ada masalah yang kita hadapi di energi ini, dan harus ada variasinya.

Kemudian *primary energy* harus berbeda-beda, jangan hanya mengandalkan minyak. Sebab, begitu harga minyak tinggi masalah ada lagi, rendah juga masalah, maka harus dibarengi dengan kombinasi.

Kenapa di Indonesia perlu ada aturannya, energi listrik itu sumber *prime energy* namanya, harus punya persentase, batu bara tidak boleh lebih 50 persen, gas 25 persen, dan energi terbarukan harus 25 persen. Karena batu bara adalah sumber energi yang paling kotor dari segi lingkungan.

Kalau Anda ke Beijing, Shanghai, bisa lihat bagaimana kota itu kadang-kadang awannya berwarna hitam. Sebab, pembangkit listrik dan industri di sekitarnya banyak yang memakai batu bara.

Karena itu, pelan-pelan dunia ini menggantinya ke gas atau *renewable* yang lain. Kita di Indonesia harus begitu. Kalau semua pembangkit listrik batu bara sepanjang utara Jawa, maka Jakarta dan sekitarnya akan seperti Beijing. Karena itu, pengaturan energi harus ditata dengan baik. Jadi energi itu mempunyai banyak hal, mulai dari kegunaannya, asalnya, harganya, kontinuitasnya. Jadi satu wilayah harus lengkap, tidak boleh satu, tidak boleh hanya matahari karena

bagaimana kalau malam? Mati dia. Tidak boleh hanya angin karena apabila angin tiba-tiba tidak ada, habis listrik kan?

Tetapi tidak boleh juga batu bara semua, nanti tiba-tiba di laut lagi sulit perjalanan dari Kalimantan, ombak tinggi, batu bara itu tidak bisa sampai. Begitu juga tidak boleh semuanya gas karena akan membuat harga gas jadi mahal atau masalah kontinuitasnya ada masalah. Jadi pemakaian energi itu harus kombinasi dari sumber-sumber energi yang ada.

Inilah tentang bagaimana kita harus menjaga. Sekali lagi, energi harus dijaga kombinasinya dan jangan menggantungkan diri hanya pada satu produk, jangan seperti Venezuela yang sekarang negaranya susah akibat terlalu mengandalkan minyak, di mana 95 persen pemasukannya berasal dari minyak, dan ketika harga minyak jatuh, negaranya juga ikut jatuh miskin.

Atau seperti Arab Saudi yang sekarang menyadari bahwa jangan tergantung ke minyak, karena itu sekarang mereka membujuk orang-orang supaya pergi umrah agar kita bisa belanja di sana. Jadi Arab Saudi menjadikan umrah sebagai salah satu komoditasnya akibat harga minyak turun. Bahkan visa yang dulu gratis sekarang mesti bayar.

Nah, karena itulah, maka kita yang diberkati oleh Tuhan atas segala kombinasi energi di negeri ini harus membuat kebijakan yang baik sehingga kita tidak kehabisan energi. Tetapi rakyat tetap mampu membayarnya.

Kita juga bisa pakai semua, gas atau pakai minyak bersih, tetapi bisa bayar tidak? Timbullah subsidi yang tinggi. Anda tahu berapa subsidi energi dalam waktu 15 tahun di negeri ini? Rp 2.500 triliun, dalam 15 tahun. Kalau itu kita pakai bangun jalan selama 15 tahun, itu berarti hampir 10 tahun

anggaran pembangunan. Untuk itu, jangan jadikan energi itu sebagai barang sosial semata. ✱

Disampaikan saat Memberikan
Kuliah Umum kepada Para Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan Ke-54 dan
Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan Ke-55
Lemhannas RI Tahun 2016
Istana Wakil Presiden
Jakarta, 30 Agustus 2016

Tantangan *Renewable Energy*

Apabila kita berbicara *renewable energy*, tentu yang pertama kita bicarakan adalah potensi yang besar di negeri ini, yaitu *geothermal*. Tadi sudah disampaikan, potensi kita hampir 1,5 GigaWatt energi baru dan terbarukan, sementara yang baru dipakai 30.000 MegaWatt.

Artinya kita mempunyai potensi yang besar. Kalau rencana 10 tahun yang akan datang akan mencapai 70.000 megawatt, berarti kita masih mempunyai potensi 70 persen lagi yang siap untuk dikelola di masa-masa mendatang.

Dari 7.000 megawatt itu, kalau sudah tersedia 1.500 megawatt, artinya setiap tahun harus dibangun setidaknya 500 megawatt. Padahal skala tergantung daerahnya sekitar 50 megawatt, 100 megawatt. Tidak seperti apabila kita membangun PLTA, bisa 1.000 megawatt sekali bangun. Itulah ciri dari berbagai bagian *plan energy*.

Kita tahu semua *geothermal*, *hydro*, tidak bisa di pindah-pindahkan tempatnya, harus di tempat asalnya, sehingga memberikan suatu tingkat kesulitan juga. *Geothermal* dan *hydro* juga tidak bisa dibangun pada tempat sesuai selera. Harus di tempat di mana energi tersebut berada.

Akibatnya, *geothermal* kita tahu semua, salah satu sistem listrik yang tingkat rekonstruksinya, pembangunannya,

termahal dibanding yang lain, tetapi tentu memiliki tingkat *suistainability* yang terjaga. Otomatis juga kita harus menjaga hutan untuk itu. Karena tanpa hutan, *geothermal* juga akan habis. Jadi ini saling menjaga. Yang mempunyai proyek *geothermal* juga harus menjaga hutan. Yang di sekitarnya juga agar menjaga kelanjutan dari programnya. Pemerintah juga seperti itu.

Karena itulah kita meyakini, program ini tentu haruslah juga bersamaan dengan *renewable* yang lainnya, *hydro*, bio, gas, dan sebagainya, atau sampah, matahari, surya, angin, yang semuanya *Alhamdulillah* tidak ada satu pun tidak ada di negeri ini. Mau angin ada, mau sinar matahari apalagi. Kita bisa sampai sembilan bulan memanfaatkannya. Dibandingkan dengan hanya enam bulan, tiga bulan di negara-negara lain. Kita mempunyai angin yang bisa bermanfaat sampai sembilan bulan dibandingkan di negara-negara lain.

Jadi inilah upaya yang besar di samping memberikan kesempatan dan kemampuan energi kita. Kita juga harus melihatnya jangka panjang karena listrik selalu untuk jangka panjang. Kita tahu semuanya, *geothermal* membutuhkan teknologi yang lebih tinggi, membutuhkan tingkat keberhasilan juga tidak 100 persen, mungkin berapa persen. Ini mungkin satu-satunya energi yang tingkat kepastiannya tidak mencapai sekian persen. Itulah *geothermal*, berbeda dengan yang lain.

Namun, untuk masa datang negeri ini, kita ingin negeri yang maju, tetapi bersih dan hidupnya lebih baik lagi. Karena itulah, saya mengharapkan *geothermal* ini menjadi bagian yang prioritas. Apalagi seperti yang disampaikan Menteri ESDM, 10 tahun yang akan datang kita harus mempunyai 25 persen *renewable energy*.

Jadi 10 tahun yang akan datang, komposisi per energinya maksimum 50 persen ke PLTU, 25 persen ke gas, 25 persen

ke *renewable energy*. Barulah kita bisa *suistainability* terjamin listrik kita, di samping mempunyai cadangan yang kuat. Karena itulah peranan swasta harus menjadi penting. Saya harapkan agar semuanya dipercepat. Waktu sisa tiga tahun kabinet ini. Jadi semuanya harus dipercepat, disegerakan dengan standar-standar yang ada.

Memang *geothermal*, *hydro*, mempunyai suatu kekhususan. Sulit ditender karena seseorang memiliki dulu wilayah, baru mengajukannya. Ada wilayah, tidak ada, bisa. Jadi memang haruslah ada standar-standar harga yang disetujui bersama lebih dulu sehingga itu dapat dilakukan.

Jadi semua sumber energi mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda. Karena itu mempunyai penanganan yang berbeda, tetapi semua mempunyai manfaat. Karena apabila kita tidak mempunyai bauran energi yang baik, maka apabila salah satunya rusak, maka semuanya juga masalah.

Maka itulah semua cadangan energi suatu sistem transmisi nasional Grid atau Jawa Grid, Sumatera Grid atau Sumatera Grid, atau Jawa Grid harus dijaga. Tentunya PLN sebagaimana telah kita tugaskan harus segera menyelesaikan 46.000 transmisi untuk menjamin pembangunan yang ada.

Jangan terulang, pembangkitnya selesai listriknya tidak bisa dijual. Jadi itu yang sangat penting. Padahal pembangunan transmisi tentu lebih murah dibanding membangun *power plan*-nya.

Jadi jangan yang murah justru merusak yang mahal, atau menya-nyiaikan, begitu CEO-nya harus dibayar oleh PLN. Jadi ini memang harus diperhatikan juga oleh PLN, tentu juga oleh Pertamina karena masalah *geothermal* tidak jauh beda dengan mencari minyak dan mencari gas. ✱

Disampaikan Pada Acara Pembukaan the 4th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IGCE)
Jakarta convention center Jakarta, 10 Agustus 2016

Jangan Boros Energi

Sering orang salah mengira, pertahanan berbeda dengan ketahanan. Ketahanan itu bukan hanya pertahanan karena pertahanan bagian dari ketahanan. Ketahanan ekonomi, ketahanan energi, ketahanan pangan, itu selalu kita sebut. Artinya, bagaimana suatu bangsa dapat berjalan, bekerja, dan dapat *sustainable*. Juga berarti, berkelanjutan dengan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkannya. Apa itu energi? Energi itu tenaga. Kalau saya angkat ini, saya harus mempunyai kekuatan untuk mengangkat. Semua kekuatan itu ada ukuran-ukurannya. Semua yang bergerak butuh energi. Karena itulah, energi dibutuhkan oleh siapa saja, apakah perorangan, apakah industri, atau transportasi.

Memang yang paling banyak memakai energi adalah industri, kedua transportasi, ketiga residensial, rumah-rumah, dan sebagainya dalam bentuk energi listrik. Itulah energi yang memberikan kekuatan, memberikan daya gerak kepada kita semua. Tentu bagi kita sekarang ini, energi diukur sesuai dengan zamannya. Kalau abad ke-20, sebelum Perang Dunia, suatu kota dianggap maju kalau punya cerobong, dan cerobong itu berasap hitam. Itu kota maju karena industrinya. Sekarang keadaan itu dianggap neraka oleh semua orang,

musuh semua orang. Karena itu, energi beralih dari waktu ke waktu.

Secara umum, tentu energi terbagi atas *fossil oil* atau fosil ke gas, dan *renewable energy*. Itu kurang lebih dasarnya. Kita bersyukur karena Indonesia mempunyai semua itu. Tidak banyak negara yang mempunyai semua sumber energi utama selengkap itu.

Kita mempunyai *fossil oil*, batu bara, minyak, dan sebagainya. Kita punya gas, kita punya *renewable energy*. Contoh *renewable energy*, tenaga panas bumi, *geothermal*, *hydro*, surya, angin, biogas. Di Indonesia, semua itu ada. Kadang-kadang orang memasukkan nuklir ke *renewable energy*, tetapi kadang bukan *renewable energy* atau kadang-kadang juga pindah.

Hidup ini selalu mempunyai kebutuhan yang lebih. Setiap kali penduduk bertambah, maka membutuhkan energi 1,5 kali atau dua kali dari pertumbuhan. Pertumbuhan naik, maka kebutuhan energi semakin tinggi. Kalau pertumbuhan kita mencapai lima persen, maka pertumbuhan kebutuhan energi sebesar 10 persen agar bisa memberikan kekuatan ekonomi, memberikan daya dukung kepada kita. Karena pertumbuhan itu, membutuhkan energi yang lebih besar, dan seterusnya lebih besar lagi.

Secara umum kebutuhan energi Indonesia termasuk rendah di antara negara ASEAN. Kita masih kalah jauh dibandingkan negara lain. Katakanlah kebutuhan per kapita energi di Singapura, Malaysia, atau Thailand. Kita nomor empat dari kebutuhan energi per kapita. Jadi memang pertumbuhan ekonomi kita nomor 4 di ASEAN. Artinya, ke depan kebutuhan energi itu masih butuh lebih banyak lagi. Pada puncak tahun 1975-an atau awal 1985-an, produksi minyak kita mencapai 1,6 juta barrel per hari. Sekarang, produksi kita tinggal setengahnya, malah mungkin di bawah 800.000 barrel

per hari. Produksi minyak kita semakin menurun sehingga kita terpaksa mengimpor. Jadi kita sebenarnya sudah defisit dari sisi minyak. Apa yang kita butuhkan? Ada dua hal yang kita butuhkan. Pertama, bagaimana meningkatkan kapasitas kemampuan energi kita. Karena tetap dibutuhkan investasi di bidang perminyakan. Walaupun harga batu bara turun, tetapi tetap harus ada keberlanjutan karena kita mempunyai PLTU yang membutuhkan batu bara.

Kita membutuhkan batu bara kira-kira 80.000 ton untuk dua atau tiga tahun mendatang. Dari jumlah itu, 60 persen masih berbentuk kebutuhan yang *primary* sehingga kita membutuhkan kurang lebih 200 juta ton lagi.

Hampir setengah dari produksi batu bara nanti digunakan dalam negeri hingga lima tahun yang akan datang. Jadi semua itu membutuhkan produktivitas yang baik, walaupun kita keadaannya seperti itu. Itulah bagian-bagian dari energi.

Di lain pihak, kecenderungan dunia untuk memperbaiki kondisi udara supaya jangan terjadi *climate change*. Jadi kita perbaiki lingkungan hidup, maka kebutuhan pada *renewable energy* juga semakin tinggi. Karena itulah pemerintah memutuskan untuk *prime energy* kepada listrik kita harus mempunyai persentase yang jelas. Kita tahu semua kebutuhan *prime energy* untuk listrik maksimum 50 persen untuk batu bara, 25 persen dengan gas, dan 25 persen dengan *renewable energy*. Kita targetkan 2025 yang akan datang atau 10 tahun dari sekarang.

Seperti saya katakan tadi, tidak banyak negara yang mempunyai kemampuan, mempunyai energi dasar yang cukup. Jepang tidak mempunyai gas, tidak punya minyak. Tentu punya *hydro*. Ada, tetapi tidak sebanyak itu. Tetapi ada juga negara seperti Skandinavia, Austria yang 80 persen energi listriknya dari *hydro*. Ada juga negara yang mempunyai kemampuan *geothermal* besar seperti New Zealand, Filipina,

dan Islandia. Ada juga negara yang mempunyai kemampuan energi dari tenaga surya dan sebagainya. Nah, dibutuhkan teknologi untuk itu.

Contoh yang paling jelas, kalau kita tidak hati-hati, negara juga bisa rusak dengan sistem. Kalau energi tidak diperlakukan dengan benar, suatu negara bisa hancur.

Hari ini Anda tiap hari lihat Venezuela. Venezuela dulu negara yang paling mempunyai kapasitas industri perminyakan yang kuat. Venezuela negara yang mempunyai *reserve* minyak terbesar dunia, mengalahkan Arab Saudi, Amerika, juga Rusia. Tetapi Venezuela negara yang sangat miskin dewasa ini. Penduduknya mencari makan pun harus antre, membeli sesuatu juga harus menyeberang ke Kolombia.

Kenapa itu terjadi? Karena dia memperlakukan energinya dengan sangat murah, menjadi barang sosial, bukan menjadi barang komersial. Jual bensinnya hanya setara Rp 1.500 per liter, membagi-bagi, mengeksport dengan murah kepada negara-negara yang butuh bantuan. Akhirnya negeri itu *colaps* setelah harga minyak turun. Penyebabnya, sebelum harga minyak turun 95 persen penghasilan pemerintah Venezuela dari minyak.

Arab Saudi dewasa ini juga mengandalkan 90 persen pendapatannya dari minyak. Begitu harga minyak turun, dia mengalami masalah. Jadi kita juga bersyukur, dulu 80 persen pendapatan kita dari minyak. Sekarang pendapatan minyak kita hanya 25 persen dari pendapatan negara. Artinya kita bisa menyesuaikan diri, baik kemajuan ekonomi, juga kepada negara. Jadi dibutuhkan efisiensi dan perilaku.

Banyak efisiensi. Dulu kalau kita keluar dari kamar hotel, AC tetap hidup, listrik tetap nyala. Setelah krisis energi tahun 1997, semua hotel, begitu kita keluar kamar, mati lampu, mati AC, dan sebagainya. Itu suatu teknologi dan kebiasaan. Tahun 2005, saat harga minyak naik dan subsidi tinggi sekali, hampir

menyebabkan negara ini defisit besar-besaran. Karena itu, kita ambil tiga langkah. Saya waktu itu masih di pemerintahan. Anda semua tahu, kita naikkan harga minyak sebesar 124 persen, terbesar dalam sejarah Indonesia. Kita konversi minyak tanah ke gas dalam waktu tiga tahun. Kita berhenti pakai jas agar suhu AC bisa dinaikkan 25 derajat. Kenapa, Anda semua sekarang hampir tidak ada yang memakai jas? Semua siap dengan memakai batik. Itu akibat penghematan energi yang bisa kita lakukan karena kalau kita memakai jas, suhu AC mungkin 16 derajat, paling sedikit harus 20 derajat. Kalau memakai batik cukup 25 derajat, bisa menghemat energi. Itu semua ada sejarahnya.

Itu dengan keras, tidak boleh lagi, AC harus 25 derajat. Akhirnya cukup memakai batik. Industri batik juga maju dan sebagainya. Nah, kita juga tidak harus memakai dasi sepanjang hari. Contohnya seperti itu. Itulah yang menyebabkan terjadi efisiensi. Jadi efisiensi itu dari teknologi, perilaku. Kalau dulu mobil menggunakan bahan bakar 1:4, sekarang ada mobil sudah 1:16 atau malah 1:20. Sepeda motor sudah 1:40. Itu semua teknologi, teknik bagaimana menciptakan efisiensi energi agar terjadi ketahanan.

Karena seperti saya katakan tadi, ketahanan energi hanya dua cara. Pertama selalu meningkatkan produksi, kedua efisiensi dalam pemakaiannya. Hanya itu yang bisa dilakukan agar mencapai ketahanan energi. Tanpa itu semua, kalau pemakaiannya boros, atau produksinya turun, maka juga tidak tahan. Karena itulah kita harus bersama-sama bekerja seperti itu.

Tetapi bisnis energi juga harus sesuai dengan tuntunan, *renewable energy* atau *clean energy*. *Pengembangan green energy* tetap harus kita dilakukan bersama-sama, dan itu butuh investasi. Hal itu merupakan bisnis besar yang dapat

kita lakukan bersama-sama, dan itu memang harapan semua orang untuk diwujudkan. *

Disampaikan pada Acara
Gathering Forum Ketahanan Energi Nasional
Oleh Ikatan Alumni Lemhanas (IKAL)
Di Hotel Grand Sahid Jaya
Jakarta, 8 september 2016

Rahmat dan Musibah

Hari ini memperingati Hari Lingkungan, artinya kita memperingati kehidupan kita, kehidupan kita di masa kini dan kehidupan kita di masa depan, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Itulah makna dari kehadiran kita di sini. Terlebih, kita hadir merayakannya di Siak, Riau, karena salah satu provinsi di Indonesia yang memahami betul baik buruknya kehidupan, pemahaman baik buruknya lingkungan adalah masyarakat Riau.

Lingkungan yang baik merupakan rahmat, tetapi lingkungan jelek merupakan musibah, seperti apa yang kita sering alami di daerah ini. Karena itulah, kita merayakan hari ini dengan tema “Selamatkan Tumbuhan dan Satwa Liar untuk Kehidupan”.

Kita tidak merayakannya agar gajah-gajah, singa-singa, atau monyet-monyet itu lebih baik. Tetapi kalau gajah tetap hidup, harimau tetap banyak, monyet tetap banyak, dan lain-lainnya, itu artinya hutan masih baik. Kalau hutan masih baik, berarti cuaca masih baik, berarti air masih banyak, akhirnya kehidupan kita lebih baik lagi. Itu maknanya.

Tumbuhan dan satwa tidak bisa dipisahkan dengan manusia. Manusia hidup dengan baik haruslah dengan tumbuhan yang baik. Hutan yang baik akan menjadikan

satwa hidup dengan lebih baik. Itulah makna kenapa kita memperingati Hari Lingkungan ini dengan tema yang ada, agar kita memahami dan memperbaikinya.

Zaman memang banyak berubah. Zaman dulu orang yang hebat di rumahnya apabila ada dua gading gajah bersilang, ada kulit harimau yang diawetkan. Itulah tanda-tanda kehebatan. Sekarang ini, kedua hal itu adalah musuh dunia. Dia menjadi kriminal apabila membanggakan dua hal itu. Dunia banyak berubah. Lingkungan itulah yang menyebabkan kehidupan ini akan berlanjut dengan baik, atau tidak.

Kita menyadari betul lingkungan banyak berubah akibat kehidupan yang berubah. Hari ini, bulan Juli masih hujan, pada September-Oktober kadang-kadang hujan belum datang. Perubahan-perubahan lingkungan itu karena lingkungan yang berubah. Karena itulah, untuk kehidupan hari ini, apalagi masa yang akan datang, haruslah memperbaiki dan selalu menjaga lingkungan.

Bukanlah hal mudah untuk memperbaiki lingkungan karena selalu berbarengan dengan ekonomi. Kalau kita terbang di atas Riau, sepanjang perjalanan kita melihat kebun sawit yang memberikan kehidupan kepada manusia, yang memberikan kemampuan kepada manusia. Tetapi apabila dikelola terlalu besar dan melampaui kemampuan lingkungannya, maka dia akan jadi musibah.

Karena itulah, membuat harmoni antara lingkungan dan ekonomi suatu kebijakan yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Hanya kedisiplinan yang dapat menjaga itu. Bagaimana kita menjaga kedisiplinan, tindakan, dan melaksanakan kebijakan yang banyak itu.

Janganlah kita mengulangi kesalahan masa lalu. Kita mempunyai hutan-hutan tropis yang luar biasa, 150 juta hektar tahun '50-an, '60-an, tetapi akibat keserakahan yang diajarkan orang-orang luar, keserakahan yang dijalankan oleh

para pejabat dan para pengusaha, terjadilah kemerosotan hutan itu dan menyebabkan kekeringan, kemudian musibah kebakaran hutan, dan sebagainya.

Begitu juga hutan gambut yang memberikan kehidupan alamiah kepada masyarakat, kemudian dikelola secara tidak benar, maka menimbulkan banjir dan sebagainya yang menimbulkan kerusakan kehidupan di masa datang. Apa yang kita peroleh dari eksploitasi sumber daya alam itu jauh lebih kecil dibanding biaya yang harus kita keluarkan dewasa ini. Bagaimana gambut kita mesti kelola, perbaiki lewat perbaikan-perbaikan gambut pada masa sekarang dan masa yang akan datang sungguh luar biasa besar biayanya.

Begitu juga akibat dari kebakaran hutan, tentu mempunyai biaya yang besar, di samping efeknya kepada manusia. Karena itulah, lingkungan selalu kita kelola dalam kehidupan yang keberlanjutan. Jangan hanya dipikirkan hari ini, tetapi pikirkanlah masa yang akan datang untuk anak-cucu kita kehidupan yang lebih baik. Itulah makna kita memperingati Hari Lingkungan ini.

Memang banyak daerah seperti Riau yang tragis akibat lingkungan. Mudah-mudahan tidak berlanjut ketragisannya. Begitu banyak orang yang kaya karena kekayaan alam Riau, tetapi dengan pengelolaan alam yang kurang baik, begitu banyak gubernur dan bupati yang masuk penjara karena masalah kekayaan alamnya. Sungguh tragis. Mudah-mudahan tidak terulang lagi. Menjadi tidak adil dinikmati oleh para penguasa, tetapi menjadi penjara untuk yang mengizinkannya. Karena itu marilah kita mengelola secara baik apa yang kita punyai ini. *

Disampaikan pada acara
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2016
serta Penganugerahan Kalpataru dan Adipura 2016
Kab. Siak Sri Indrapura, Riau
22 Juli 2016

Hijaukan dengan Bambu

Kita sebagai manusia tentu semakin sadar arti lingkungan. Untuk kualitas hidup, haruslah lingkungan baik. Yang kedua, juga pengalaman dan kesadaran kita bahwa lingkungan harus bermanfaat terhadap semua orang. Maka setiap upaya harus melibatkan juga seluruh masyarakat. Karena melibatkan masyarakat yang kemudian bermanfaat untuk masyarakat, barulah lingkungan itu dapat *sustainable*, dapat berlangsung dengan baik.

Kita pernah punya pengalaman, berbagai-bagai acara lingkungan dengan proyek demi proyek, reboisasi, penghijauan, segala macam. Tetapi ujung-ujungnya kadang-kadang penjara. Lingkungan tidak baik malah diselewengkan. Maka yang kita kemudian laksanakan, lingkungan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri, dia memelihara, bermanfaat untuk dirinya.

Ukuran keberhasilan penghijauan adalah sungai. Kalau sungai kembali biru, baru berhasil. Kalau sungai keruh itu berarti di DAS-nya masih terjadi pengikisan ke bawah. Itu ukurannya. Tidak usah pakai statistik. Lihat saja warna sungai. Kalau warna sungai sudah biru, baru berhasil. Kalau warnanya masih coklat, itu berarti tidak berhasil. Itu saja ukurannya. Saya tidak melihat apa yang terjadi di atas. Saya

melihat di bawah, sungainya. Airnya tidak biru, berarti di atas habis hutannya. Itu ukurannya.

Nah, kalau soal bambu, setiap sungai ada proyek talud, lama-lama pecah, longsor taludnya, ganti lagi, bermiliar-miliar, tetapi gersang. Pertanyaannya, bagaimana memelihara lingkungan dengan murah, bertahan, dan tidak gersang? Salah satunya menanam pohon. Pohon yang efektif dan berguna untuk masyarakat, serta cepat dan juga tahan di lereng-lereng, serta di mana pun itu bambu. Bambu mempunyai manfaat seperti apa saja, dari akar sampai daun, apalagi pohonnya. Timbullah pemikiran bahwa bambu kita harus kaji ulang karena ini bukan hal baru.

Saya baca buku, sejak nenek moyang juga bambu. Walaupun tentu kita tidak ingin lagi memakai rumah bambu secara luas, tetapi mau menikmati udara pakailah dinding bambu. Cuma kadang-kadang kalau ada pencuri, bambu lebih gampang dirusak. Justru itu saja, tetapi tidak apa-apa, itu juga menjaga keamanan.

Karena kalau dinding bambu, saya kira AC tidak banyak digunakan lagi karena udara bisa masuk dari celah-celahnya. Itu juga udara masuk, nyamuk tidak. Itu bagus. Jadi semua ada manfaat.

Untuk itu coba kita besarkan secara nasional dengan murah. Hanya gerakan nasional yang bermanfaat untuk masyarakat, baik untuk lingkungan, pemerintah bisa membiayai dengan murah. Tidak perlu pemerintah harus terjun ke mana-mana, tetapi kerahkan masyarakat dengan modal dari pemerintah. Itu program yang paling mudah, paling cepat, paling terawasi karena masyarakat akan mengawasi dirinya karena bermanfaat kepada dirinya. Jangan lewat proyek-proyek besar-besar yang tidak bisa diperiksa.

Itulah yang mendasari kenapa gerakan nasional penanaman bambu nasional ini supaya semuanya terlibat. Jadi

nanti kalau jadi, pabrik sumpit bikin lagi, banyak produknya. Sumpit dulu cepat habis karena habis makan dibuang. Kalau pakai plastik dipakai ulang, jadi kotor. Jadi banyak hal bisa dibuat.

Karena itulah saya mengharapkan program nasional ini dapat mencapai semua level dengan modal kecil. Pemerintah hanya membayar bibitnya. Masyarakat kemudian lagi membibitkan, dibeli ulang oleh pemerintah, dijual kepada masyarakat. Itu yang kita lakukan dulu sehingga dari pembibitan, kurang lebih 15 pembibitan nasional, tiba-tiba dalam waktu satu tahun menjadi ratusan pembibitan. Anak-anak SD pun dapat membibitkan dan dibeli oleh pemerintah.

Itu konsep yang saya minta, konsep kerja sama. Saya kira banyak ahli bambu di antara kita yang mengetahui proses ini lebih baik dan juga ada ratusan jenis bambu di Indonesia. Indonesia salah satu negeri yang mempunyai jenis-jenis bambu yang baik. Kalau kita dulu ada bambu Toraja, ada bambu Kuning, ada bambu apa saja.

Jangan lupa, bambu melambangkan apa saja. Ada rumah bambu, ada satu yang paling orang ingat, kepahlawanan itu, ada di bambu, bambu runcing. Coba kapan orang bicara politik kalau tanpa mengenal bambu runcing. Tidak ada mengatakan kayu runcing.

Jadi berbagai simbolik ada di bambu. Itu artinya berbagai manfaat ada di bambu. Tetapi yang paling penting segala upaya itu harus bermanfaat untuk masyarakat. Di samping bermanfaat karena lingkungannya lebih baik, pemerintah bermanfaat karena dengan biaya murah dapat menjaga lingkungan, dapat menjaga sungai, dapat menjaga lereng-lereng, dapat menjaga apa saja dengan baik. Terutama bambu buat masyarakat dapat dipakai untuk membangun rumah, apa saja.

Justru kalau di negara-negara yang maju, bambu sangat penting. Kalau pergi ke Hongkong, lihat pembangunan rumah 50 tingkat, *stage holding*, itu bukan besi, *stage holding*-nya selalu bambu. Saya tanya kenapa bambu?

“Ooh di sini selalu banyak topan, Pak, kalau besi bisa patah, langsung runtuh ini bangunan. Tetapi kalau bambu fleksibel, mau topan apa pun dia hanya goyang-goyang tidak patah.”

Itulah antara lain kenapa di pembangunan rumah-rumah di Hongkong semua pakai bambu. Sama juga kita di sini. Kita makmur karena hijau, hijau karena air, air harus karena ada hutan, hutan karena hujan, hujan karena uap, uap karena air.

Berputar saja hidup ini. Begitu hilang dia punya rantai, hilang hutannya, kehidupan tidak berputar. Yang ada hanya banjir dan kekeringan. Kalau musim hujan banjir, musim kemarau kering. Kalau ada hutan yang baik, pepohonan yang baik, ini kehidupan akan berputar dengan baik. *

Disampaikan pada acara
Launching Penanaman Bambu 100 Juta untuk Indonesia,
diawali 10 juta dari provinsi Sulawesi Selatan
Di Gowa, Sulawesi Selatan
10 september 2016

Belajar Mengelola Sampah

Tidak banyak negara yang memperingati hari sampah seperti di Indonesia. Mungkin karena negara lain tidak peduli atau justru sudah sangat peduli sehingga tidak lagi menganggap sampah sebagai masalah.

Sampah yang terus bertambah dan menjadi masalah sebenarnya dipicu oleh kemajuan suatu negara. Kemajuan ekonomi membuat konsumsi makin bertambah sehingga ada barang yang tersisa atau menjadi sampah. Kedua, teknologi, akibat orang mempunyai teknologi yang simpel, tetapi kemudian berbahaya pada akhirnya.

Pada masa lalu, setiap membeli makanan biasanya dibungkus dengan daun pisang. Sekarang, hampir semua makanan dikemas dengan bahan plastik atau kertas. Tidak ada lagi nasi yang dibungkus dengan daun. Kenapa? Karena teknologi membuat plastik menjadi lebih murah daripada membeli daun pisang.

Demikian pula dengan tingkat konsumsi masyarakat kita, yang sekarang semakin tinggi. Dahulu toko atau pusat perbelanjaan masih sepi. Namun, seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, pusat perbelanjaan menjadi lebih ramai. Situasi ini ikut menyumbang peningkatan volume sampah.

Perubahan lingkungan rumah tangga juga menjadi pemicu meningkatnya jumlah sampah domestik. Sebagian besar, istri atau kaum perempuan tidak sempat lagi memasak di rumah karena ikut sibuk bekerja. Maka yang terjadi adalah membeli makanan instan karena semuanya sudah tersedia. Makanan-makanan tersebut semuanya dikemas dalam wadah yang kemudian menjadi sampah.

Ilustrasi lain adalah sampah dari warung atau restoran. Sampah di restoran Padang biasanya lebih sedikit karena hanya lauk yang dimakan, yang dibayar. Sedangkan lauk yang sisa dijual kembali sehingga tidak menjadi sampah.

Sementara restoran lain menggunakan konsep yang berbeda. Makanan yang tidak dihabiskan akan menjadi sampah. Bila hanya 70 persen makanan yang habis, maka 30 persen sisanya dibuang, dan menambah volume sampah.

Lalu, bagaimana sampah ini diubah dari beban menjadi keuntungan? Sampah yang sebelumnya musuh kita jadikan kawan. Maka harus ada gerakan yang dibuat untuk mengelola sampah sehingga menciptakan keuntungan ekonomi.

Sampah tidak mungkin dihilangkan. Harus ada kebijakan dalam menekan jumlah volume sampah dengan melibatkan masyarakat. Salah satu caranya adalah semua selokan di depan gedung atau rumah harus menjadi tanggung jawab si pemilik untuk membersihkan. Pemilik bangunan tidak lagi dengan seenaknya membuang sampah di selokan karena dia bertanggung jawab.

Di Singapura, misalnya, setiap jentik nyamuk yang didapati oleh otoritas setempat di suatu halaman atau bangunan, maka hukuman denda akan diberlakukan kepada si pemilik lahan atau bangunan karena tidak menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya. Di Amerika, semua orang harus membersihkan salju yang ada di rumahnya saat musim dingin tiba. Bila ada

orang yang tergelincir karena salju tersebut, maka si pemilik rumah yang dimintai tanggung jawabnya.

Selama ini solusi menangani sampah hanya melarang membuang sampah sembarangan, tapi tidak menyediakan tempat sampah yang memadai. Jadi kalau tidak ada tempat sampah, mau dibuang ke mana? akhirnya ke sungai dan sebagainya.

Untuk itu, dalam persoalan sampah, kita harus belajar dari sapi. Jika melihat seekor sapi, maka semua yang ada pada sapi tersebut bisa dimanfaatkan. Dagingnya untuk dikonsumsi, kulitnya jadi sepatu atau jaket, tulangnya jadi makanan ternak, jeroan enak dibuat coto Makassar, kotorannya jadi pupuk, tanduknya jadi kerajinan tangan. Hampir tidak ada yang tidak bisa dimanfaatkan dari sapi.

Seperti halnya sampah, terdiri dari barang-barang yang bermanfaat yang jadi sisa. Jadi bukan kotoran sebenarnya. Sisa makanan, sisa buangan pakaian, dan sebagainya. Itu semua masih bisa kita manfaatkan atau daur ulang.

Karena itulah, saya sangat setuju dengan ide bank sampah yang datang dari masyarakat. Artinya masyarakat kita sejak dulu mengerti tentang bagaimana mengelola sampah dengan baik. Buktinya di TPA, tempat pembuangan sampah itu begitu banyak rakyat kecil yang bekerja mengais-ngais sampah untuk hidup. Tetapi harus ditata jangan sampai kejadian yang menimpa TPA Luewigajah di Bandung itu, 12 tahun lalu, terulang dan mengorbankan masyarakat kecil. *

Disampaikan pada
Acara Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2016
Celebes Convention Center
Makassar, 5 Maret 2016

Merusak Hutan Indonesia

Saat ini, banyak seruan agar kita menjaga satwa liar. Tentunya banyak yang belum memahami kenapa satwa seperti orang utan, gajah, harimau, dan sebagainya harus kita jaga. Padahal yang terpenting di dunia ini adalah bukan kehidupan satwa tersebut, tetapi kehidupan manusianya. Itu karena keberadaan satwa liar merupakan suatu indikator bahwa lingkungan kita masih baik. Ketika gajah masih banyak, orang utan masih berkeliaran, kupu-kupu berterbangan, itu berarti keadaan hutan kita masih baik.

Apabila hutan masih baik, maka artinya air masih tersedia. Dan apabila air masih ada, tentunya implikasinya baik untuk manusia.

Jadi ada suatu hubungan-hubungan yang penting kita jaga karena kalau satwa liar sudah tidak ada, berarti hutan sudah habis, kualitas udara menjadi tidak bersih, maka kualitas hidup manusia akan menurun.

Pada masa lampau, yakni antara tahun 1960-1970-an, kita pernah mempunyai kesalahan luar biasa. Pada masa tersebut, kita membatasi hutan untuk kemakmuran sehingga pada zaman tersebut orang kaya dan terpandang adalah orang yang punya jutaan hektar hutan yang siap untuk ditebang.

Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan aturan yang jelas, yakni melakukan reboisasi, tetapi yang namanya manusia banyak mempunyai kesalahan dan juga kecerobohan.

Sengaja maupun tidak disengaja. Akhirnya eksploitasi hasil hutan yang awalnya ditujukan untuk kemakmuran bangsa justru menyebabkan kemiskinan bangsa. Akibatnya, banjir, tanah longsor dan akibat lain, lingkungan yang rusak.

Itu adalah kesalahan kita, menghabiskan hutan kita atas nama kemakmuran. Padahal pada waktu itu dari setiap kubik kayu yang kita tebang, kita hanya mendapat *fee* paling tinggi lima dollar.

Dan sekarang seperti kita lihat, di mana saja di Indonesia, selalu terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Dunia mengalami perubahan iklim dan bumi menjadi semakin panas.

Saat ini kita berusaha memperbaiki semua itu dengan melakukan rehabilitasi. Meskipun ternyata ongkos merehabilitasinya jauh lebih besar daripada manfaat sebelumnya, dari pada pembabatan hutan itu.

Jadi ini juga satu kesalahan bersama kita di dunia ini, bukan hanya kesalahan Indonesia semata. Untuk itu dalam satu pertemuan besar di Tokyo saya ditanya, mengapa Indonesia tidak mampu menjaga *tropical forest* yang dimilikinya. Saya bilang siapa yang tidak menjaganya, kalian yang merusak itu.

Dulu kita tidak mengerti apa-apa tentang membatasi hutan sebelum orang Amerika dan Jepang datang mengajari orang Indonesia memakai bulldoser dan *chainsaw* untuk membatasi hutan.

Dan saya juga yakin, kalian menikmati hasil kayu dari Indonesia, seperti kursi, meja, kusen jendela, semuanya terbuat dari kayu di ruang seminar ini adalah hasil kayu dari Indonesia.

Untuk itu harus menjadi tanggung jawab bersama. Anda harus membayar kami untuk melakukan penghijauan melalui sistem *carbon trading*.

Itulah makna kerja sama internasional memperbaiki lingkungan hidup itu untuk menjadikan kembali hutan tempat alam menjadi bersih, tempat para binatang liar ini hidup, yang bermakna hutan baik, lingkungan baik, air kembali mengalir menjadi jernih kembali.

Tidak seperti sekarang, air sungai isinya lumpur dan sebagainya, dan juga bagian daripada kita semua menjaga itu. Ada banyak upaya kita melakukan reboisasi itu, dulu kita ada gerakan satu juta hektar. Kemudian gerakan satu miliar pohon. Kita melakukan upaya perbaikan lingkungan, sampah, dan sebagainya.

Kita sekarang lagi melakukan gerakan untuk memanfaatkan ulang sampah plastik dan penghematan kantong-kantong plastik di supermarket. Kita juga melakukan sertifikasi kayu, dan semua program-program itu harus bersamaan dijalankan dalam rangka menjaga lingkungan untuk kebaikan kita, untuk kesejahteraan kita, untuk kualitas hidup. Semua itu tidak punya makna tanpa kerja sama seperti itu.

Jadi, menjaga lingkungan hidup adalah karena pendahulu kita mewariskan suatu hutan yang rusak, maka tugas kita hari ini adalah mewariskan kepada anak cucu kita dengan merehabilitasi, mereboisasi hutan yang lebih banyak untuk anak cucu kita ke depan.

Begitu juga kebiasaan kita yang sampai sekarang masih banyak daerah yang sampahnya dibuang ke sungai, industri-industri yang merusak lingkungan yang membutuhkan kesadaran dan hukum yang jelas untuk itu. Kesadaran selalu timbul daripada hukum. Jarang kesadaran hanya karena kesadaran, tetapi kesadaran baru bisa efektif apabila hukum berjalan dengan baik.

Karena itulah, hukum lingkungan, kebakaran hutan yang mempunyai hukum yang jelas, kita harus jalankan seperti itu. Itulah semua yang akan menjadikan hidup lebih baik pada masa datang, yang akan kita berikan kepada anak cucu kita, kepada kita semua, dan kepada dunia ini. ✨

Disampaikan pada Acara Pembukaan Pameran Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia ke-20 tahun 2016
Jakarta Convention Centre
Jakarta 09 juni 2016

BAB 4
TEKNOLOGI

Tanpa Teknologi

Industri pesawat terbang memang *high tech, high cost*. Modalnya besar sehingga dibutuhkan investasi besar. Walaupun banyak negara yang membuat pesawat atau perusahaan besar mulai sulit menjual produknya, tetapi lebih sulit lagi memelihara industrinya selama 30 tahun secara konsisten.

Kalau saya ikuti pengalaman PT DI, itu yang tidak konsisten. Bisa orang beli pesawat, bisa buat, bisa jual, tetapi memberikan jaminan *after sales*, kadang-kadang di situ letaknya yang menyebabkan kontinuitasnya menurun. Di samping juga sulitnya, pesawat butuh *image* yang besar, butuh persepsi sangat kuat. Sama juga barang-barang tertentu. Seperti sering saya katakan, kalau saya mau beli pesawat, ada yang tawarkan pesawat buatan Filipina dan ada buatan Amerika. Selalu kita terjebak dalam pikiran, beli buatan Amerika saja. Jadi sama saja. Ini pesawat buatan Indonesia tapi ada juga buatan Eropa, pilihan pertama orang pasti yang lebih terjamin. Ada yang sukses, walaupun sekarang kita tahu ada juga yang menghadapi kesulitan.

Karena itulah, di dunia ini kita tahu semua perusahaan yang sukses adalah justru perusahaan besar yang *merger-merger-merger sehingga* menjadi tergabung. Karena dia tidak

hidup sendiri, dan kita semua tahu bahwa sekarang banyak perusahaan yang memang sudah lama berhenti. Apakah Fokker atau apa pun. Jadi memang suatu bisnis yang tidak mudah untuk kita kembangkan. Tapi kita bersyukur selama 40 tahun bisa bertahan.

Tetapi letaknya menjaga reputasi. Begitu hebatnya pemerintah sehingga Hari Teknologi dimulai dari terbangnya pesawat buatan PT DI. Namun, itu kemudian berhenti. Hari Teknologinya tetap jalan, tetapi yang dirayakannya tidak ada. Tentu saya bukan melihatnya dari sisi teknis. Anda lebih pintar, tetapi yang paling penting fokus saja. Kalau saya lihat dari bermacam-macam pesawat yang direncanakan, ada rendah, tiba-tiba tinggi, akhirnya karena tidak mampu, maka bikin 212, 219. Tapi kelemahan yang paling besar, menurut saya, ketidakyakinan orang bahwa kalau saya beli ini pesawat, apakah bisa bertahan 30 tahun? Seperti selalu saya katakan, tiga tahapan dalam industri: membuat, menjual, memelihara. Kebetulan *background* saya penjual mobil. Jadi selalu saja saya tekankan, ada yang buat, ada yang jual, dan ada yang memelihara. Yang paling penting orang membeli itu pemeliharaan, bukan menjual, sehingga dalam menjual itu selalu pedomannya. Kita tanda tangan kontrak, itu bukan akhir. Itu justru awal penjualan, awal janji. Jadi teken penjualan itu awal janji.

Untuk memelihara pesawat, itu butuh setidaknya selama 30 tahun. Menurut saya, itu sebenarnya mengapa PT DI tidak melakukan itu. Jangan berusaha menjual terlalu jauh, tidak mungkin itu. Sebab, perlu ada *after sales services* yang baik. Pesawat itu punya jam terbang, kapan mau cek, macam-macam, mana cek tahunan, cek jam terbang. Begitu semua tidak siap *sparepart*, jadi susah.

Saya punya pengalaman. Suatu hari saya ada di Johor. Pesawat saya mengalami kerusakan, mekaniknya tidak tahu.

Langsung telepon, *teleconference* dengan pabriknya walau di sana tengah malam. Jadi servisnya 24 jam. Di mana pun terbangnya dia harus kasih petunjuk, lengkap. Itu baru bisa bisnis pesawat.

Kalau mobil masih mudah, simpan dulu, pergi beli *sparepart*. Ini kalau pesawat bagaimana, terbang kan? Jadi orang tidak pernah mau ribet lagi masalah-masalah ini. Memang, pertama semua pihak harus siap mental, bukan untuk kebanggaan. Kalau hanya untuk pencitraan, lupakan. Inilah bisnis yang paling serius di dunia. Kalau kontraktor jalan, jembatan, jaminannya cuma 6 bulan. Setelah 6 bulan selesai, mau rusak lagi setelah itu urusan kalian. Kita cuma jamin 6 bulan.

Kontraktor rumah, pokoknya selama tidak bocor sekian bulan, selesai. Bocor satu tahun kemudian urusan kalian. Walaupun lama-lama nama jelek juga, tapi kalau ini begitu tidak disiapkan *spareparts* dalam waktu 1-2 hari, semua orang jual pesawatnya. Menurut saya, di sini letak kelemahan pokoknya. Bukan masalah kemampuan *engineering*. Membuat lebih mudah daripada menjual. Tidak terlalu sulit bikin pesawat, apalagi kalau kerjaan *assembling*. Yang paling sulit adalah menjualnya.

Nah, inilah yang saya pesankan. Saya tidak tahu ini bagian penjualan masih kuat atau tidak. Di situ kuncinya. Jadi mentalnya. Kadang-kadang kita kalau jual baju, begitu jual selesai persoalan. Justru kalau kita jual pesawat, begitu jual, di situ mulai persoalan. Begitu tidak ada *spareparts*, apalagi kalau yang pakai macam-macam negara, macam-macam *supplier*, *vendor*-nya macam-macam, kemudian tidak tersedia *spareparts* di sini atau di tempat yang lain, jadi repot.

Jadi, menurut saya, kalau ini jangan terlalu banyak. Kalau memang mau diteruskan, fokuskan saja apa yang bisa diharapkan. Jangan bermacam-macam.

Mungkin di samping pesawat ada yang bisa komersial sebagai suatu alternatif industri. Misalnya, kita butuh 10 juta meteran air. Memang kecil, tetapi 10 juta. Kita butuh listrik 35 ribu megawatt. Kita mau ada komponennya yang bisa kita buat. Karena itulah saya mengajak kita berpikir. Coba di industri yang luas ini, apa yang bisa dibuat. Tadi di Pindad, oke saya bilang bikin terus, tapi fokus ke Anoa dan senjata. Kan jalan. Kenapa tidak seperti Singapura, pusatkan *maintenance* pesawat. Tapi yang ada lisensi. *

Disampaikan saat Pertemuan dengan Jajaran Komisaris dan Manajemen PT. Dirgantara Indonesia
Di kantor PT. Dirgantara Indonesia
Bandung, 20 Januari 2016

Maju karena Industri

Kemajuan suatu bangsa tidak mungkin tanpa kemajuan industri. Contoh yang paling gampang kita lihat. Kalau petani padi menghasilkan lima ton gabah kering, nilainya Rp 20 juta. Dikurangi ongkos 50 persen, dia dapat Rp 10 juta. Tetapi itu untuk enam bulan. Berarti hanya dapat Rp 1 juta lebih sebulan untuk satu keluarga. Industri jauh lebih tinggi daripada pertanian. Industri akan memberikan nilai yang lebih baik.

Yang saya ingin sampaikan, untuk kemajuan, salah satu faktor yang sangat penting ialah kemajuan industri. Baik untuk lapangan kerja, untuk penerimaan masyarakat, penerimaan negara, juga untuk kemajuan daerah.

Namun, industri tentu mempunyai banyak syarat untuk maju. Industri maju mempunyai tiga faktor. Faktor teknologi yang selalu mendesain, faktor modal, dan faktor *skill*. Industri hanya bisa maju dengan kombinasi tiga faktor itu.

Walaupun mempunyai modal, tetapi tidak punya teknologi, tidak mempunyai *skill*, sulit maju. Modal dapat dicari, teknologi dapat dibeli, tetapi *skill* harus dididik, harus dilatih. Tidak ada *skill* yang hanya datang begitu saja. Harus dilatih.

Di lain pihak, teknologi berkembang cepat sekali. Teknologi yang paling cepat di elektronik dan di IT. Setiap 18 bulan berkembang dua kali lipat. Karena itu, kadang-kadang sekolah teknik atau STM zaman dulu atau politeknik, peralatannya masih analog, padahal semua orang sudah pakai digital.

Di STM kita sebagian besar hanya mempunyai mesin bubut, padahal industri sudah pakai CNC. Jadi kadang-kadang tidak mengejar kemampuan pendidikan itu dibanding dengan kemajuan industri.

Siapa yang berkepentingan dalam hal ini? Semuanya berkepentingan karena industri membutuhkan *skill* yang baik. Tetapi tentu masyarakat, anak-anak muda, membutuhkan *skill* yang baik untuk masuk ke industri.

Karena itulah apa yang dilakukan hari ini adalah kerja sama, jalan tengah dari dua kepentingan tersebut. Pemerintah melatih dasarnya, industri memberikan *finishing*-nya untuk kebersamaan. Tanpa kerja sama itu, industri akan kesulitan mendapat tenaga *skill* yang sesuai, tetapi juga anak muda kesulitan mendapat lapangan kerja sesuai kemampuannya.

Itulah yang disebut *link and match*, menghubungkan yang sesuai. Ini sudah 20 tahun lalu didengungkan. Waktu itu Menteri Wardiman. Karena dia lulusan Jerman sehingga mendorong *link and match*. Sekarang kembali lagi pak menteri mendengungkan itu karena memang itulah tujuan kita, bagaimana menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja dewasa ini.

Sekali lagi, kita mempunyai penduduk 250 juta. Kita mempunyai tenaga kerja lebih dari 100 juta, sekitar 120 juta. Setiap tahun bertambah anak yang mau kerja sebanyak tiga juta orang. Yang tiga juta orang itu, setiap tahun harus mendapat lapangan kerja agar mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan juga menciptakan kemajuan.

Karena itulah kerja sama antara dunia pendidikan dan dunia industri, mempunyai misi yang sama, memajukan bangsa ini. Dunia industri ingin mempunyai nilai tambah yang cepat, ingin nilai tambah dan tepat. Karena itulah tanpa kerja sama akan menyulitkan industri, juga akan menyusahkan anak muda yang ingin bekerja.

Pemerintah sejak dulu mempunyai sejarah panjang dalam pendidikan teknik dan kejuruan. Dulu ada STM, ada BLKI, ada politeknik, ada SMK, ada balai pelatihan, dan lainnya. Sekarang vokasi. Istilahnya saja yang berbeda. Tujuannya sama, mendidik generasi muda, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan *skill* yang sesuai dengan zaman.

Seperti saya katakan tadi, SMK pada ujungnya jangan belajar dengan peralatan yang hanya analog, radio tua, padahal yang dipakai sudah sangat maju digitalnya. Begitu juga peralatan-peralatan dan kemampuan-kemampuan lainnya. Yang mengetahui teknologi itu industri, yang mengetahui kebutuhan itu industri sehingga mereka paham.

Bagi pengusaha, kerja sama bukan amal. Ini bukan belas kasihan. Ini investasi untuk industri. Investasi artinya apa yang dikeluarkan akan menghasilkan lebih banyak. Itu makna investasi.

Jangan menganggap datang ke sini karena diminta gubernur, diminta menteri untuk semacam *charity*. Bukan *charity*. Ini investasi untuk industri. Karena tanpa teknologi, tanpa *skill*, industri tidak akan berkembang dengan baik, tidak efisien, dan tidak bisa menguntungkan.

Justru inilah investasi yang paling murah, sebenarnya karena dasar-dasarnya sudah diberikan pemerintah. Dasar-dasar itu diberikan lewat SMK, lewat politeknik, lewat balai latihan. Cuma menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Itulah tugas industri.

Inovasi untuk Pasar

Melatih mengelas penting supaya industri galangan kapal bisa berjalan baik. Itu arti kerja sama ini. Jadi kerja sama yang saling menguntungkan, bukan beban pada industri. Tetapi bagi industri, ini investasi yang baik sehingga akan terjamin kebutuhan lapangan kerja di belakang hari.

Bagi anak didik yang sedang latihan, haruslah menyesuaikan diri dengan kemampuan *skill* yang dibutuhkan oleh industri. Sehingga tidak butuh banyak penyesuaian diri. Tanpa itu, akan bingung apabila menghadapi lapangan kerja yang nyata.

Gaji pegawai negeri disesuaikan dengan pangkat. Gaji pegawai swasta disesuaikan dengan keahlian. Itu bedanya. Apabila punya keahlian pasti akan memperoleh pendapatan yang tinggi. *

Disampaikan Pada Acara
Peluncuran Program Vokasi Industri Tahap I
Di Mojokerto, Jawa Timur
28 Februari 2017

Saat ini kita mengenal istilah *knowledge economy*. Yakni, suatu ekonomi digerakkan dengan ilmu pengetahuan dan inovasi yang kreatif. Itulah yang menggerakkan ekonomi dunia dewasa ini, di samping ekonomi lainnya.

Kita Indonesia tentu masih selalu berpusat pada *economic commodity*, baik komoditas yang dihasilkan secara geografis, bidang komoditas pertambangan, dan pertanian.

Tentu komoditas seperti ini sangat bermanfaat karena memberikan lapangan kerja untuk masyarakat kita secara luas. Namun, dewasa ini kita berada dalam gelombang revolusi industri yang ketiga setelah mesin uap atau sistem *manufacturing*, sekarang menghadapi revolusi informasi dan teknologi.

Gelombang industri yang ketiga ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itulah kita memberikan penghargaan kepada generasi muda yang menguasai ilmu dan pengetahuan. Mereka memberikan partisipasi dan kemajuan bangsa ini, walaupun tentu kita masih membutuhkan begitu banyak lagi para generasi muda yang menguasai ilmu dan pengetahuan. Kini semua sudah berubah. Berubah cara kita menghasilkan

sesuatu, berubah dalam menjalankan sistem nasional kita. Apakah di pemerintahan, di swasta, berubah dalam segala produk-produk dan berubah dalam pendekatan kita. Semua karena ilmu pengetahuan teknologi, pada IT yang berkembang dewasa ini.

Seperti fenomena Pokemon Go yang mengubah orang dan cukup menarik. Selama ini cucu saya di kamar bermain *gadget*, sekarang dia di luar bermain *gadget* juga, tetapi dia banyak bergerak karena mengejar monster Pokemon.

Jadi aplikasi Pokemon itu membuat orang banyak bergerak dan mengubah total kehidupan generasi muda yang lain, walaupun saya melihat ada juga yang keliru masuk WC karena bermain pokemon.

Itu salah satu contoh yang mengubah kehidupan. Apakah dalam bentuk produk, bentuk sistem, ataupun dalam bentuk hiburan. Semua berubah karena ilmu pengetahuan.

Tetapi tentu semua itu hanya dapat dilakukan di negara kita ini dengan sistem yang baik. Karena itulah, ilmu pengetahuan harus dilindungi dalam berbagai bentuk hukum yang telah kita setuju bersama. Apakah itu perlindungan merek produk, hak cipta, dan juga investor properti lainnya.

Memang suatu negara bisa maju hanya bila dapat perlindungan. Karena tanpa perlindungan, orang akan sulit berkembang seperti itu. Kalau semua hari ini dapat ditiru oleh siapa saja, buat apa orang mempunyai inovasi dan kreativitas? China juga mulanya maju dengan meniru. Pada awalnya, 20 tahun lalu, China bukannya mempunyai *copyright*, tetapi *right to copy*. Tetapi ini sudah banyak berubah. China juga tidak ingin produknya *right to copy*.

Kita juga harus seperti itu, melindungi inovasi kreativitas dari anak bangsa dengan berbagai undang-undang. Memberikan penghargaan bagi mereka yang telah mendapatkan ide dan inovasi-inovasi. Kalau generasi

saya, tentu sudah lewat untuk mengetahui sistem-sistem itu. Kita juga dapat memberikan perlindungan, bagaimana memberikan hak-hak merek, paten, atau hak produk-produk.

Berdasarkan geografi agronomis, komoditas yang hanya bisa tumbuh di Indonesia, seperti produk makanan dan sebagainya. Misalnya, kopi dan teh. Semua itu kekayaan yang tidak dipunyai orang lain karena hanya berada di geografis Indonesia.

Juga, dibutuhkan dukungan universitas dan lembaga penelitian karena hampir semua penelitian selalu dimulai dengan universitas. Cuma kita tahu juga yang kerap menciptakan ternyata orang *drop out* dari universitas. Facebook dan Microsoft, semua diciptakan anak *drop out*. Tidak berarti rektor mendorong mahasiswa agar secepatnya *drop out*?

Sering saya katakan, *drop out* saja bisa seperti Bill Gates, apalagi kalau sudah selesai. Jadi seperti itulah kita melihat bagaimana tren-tren dan kemajuan menjadi bagian kita.

Saat ini kita harus mempunyai upaya untuk menghidupkan kekuatan kita, kekuatan otak kita, hak cipta kita, untuk memakmurkan dan memajukan bangsa. Kita membutuhkan banyak lapangan kerja. Lapangan kerja banyak berubah. Pada masa datang, mungkin 1-2 tahun, orang sangat berkurang pergi ke mal karena semuanya dengan *e-commerce*.

Karena itulah, perubahan-perubahan itu harus segera kita tanggapi, khususnya IT. Teori dasar IT mengatakan, IT berubah 100 persen di setiap 18 bulan. Begitu cepatnya ilmu itu, begitu cepatnya penemuan itu, sehingga *handphone*, komputer, penemuan lain, *game*, itu setiap 18 bulan berkembang 100 persen akibat kemampuan IT.

Artinya, begitu kita tidak mengadakan riset, begitu kita mengadakan penelitian, begitulah kita berinovasi. Kita jangan

menjadi total konsumen dari pada produk IT dan segala macam perangkat-perangkatnya.

Kepada generasi muda yang mempunyai kemampuan otak dan kemampuan berpikir, serta kecerdasan, mari berlomba-lomba membuat kemajuan dalam berbagai bidang ilmu dan penemuan-penemuan. Pasar kita 250 juta orang. Sehebat-hebatnya Singapura, dia hanya berpenduduk lima juta orang. Begitu kita tidak beli, mereka akan habis.

Kita punya pasar 250 juta manusia yang menurut laporan hampir 100 juta golongan menengah. Mereka mempunyai daya beli yang kuat. Sebenarnya kita bisa, dari yang kecil-kecil kemudian menjadi besar. Katakanlah seperti Gojek. Tidak ada yang memikirkannya, ternyata orang bisa dengan mudah, dengan sedikit fasilitas, sedikit aplikasi yang baik, dapat mempertemukan begitu banyak orang yang membutuhkan. *

Disampaikan pada Acara
Forum Kekayaan Intelektual Nasional 2016
"Strategi Nasional Kekayaan Intelektual Menuju Kekuatan Ekonomi Digital"
Di Gedung II Istana Wakil Presiden RI
18 Juli 2016

Melek Sosmed

Dunia hari ini kurang senyum. Di mana-mana yang timbul kesedihan, kesulitan, akibat konflik terjadi di banyak negara. Di Asia, di Timur Tengah, di Afrika, juga di Eropa. Semuanya itu berawal dari konflik internal atau konflik eksternal yang terjadi di dalam negeri.

Kita tahu permasalahan dunia adalah kemanusiaan, pengungsi, ketakutan, dan biaya. Itu semua menyebabkan banyak negara yang hampir bangkrut, bahkan sudah bangkrut akibat masalah-masalah itu.

Kita bersyukur, bangsa kita dewasa ini sudah melewati konflik-konflik yang besar. Namun, masih sering terjadi konflik yang bersifat lokal, komunal, dan juga menyebabkan masalah-masalah kemanusiaan dan masalah-masalah daerah. Itu masalah kita.

Kalau kita melihat sejarah Indonesia selama 70 tahun, begitu banyak konflik. Saya sering mengukur konflik yang besar. Kalau korban yang tewas katakanlah lebih 1.000 orang. Sekitar 15 kali konflik itu, mulai dari RMS dan munculnya PKI di Madiun, RMS, DI/TIII di Sumatera Selatan, di Jawa Barat, di Aceh, RRI tahun 1957, Permesta juga tahun 1957, G30S PKI, GAM, Papua, Timtim. Semuanya banyak sekali korbannya, mencapai ribuan orang.

Di samping itu banyak konflik-konflik yang lebih kecil. Apakah korbannya ada atau tidak, selalu merusak. Terakhir di Tanjung Balai, di Papua.

Ada konflik yang bersifat vertikal. Artinya masyarakat melawan negara, melawan hukum, mulai dari RMS, DI/TIII, Permesta, G30S PKI, termasuk GAM, dari Papua dan Timtim. Itu yang vertikal, dari bawah ke atas.

Konflik horizontal, masyarakat dengan masyarakat seperti di Ambon, Poso, di Kalimantan, di Jakarta. Itu masyarakat dengan masyarakat, tetapi juga melanggar hukum. Lawannya masyarakat dengan masyarakat, bukan negara, tetapi negara tentu mengambil tindakan karena ada yang melanggar hukum.

Jadi sebenarnya, kedua-duanya melawan negara. Inilah yang terjadi sebagai gambaran, begitu besarnya kita. Kemungkinan itu terjadi, potensi bisa terjadi di mana-mana.

Karena itulah, sebagai aparat penegak hukum, kepolisian mempunyai tanggung jawab paling besar untuk menyelesaikan itu. Itulah situasi sekarang dan masa lalu. Kalau konflik kecil seperti SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Berbagai bentuknya. Begitu keluhan yang terjadi di negeri kita.

Dulu satu konflik selalu ada pemimpin. Sekarang dunia tanpa pemimpin lagi. Yang pimpin Facebook, SMS, WA, media sosial. Itu yang terjadi di Lampung, tiba-tiba beredar ribuan SMS bahwa terjadi pelecehan seksual. Juga di Sumbawa. Sama, dikendalikan oleh Whatsapp, SMS. Artinya apa? Konflik makin cepat.

Kalau dulu dari mulut ke mulut masih butuh waktu mungkin 1 minggu untuk sampai ke seribu orang. Sekarang dalam 2 atau 3 menit bisa sampai ke seribu orang. Apa artinya? Kita harus punya kekuatan IT yang baik untuk mengklarifikasi. Jangan pernah terlambat. Begitu telat, dikalahkan oleh media sosial. Bukan hanya dalam negeri. *Arab Spring*, revolusi di negara-negara Arab tidak ada yang

memimpin. Yang kendalikan hanya yang atur Facebook, yang atur WA. Kemarin masih dengan fax, tetapi sekarang makin cepat. Artinya Anda semua harus menguasai IT.

Sekarang langsung kumpul, tidak tahu siapa yang kumpulkan. Tidak ada yang mengerti. Jadi isunya makin cepat terjadi. Karena itu jangan pernah kalah kecepatan. Begitu Anda kalah kecepatan, terjadilah itu. Memang tidak mudah, tetapi itu yang terjadi.

Jadi kalau tugas di daerah harus berteman dengan yang punya jaringan media, media sosial. Di daerah-daerah, kan banyak punya jaringan-jaringan seperti itu. Jadi Anda mau minta transaksinya, siapa yang punya paling banyak *followers* supaya bisa membantu memadamkan isu. Itu yang terjadi.

Karena itu, konflik tadi bisa terjadi di mana pun. Isu yang sederhana bisa menimbulkan masalah besar. Tanpa pemimpin, konflik sudah bisa terjadi. Dipimpin oleh isu, dipimpin oleh media sosial. Dewasa ini, teknologi makin cepat.

Karena itulah, Anda semua, perwira-perwira yang muda-muda dan juga yang sedang siap menjadi pemimpin Polri, harus memahami ini. Itu bisa terjadi kapan saja. Tetapi satu-satunya yang lebih baik adalah mencegah.

Kalau saya ingin mengulangi lagi peristiwa di Poso, dimulai secara sederhana. Natal ada anak-anak yang baru pulang pesta, mabuk-mabuk, bertengkar dengan anak penjaga masjid, berkelahi. Anak itu, yang di masjid tiba-tiba buka *mic*, berteriak-berteriak, dibunuhlah dia. Besok terbakarlah Poso. Di Ambon, sebab khususnya anak terminal. Ribuan orang mati hanya gara-gara itu.

Jadi ini menjadi sangat penting bagi kita semua untuk melihat peta masalah. Apa masalahnya, apa penyebabnya. Jangan tiap kali selalu menyalahkan orang lain. "Oh, pasti

ada dalangnya.” Padahal sekarang dengan isu saja, tanpa ada dalang, sudah bisa terjadi konflik.

Jadi, sejarah konflik atau sebab konflik, atau cara penyelesaiannya berbeda-beda sesuai masalahnya dan waktu. Sekarang makin cepat. Itulah yang terjadi di dunia, begitu berubahnya.

Kalau kita ambil contoh yang besar lagi. Dulu teknologi sentralistik, sekarang semua bersambung satu sama lain tanpa sentral. Dulu kalau ada peristiwa, yang pertama dikuasai adalah RRI. Sekarang orang tidak perlu lagi menguasai RRI karena media sosial lebih cepat daripada RRI.

Jadi, waktu peristiwa di Turki, mereka tidak menguasai kantor berita karena fungsinya sudah berbeda-beda. Jadi perlu diketahui, kekuatan media sosial sangat penting.

Di tiap daerah pasti ada orang-orang yang mempunyai *followers* yang hebat. Tinggal ajak berteman. Mungkin tiap enam bulan bikin *gathering* dengan mereka sehingga menjadi telinga, dan juga menjadi tangan dari polisi untuk menjelaskan kepada orang-orang.

Itulah masalah dewasa ini. Tetapi sekali lagi, dari semua itu, kita menunjukkan perilaku yang baik, memberi contoh yang baik, dan kemitraan. Karena itulah polisi juga bertanggung jawab untuk mencegah masalah. *

Disampaikan pada acara
Pendidikan SESPIMTI POLRI DIKNEG ke 25 tahun 2016
di Gedung II Istana Wakil Presiden RI
29 Agustus 2016

Gojek “Mengubah” Kehidupan

Ada dua teknologi yang paling mengubah kehidupan kita, dan paling tergantung kehidupan kita. Pertama telekomunikasi atau IT dan kedua listrik. Menurut saya, IT dan listrik mengubah kehidupan. Mungkin hanya di kampung-kampung yang tidak menikmati dan mempergunakan listrik dan komunikasi.

Cuma ada satu bedanya. Teknologi listrik satu abad tidak berubah, tetap saja turbin, selesai pada transmisi setelah masuk ke rumah. Tetapi telekomunikasi, setiap 1,5 tahun berubah. Perkembangannya sangat cepat sehingga dibutuhkan investasi, inovasi, dan kreativitas terus-menerus. Karena itulah, pameran dan ICT Summit hari ini pentingnya agar kita jangan sampai ketinggalan teknologi.

Saya punya pengalaman waktu bekerja di bidang telekomunikasi dengan KSO, dengan Telkom di Indonesia Timur. Saya kira Pak Setyanto tahu betul bagaimana telekomunikasi. Saya menghadiri seminar di ITB, juga di Phoenix, Amerika, dalam rangka sebagai preskom perusahaan telekomunikasi.

Seorang profesor berkata, tahun 1992-an, nanti ke depan semua transaksi di kantong. Saya bertanya, apa maksudnya Anda bertransaksi di kantong? “Ya semua, Anda mau bayar,

mau kartu kredit, mau beli, mau belanja, mau apa, semua bisa di kantong.”

Waktu itu kita membangun telekomunikasi dengan kabel terus-menerus yang investasinya 1.000 dollar per *line*, sekarang mungkin di bawah 5 dollar per *line* untuk investasi *wireless*. Saya tidak percaya, karena itu terus bekerja sama dengan Telkom. Yang lain sudah jual. Yang di Indonesia Timur saya tidak mau jual.

Ternyata betul, sekarang semua telekomunikasi di kantong, tidak ada lagi memutar telepon pakai kabel. Makanya kita semua ketinggalan.

Artinya, komunikasi penuh dengan peningkatan teknologi, penuh dengan inovasi. Siapa yang tidak ikut inovasi, dia akan ketinggalan. Karena itulah ICT Summit hari ini tentu berbicara dalam kerangka itu.

Memang hukumnya di dunia ini, teknologi yang paling cepat berubah adalah telekomunikasi dengan komunikasi. Kalau kedokteran tiap tiga tahun meningkat 100 persen teknologinya. Artinya dokter yang tidak belajar dalam masa tiga tahun terus-menerus, pengetahuannya akan tinggal setengah. Tetapi yang berada di bisnis ICT, jika dia tidak berinovasi, tidak berinvestasi dalam 1,5 tahun, maka modalnya tinggal setengah karena teknologi itu penciptaan.

Dalam suatu pertemuan dengan pengusaha, saya ditanya, “Menurut Bapak mana yang penting, *hardware* atau *software*?” Kedua-duanya penting karena tanpa *hardware*, *software* tidak lagi laku. Tanpa *software*, juga *hardware* tidak laku. Makanya kedua-duanya sama pentingnya. Karena itulah perusahaan terbesar di dunia, *Microsoft* dan *Apple*, keduanya penting.

Jadi tentu di tempat inilah kita saling meningkatkan pengetahuan dan belajar bagaimana memiliki teknologi dan menjalankannya. Indonesia dengan penduduk 255 juta orang, dengan pemakaian katakan setengahnya saja, 125

juta orang memakai internet. Kalau *wireless* sudah lebih dari 300 juta orang. Saya kira, kalau yang hadir di sini 300 orang, mungkin ada 500 *handphone* di sini. Tentu ada yang punya dua *handphone*. Artinya begitu kepentingan kita besar sekali di bidang ini.

Karena itulah Indonesia jangan hanya jadi pemakai atau pengguna, tetapi pemilik teknologi dengan riset dan sebagainya. Memang ini selalu jadi cita-cita karena pesatnya teknologi. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Karena itu saya minta, kita bukan hanya melihat pameran, tetapi melihat bagaimana kita menjadi bagian yang mutlak dalam kesempatan ini.

ICT ini adalah revolusi industri ketiga, dan mengubah segalanya, mengubah kehidupan, mengubah komunikasi, mengubah usaha, mengubah militer, mengubah hukum, dan sebagainya. Mengubah kita semuanya. Bahkan, hubungan keluarga juga berubah.

Kalau zaman dulu, masih istri bisa tanya di mana kamu, kita tidak bisa bohong kalau di kantor karena telepon di nomor kantor. Sekarang bisa macam-macam nomornya. Tetapi dengan teknologi baru bisa diketahui lagi di mana. Jadi semua pola kehidupan berubah. Makan juga mengubah kita. Sekarang mau makan tidak mesti ke restoran, tinggal telepon Gojek, bisa makan. Semuanya berubah dari yang kecil sampai yang besar dengan telekomunikasi.

Karena itulah perkembangan ini bukan hanya untuk melihat pameran, tetapi kita juga harus berpameran untuk memiliki teknologi ini agar dapat mengerti apa yang dimaksudkan dengan kemajuan itu. Sekali lagi teknologi yang paling cepat berkembang akibat kemampuan *chip* yang begitu besar.

Kita mengetahui, kekuatan *computer smartphone* lebih kuat dan lebih besar daripada kekuatan *computer apollo*

dewasa ini. Begitu besarnya kemampuan yang dapat diperoleh, dan Andal adalah yang generasi muda. Kalau generasi saya paling tinggi SMS dengan berbicara yang kita tahu saja. Tetapi Andal adalah yang muda-muda yang memiliki kemampuan.

Sekali lagi saya pesankan, jangan hanya melihat pameran, tetapi membuat pameran agar kita mempunyai kemajuan. Indonesia berpenduduk nomor tiga di dunia, dengan pengguna nomor enam.

Jadi, kita harus mampu untuk berbuat sesuatu, bukan hanya menjadi konsumen. Saya tahu, ini pekerjaan yang berat karena cepatnya perubahan, tetapi cepatnya perubahan juga akan mempercepat perubahan iklim bisnis. *

Disampaikan Pada Acara
Pembukaan ICT Summit Communication Indonesia
Dan Broadcast Indonesia 2016
Di JI EXPO Kemayoran
Jakarta, 31 Agustus 2016

Teknologi atau Konten

Teknologi informasi mengubah banyak hal. Kita harus mempersiapkan diri menghadapi perubahan itu. Memang bisnis seperti televisi investasinya selalu cepat dan besar. Kalau teknologi televisi kita sangat tergantung pada teknologi dari luar, tetapi yang sangat penting juga konten. Kita yang menentukan kontennya.

Kalau dulu yang dimaksud berita apa yang telah terjadi, sekarang berita adalah apa yang telah terjadi dan sedang terjadi. Begitu *live* dari televisi berarti sedang terjadi dan sudah menjadi berita. Kalau pada zaman dulu kejadian kemarin, hari ini kita baru beritanya. Semua berubah. Kecepatannya juga berubah.

Manfaat teknologi sangat penting, tetapi konten juga sangat penting. TVRI pada tahun 1970-an masih hitam putih dan satu-satunya yang terpaksa kita tonton. Acara Dari Desa ke Desa mengubah banyak hal kehidupan. Contohnya bagaimana orang berkoperasi.

Sekarang teknologinya sudah modern. Namun, banyak juga segi positifnya. Sekarang sinetron di mana-mana, perkelahian, ada film-film, tetapi kita dapat memilih apa yang ingin kita tonton. Kita memilih acara dakwah.

Dakwah di media terbesar dalam sejarah dunia mungkin di Indonesia. Saya hitung-hitung setiap tahun minimum sekitar 4.500 acara dakwah di televisi di Indonesia. Saya bilang ke ustaz, kalau Anda bicara di masjid paling tinggi didengar 500-1.000 orang. Tetapi seorang Ustaz Maulana berceramah di televisi pagi-pagi dengan yang lucu-lucu, jutaan orang yang melihat. Luar biasa, di kali 4.000 kali karena kalau bulan Ramadhan kan penontonnya 5 kali sehari, dari subuh ke subuh. Jadi itu semua tergantung dari kita semua. Sinetron juga bisa ribuan kali, tergantung isinya.

Economic Change Langers tentu mengerti ekonominya. Saya juga sebenarnya bagian dari itu. Tiga tahun pernah menjadi presenter di KompasTV, jadi mengerti caranya, bagaimana mempersiapkan, bagaimana harus berdiri satu jam untuk mengupas berita atau hal lain.

Jangan lupa syarat harus mengikuti aturan. Hiburan penting, pendidikan penting, berita penting, tetapi mari kita berbicara juga manfaat. Kita harapkan seperti itu.

Sering orang bilang, kenapa orang Makassar selalu demo, lempar-lemparan. Itu sangat dipengaruhi oleh televisi. Begitu mau demo, tunggu wartawan TV. Begitu TV-nya pergi, berhenti demonya juga. Begitu di Makassar karena sebelum demo dia telepon dulu temannya di kampung. "Tunggu saja saya akan ada di TV-TV," dia bilang begitu.

Kadang-kadang juga karena tidak ada berita, wartawan suruh mahasiswa demo agar ada berita. Itu yang pernah diceritakan juru bicara saya, Husain Abdullah, yang kebetulan dulu wartawan.

TV sangat menentukan apakah mau kondisi Indonesia menghangat atau kalem. Semua tergantung TV. Sebagaimana

yang terjadi saat ini, kasus Al-Maidah 51, semua tergantung TV, apakah mau memperuncing atau menenangkannya.

Jadi lihatlah seperti itu juga. Kita butuh hiburan, butuh pendidikan, butuh informasi, tetapi informasi yang punya batasan-batasan. Yang sangat penting televisi memakai frekuensi nasional, maka televisi juga harus mempunyai tanggung jawab nasional dalam hal independensi.

Semua orang boleh punya kepentingan berpihak, tetapi independensi sangat penting dijalankan. Jangan frekuensi milik kita semua dipakai untuk saling mencerca.

Begitu banyak hal positif dari televisi. Dari TV nasional ditambah ratusan TV lokal tentu dapat memberikan hal-hal yang positif untuk pembelajaran, pendidikan, dan informasi. Tetapi harus diukur positifnya masing-masing pihak. Komisi Penyiaran tentu harus objektif menilai manfaatnya.

Tentu televisi perlu memperhatikan *rating*, tetapi *rating* juga mempunyai batasan manfaat. Jangan dangdutnya dari sore sampai tengah malam.

Acara Dari Desa ke Desa yang disiarkan pada tahun 1970 mengubah kehidupan masyarakat di desa, tetapi jangan televisi mengubah orang desa menjadi konsumtif. Bagaimana membawa orang desa menjadi produktif dengan televisi.

Tentu bukan lagi model Sambas yang naik dokar baru masuk dengan suara baritonnya, tetapi bagaimana orang desa juga bisa melihat cara bertanam sayuran yang baik. Dengan gaya dangdut atau apa pun tidak apalah. Itu kreativitas masing-masing.

Yang saya ingin sampaikan, bangsa ini membutuhkan TV pasti yang baik, tetapi asas manfaatnya yang positif juga dibutuhkan sehingga kita tidak hanya terkesan dari sinetron

ke sinetron saja yang kita lihat. Orang marah pecah-pecahkan kaca saja yang kadang-kadang menonjol.

Kritikan juga penting karena tanpa kritikan kita tidak berubah. Jadi perubahan-perubahan positif yang terjadi. Kreatif yang positif tentu kita harapkan. ✨

Disampaikan pada Acara
International Broadcasting Expo (IBX)
Di Balai Kartini, Jakarta
21 Oktober 2016

Lawan Hoaks

Tadi pagi saya diperlihatkan oleh saudara Sofjan Wanandi (ketua Tim Ahli Wapres) dan Husain Abdullah (Jubir Wapres), sebuah meme yang beredar di dunia maya yang menyatakan bahwa saya menyarankan untuk tidak mengirim bunga ucapan selamat kepada Anies-Sandi apabila dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur nanti. Dari pada kirim bunga, lebih baik uang yang dipakai untuk membeli bunga tersebut diberikan ke anak yatim karena bunga-bunga yang ada di sepanjang jalan Balaikota itu tidak ada gunanya.

Wah, kapan saya ngomong seperti itu, saya tidak pernah merasa berkata seperti itu. Saya baru membaca meme tersebut pagi tadi, terus terang saya terkejut. Seakan-akan saya memberikan komentar, padahal saya tidak mengomentari soal bunga-bunga, terkecuali bunga bank yang selalu saya minta diturunkan.

Tetapi kalau bunga yang lain (karangan bunga) itu berapa pun terserahlah, setidaknya-tidaknya yang untung juga perajin bunga dan terkait dengan pekerjaan tersebut.

Memang teknologi mengubah banyak hal. Kalau kita kembali 40 tahun yang lalu, yakni tahun 1966, jika ingin membaca berita-berita politik yang serba menggelitik ataupun

isu-isu hangat, itu hanya bisa baca melalui stensilan, itu pun stensilnya di Jakarta kemudian kirim ke Jakarta 1 minggu setelah terbit baru kita bisa baca.

Namun, berita stensilan tersebut juga turut mengubah bangsa, walaupun jaraknya seminggu baru sampai ke tangan pembaca atau beredar pada kalangan terbatas. Banyak gerakan perubahan di dunia ini yang juga menggunakan stensilan.

Kalau revolusi Iran meletus berkat kaset-kaset ceramah yang dikirim oleh Khomeini dari pengasingannya di Paris, Prancis. Revolusi Tiananmen itu digerakkan dengan faksimile karena waktu itu sudah mulai ada teknologi faks. Jadi faksimile yang dikirim dari luar menggerakkan pikiran, mengubah pikiran rakyat China dengan membaca faks tersebut.

Arab springs berkejolak melalui penyebaran informasi lewat sosial media, dengan Facebook, SMS, Blackberry Messenger, Twitter dan sebagainya.

Tentu yang jadi masalah, kalau apa yang disampaikan itu adalah berita bohong, seperti kasus meme saya yang melarang orang kirim bunga untuk Anies-Sandi. Untuk itu, saudara Sofjan sempat tanya saya,

“Apa ini? Bapak pidato di mana?” Saya bilang “Wah, mana pernah saya pidato soal bunga-bunga itu, kapan?”

Ya tentu, kebetulan saya tidak suka, dan tidak pernah membaca, atau tidak ada waktu membaca begitu-begituan (meme) jadi saya tidak tahu. Berbeda halnya dengan Bapak Presiden, beliau suka membaca yang begituan sekarang, jadi beliau mengetahui semua perkembangan di dunia maya. Jadi hati-hati membikin hoaks, pasti dibaca oleh Bapak Presiden, ke mana-mana pun pasti pakai Ipad-nya pantau itu.

Artinya adalah bahwa memang karena teknologilah yang mengubah banyak hal, termasuk penyebaran berita bohong. Untuk melawannya pun harus menggunakan teknologi, tidak mungkin dilawan secara konvensional karena sifatnya sangat-

sangat instan dan cepat sekali. Dan rata-rata orang Indonesia, setiap hari rata menghabiskan waktunya sekitar tiga hingga empat jam memakai *gadget*.

Lihat saja suasana kalau Anda naik pesawat terbang. Kalau zaman dulu begitu pesawat mendarat, yang pertama orang lakukan, apalagi di Indonesia, berdiri mau ambil dia punya barang di bagasi kabin.

Kalau sekarang, begitu pesawat mendarat, kalau ada 200 penumpang, saya kira 190 orang yang pertama dilakukannya adalah periksa *handphone*-nya, apa saja dilihat, lupa dia dengan barangnya di atas. Begitu hebatnya teknologi yang bisa mengubah banyak hal.

Karena itulah, media *mainstream* harus juga berperan aktif melawan hoaks. Contohnya kalau ada yang mau kirim surat pembaca, nanti bisa diterima jika melampirkan *copy* KTP. Jadi itu akan meredam niat orang untuk membuat berita hoaks.

Beda kalau tidak ada kewajiban melampirkan identitas, maka bisa jadi apa yang ingin disampaikan adalah semacam hoaks. Tentu hal seperti itu tidak usah dimuat, dianggap hoaks saja sehingga kita bisa terhindar dari turut serta menyebarkan fitnah karena fitnah itu bisa merusak apa saja. Sebagaimana kata hadis, “fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan”.

Jadi karena itulah saya sangat bergembira dengan Jaringan Wartawan Anti Hoax (Jawah) ini. Tetapi kalau sedikit saya boleh usul, Jawah itu rasanya agak tidak terbiasa di telinga kita, bagaimana kalau disebut Jawarah? Jaringan Wartawan Anti Hoax, kedengarannya lebih heroik. Kalau yang kita kenal kan Jawa tanpa huruf H, dan ini ditambahkan huruf H, jadi tidak sama benar dengan jawara. Jadi kayak pesilat dari Banten atau pesilat dari Betawi, itu namanya jawara. Jadi artinya siap untuk membela kebenaran, jawara, kan,

konotasinya siap membela kebenaran, jawara itu, bukan preman jawara itu, beda. Jawara positif, preman agak negatif istilahnya kan? Seperti si Pitung yang merupakan jawara. Jadi cukup tambah huruf H sudah tidak melanggar *copy right* lagi.

Oke setuju Jawarah ya? Terima kasih banyak. aklamasi ini ya? Terima kasih karena perlu heroisme, perlu ada suatu julukan untuk masyarakat lebih gampang mengetahui, kalau Jawah nanti Jawa apa ini ada H-nya? Orang Jawa kan biasa, pakai bahasa. Jadi Jawah itu bahasa Jawa-nya hujan ya, oh begitu? Kasih banjir, bahaya kalau banjir, kan?

Itulah, jadi semoga Jawarah ini memberikan kita semua suatu kesatuan dan suatu spirit sebagai Jawara yang beraksi untuk mengurangi kejahatan, untuk melawan kezaliman. *

Disampaikan pada Acara
Peluncuran Jaringan Wartawan Anti-Hoax (Jawahar)
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tahun 2017
Di Istana Wapres
Jakarta, 28 April 2017

Host “Jalan Keluar”

Televisi kita banyak macamnya, demikian pula segmennya. Jadi kita sekarang, penonton, tinggal memilih, mau yang terus-terusan berita, mau yang terus-terusan dangdut, atau mau yang terus-terusan sinetron juga ada. Jadi sekarang ini, pilihan ada di tangan kita.

Soal TV berita, walaupun mungkin penontonnya sedikit, hampir semua pengambil keputusan menjadi pemirsanya. Pengambil keputusan nonton berita, jarang nonton dangdut. Jadi, sebenarnya memengaruhi bangsa. Seperti ini, TV berita, apalagi Kompas TV, tentu mempunyai image terpercaya. TV berita memang mungkin lebih sulit dibanding dengan koran berita. Kalau koran masih ada waktu mengoreksi jika ada yang salah, masih ada redaktur. Kalau TV berita, *you ngomong live* sudah langsung didengar orang, jadi harus berhati-hati.

Jadi reporter harus yang terpilih karena kalau salah ngomong, ya salahlah. Ralatnya susah kalau TV, orang sudah lihat. Walaupun TV berita, tentu juga seperti diskusi.

Jadi waktu menganggur, sehabis menjabat Wakil Presiden pertama kali tidak ada kerjaan. Mau pulang kampung sudah telanjur di Jakarta. Nah, Buyung Wijaya Kusuma bersama teman-temannya dari Kompas TV datang ke rumah. Saya

pikir diminta jadi narasumber. Biasanya kan saya narasumber. Oh, ternyata diminta jadi *host*. “Apa *host*, bagaimana caranya?”

Waktu itu, Kompas TV penontonnya belum banyak. Jadi saya pikir, “Ah ini cari yang gampang-gampang saja. Ya sudahlah, sebagai teman. Tetapi saya memberikan syarat, sekali sebulan, tidak sekali seminggu.”

Waduh, mana mungkin saya satu kali seminggu. Akhirnya tawar-menawar, dua kali sebulan. Ah, bolehlah. Itu untuk setahun, selama hampir tiga tahun. Yang menarik karena mungkin juga baik, walaupun menteri diundang, dia salah omong, saya juga yang koreksi. Jadi ada enakya waktu itu.

Kalau yang lain, barangkali mungkin ragu-ragu untuk mengoreksi. Kalau saya, Anda ini salah *omong*, jangan begitulah. Itulah mantan Wapres, tetapi bagi saya itu pengalaman juga. Hidup ini bervariasi, kadang-kadang begitu sulit.

Suatu kali saya marah sama Rossi Silalahi waktu jadi penyiar SCTV. “Kau Rossi kenapa itu demo-demo di Makassar selalu kau muat, padahal demonya kecil. Kau muat lama di TV.

”Bukan demonya, Pak” kata Rossi.

“Jadi apa?” tanya saya.

“Omongan orang Makassar yang menarik, Pak” kata Rossi.

”Ya, orang Makassar omongnya macam-macam, kan. Jadi bukan beritanya yang dimuat. Jadi kalau di Jakarta bukan berita, di Makassar jadi berita karena ngamuk-ngamuk, tidak tahu apa ngamuknya. Kadang kala mengamuk saja. Jadi itulah kira-kira.”

Jadi rupanya, apa pun bisa untuk diberitakan di TV, selama itu menarik. Tetapi yang lebih menarik lagi, kalau berita menarik jadi menarik. Jadi berita tetap objektif, sedikit

tegang-tegang atau nyentil atau kritik, ya silakan karena pemerintah atau masyarakat perlu dikritik juga. ✱

Disampaikan pada Acara
Suara Indonesia Kompas TV
Di Jakarta Convention Center
Jl Jenderal Gatot Subroto
Jakarta, 28 Januari 2016

Jangan Pencitraan

Kita mengharapkan media massa bisa memberikan informasi yang lebih *fair*. Terbuka, tetapi *fair*. Kita juga tidak ingin berita yang ditulis media, walaupun *fair*, tetapi jelek. Hal itu sangat penting sebab masyarakat mengetahui yang *fair* dan tidak *fair*.

Kita juga mengharapkan media massa memberikan harapan. Karena kalau media massa memberikan harapan, masyarakat akan lebih tenang. Bahaya jika tidak *fair* dan tidak memberikan harapan.

Jadi perlu optimisme yang rasional dan edukatif. Tentu tidak dituntut seperti TVRI zaman dulu lagi. Tetapi harus memberikan informasi yang positif dan edukatif.

Jadi, dua hal yang sangat penting, harus *fair* dan memberikan harapan. Janganlah hal-hal kecil dibesar-besarkan, dan hal-hal besar justru dikecilkan.

Katakanlah, jangan sampai merusak modal masyarakat, berupa harapan. Berikanlah harapan kepada masyarakat. Karena itulah modal bangsa ini. Tentu pemerintah juga akan ikut melakukan penataan.

Media juga dapat mengubah gaya hidup masyarakat. Bagaimana kita menyesuaikan gaya hidup dewasa ini. Katakanlah gaya hidup yang tidak berlebihan, tidak mewah.

Kalau semua sinetron menampilkan rumah mewah, maka orang akan melupakan rumah kumuh di Ciliwung.

Jangan hanya model rumah, bertengkar soal pacar, dan macam-macam yang dipertontonkan. Jika hal seperti itu disajikan terus-menerus dalam sinetron, maka apa yang kita hadapi adalah dampak sosial. Hal itu jauh lebih berbahaya daripada pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Lebih berbahaya lagi apabila terjadi kesenjangan di suatu daerah yang kurang tumbuh.

Kalau saya melihat media seminggu ini, *headline*-nya berbagai, tentu ada berita, ada kritikan, ada juga harapan. Tentu juga banyak yang ingin mengetahui apa yang akan terjadi. Kalau rencana pemerintah sudah sering kita bicarakan, apa yang kita harapkan?

Tentu harapan kita semua, pertama bagaimana memastikan semangat bangsa dan optimisme kita. Kita tidak ingin situasi yang jelek. Begitu, kan?

Saya tahu masyarakat membutuhkan informasi, masyarakat mengharapkan banyak hal. Kita juga minta maaf, ada yang bisa kita realisir, ada yang tidak, karena situasi yang sangat cepat berubah-ubah.

Saya kira tiap hari ada media menulis tentang anggaran yang tidak tercapai, pajak yang tidak dicapai, yang terpaksa kita potong anggaran. Itu sudah pengetahuan semua pihak. Kita tidak ingin tutup-tutupi, tetapi ini menjadi bagian daripada hal-hal yang harus kita perbaiki.

Kita tidak ingin kembali ke tahun 1998, satu minggu sebelum krisis, Menteri Keuangan—saat itu Fuad Bawazier—masih mengatakan Indonesia solid, fundamental ekonominya kuat, jangan khawatir. Nah, kita butuh kehati-hatian supaya jangan tergelincir. Mudah-mudahan ini semua bisa diatasi.

Kita perlu saling mengingatkan. Jangan dipuji terus. Kita tidak ingin begitu.

Pemerintah jangan juga dipuji berlebihan sehingga terseret dengan situasi yang lupa diri. Ini terjadi di banyak sektor. Kita ingin *fair* sajalah. Kita tidak ingin dipuji-puji sehingga lupa diri. Ini terjadi.

Saya tiap hari ngomong listrik 35.000 megawatt. Jokowi *ngomong* tiap hari. Tidak jadi-jadi, telat semua. Jadi perlu kami diperingati, tanpa ingin bela diri.

Mungkin agak aneh tetapi inilah, saya tidak mau menteri-menteri itu pikirannya hanya untuk pencitraan saja. Perlu diperingatkan supaya ekonomi ini, bangsa ini, jangan terseret pada *euphoria-euphoria* seperti itu.

Pengalaman saya di beberapa pemerintahan, tidak banyak pejabat yang bekerja dengan empat presiden. Saya bekerja dengan empat presiden, jadi mengerti banyak pimpinan yang akan mengambil kebijakan berdasarkan berita media.

Setiap bulan media memuji. Akhirnya dibikinkan statistik berapa berita yang menyenangkan, berapa berita mengkritik. Ini tentu buka rahasia supaya mengerti bahwa bagaimana peran media luar biasa dalam mengambil kebijakan. Setiap apa ada data statistiknya. Zaman dulu itu. Sekarang, ya, saya bilang kan banyak.

Jadi kita harapkan betul-betul *fair dan* objektif. Kita arahkan supaya jangan berbunga-bunga, atau dipuja-puja sebagai pahlawan. Berkali-kali kita tegur, tetapi tetap saja merasa hebat. Akhirnya didemo rakyat baru terasa, "Oh ternyata saya salah." Contoh seperti itu. Nah, saya justru ingin membuka diri untuk itu.

Sering, saya selalu berpikir, kenapa setiap lima tahun APBN kita tumbuh dua kali, setiap lima tahun. Artinya setiap sepuluh tahun tumbuh empat kali. Tahun 2005, APBN kita masih Rp 1.000 triliun, sekarang sudah Rp 2.000 triliun, tetapi pertumbuhan kita tidak mendukung karena biaya negeri ini makin tinggi. Jadi harap dipahami kalau kita

terpaksa melakukan pemotongan anggaran atau subsidi untuk menyelamatkan masa depan bangsa ini.

Kita ingin kurangi semua biaya tidak penting. Kenapa ini terpotong terus? Karena setiap kali defisit kita pasti meminjam. Tahun ini mungkin kita meminjam di atas Rp 400 triliun. Bunganya saja setiap tahun lebih dari Rp 30 triliun karena *rate*-nya 8 persen sehingga akan berlangsung 10 tahun. Jadi kalau kita perlu menghemat semuanya, tolong didukung penghematan itu. Supaya jangan terjatuh seperti tahun 1998 atau 2008.

Kenapa Amerika, seperti dikatakan tadi, akan menghadapi masalah? Ternyata dalam sejarah Amerika setiap delapan tahun dia mengalami krisis, setiap penggantian presiden dia menghadapi krisis.

Tahun 2000 krisis. Kalau ingat dot.com tahun 2000, itu semua orang IPO, perusahaan-perusahaan dot.com itu, mengerek sebagian besar bank yang gagal. Delapan tahun kemudian, 2008 krisis lagi. *Sub Prime Mortgage*. Nah ini banknya yang akan hancur-hancuran, Citibank, CS bank, atau macam-macam.

Kemudian, pengalaman yang lalu, timbul masalah sosial karena pasti banyak *lay off*, pasti banyak perusahaan yang PHK. Kalau permintaan dari Eropa atau permintaan dari China menurun, pasti PHK. Pendapatan tidak ada. Kalau PHK, masalah sosial besar. Nah, yang saya harapkan begini. Saya mohon jangan sevilgar ini disampaikan, tetapi kita memberikan *warning* kepada masyarakat bahwa kita harus betul-betul menjaga jangan sampai kembali ke situasi krisis lagi.

Tetapi seperti saya katakan tadi, sekali lagi, supaya kita mengetahui masalah dengan detail, buka internet, semua informasi akan muncul. Karena hal-hal seperti ini tidak akan muncul dari pemerintahan resmi. Kalau ditanya World Bank,

tanya IMF, pasti putar-putar jawabannya. Sama saja kalau ditanya Menteri Keuangan, pasti putar-putar.

Siapa pun kalau ditanya akan begitu. Saya diwawancarai misalkan, “Oh tidak ada apa-apa, ini-ini. Pasti pajak akan kita capai walaupun kita yakin tidak akan pernah dicapai. Tetapi karena Anda semua sebagai pimpinan, saya yakin menjaga situasi ini. Tetapi dengan *warning* pelan-pelan sebab semua orang harus siap menghadapi yang terburuk. Mudah-mudahan tidak. ✱

Disampaikan pada Acara
Buka Puasa dan Silaturahmi dengan Forum Pemimpin Redaksi Media
Di Kediaman Dinas Wakil Presiden RI
Jakarta, 17 Juni 2016

BAB 5

POLITIK DAN HUKUM

Dunia Kurang Tersenyum

Saya sering katakan, dunia dewasa ini kurang senyum. Di mana-mana hanya masalah yang kita lihat, apakah di bidang politik, di bidang keamanan, dan di bidang ekonomi. Dunia hari-hari ini banyak kegalauan dan masalah. Apalagi dunia Islam yang menjadi bagian dunia kita. Kalau kita lihat masalah politik dan keamanan, kadang-kadang kita tiap malam terharu melihat apa yang terjadi di Timur Tengah. Di Afrika bom demi bom.

Saya baru kembali menghadiri Sidang Umum PBB. Yang kita bicarakan pengungsi, terorisme, masalah ekonomi yang sulit. Itulah tantangan ke depan dunia yang kita hadapi.

Di Eropa, yang dihadapi adalah masalah terkait bagaimana pengungsi yang masuk ke wilayah tersebut. Bagaimana ekonomi yang terpecah di Eropa. Di Amerika bagaimana krisis yang mereka hadapi sehingga memilih presiden pun begitu sulitnya karena keadaannya begitu susah. Di Asia juga begitu.

Kita bersyukur di Indonesia masalah seperti politik, keamanan, tidaklah seburuk dihadapi banyak negara di dunia. Kita bersyukur untuk itu.

Begitu juga masalah ekonomi, hampir-hampir tidak ada negara yang bisa bertumbuh sebaik sepuluh tahun lalu. Malah

banyak negara yang dulu sangat kaya menjadi sangat miskin dewasa ini. Hal itu akibat salah kebijakan.

Venezuela negara yang begitu kaya, cadangan minyaknya begitu besar daripada Saudi, tetapi untuk membeli sekerak roti antri dari pagi sampai siang. Membeli tisu saja atau obat harus antri dari subuh sampai siang. Juga untuk mendapatkan sedikit obat.

Itulah negara yang kaya, tetapi salah urus dan korup. Karena itulah, kita sangat menghargai KPK yang tetap konsisten menjaga bangsa ini untuk tidak terjebak dalam kondisi seperti masa lalu. Seperti banyak negara lain yang salah urus.

Di dunia Islam lebih bermasalah lagi. Kalau saya katakan tadi, di PBB hari pertama dibicarakan adalah pengungsi. Artinya, pengungsi yang ada, 90 persen adalah umat Islam. Saya sering katakan, di Timur Tengah, di Istanbul, di mana pun, kalau kita bicara hijrah Rasulullah, Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Sekarang umat Islam hijrah dari Suriah, Irak, Libya ke Eropa, ke negara-negara non-Islam. Alangkah galanya perasaan kita dengan kondisi seperti itu. Memang Indonesia kemudian menjadi tumpuan harapan umat Islam, bagaimana persatuan dan solidaritas kita.

Saya ceritakan pengalaman pahit dan pertama saya alami seumur hidup saya. Kemarin saya Shalat Idul Adha di kota Rochester di Amerika, sebelum ke New York. Hadir kira-kira 2.000 jamaah. Tapi begitu dimulai shalat, imamnya diteriaki, disuruh turun. Akhirnya imam baca Al Fatimah salah akibat diteriaki. Bertengkar selama setengah jam kemudian datang imam baru. Mau dipukul lagi, tetapi ditahan.

Jadi di negara orang lain pun kita bertengkar. Polisi Amerika datang meleraikan umatnya. Itu yang terjadi. Hanya karena perbedaan paham, ribut. Ibu-ibu lari ke luar. Saya tanya apa yang terjadi, ini hanya Idul Adha.

Saya tidak yakin. Tidak akan pernah terjadi di Indonesia hal itu. Kita bersyukur akan hal itu. Itulah perasaan yang galau di antara kita. Karena itulah kita merencanakan bagaimana Islam di Indonesia menjadi bagian daripada cita-cita *rahmatan lil alamin*. Bagaimana praktiknya yang baik, sebagai Islam *wasathiyah*, jalan tengah yang moderat, yang mengayomi seluruh umatnya dan seluruh bangsa. Itulah menjadi harapan dan cita-cita kita.

Karena itu ada Profesor Komaruddin yang menjadi komandan, yang harus bertugas merintis semua, dan teman-teman lainnya kita harapkan partisipasinya. Begitu juga partisipasi kita di negara-negara Islam, kita harus jalankan dengan baik supaya bangsa ini menjadi bangsa yang besar.

Presiden Jokowi, baru saja bersama-sama kita menyetujui untuk membangun 10 sekolah di Irak. Kita juga ingin memberikan rumah sakit lagi di Irak apabila banyak dokter kita yang mau mengambil bagian. Kita merupakan negara yang Insya Allah akan menjadi negara yang lebih damai dan lebih makmur dibanding negara yang lain.

Itulah masalah-masalah di dunia ini yang dihadapi. Indonesia sebagai negara yang penduduknya terbanyak beragama Islam harus mengambil tanggung jawab juga dalam hal-hal itu. Kita tidak boleh hanya menonton situasi tersebut. Karena itulah tugas kita semua. ✱

Disampaikan pada Acara
Peringatan Emas HUT ke-50 KAHMI
Di Hotel Bidakara Jakarta
28 September 2016

Stop Radikalisme

Negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam di dunia ini sebanyak 57 negara. Sebagian besar tersebar di kawasan Asia-Afrika. Negara-negara ini memiliki kekayaan alam yang sangat besar, antara lain dua pertiga sumber minyak dan gas di dunia ini ada di negara-negara Islam sehingga sering dikatakan, di mana ada azan kadang-kadang di situ banyak kekayaan. Semua itu menggambarkan bagaimana potensi yang besar di dunia ini.

Akan tetapi, kita juga melihat kenyataan negara-negara Islam yang ada dewasa ini. Banyak konferensi membahas permasalahan ini. Jadi, apabila semua masalah dapat diselesaikan dengan konferensi, maka saya pikir mudah masalahnya. Namun, masalah-masalah di dunia Islam tidaklah semudah menyelesaikan dalam dunia konferensi. Kita butuh persatuan dan kekuatan.

Hari ini ini kita berbicara tentang bagaimana mengatasi radikalisme dan terorisme. Karena tentu kita menginginkan Islam yang menjadi *rahmatan lil'alamin*. Bagaimana Islam sebagai agama memberikan rahmat, memberikan kebaikan, mempersatukan kepada seluruh umatnya. Itulah yang selalu menjadi tujuan dan cita-cita kita semuanya.

Indonesia sangat bersyukur, sebagai negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia. Mayoritas memiliki pemahaman keislaman yang moderat dibanding negara Islam lainnya. Memang Islam kita ini mempunyai banyak perbedaan-perbedaan dari sistem pemeluknya. Seperti saya katakan, terdiri dari 57 negara dengan berbagai sistem pemerintahan politik yang berbeda-beda, ada republik, ada kerajaan, ada kesultanan, dan macam-macam. Kita terdiri dari berbagai bahasa dan budaya, untuk hal-hal yang kecil kita juga berbeda dalam cara melaksanakan agama.

Karena itulah, apa yang kita harapkan adalah dari segi perbedaan itu kita bersatu. Dari segi perbedaan itu kita harapkan menjadi kekuatan, bukan menjadi perpecahan. Kuncinya saling menghargai karena ini yang dapat mempersatukan kita semuanya. Hari-hari ini, tahun-tahun ini apabila kita berbicara tentang umat Islam selalu mendapat rahmat, tetapi setiap hari apa yang kita lihat hanyalah bom, perang konflik di berbagai di negara-negara Islam.

Kalau zaman Rasulullah orang hijrah dari Mekkah ke Madinah untuk mencari kebaikan dan persatuan sehingga muncul masyarakat Islam yang baru. Hari ini yang kita saksikan adalah hijrahnya orang-orang Islam dari negara-negara, seperti Suriah, Libya, Irak, dan sebagainya, ke negara-negara non-Islam di Eropa. Sungguh tragis memang apa yang terjadi pada hari ini, dan semua itu tentu bagian apa yang harus kita selesaikan, bukan hanya untuk dibicarakan. Kenapa semua itu terjadi? Di banyak negara timbul *Islam-phobia*, faham yang mendiskreditkan Islam.

Namun, apabila kita lihat radikalisme tentu bukan hal yang baru dalam Islam. Bagaimana sejarah kaum khawarij justru membunuh para pemimpin, tetapi tentu kita tidak inginkan bahwa sejarah masa lalu tetap menjadi kejadian pada dewasa ini. Radikalisme dalam berpikir hal yang biasa dalam

setiap negara dan setiap bangsa. Tetapi yang dikhawatirkan adalah radikalisme dalam tindakan, dalam bentuk teror, perang, konflik, dan sebagainya. Itulah yang menjadikan kekhawatiran dunia dan kita semuanya.

Apabila kita melihat beberapa tahun terakhir, radikalisme selalu timbul dari negara yang gagal. Khususnya negara-negara Islam yang gagal. Karena itu, puncak dari radikalisme itu selalu digambarkan dengan gerakan Al Qaeda dan ISIS.

Ada dua penyebab negara gagal, yakni otoritarianisme pemimpin dan akibat invasi negara lain. Bagaimana kita melihat otoritarianisme di Afganistan, Irak, Suriah, dan Libya.

Namun, yang terbesar adalah invasi negara ke negara lain. Kita melihat bagaimana negara-negara besar menyerang negara tertentu dengan alasan demokrasi.

Afganistan diserang oleh Rusia, Irak diserang Amerika, dan oleh para sekutu tentunya tanpa alasan yang jelas. Begitu juga dengan Libya.

Kehancuran negeri itu menyebabkan masa depan yang gelap masyarakatnya, maka timbul kekhawatiran, timbul ketakutan dan kemarahan. Itulah awal dari radikalisme, yang kemudian menjadi terorisme.

Kalau melihat pengalaman yang ada di Eropa, pelaku teror adalah anak muda yang tidak mempunyai pemahaman agama yang benar. Anak-anak muda itu justru tidak mempunyai pemahaman agama yang dalam. Kita melihat seperti Abdussalam, Abdullah, atau siapa pun di Prancis, di Belgia, semuanya tidak mengenal masjid dengan benar, dan justru mereka suka mabuk, narkoba, dan sebagainya, tetapi yang timbul adalah kemarahan kepada umat.

Tetapi yang paling menyedihkan, sekali lagi adalah kita sendiri saling serang, saling menghancurkan, tanpa alasan yang jelas. Terlalu banyak hal yang menjadi penyebab konflik.

Mulai dari ideologi, energi, pemerintahan, demokrasi, dan sebagainya.

Yang paling menakutkan adalah adanya terorisme dengan bunuh diri. Kenapa terjadi bunuh diri dan paham apa yang menyebabkannya? Semua anak muda yang bunuh diri tentu bukan karena faktor ekonomi atau uang. Buat apa mendapat kekayaan kalau pun dia akhirnya meninggal? Tentu juga bukan karena alasan mencari kedudukan politik. Apa yang dia cari? Yang dicari adalah surga. Akan tetapi, siapa yang mengajari dia bahwa dengan membunuh, maka dia masuk surga? Ini bukan hanya terjadi di luar negeri. Inilah tugas para ulama dan pemimpin untuk meluruskan masalah ini.

Pengalaman saya di Poso dan Ambon, semuanya saling membunuh hanya alasan surga. Anak-anak muda yang selama ini tidak mengenal masjid dan gereja mencari jalan pintas untuk mendapat surga lewat membunuh satu sama lain. Mari kita luruskan hal-hal itu di tengah pergolakan pikiran pada dewasa ini. Karena itulah para alim ulama, para pemimpin moderat kita hadir dengan suatu tujuan, yakni bagaimana Islam menjadi rahmat untuk seluruh seisi alam kepada kita semuanya. Bukan saling membunuh, menghancurkan, dan mengebom satu sama lain. *

Disampaikan pada acara
Pembukaan International Summit Of The Moderate Islamic Leaders (Isomil)
Jakarta Convention Center
Jakarta, 9 Mei 2016

Zaman Jahiliah

Apabila kita melihat dunia Islam dewasa ini, kadang-kadang kita berpikir. Suatu saat kita akan sangat sedih, kita menyayangkan kejadian-kejadian di banyak negara Islam. Sering saya katakan kembali ke zaman jahiliah. Saling membunuh, saling memerangi satu sama lain yang luar biasa. Mungkin korbannya jauh lebih banyak saat ini dibanding zaman jahiliah.

Itulah yang terjadi sehingga saya sering katakan, dunia Islam, kalau zaman Rasulullah hijrah dari Mekkah ke Madinah, sekarang umat Islam malah hijrah dari Suriah, Irak ke negara-negara non-muslim. Sungguh tragis nasib sebagian umat di dunia ini yang mengalami kondisi seperti itu. Apa yang terjadi? Kenapa seperti itu?

Dunia Islam mempunyai kekayaan yang luar biasa dibanding negara-negara lain. Negara Islam pemilik kekayaan alam terbesar di dunia. Tetapi kekayaan itu kadang-kadang menjadi kutukan karena menyebabkan seperti itu.

Kita bersyukur, alhamdulillah, kita mengalami situasi yang jauh lebih baik. Walaupun ada konflik kecil, tetapi kita dapat mengatasinya. Tidak seperti di sebagian negara lain. Jadi upaya kita, bagaimana mendoakan umat Islam di seluruh dunia kembali damai, kembali bersaudara, kembali

memberi arti kepada salam kita. Setiap hari kita ucapkan *Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh*, mendoakan keselamatan, tetapi yang mereka lakukan membuat kejahatan satu sama lain.

Kita bersyukur, persatuan di negeri kita tetap terjaga walaupun berbeda-beda. Berbeda dengan negara-negara Timur Tengah yang hampir satu. Satu bahasa, satu budaya, satu warna kulit. Kita dari hitam ke putih, ke coklat. Rumpun bahasa 800 sekian, tetapi *alhamdulillah* kita bersatu. Sungguh rahmat Allah yang harus kita nikmati.

Sejarah Islam di Indonesia memang berbeda dengan sejarah Islam di banyak negara di Asia lainnya, Timur Tengah, dan Afrika. Sejarah Islam Indonesia dibawa oleh para ulama yang pedagang atau pedagang yang sekaligus para ulama. Ulama yang pedagang atau pedagang jadi ulama selalu tidak ingin mencari musuh, tidak ingin bertentangan. Di Makassar saya bersahabat dengan Pak Quraish. Bapak saya bersahabat dengan banyak sesama pedagang yang bersama-sama mengurus agama. Jadi itulah yang menyebabkan tradisi ini berjalan.

Jadi kita harus kembalikan ke tradisi di mana transisinya mudah dijalankan. Kenapa di Indonesia begini terjadi suatu moderasi *wasathiyah* yang berjalan, karena sejarah yang panjang seperti itu dan kita menjaga cara-cara seperti itu. Karena itulah saya juga selalu menganjurkan agar dakwah kita adalah dakwah yang menghibur, dakwah yang menyenangkan, yang memberikan harapan.

Sering orang mencela Islam sebagai teroris, agama yang mendorong teroris, padahal sebenarnya tidak. Sering saya bantah di forum-forum internasional bahwa apa yang Anda sebut teroris di Eropa, di Amerika, itu bukan pikiran agama. Mereka anak muda yang pemaarah, yang membalas kejahatan yang Anda buat di negaranya karena negaranya dihancurkan

dari luar. Mereka marah dan mereka bukan penganut Islam yang baik. Anak-anak muda di Eropa yang menjadi teroris itu, ya peminum alkohol. Dia penjual narkoba, malah. Pendiri ISIS, Al Zarqawi malah preman pasar. Tetapi dia pemaarah, semuanya akibat kelakuan orang lain.

Jadi apa yang terjadi di negara yang rusak itu, dari dalam negaranya diktator, diktator merusak. Saddam merusak, Khadafi merusak, Bashar 30 tahun tidak mau berhenti tetapi dia merusak bangsanya. Jadi bukan agama yang merusak itu, tetapi sistem yang merusak. Kemudian diserbu, tanpa alasan oleh negara-negara besar, menyebabkan kehancuran yang luar biasa.

Tidak ada sejarah di dunia ini selama ribuan tahun seperti yang terjadi di Suriah. Semua negara mengebom Suriah. Bashar mengebom rakyatnya. Saudi ikut mengebom, Emirate mengebom, Amerika mengebom, Rusia mengebom, Prancis mengebom negara sekecil itu. Hancurlah semuanya. Saddam, bagaimana zalimnya kepada rakyatnya, dizalimi lagi dari luar. Khadafy demikian juga, Nigeria seperti itu.

Jadi apabila kita ingin mendapatkan negara yang *baladun tayyibatun warrabbun ghafur*, dua-duanya harus kita diperbaiki. Dari dalam kita perbaiki, ekonomi dan keadilan harus dijalankan, dan juga mencegah dari luar. Jangan mereka merusak negeri kita. Inilah yang terjadi di negara-negara Islam dewasa ini.

Kita, ada dua kebanggaan dari segi keislaman, jumlah yang besar, terbesar di dunia dan sifat yang *wasathiyah*, moderat. Tidak ada lagi setelah itu. Tetapi kita ketinggalan dalam bidang ekonomi. Ekonomi dikuasai non-Islam.

Kita kekurangan keilmuan. Apabila kita ke toko buku mencari kitab, hampir semuanya terjemahan, kecuali bukunya Pak Quraisy, bukunya Hamka. Yang lain hampir semuanya terjemahan. Artinya, kita membutuhkan tingkat keilmuan

yang lebih baik lagi. Karena kita mempraktikkan, kalau mereka hanya mengajarkan. Kita mempraktikkan Islam yang baik di Indonesia, yang menjadi *rahmatan lil'alamin*. Kita mempraktikkan itu. Marilah kita menjadi *center* dari itu.

Karena itulah, pemerintah akan mendirikan Universitas Islam Internasional yang besar agar menjadi *center* dari keilmuan Islam. Indonesia harus menjadi rujukan dunia dalam hal toleransi dengan mendirikan universitas Islam terbesar di dunia. Bukan hanya ada di Yaman, di Mesir, di Saudi, yang sebagian sudah hancur. Kita harus membawanya ke sini. Untuk itu dibutuhkan partisipasi para alim ulama, para habaib, dan sebagainya.

Saya tahu juga, ada di antara kita yang berpikir radikal. Berpikir radikal tidak ada yang larang, tetapi jangan bertindak radikal. Sebenarnya yang paling ditakuti di dunia bukan senjata, melainkan orang yang mau bunuh diri. Apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Prancis, semua bunuh diri. Kenapa orang mau bunuh diri? Dia tidak mencari uang, tidak mencari kedudukan. Apa yang dia cari? *Jannah, jannatun naim*. Siapa yang mengajarkan mereka membunuh orang itu masuk surga? Ini yang salah.

Jadi itulah yang menjadi bagian dari kita dalam menyebarkan agama, mengajarkan ajaran yang benar. Mari kita lakukan apa yang pendahulu kita perbuat, para habaib, para alim ulama, para guru yang semua mengajarkan kebaikan. *

Disampaikan pada Acara
Muktamar Nasional Rabithah Alawiyah ke-24
Di Hotel Aston TB Simatupang
Jakarta, 6 Agustus 2016

Lahir dari Kemarahan

Kita masih ingat pada bulan Oktober 2002, bom Bali pertama yang mencengangkan menewaskan lebih dari 200 orang, sebagian besar warga asing, termasuk Australia dan negara-negara lain. Tiga tahun kemudian berulang lagi, bom Bali kedua, Oktober tahun 2005 yang juga menyebabkan banyak korban.

Di Jakarta dan beberapa tempat di Indonesia, sama dengan banyak negara-negara lain, tentu mengalami hal yang sama. Karena itulah kita bersatu di sini, mencari cara bagaimana mengatasi masalah-masalah seperti itu karena menimbulkan bukan hanya kerugian jiwa, melainkan juga kerugian ekonomi dan juga *image*.

Contoh di Bali. Pada bom Bali yang pertama, dalam satu minggu turis yang datang tinggal 10 persen dari yang biasanya. Bagaimana lengangnya Bali, hotel-hotel, dan lain-lain. Bagaimana kerugian masyarakat dan ekonomi Indonesia karena peristiwa itu.

Namun, dengan keteguhan rakyat Bali dan para pejabatnya, kita dapat mengatasi akibat-akibat masalah tersebut. Tetapi yang sangat penting bagaimana agar masalah tersebut jangan terjadi lagi di masa datang. Begitu juga di tempat lain, di manapun di dunia ini.

Masalah terorisme tentu bukanlah hal yang baru sebenarnya, walaupun berbeda cara. Kalau 50 tahun lalu, hampir 10 tahun, terorisme dalam bentuk lain. Kita mengenal banyak pesawat yang dibajak, di-*hijack* oleh banyak teroris dibawa ke Kuba, ke Aljazair dibajak oleh teroris, termasuk oleh Carlos yang terkenal itu.

Itulah yang menimbulkan ketakutan dunia ini di waktu itu. Namun, dampaknya berbeda karena pada waktu itu motifnya *liberation, liberation* untuk daerah-daerah, negara-negara seperti Palestina ataupun negara-negara Amerika Selatan.

Dewasa ini tentu berbeda lagi setelah sekian puluh tahun. Jadi untuk mengatasi teroris, pertama bukan hanya perlu mengetahui apa yang terjadi, di mana terjadi, tetapi kenapa hal itu terjadi. Ini jarang dibicarakan. Mengapa itu terjadi, terorisme seperti itu, kenapa semakin hebat, kenapa semakin membawa korban yang besar dengan modal yang sedikit?

Kelompok-kelompok yang radikal, sama dengan pencuri, kadang-kadang lebih pintar dari polisi. Kalau tidak ada uang, dia akan mencari cara yang lebih murah. Siapa yang menduga di Nice, dengan hanya menyewa truk dapat menewaskan 80 orang? Sebelumnya juga siapa yang mengira orang menggunakan pesawat untuk mengebom?

Semua itu adalah pikiran yang mempunyai ideologi, mempunyai dasar yang sulit kita ketahui, walaupun apa yang jadi masalah sebenarnya dapat kita analisis. Intinya, yang paling ditakuti dewasa ini adalah terorisme dengan bunuh diri. Makin banyak polisi yang menjaga bandara, makin banyak polisi yang menjaga tempat-tempat lain, dia makin senang karena makin banyak polisi atau tentara yang meninggal. Itulah yang terjadi di dunia ini.

Kalau kita lihat sejarah radikalisme, kemudian terorisme, itu selalu bergandengan. Kenapa terjadi

radikalisme dan terorisme? Radikalisme dalam bentuk seperti ini dimulainya oleh Al Qaeda, kemudian timbul yang lebih besar lagi, ISIS. Dari mana datangnya dua organisasi yang begitu mencekam dunia dewasa ini? Al Qaeda datang dari Afganistan.

Anda tahu semua, ISIS datang dari Suriah dan Irak. Apa persamaan tiga negara itu? *The failed country*, negara yang gagal. Kenapa gagal? Ada masalah internal di negara itu, otoritarian, kemudian yang paling penting, ada *invasion* dari negara-negara besar yang menghancurkan negeri itu.

Akibat kehancuran itu banyak generasi muda yang kehilangan harapan, kehilangan masa depan, kemudian mengungsi, tidak mengetahui lagi apa arti hidup dan marah. Itulah yang menjadikan dia radikal, bukan hanya agama. Agama memang menjadikan dia menjadi bersatu, tetapi bukan agama yang menyebabkan dia marah.

Kalau kita lihat orang-orang yang berbuat begitu ada yang di Indonesia. Kita tahu semua, siapa itu Imran, siapa Imam Samudra, dan sebagainya. Mereka bukan ahli agama yang baik, tetapi anak muda yang marah. Mereka umumnya datang dari Afganistan. Apa yang mereka dapat di Afganistan? Suatu penjajahan yang terjadi di negara muslim oleh negara besar.

Apa yang terjadi di Eropa, di Paris? Siapa Hamid Aba Oud, siapa Abraham Abdeslam, siapa Lahouaiej-Bouhlel? Semua bukan ahli agama. Dia jarang ke masjid. Dia peminum alkohol, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Siapa Abdullah *Mohamed* Lahouaiej-Bouhlel yang menabrakkan truk di Nice, dia juga tidak mengetahui agama dengan benar. Jadi bukan agama yang mendorong dia berbuat begitu, tetapi kemarahan, keputusasaan, dan juga kehilangan harapan karena terjadi kerusakan di negeri-negeri itu.

Ini dapat kita bandingkan dengan yang terjadi di Dallas. Kenapa Xavier Johnson di Dallas membunuh lima polisi

kulit putih? Apakah dia teroris? Apakah karena agama? Apa yang terjadi di Louisiana? Dengan Gavin Eugene Long, yang membunuh tiga polisi.

Dia marah, dia pemarah, karena orang hitam dibunuh oleh polisi tanpa alasan yang jelas.

Kita memang marah melihat korban puluhan di jalan, di Paris, di Belgia, di London, tetapi lebih banyak lagi yang dibom di Irak, di Suriah, di Libya tanpa alasan yang jelas. Kenapa harus jutaan orang mati di situ. Itu menimbulkan kemarahan yang luar biasa. Jadi kita harus melihat *the root of problem* saja, diduga, bukan hanya kenapa, di mana. *Root of the problem* karena menyadari hal-hal tersebut.

Kalau kita menyadari *the root of problem*, kemarahan, kenapa bekas tentara Amerika rela membunuh lima polisi? *What wrong?* Bukan ideologi. Tidak ada yang mengajarkan dia Islam, tetapi dia marah. Kenapa Mohamed Lahouaiej-Bouhlel mau membunuh dan bunuh diri di Nice? Apa alasannya? Marah melihat keadaan dan kehilangan masa depan. Jadi terjadi seperti itu di dunia ini.

Tetapi dewasa ini lebih banyak lagi teroris di negara-negara Islam, sampai di Madinah, di Jeddah, di Jakarta, di Istanbul, di Karachi. Ini lain lagi persoalannya. Dia ingin menegakkan syariah. Jadi teroris di dunia ini bukan satu motif. Berbeda-beda motif, tetapi mereka bersatu dengan suatu harapan, meskipun harapan yang pendek.

Kalau seorang yang kita kenal teroris, radikal yang kemudian menjadi teroris, kemudian membunuh orang, apa yang ingin dia capai? Sederhana sekali. Dia ingin mencapai surga dengan jalan pintas. Pasti tidak mencari uang karena dia mati. Dia tidak juga mencari kedudukan politik karena dia mati, tetapi mencari masuk surga.

Saya punya pengalaman pribadi waktu menyelesaikan konflik Ambon dan Poso, sekitar 5.000 orang meninggal.

Saya bingung kenapa dia ingin saling membunuh, membakar masjid, macam-macam. Setelah saya pelajari, sederhana masalahnya. Masing-masing ulama mengajarkan dia bahwa itulah jalan yang tercepat masuk surga. *Mindset* itu yang diubah. Saya menjelaskan, cara itu bukan jalan masuk surga, tetapi masuk neraka. Dalam dua minggu berhenti konflik.

Jadi tidak bisa memakai senjata untuk mendamaikan pikiran. Karena itulah di Indonesia mempunyai program deradikalisasi agar pikiran itu kita jelaskan yang lurus.

Tidak mudah memang, tetapi harus dijalankan, karena senjata sulit menyelesaikan. Bisa dikurangi, tapi tidak akan menyelesaikan. Karena seperti saya katakan tadi, makin banyak polisi atau tentara yang menjaga sesuatu *airport*, mereka semakin senang.

Ini yang susah. Siapa yang berpikir pesawat menabrak World Trade Center. Setelah semua pesawat dijaga luar biasa, dia pakai sederhana lagi, truk. Tidak ada yang memikirkan itu. Kenapa tidak berpikir karena dia mau bunuh diri. Jadi inti dari persoalan ketakutan dewasa ini bukan terorisnya, tetapi ada sekelompok orang yang mau mati hanya untuk satu tujuan. Ini problem utama yang sulit dan harus kita atasi, yaitu pikiran-pikiran itu. Karena itulah pikiran moderat.

Tetapi apa yang terjadi di negara-negara Islam berbeda dengan apa yang terjadi di negara Barat. Dia tentu tidak ingin mengislamkan Paris, Belgia, atau London. Tidak. Tapi dia marah akan hal tersebut. Sama dengan Bom Bali pertama. Bom Bali pertama targetnya orang asing karena dia marah kepada orang asing. Tetapi Bom Bali kedua, bom di Jakarta, bom di Solo, tidak lagi. Siapa saja, *random*, karena adanya pikiran-pikiran seperti itu.

Karena itu, marilah kita bersatu melihat secara jernih permasalahannya. Jangan ada negara besar menginvasi negara-negara lainnya hanya dengan alasan tidak benar. UK

sudah mengakui laporan tentang Tony Blair bahwa invasi suatu negara sebagai penyebab munculnya terorisme. Dunia harus mengakui bahwa ada kesalahan di situ sehingga terjadi kehancuran seperti itu.

Jika tidak ingin mengetahui permasalahannya, maka masalahnya tidak akan pernah selesai. Sebab berapa ratus ribu orang yang tidak peduli dengan kematian demi hal lain.

Kita mendukung usaha menyelesaikan masalah itu, tapi kita harus tetap berusaha bekerja sama untuk mendapat informasi intelijen yang baik. Tujuannya agar kita terhalangi seperti itu. Tanpa informasi yang sama, kita juga tentu akan kesulitan mengatasinya. Saya selalu mengucapkan terima kasih kepada negara-negara yang bekerja sama dengan Indonesia, memberikan teknologi yang lebih modern untuk mendeteksi hal itu.

Tentu juga diakui oleh banyak negara bahwa polisi Indonesia termasuk kepolisian yang sangat aktif dan berhasil dalam mengatasi hal-hal tersebut. Namun, juga tidak semuanya bisa sukses mengatasi masalah-masalah tersebut karena tidak mudah mendeteksi orang-orang yang siap mati.

Karena itulah, mari kita bersatu mengatasi asal-usul masalah ini. Kita harus bersatu menegakkan demokrasi dengan betul, tanpa paksaan. Kita juga ingin mengatasi kemiskinan dengan baik karena hampir semua di negara paling mudah muncul masalah apabila negeri itu miskin.

Saya berbicara dengan Perdana Menteri Bangladesh, siapa yang mengebom di Bangladesh, di Dacca, semua golongan menengah, bukan orang miskin karena tertarik dengan ide-ide seperti itu. Tentulah, dengan cara seperti itu harus menjadi bagian pembicaraan kita. Kita harus mengatasi inti, *root of the problems, not the problem only, the root of problem*. Kedua, berapa ongkos kita untuk menahan terorisme dibanding

dengan siapa yang salah dalam perang Irak dan Suriah dan sebagainya?

Negeri itu harus diberikan harapan kembali, harus diberikan restorasi kembali. Tanpa itu, dunia tidak akan pernah terlepas dari kebencian dan kemarahan. Apabila kebencian dan kemarahan selalu terjadi, maka apa pun akan sulit diatasi.

Indonesia bukanlah sekadar bicara. Kami termasuk korban yang banyak dari soal itu. Tetapi saya ingin katakan, terjadi perbedaan antara teroris di sini dan teroris di negara lain. Motifnya berbeda. Motifnya di sini syariah. Begitu agama dilaksanakan dengan betul, tidak terlalu besar lagi. Tetapi bagi negara lain, pembalasan, kemarahan, rasa putus harapan. Itu yang lebih berat dari apa yang kita hadapi dewasa ini. ✱

Disampaikan pada Acara
International Meeting on Counter-Terrorism and 2nd counter-
Terrorism Financing Summit 2016
Di Sofitel Bali, Nusa Dua Beach Resort, Nusa Dua,
Bali, 10 Agustus 2016

Paling Stabil

Tujuan berbangsa adalah bagaimana kita bisa mencapai masyarakat yang makmur dan adil. Kita bekerja dengan sebaik-baiknya agar bisa menikmati kemakmuran dan keadilan. Kita menuju ke situ. Sekarang masalahnya, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan itu?

Kalau kita membagi masalah, ada masalah politik, ekonomi, dan sosial. Secara politik, saat ini Indonesia menjadi negeri paling stabil di Asia. Artinya, kalau dihitung masalah yang ada di antara partai-partai, kondisi politik Indonesia paling stabil dibanding Malaysia, Filipina, dan Thailand. Apalagi negara yang lebih jauh. Partai di Indonesia sudah bersatu untuk mendukung program pemerintah. Jadi kita tidak punya masalah politik.

Masalah ekonomi juga ada tantangannya. Karena itulah *challenge opportunity* yang ingin dibicarakan. Masalah sosial juga ada hubungannya dengan nilai ekonomi. Ketimpangan yang harus kita perbaiki karena di semua negara, masalah yang terjadi bukan karena pertumbuhannya, tetapi karena keseimbangannya atau karena ketimpangannya.

Masalah keamanan juga ada tantangannya. Tantangannya ada di luar dan di dalam. Kita baru saja mengalami beberapa

hari yang lalu, di Jalan Thamrin, Jakarta. Walaupun korbannya tidak sebesar dibandingkan dengan yang terjadi di negara-negara lain, tetap jadi masalah yang bisa membesar kalau kita tidak berhati-hati.

Semua masalah yang terjadi selalu tidak berdiri sendiri. Kalau kita lihat masalah ekonomi, maka semua harus dipahami bahwa ada masalah di luar dan ada masalah di dalam.

Tetapi masalah di luar jauh lebih besar. Kita tahu apa yang telah terjadi di Tiongkok. Penurunan ekonomi Amerika dan ekonomi Eropa membuat pasar Tiongkok pun ikut turun.

Akibatnya, ekonomi negara Tiongkok menurun mengikuti industrinya yang juga menurun. Akhirnya pertumbuhan ekonominya menurun. Efeknya juga ke Indonesia. Permintaan komoditas di dunia langsung menurun karena penurunan dari ekonomi negara besar.

Nah, kita mempunyai dampak yang besar. Akan tetapi dampak itu berbeda-beda pada setiap daerah di Indonesia. Dampak di Kalimantan dan Sumatera berbeda dengan apa yang terjadi di Jawa dan di Sulawesi. Hal itu karena penurunan permintaan komoditas mineral, sawit, dan sebagainya. Di daerah yang memproduksi komoditas tersebut, pasti ekonominya menurun. Secara nasional, pertumbuhan kita tidak bisa mencapai target.

Dampak lanjutannya, harga minyak turun akibat permintaan menurun. Sehingga, secara otomatis berlaku hukum dasar ekonomi, yakni *supply* dan *demand*. Begitu *demand* menurun, sementara *supply*-nya tetap, maka harga minyak akan turun. Meskipun memang benar ada dua masalah yang bisa memengaruhi harga minyak, yaitu ekonomi atau politik konspirasi. Tetapi dua-duanya bisa terjadi sekaligus.

Sebenarnya, penurunan pertama terjadi akibat Amerika Serikat yang memicu harga menurun secara perlahan. Tetapi

produsen minyak di Timur Tengah tidak mau kondisi itu berkembang. Mereka kemudian menurunkan harga sekaligus. Akibatnya, *surchage* tidak bisa jalan, hanya jalan di level 50-an.

Kondisi tersebut diperparah lagi dengan Iran yang relatif stabil dan damai sehingga harga minyak tambah turun lagi. Jadi lebih besar faktor penyebab turunnya harga minyak adalah karena masalah ekonomi. Jadi bukan disebabkan masalah konspirasi karena negara yang paling menderita dengan kondisi ini adalah Arab Saudi.

Negara penghasil minyak terbesar ini mengalami defisit sudah lebih dari 25 persen akibat penurunan harga minyak. Itu artinya, kalau Arab Saudi mengalami kondisi ini lima tahun terus-menerus, maka negara ini bisa bangkrut.

Sama halnya dengan negara kita, jika defisitnya sekarang 2,8, maka suatu saat kita bisa defisit besar jika kondisi ini berlangsung terus-menerus selama 40 tahun. Sementara Amerika Serikat dengan kondisi harga minyak sebenarnya *fifty-fifty*, kalau harga minyak Chevron naik bisa kaya raya, tetapi rakyatnya akan susah.

Sekarang harga minyak turun. Subsidi kita bisa mencapai angka nol komsumsinya, tetapi pendapatan negara juga turun. Nah, tinggal dihitung, besar mana? Jumlah subsidi bahan bakar minyak yang dikeluarkan dibandingkan dengan pendapatan negara yang diterima. Oleh karena itulah, mengapa harga minyak harus turun. Indonesia memang bisa menghadapi masalah, tetapi tidak sebesar dibandingkan dengan negara pengekspor minyak yang besar.

Karena itulah, dari sisi ekonomi, langkah yang kita harus perbuat adalah sama dengan yang dilakukan pemain silat. Menggunakan tenaga dalam lebih banyak karena kita tidak bisa memakai tenaga luar. Kita ke China mau dagang, dagang

apa? Batu bara turun, nikel turun. Kadang-kadang dijual harga pokok. Itu yang terjadi.

Kalau kita lihat apa yang terjadi di Amerika, China, dan Eropa, semua akibat berlebihan. Amerika mulai krisis akibat terlalu banyak perang. Perang Irak ongkosnya tiga triliun dollar, tambah lain-lainnya, dan Afganistan satu triliun dollar.

Kalau kita perang seperti itu, mungkin ongkosnya hanya berapa triliun rupiah karena kita tidak minum es krim di gunung. Mereka, tentaranya, dalam situasi apa pun tetap minum es krim walaupun membawanya susah. Eropa terlalu tinggi biaya sosialnya. Yunani bangkrut karena semua biaya ditanggung, pajak dinaikkan, gaji dinaikkan, dan penghasilan menurun. Akhirnya bangkrut.

Kelemahan kita bukan soal banyaknya bank, bahkan jumlahnya berlebih, tetapi yang tinggi bunga. Bunga tinggi karena bersaing menarik nasabah untuk menyimpan uang sehingga menawarkan bunga tinggi. Makanya kita termasuk bunga yang tinggi. Akhirnya kita tidak bisa bersaing dengan Thailand, Malaysia, apalagi China dan Jepang. Karena itu, pemerintah menurunkan bunga, khususnya UKM dengan subsidi. *

Disampaikan pada Acara
Forum redaksi "Indonesia 2016": Challenges and opportunities
Di MNC Tower Jl Kebon Sirih
Jakarta, 21 Januari 2016

Amandemen Konstitusi

Pendiri bangsa ini bukan saja para pejuang, perintis, proklamator, melainkan juga negarawan yang mempunyai kemampuan, keilmuan, pengalaman sehingga dapat menyusun kerangka dasar negara ini dengan sebaik-baiknya. Setelah proklamasi, disusun konstitusi, walaupun dalam waktu yang sangat singkat, tetapi mempunyai makna dan isi yang sungguh dapat mempersatukan bangsa selama ini.

Begitu juga memilih pemimpinnya, presiden dan wakil presidennya. Dalam konstitusi yang dibuat sedemikian baiknya masa itu. Karena itulah, sebagai penghargaan dan tanda terima kasih kita memperingati Hari Konstitusi hari ini.

Konstitusi kita pahami memuat falsafah bangsa ini, juga dasar-dasar kerangka kenegaraan kita dan tujuan-tujuan serta batasan-batasannya. Selama 71 tahun, sebenarnya konstitusi itu dinamis, sangat dinamis. Setidak-tidaknya kita sudah menjalankan tiga Undang-Undang Dasar dengan empat perubahannya. Artinya, sudah tujuh macam Undang-Undang Dasar telah kita jalankan. Sangat dinamis. Undang-Undang Dasar 1945, kemudian UUD RIS, sejak Desember 1949-1950 hanya 10 bulan, kemudian menjadi Undang-Undang Dasar

Sementara 1950 yang sangat liberal, parlementer, kemudian kembali pada Undang-Undang Dasar bulan Juli 1959.

Artinya bangsa ini telah mencoba atau menjalankan hampir semua sistem kenegaraan yang ada. Tahun 1945 kita negara kesatuan dengan presidensial. Kita berubah lagi ke federal hanya 10 bulan. Rupanya tidak cocok, kita kembali lagi ke negara kesatuan tetapi parlementer yang liberal, hanya juga bertahan beberapa tahun, tujuh tahun.

Kita kembali lagi ke UUD 1945. UUD 1945 kemudian empat kali diamendemen. Itu artinya Undang-Undang Dasar pada dasarnya memenuhi kebutuhan yang dinamis, tidak berarti sakral yang tidak boleh diubah-ubah. Ini menandakan juga bangsa ini sangat dinamis, sama dengan bangsa-bangsa lain, Undang-Undang Dasar dibuat sesuai dengan kebutuhan saat itu.

Karena itu, apabila keadaan membutuhkan, amandemen Undang-Undang Dasar selalu terbuka sebagaimana juga yang ada dalam pasal perubahan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Harapan kita agar Undang-Undang Dasar itu selalu menjadi bagian yang sangat penting untuk kemajuan bangsa ini.

Seperti saya katakan tadi, Undang-Undang Dasar kita sebenarnya sudah sangat dinamis. Kalau Undang-Undang dasar 1945 dan yang sekarang memang BAB-nya tetap sama 16, maka tetap 16. Pasalnya juga dari 37, tetap 37, tetapi ayatnya yang sudah 3 kali lebih banyak dari sebelumnya. Kalau aslinya Undang-undang Dasar 1945 hanya 65 ayat, sekarang sudah 194, persis tiga kali lipat dari sekarang ini. Jadi sebenarnya UUD 1945 dewasa ini yang sudah diamandemen empat kali sudah mencakup hal-hal yang lebih detail dibanding sebelumnya.

Saya kira itu juga sesuai dengan falsafah atau apa yang dijanjikan oleh Bung Karno pada awalnya bahwa UUD 1945

merupakan sesuatu yang bersifat sementara, yang kemudian akan disempurnakan. Bahwa pada tahun 1999 sampai tahun 2002 disempurnakan dalam bentuk amandemen, tentu itulah bagian daripada konstitusi itu sendiri.

Memang, di mana pun hal itu sangat dinamis. Kita malah tidak sedinamis dengan bangsa-bangsa lain. Kalau kita mempelajari konstitusi Amerika, dalam 227 tahun, sejak tahun 1789, dia sudah mengamandemen 27 kali. Tapi yang lebih sering lagi India. India selama 60 tahun mengamandemen 100 kali. Walaupun amandemennya mungkin hanya 1-2 pasal, tetapi 100 kali mengamandemen. Negara ASEAN, Thailand, sudah 20 kali mengamandemen undang-undang dasarnya. Malaysia lebih hebat, 57 kali selama 59 tahun.

Jadi, sekali lagi, UUD bukan suatu sakral yang tidak boleh diubah-ubah. Sesuai kebutuhan yang dasarnya, karena kondisi yang berubah. Negara-negara di sekitar kita seperti Thailand malah setiap pergantian pemerintahan hampir semuanya diubah karena konstitusi mereka tidak sesingkat kita. Konstitusi Thailand lebih dari 300 pasal, bukan ayat. Jadi sudah mencakup juga Undang-Undang Pemerintah Daerah. Nah, itulah bagian-bagian yang kita pahami, sesuatu Undang-Undang Dasar bukan dasar daripada kebutuhan masa kini dan masa mendatang.

Karena itulah, apabila kita semua berpikir bahwa semua mengharapkan sesuatu yang harus diperbaiki, tentu perubahan atau amandemen bukanlah hal yang mustahil untuk kita bicarakan. Bukanlah hal yang sakral bagi kita untuk tidak mengadakan suatu perubahan yang mendasar. ✱

Disampaikan pada Acara
Peringatan Hari Konstitusi dan
Grand Final Lomba Cerdas Cermat 4 pilar 2016
Di gd. Nusantara IV, kawasan MPR-DPR Senayan
Jakarta, 18 Agustus 2016

Pilkada Sempel

Lebih dari 12 tahun kita melaksanakan pilkada. Sejak 2 tahun lalu, tahun 2015, dilaksanakan pilkada serentak. Kenapa pilkada serentak? Karena sebelumnya pilkada dilakukan terpisah-pisah sehingga Indonesia negara yang mempunyai pemilu terbanyak di dunia. Lebih 500 pilkada dalam lima tahun karena tiap kabupaten/kota mengadakan pemilihan kepala daerah. Pilkadanya sesuai dengan waktunya. Itu dianggap tidak efisien, apalagi kalau terjadi masalah.

Karena itulah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008, diadakan pemilu serentak sehingga ada efisiensi, ada kebersamaan, sehingga dalam lima tahun, hanya ada tiga pemilu. Dua kali pilkada dan satu kali pemilu legislatif dan sekaligus pemilihan presiden.

Ini jauh lebih efisien dari sebelumnya. Untuk itulah dibutuhkan cara konsisten, bagaimana pemilu berjalan baik, juga dari sisi keamanan. Karena itulah kita semua harus menjadi bagian untuk menjaga keamanan dan kesatuan bangsa agar prosesnya berjalan dengan baik.

Sebenarnya pemilu ini lebih ringan daripada pemilu-pemilu sebelumnya. KPU dan Bawaslu telah mengatur pemilu makin bermutu atau tidak. Katakanlah, pengerahan massa

yang besar, tidak ada baliho, iklan TV yang terbatas. Semua itu memberikan efisiensi dan juga tentu lebih menyentuh masyarakat.

Calon lebih banyak bersentuhan dengan masyarakat karena kampanye secara tidak langsung panjang. Itulah perbedaan-perbedaan pemilu dahulu dan yang sekarang.

Apa yang kita pelajari dari pilkada serentak pertama tahun 2015? Pertama konflik-konflik sangat kecil akibat tidak ada pola politiknya. Walaupun pilkada di kabupaten, walikota, atau gubernur sekaligus, pola dukungannya berbeda-beda. Hari ini koalisi PDI-P dengan Golkar dengan Hanura, besok di tempat lain berbeda lagi. Tidak ada pola yang sama. Hampir semua tidak ada yang sama, antara koalisi-koalisi pemilu.

Apa artinya? Artinya, tidak akan terjadi konflik politik karena kalau dia berkonflik di sini, bersama di kabupaten sebelah atau di provinsi. Jadi itu sesuatu yang sangat personal.

Kedua, akibat proses kampanye dan proses selanjutnya dibatasi oleh banyak aturan yang lebih ringan sehingga tidak menimbulkan gesekan-gesekan banyak soal.

Namun, yang besar akibat teknologi. Di media, hoaks dan macam-macam bertebaran. Ini yang terjadi. Isu bertebaran umumnya terjadi pada akhir masa kampanye. Namun ini dapat ditangkal dengan pola yang berbeda.

Artinya, isu sosial masyarakat berbeda-beda, kampanye sangat kecil gesekannya sehingga tidak terjadi hal yang menyebabkan konflik besar. Pengalaman yang lalu justru terjadi setelah perhitungan. Biasa, ada setuju, ada tidak setuju. Ada percaya, ada tidak percaya atau mencari alasan apabila ada yang merasa kalah dengan hasil. Itu biasanya yang timbul.

Jadi konflik atau gesekan, berdasarkan pengalaman, terjadi setelah pelaksanaan pilkada. Artinya Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan agar berhati-hati bukan hanya setelah pemilihan, tetapi dua minggu setelah itu, saat proses pengumuman di

KPU daerah. Walaupun ujungnya ke Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi akibat peraturan yang ketat, yang dapat diadili tidak banyak juga.

Itulah pengalaman tahun 2015. Apabila kita lihat, yang terjadi sangat personal. Mungkin yang dukung keluarga atau kelompok tertentu. Itu yang terjadi, kemungkinan gesekan.

Yang kita khawatirkan jangan terjadi masalah seperti suku, agama, kelompok, dan sebagainya. Itu harus dijaga, jangan sampai terjadi. Agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar.

Tentu ada daerah yang punya risiko tinggi. Kalau kasus di Jakarta tentu agak berbeda. Walaupun, gaungnya secara nasional, tetapi setelah masuk ke ranah hukum, ternyata juga lebih tenang. Ini juga menandakan kedewasaan. Apabila dibawa ke ranah hukum, situasinya akan lebih tenang.

Masyarakat, pejabat, juga kepala daerah dibutuhkan untuk menjaga sehingga terjadi kedamaian dalam pemilu karena apa yang dihasilkan dari proses yang baik akan menghasilkan juga pejabat yang baik. Apabila ada gesekan, biasanya terjadi sentimen yang berkepanjangan di daerah tersebut. Kita mengharapkan Kepolisian, TNI, dan aparat Kejaksaan menjalankan proses ini dengan baik.

Karena pilkada dibutuhkan biaya yang cukup, pemerintah, pemerintah daerah tentu menyiapkan dana yang baik. Tidak boleh berlebih-lebihan. Tapi saya yakin, karena ini tugas kita semua tentu akan dilakukan dengan baik.

Jangan lupa, sekarang ini pilkada itu simpel. Berbeda dengan pemilihan legislatif (pileg). Kalau pileg, salah satu pemilu yang paling rumit di dunia karena menghitung tiga tingkat, tiga lapisan, kemudian partai berapa, calon berapa, kemudian ada DPD.

Ini ditambah lagi dengan pilpres. Ini nanti akan ribut sekali permasalahannya tahun 2019. Tetapi kalau pilkada

itu cukup satu jam, selesai perhitungannya karena nomor 1, nomor 2, nomor 3, putar-putar. Itu saja putar-putar, hitung selesai, tidak ada lagi calon ini, calon itu, partai apa. Ini jangan disamakan dengan legislatif yang rumit. Pilkada simpel selama ada keterbukaan. *

Disampaikan pada Acara
Penutupan Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak
Tahun 2017
Di Hotel Bidakara Jakarta
31 Januari 2017

Partai yang Demokratis

Indonesia hampir sudah mencoba semua sistem yang berlaku. Pada tahun 1945, undang-undang kita memakai sistem presidensial yang sentralistik. Kita tidak terlalu puas. Kita sekalian belok ke federal dengan RIS, walaupun hanya 10 bulan. Kita menjadi negara federal. Sejarah mencatat itu.

Indonesia juga pernah menjadi negara federal. Indonesia Timur presidennya ada di Bali, menterinya di Makassar, bayangkan itu sistemnya. Kita tidak puas. Kita bikin Undang-Undang Dasar Sementara yang parlementer. Kita tiru negara-negara Barat yang parlementer. Akhirnya kabinet bisa jatuh satu tahun, enam bulan pun tidak ada kabinet.

Pokoknya kalau parlementer yang pernah dijalankan di Indonesia berorientasi bukan pada bagaimana pemerintahan berjalan dengan baik, melainkan bagaimana pemerintahan yang sedang berkuasa segera jatuh. Tahun 1959 kita kembali lagi ke UUD 1945, presiden bertahan lama. Kemudian Orde Baru tetap undang-undang yang sama, mulai kelihatan demokratis. Ada 10 partai, 12 partai kalau kita bicara partai, tetapi akhirnya juga otoriter, akhirnya direformasi lagi.

Kembali lagi dengan UUD 1945, tetapi diamandemen empat kali. Jadi itulah perjalanan ketatanegaraan republik

ini yang dinamis sekali. Hampir semua sistem kita coba. Demokrasi bukanlah sistem yang sangat sempurna, tetapi yang paling minim kekurangannya dalam ketatanegaraan kita. Akhirnya kita memilih itu, dengan berbagai cara. Begitu juga kalau kita berbicara kepartaian, kita sudah pilih macam-macam.

Sejak Maklumat November, Pak Hatta. Dari dulu dia maklumat “X” partai timbul sepuluh, kemudian naik lagi jumlahnya. Puncaknya pada Pemilu 1955, terdapat lebih dari 100 partai dan perorangan pun bisa ikut Pemilu. Sehingga waktu itu, begitu besarnya formulir pemilu karena kadang-kadang isinya terdapat lebih 100 partai.

Kembali ke Orde Baru 12 partai, lama-lama disingkatkan ingin coba ikut Amerika hanya tiga partai supaya lebih mudah, jatuh pula. Bikin lagi 40 partai tahun 1999, 42 partai yang ikut pemilu. Akhirnya kembali 12 partai.

Dalam demokrasi, tentu partai politik menjadi inti pelaksanaan demokrasi. Ya, ada juga demokrasi tanpa partai kalau pemilihan kepala desa. Tidak perlu partai, cukup tiga orang saja karena sedikit orangnya. Tetapi begitu menjadi nasional atau provinsi, harus lewat partai.

Karena tidak mungkin semua orang memilih orang yang sama atau pun memilih senat itu tidak perlu partai. Artinya, partai suatu fondasi dari demokrasi itu sendiri.

Pertanyaannya, kalau partai sudah di fondasi demokrasi, tentu partai harus menjaga demokrasi terlebih dahulu. Inilah menjadi masalah yang kita hadapi dewasa ini. Bagaimana, agar partai lebih demokratis sehingga negeri ini menjadi lebih demokratis.

Apakah mungkin semua bisa atau juga semua tidak bisa, tergantung apa yang kita hadapi dewasa ini. Memang tidak mudah apabila kita sangat pragmatis, apabila biaya politik terlalu tinggi. Kritikan di Indonesia kenapa partai berpolitik?

Saya berhak bicara karena bekas ketua umum partai. Jadi, kenapa banyak kritikan tentang perangkat *pragmatis* partai, tentu salah satu yang sering dibicarakan karena biaya politik di Indonesia. Di mana pun di dunia ini, di Amerika, di India, di Malaysia, juga sangat mahal.

Akibatnya, semua partai memerlukan biaya yang besar untuk menjalankan sistem ketatanegaraan lewat partai. Itulah yang menyebabkan masalah-masalah yang kita hadapi.

Namun partai juga dapat menciptakan iklim demokratis dalam tubuh partai. Demokrasi pada ujungnya adalah pengambilan keputusan yang baik. Kalau kita ingin singkatkan, di mana kita berdemokrasi? Di dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan kita bisa batasi. Saya ingin *sharing* pengalaman saya sebagai ketua partai. Saya berusaha bagaimana partai saya, Partai Golkar, menjalankan demokrasi, maka harus lebih dulu mempraktikkan budaya demokratis. Karena itu saya katakan, demokrasi adalah hal dalam pengambilan keputusan atau memilih orang. Itu intinya sebenarnya dalam kepartaian itu.

Apa yang saya lakukan? Pertama kita buat sistem yang harus disetujui bersama. Pertama tingkat-tingkat pengambilan keputusan harus kita taati. Kalau masalah nasional kita harus putuskan di dalam Munas. Kalau bersifat teknis kita putuskan di Rakernas. Kalau bersifat kesehari- kita putuskan di pengurus. Kalau bersifat orang, kita putuskan secara bersama.

Dengan keputusan itu, pengalaman saya, partai dapat demokratis. Akibat demokratis biayanya lebih kecil. Akibat biayanya kecil bisa demokratis lagi. Itulah perputaran partai dalam demokratisasi, saya jalankan selama 5 tahun dan berjalan dengan baik.

Hal yang menyulitkan dewasa ini juga karena banyak orang, partai itu sudah gemuk, dan semakin gemuk. Ada

partai yang pengurusnya sampai 600 orang. Bagaimana mengambil keputusan? Golkar terakhir pengurusnya 600 orang, sekarang sudah turun, katanya kira-kira 400 orang. Waktu zaman saya memimpin, hanya 80 orang dan pengurus hariannya hanya 30 orang. Jadi mudah mengambil keputusan.

Jadi akibatnya, kita sendiri yang mempersulit pengambilan keputusan. Menyebabkan ada ketua menjadi otoriter karena tidak bisa membagi keputusan dengan 600 orang. Selain itu, tidak ada ruangan di kantor partai yang bisa menampung 600 orang untuk mengambil satu keputusan. Itu masalah teknis saja, contoh di mana semua pengurus tergantung pada pimpinan.

Sekarang bagaimana? Setidak-tidaknya bisa mendemokratisasikan tujuan. Contoh sederhana, saat ini, kalau ingin mencalonkan diri jadi gubernur, jadi bupati, tentu partai menjadi rebutan untuk mendapat rekomendasi. Akibatnya, bukan lagi mendorong kader, melainkan bagaimana orang memakai partai untuk mencalonkan kembali seseorang.

Apa yang saya buat pada waktu itu sehingga hal itu tidak terjadi? Semua lini harus mempunyai hak yang terbatas. Kalau ingin merekomendasikan seseorang atau kader untuk menjadi gubernur harus rapat bertiga. Pengurus Pusat, Pengurus Daerah Tingkat 1, dan Pengurus Daerah Tingkat 2. Pengurus Pusat hanya memiliki hak 20 persen, Pengurus Tingkat 1 hanya 40 persen, dan Pengurus Tingkat 2 hanya 20 persen.

Sebaliknya, kalau ingin mencalonkan tingkat bupati atau wali kota, hak 40 persen berada di Tingkat 2, 20 persen di Tingkat 1, dan 20 persen di Tingkat Pusat.

Akhirnya, tidak satu pun pihak yang bisa otoriter karena pemilihannya harus terbuka. Selama lima tahun Anda tidak menjumpai orang yang direkomendasikan hanya satu orang

di Golkar, baik oleh hak ketua umum atau hak sekjen. Tidak ada.

Semua harus setuju dari atas ke bawah dan aman. Itulah cara pengambilan keputusan yang kami lakukan. Setiap keputusan untuk *policy* yang menyangkut nasional harus dirapatkan lewat minimum 30 orang. Jadi demokrasi adalah sistem yang justru dibangun oleh partai agar partai dapat menjawabnya.

Salah satu yang menyebabkan banyak partai sulit berdemokrasi adalah karena masalah keuangan. Partai membutuhkan banyak sponsor. Solusinya sederhana, biaya partai. Zaman saya tidak pernah ada acara-acara besar di hotel dan sebagainya sehingga tidak perlu biaya besar dan mewah sehingga tidak perlu sponsor.

Kedua suatu larangan mutlak. Aturannya, anggota DPR di mana pun jabatannya tidak boleh menyumbang ke partai satu rupiah pun. Tidak boleh. Apa akibatnya? Tidak bisa mengatasnamakan partai untuk mencari proyek. Hal itu tidak terjadi karena saya mengumumkan secara terbuka dan berkirim surat ke semua menteri, tidak ada satu pun anggota DPR dari partai yang diperbolehkan berbicara proyek ke siapa pun karena partai mereka tidak boleh menyerahkan uang kepada partai.

Pertanyaannya dari mana partai mencari dana? Ya, dari anggota yang mampu mensponsori, yang bisa menyumbang, tetapi tidak banyak. Karena kita tidak membutuhkan uang banyak. Acara tidak boleh di luar kantor ataupun acara terbatas. Yang saya ingin sampaikan, dengan *policy* itu, tidak ada satu pun anggota DPR Golkar di mana pun yang kena masalah KPK, Kejaksaan, Polisi, pada zaman tahun 2004-2009.

Yang terjadi sebelumnya dan setelahnya bukan tanggung jawab saya. Anda boleh cek. Termasuk tidak ada satu pun

menteri di kabinet waktu saya, ada yang bermasalah hukum. Dari sembilan menteri yang ada masalahnya, tidak satu pun dari Golkar pada periode saya. Itu cara untuk mengatasi. Apabila itu terjamin, maka dia demokratis. *

Disampaikan pada Acara
Pembukaan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-3
Di Convention Hall Universitas Andalas (UNAND)
Sumatera Barat
5 September 2016

Jangan Copy Paste

If prostitution is the world oldest profession, corruption must be among it's most ancient vices.

Sekiranya pelacuran itu adalah profesi yang tertua di dunia, maka korupsi adalah kejahatan yang paling kuno.
(Jonathan Tepperman)

Kutipan dari buku *The Fix: How Nations Survive and Thrive in a World in Decline* tersebut ingin menggambarkan bahwa korupsi lebih dulu daripada pelacuran. Zaman dulu, orang kuno yang tinggal di gua, dia bisa dapat tempat yang baik kalau kasih dagingnya lebih banyak kepada *chief* di kelompok itu.

Itulah perumpamaan bahwa memberantas korupsi bukan hal yang mudah. Sama tidak mudahnya memberantas pelacuran. Satu-satunya cara di Belanda sehingga tidak ada kejahatan pelacuran, dia legalkan saja pelacuran sehingga tidak ada kejahatannya.

Tentu kita tidak ingin legalkan korupsi supaya kita bersih dari korupsi, tidak. Sama dengan di banyak negara, ganja tidak ada lagi kejahatannya karena ganja sudah dibebaskan. Ini juga masalah hukum, tentunya. Karena itulah saya gembira

ini dibahas juga dari segi hukum. Hukum juga berinteraksi di atasnya, ada keadilan.

Beberapa bulan lalu saya ke Venezuela mewakili Indonesia dalam Konferensi Nonblok. Saya melihat bagaimana negeri yang begitu kaya, mempunyai *resources* yang terkaya di dunia dalam *oil and gas*, kemudian jatuh miskin. Luar biasa miskinnya sehingga hanya untuk membeli tisu saja orang harus antr dari subuh. Untuk mendapatkan dua tisu menghabiskan 5 jam. Apalagi beras dan obat. Padahal negara yang paling kaya. Itu diakibatkan pertama kebijakannya yang menjual murah seluruh *resources*-nya, kemudian di tengah-tengah itu muncullah korupsi karena adanya dua harga dalam kebijakan-kebijakannya. Bangkrutlah negeri itu. Begitu juga Brazil. Negara yang dikenal dengan *bright*, juga jatuh.

Kita tentu juga mengalami hal yang sama sehingga pemberantasan korupsi menjadi sejarah yang panjang di negeri ini. Sejak tahun 1950-an, mulai dengan Rosihan Anwar sebagai wartawan yang menggambarkan korupsi sehingga menimbulkan masalah politik yang besar. Ada Komisi Pak Hatta, Komisi Wilopo, ada Kopkamtib, macam-macam era, sampai zaman KPK yang luar biasa.

Jadi juga sejarah korupsinya panjang, pemberantasannya juga yang panjang. Kita tahu tidak mudah memberantasnya. Kita tidak bisa mengatakan kita akan habiskan korupsi. Di negara apa pun sulit. Indeksnya selalu di bawah 10. Tapi kita harus menguranginya semaksimal mungkin.

Tentu banyak negara yang berhasil dalam memberantas korupsi sehingga indikator korupsinya sangat baik. Ada New Zealand, ada Singapura yang paling dekat dengan kita, ada Hongkong.

Kita ambil dua negara yang paling penting, walaupun Hongkong dan Singapura kita tidak bisa bandingkan dengan kita. Penduduknya 5 juta, kita 258 juta, 50 kali lipat. Namun,

banyak pelajaran yang bisa diperoleh dari apa yang dibuat Singapura. Ada yang berhasil, ada juga tidak mungkin sama dengan kita. Jadi pemberantasan korupsi tidak bisa di-*copy paste* dengan negara lain. Kita harus melihat kondisi kita.

Singapura di bawah Lee Kuan Yew dengan tegas mulai dengan CPIB-nya. KPK-nya dengan Undang-Undang Prevention of Corruption Act, sama dengan Undang-Undang Tipikor kita. Luar biasa kerasnya, dan itu berhasil. Apa keberhasilannya? Karena Lee Kuan Yew konsekuen untuk dirinya sendiri, memberi contoh yang kuat dan tegas kepada siapa pun. Jadi ujungnya adalah masalah *personal*, contoh dari atas ke bawah.

Dengan undang-undang yang keras, yang bersih, walaupun kemudian punya efek yang tidak bisa juga kita ikuti, Singapura tidak punya liberal demokrasi, tidak ada *open* demokrasi. Akibatnya nepotisme. Dia diganti oleh anaknya kemudian sebagai perdana menteri, juga kritikan. Kemudian lebih tinggi solusinya. Gaji menteri di sini Rp 19 juta. Berapa gaji menteri di Singapura? Kalau dirupiahkan ada Rp 850 juta. Perdana menteri gajinya Rp 1 miliar per bulan. Gaji Presiden di Indonesia hanya Rp 60 juta, sedangkan wakil Presiden Rp 40 juta.

Tapi kita tidak bisa dengan alasan itu lalu mengatakan kita tidak bisa berantas korupsi. Mencontoh Singapura boleh, tapi efeknya beda. Kalau kita gaji menteri Rp 200 juta saja, bangkrut negeri ini karena otomatis gaji yang lain harus naik juga.

Gaji pegawai negeri sekarang di Indonesia sudah Rp 730 triliun, 35 persen dari seluruh APBN. Itu juga bukan hal yang mudah. Kalau kita naikkan, langsung kita bangkrut. Kita tidak bisa bikin apa-apa kalau mau seperti Singapura, gaji pejabatnya begitu tinggi. Tentu efek dari pemberantasan korupsi, ekonominya makmur. Jadi ini seperti ayam dan telur.

Apa yang dilakukan Singapura? Kampanyenya, negara bersih, tidak korup. Ada *reward*. Siapa yang menolak sogokan, dikasih *reward*. Jadi sistem yang harus kita perbaiki. Jangan pikiran kita hanya menghukum orang, tapi sistem yang harus diperbaiki.

Apa upaya kita? Tentu kita mempunyai upaya yang jelas pada korupsi. Kalau dari segi orang yang dihukum, saya kira kita juara dunia. Tidak ada negara yang bisa menghukum koruptor seperti Indonesia. Dalam waktu 10 tahun, ada 9 menteri masuk penjara. Ada 19 gubernur, 46 anggota DPR, bupati dan anggota DPRD ratusan orang yang masuk penjara.

Ada tiga ketua partai, ada tiga lembaga lembaga negara, MK, KY, dan KPU, dua gubernur Bank Sentral. Itu masih kurang. Ada dua jenderal bintang empat masuk penjara, dua jenderal bintang tiga. Tidak tanggung-tanggung. Bayangkan itu! Tidak ada negara yang seperti itu. Kita sebenarnya sudah menghukum luar biasa aparat kita.

Di negara lain, satu menterinya saja masuk penjara, berita dunia. Kita sembilan orang. Kalau di dunia ada gubernur bank sentralnya masuk penjara, langsung ambruk dia punya mata uang. Kita tidak apa-apa. Jadi dari segi hukuman, saya ingin katakan, kita juara dunia. Coba tunjukkan negara yang jumlah orang masuk penjaranya begini? Jadi jangan pernah bilang kita tidak bertindak keras kepada koruptor.

Tapi kenapa korupsi masih begini? Ada dua penafsiran sebenarnya tentang Indonesia. Kalau ditanya macam-macam, “Wah kita harus bertindak. Kenapa korupsi hanya yang kecil-kecil saja?”

Ini pemikiran yang mesti kita luruskan, seakan-akan kita tidak berhasil. Saya yakin kita berhasil menekan korupsi. Karena itu KPK tidak lagi mudah menangkap yang besar karena hanya orang yang punya nyali hebat yang mau korupsi hari ini.

Artinya, setidaknya-tidaknya terima bungkus uang malam-malam. Apalagi transfer, tidak ada lagi. Mau terima cek, cek pasti tidak ada lagi. Mau terima tunai susah. Artinya kita sudah berusaha keras. KPK, Kejaksaan, Kepolisian sudah berusaha keras.

Karena itu kalau kemudian kurang yang ditangkap, itu keberhasilan. Kalau makin banyak yang ditangkap berarti KPK gagal. Jangan lupa itu. Kalau makin banyak yang ditangkap, KPK gagal. Artinya, ternyata orang masih korupsi. Justru kalau susah orang ditangkap baru berhasil itu KPK. Berhasil karena susah menangkap orang. Karena itu asal jangan salah tangkap. Itu bahaya juga. Kita juga ingin keadilan yang lebih tinggi karena di atas hukum ada keadilan.

Kenapa saya secara pribadi sering orang kritik? Saya datang ke pengadilan, membela terdakwa. Saya datang waktu Sekjen Deplu disidang. Saya saksi dia tidak salah karena dia melaksanakan perintah. Dia melaksanakan konferensi internasional yang dibutuhkan perintah dalam seminggu. Tidak mungkin tender kalau seminggu. Masuk penjara juga.

Saya merasa itu tanggung jawab saya, tapi dihukum. Ya, tapi saya sudah menjelaskan bahwa saya bela dia, bahwa dia tidak salah. Bagaimana mau tender kalau waktunya diperintahkan oleh Presiden bikin konferensi dalam waktu seminggu. Tidak mungkin tender.

Saya bela Bupati Indramayu, dituduh korupsi Rp 3 miliar. Tapi kalau dia tidak percepat pembebasan lahan di Indramayu, negara rugi Rp 1 triliun pertahun. Negara rugi Rp 1 triliun per tahun karena listrik tidak jadi, terpaksa pemerintah membayar subsidiya. Saya bela itu. Saya datang untuk menjadi saksi.

Saya jadi saksi perkaranya Jero Wacik karena menurut saya PP-nya sudah tidak berlaku. Didituduh melanggar Kepmen, padahal Kepmennya sudah diubah saat itu.

Artinya, kita tidak hanya bergelora untuk menghukum apa yang kita katakana karena kita sudah menghukum luar biasa pejabat bangsa ini. Tidak ada negara seperti ini. Negara lain, satu gubernur negara bagian Amerika masuk penjara, itu sudah berita dunia. Kita 19 gubernur.

Kita kadang-kadang sedih juga. Kalau saya terbang dengan helikopter di atas Riau, melihat kebun sawit jutaan hektar dimiliki oleh konglomerat dari luar Riau. Mereka kaya luar biasa karena tanah Riau, tapi tiga gubernurnya masuk penjara. Lebih dari 10 bupatinya masuk penjara hanya karena menandatangani izin.

Okelah, dia salah. Tapi kita juga harus adil melihatnya secara terbuka. Orang kaya luar biasa, tapi gubernurnya tiga masuk penjara. Bagaimana kita sebagai orang pemerintah tidak sedih melihatnya. Ini kenyataan yang terjadi.

Tentu menghukum perlu, tapi kita juga harus mempelajari *restorative justice*. Yang penting bagaimana kerugian negara kita kembalikan. Bukan hanya penjaranya yang dihitung, tahunnya yang dihitung, tapi *restorative justice* karena ternyata dengan puluhan, ratusan orang masuk penjara tidak menyebabkan negeri ini menjadi lebih maju. Inilah realita yang kita hadapi. Sekali lagi saya tidak berpihak kepada koruptor, tetapi kita harus mengelola dengan sistem.

Saya bangga waktu menjadi Ketua Golkar, tidak ada satu pun anggota DPR Golkar yang masuk penjara, DPR Golkar selama 5 tahun. Cuma dua cara yang saya lakukan. Kumpulkan anggota DPR, "Kalian tidak boleh menyeter Rp 1 rupiah ke pengurus. Tidak boleh."

Kenapa? Karena selalu mereka cari duit atas nama partai, padahal kalau dia dapat 100, cuma dikasih partai 10 dan 90 dibagi-bagi. Lihat kasus Nazarudin. Apakah dia kasih Partai Demokrat? Kita tidak tahu, tapi yang jelas dia bagi-bagi. Jadi biar satu sen tidak boleh.

Kemudian sistem pencalonan bupati kepala daerah tidak boleh mutlak, mesti tiga orang menentukan. Hak pusat hanya 40 persen, hak daerah 40 persen, dan kabupaten 20 persen. Voting dengan 3 orang. Tidak ada yang boleh lobi. Akhirnya bebas semua. Tidak ada satupun yang masuk penjara. Jadi sistem yang harus diperbaiki dengan sederhana.

Sebenarnya saya juga bangga, waktu pemerintahan SBY-JK tidak ada satu pun menteri masuk penjara. Tapi kemarin masuk Fadhillah (mantan Menkes) sehingga teori saya habis, kan?

Memang tergantung orang dan sistem. Kalau kita lihat Singapura, maka teori *power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*, tidak berlaku di sana. Lee Kuan Yew *absolute power* tapi dia tidak korup. Jadi tergantung orang, tergantung pemimpin pada akhirnya juga.

Nah, itu upaya kita sebenarnya sangat luar biasa yang harus kita perbaiki secara berlanjut karena korupsi di Indonesia sudah *borderless*, tidak ada batasnya lagi yang kena. Mau laki-laki, mau perempuan, kadang-kadang juga ibu, maaf, begitu kena langsung pakai jilbab.

Artinya apa? Memang di samping jadi contoh dari atas, ketegasan di bawah, tapi bagaimana mengampanyekannya dengan betul. Tapi intinya bagaimana negara juga berperan.

Bagaimana ke depan? Bangsa ini tentu mempunyai tujuan. Tujuan kita ialah kemakmuran dan keadilan. Untuk makmur pasti kita harus menjalankan ekonomi. Ekonomi harus dilaksanakan dengan betul, dengan cepat.

Sekarang dengan bangga kita selalu katakan, kita sudah melaksanakan antikorupsi dengan betul, dengan menghukum sekian banyak orang. Efek sampingnya ialah ketakutan. Ketakutan menyebabkan pejabat sulit mengambil keputusan, lambat mengambil keputusan. Semua minta payung hukum.

Akibatnya juga ekonomi menjadi lambat jalannya. Apabila ekonomi lambat, bisa menimbulkan juga masalah kepada seluruh masyarakat. *

Disampaikan pada Acara
Anti Corruption Summit 2016
Di kampus UGM Yogyakarta
25 oktober 2016

Korupsi Subur

Kita sepakat bahwa korupsi dalam bentuk apa pun telah merugikan rakyat dan negara. Negara akan sulit mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Ini terjadi di negara manapun. Setiap negara yang tingkat korupsinya tinggi pasti tingkat kesejahteraannya rendah. Bahkan, dewasa ini negara kaya pun jatuh karena korupsi. Seperti kita lihat di Venezuela, negara yang mempunyai sumber minyak nomor dua di dunia. Banyak orang antre membeli makanan akibat dari korupsi di negara itu. Begitu pula di Brazil, Nigeria, Pantai Gading, Uganda, Kazakhstan, Turkmenistan, dan juga negara-negara lainnya. Kita di Indonesia, juga sangat merasakan dampak dari praktik korupsi.

Pertanyaannya adalah kita mempunyai undang-undang yang lebih keras dari sebelumnya, tindakan-tindakan yang lebih keras dari sebelumnya, tapi kenapa masalah korupsi ini kelihatannya semakin besar? Apa penyebabnya? Kenapa anggaran naik, korupsi juga ikut naik ?

Pertama, karena sebagian besar yang dikorupsi itu anggaran negara. Karena anggaran kita naik 100 persen setiap lima tahun pasti yang dikorupsi juga makin besar. Anggaran kabupaten bukan lagi puluhan, ratusan miliar, tetapi sudah triliunan hari ini.

Kedua, karena definisi korupsi semakin meluas. Dahulu korupsi hanya yang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri. Sekarang *double*, merugikan atau dapat merugikan. Belum terjadi pun sudah bisa dianggap korupsi. Jadi, semakin melebar formula korupsi itu, jadi semakin banyak yang kena.

Ketiga, kewenangan yang besar juga memperluas korupsi. Dahulu yang korupsi hanya eksekutif. Sekarang karena perubahan kewenangan lembaga tinggi negara, maka kewenangannya pun sama. Sebelumnya DPR hanya cap dan semua telah diputuskan oleh eksekutif. Sekarang kewenangan DPR di bidang anggaran kadang-kadang lebih besar daripada kementerian. Karena itu dahulu hanya korupsi di kementerian, tetapi sekarang terbagi dua, yaitu di pemerintah dan DPR.

Keempat, yaitu otonomi daerah. Dahulu, pemerintah pusat yang memiliki kewenangan, sekarang seiring pelaksanaan otonomi daerah, maka banyak kewenangan berada di pemerintah daerah.

Kita semua memahami tujuan kita memberantas korupsi untuk mencegah kerugian negara dan kerugian masyarakat. Apakah tindakan ini sudah sesuai dengan tujuan itu? Apakah hukum yang diterapkan telah membuat koruptor jera? Ternyata koruptor tidak jera. Kenapa hari ini di suatu lembaga tetap saja ada korupsi?

Dalam rangka memberantas korupsi, kita sepakat harus keras. Akan tetapi, apabila kita kembali pada tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, dampaknya ada dua, yaitu baik dan juga tidak baik. Akibat tindakan yang kadang di luar proporsional, muncul ketakutan di kalangan pejabat dituduh korupsi sehingga mereka tidak berani membuat kebijakan. Dengan demikian akhirnya bukan mempercepat pembangunan, justru banyak yang memperlambat.

Sekarang di satu sisi kita mengurangi aturan. Akan tetapi, di sisi lain kita menambah aturan baru, seperti bikin

pelabuhan minta keppres, bangun listrik minta keppres, bikin jalan tol minta keppres, supaya tidak diperiksa, atau minta pendampingan dari Kejaksaan. Akibatnya, jalan telat, pelabuhan telat, pembangunan yang lain telat. Pemberantasan korupsi jangan sampai menimbulkan ketakutan, sehingga orang tidak bertindak.

Dalam suatu kunjungan ke luar negeri, saya ditanya oleh para pengusaha tentang iklim usaha dan tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Saya bilang, boleh bandingkan semua negara di dunia ini. Saya ingin memberikan Anda statistik ringkas, di Indonesia selama 12 tahun itu ada sembilan menteri yang masuk penjara, ada 19 gubernur, ada 46 anggota DPR, ada 200 lebih bupati, anggota DPRD sudah ratusan juga tentu, empat ketua umum partai, lembaga negara begitu banyak, MK, KPU, KY, kira-kira begitu. Di negeri Anda apa tindakannya? Tidak banyak. Kalau menurut saya masih lebih baik kita. Jadi korupsi terkesan banyak karena tindakan bagus dari penegak hukum kita.

Pemerintah tahu betul bagaimana sulitnya sekarang mengambil keputusan di tingkat bawah. Salah satu akibat banyaknya aturan, semakin banyak yang kemungkinan orang tertangkap karena korupsi, karena semakin banyak yang dilanggar. Siapa bisa membaca semua aturan itu? Kebanyakan kasus korupsi karena pelanggaran administratif belaka. Tiba-tiba saja di pengadilan Saudara melanggar keppres nomor sekian karena tidak melaksanakan ayat sekian dari keppres itu.

Inilah faktor yang saya ingin sampaikan dari sisi pemerintah, bahwa kita dukung penegakan korupsi ini. Tetapi tolong juga diberikan suatu batasan sehingga tidak membuat ketakutan yang terlalu besar. Kalau tidak korupsi, bisa bilang tidak korupsi, kenapa takut? Kalau orang berbuat baik saja sudah takut, tidak jauh beda dengan kejahatan. Karena itulah

sumpah pejabat selalu berbuat atau tidak berbuat. Tidak berbuat juga tidak boleh, harus berbuat. ✱

Disampaikan pada Acara
Menghadiri Peluncuran Buku "Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat
Antikorupsi Fakta dan Analisis"
Hotel Borobudur Jakarta 12 Mei 2016

BAB 6
PEMERINTAHAN

Pemerintahan dan IT

Hidup ini adalah perubahan. Apa yang terjadi di lingkungan kita saat ini akan menyebabkan perubahan itu. Kita perlu berbuat sesuatu untuk menghadapi perubahan-perubahan itu.

Apabila kita berada dalam suatu sistem pemerintahan, tentu yang pertama kita ingin ketahui apa tujuan kita dalam sistem pemerintahan itu? Tentu tujuan kita adalah kebangsaan dan bernegara, mencapai masyarakat yang maju, masyarakat yang adil dan makmur.

Itu tujuan yang sederhana, tetapi sangat dahsyat untuk dicapai. Kita berada di situ, memajukan bangsa, apa pun tugas kita. Apakah gubernur, rektor, mahasiswa, tujuannya sama, memajukan bangsa ini. Namun, tentu dalam kondisi hari ini kita tidak lagi hidup sendiri. Dunia sudah sangat tersambung, dunia sangat mengglobal sehingga tidak ada lagi orang yang bisa hidup sendirian.

Kita tidak bisa berbicara hanya Jawa Barat, hanya Indonesia, apalagi berbicara hanya satu kabupaten karena bersambung satu sama lain, berpengaruh satu sama lain. Tanpa memperhatikan itu, kita tidak akan membuat sesuatu yang lebih baik bagi orang lain.

Contohnya, semua mengatakan kita mengalami masalah ekonomi, terjadi penurunan, banyak penurunan impor, ekspor, dan sebagainya. Apa masalahnya? Masalah luar, bukan hanya kita yang menyebabkan itu, tetapi juga negara lain. Maka itu harus bekerja sama. Kita dapat menyelesaikan itu hanya dengan upaya kerja keras kita semua. Tanpa kerja sama, kita tidak bisa capai itu. Kita juga harus mengetahui apa sebabnya dan kenapa harus kita buat seperti itu.

Itulah masalah-masalah yang kita hadapi dewasa ini. Begitu juga pengaruh satu sama lain. Dalam kurun waktu katakanlah 15 tahun sudah berbeda sejarah pemerintahan sebelum reformasi dengan sekarang. Perubahan-perubahan itulah yang menjadi tatanan baru. Tatanan baru itu menjadi bagian yang harus dipelajari.

Suatu pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kondisi politik, sistem ekonomi, juga sosial masyarakat. Itu yang terjadi di dunia ini. Dunia ini dunia yang tanpa senyum pada tahun-tahun ini, di bidang apa saja. Politik. Begitu buka TV, yang terjadi adalah pengeboman, serangan, pengungsian, kesulitan. Itu yang kita hadapi di dunia ini. Kekhawatiran ekonomi timbul di mana-mana. Itulah yang terjadi.

Pemerintahan kita juga berdasarkan kondisi objektif itu. Tidak bisa hanya mengurus KTP, rumah tangga, dan sebagainya yang kita selesaikan, tetapi bagaimana menghindari itu. Setidak-tidaknya bagaimana menghindari situasi seperti itu. Jadi sistem pemerintahan sekarang bukan hanya sebagai administrator, tetapi bagaimana mempunyai visi yang lebih jauh dan menjaga keutuhan bangsa, menjaga kemajuannya, dan sebagainya. Itulah masalah-masalah yang kita hadapi dalam suatu sistem pemerintahan yang ada.

Suatu sistem pemerintahan berubah, seperti saya katakan tadi, apabila politik berubah, ekonomi berubah, sosial berubah, maka sistem pemerintahan berubah. Kalau

sebelum reformasi tahun 1998-1999, ke tahun 2000 sistem pemerintahan itu pusat. Semua taat. Pemerintahan umum, ekonomi, pekerjaan umum, perdagangan, itu semua bagian dari pusat. Karena itu ada kanwil-kanwil ke daerah sampai kepala dinas ke kabupaten. Sekarang semua berubah dengan otonomi akibat politiknya berubah. Karena sistem pemerintahan yang sentralistik berubah ke otonomi, maka semua sistem berubah.

Gubernur dulu hanya sebagian besar mengurus pemerintahan umum, sekarang semuanya, terkecuali beberapa hal bagian dari kewenangan pusat. Jadi seluruh kantor-kantor pemerintahan berubah dari kanwil ke dinas. Akibatnya orang pemerintahan berubah juga. Karena itulah apa yang dipelajari di perguruan tinggi pada masa lalu berubah prospeknya dewasa ini. Anda harus mempelajari apa yang terjadi pada masa datang, bukan apa yang terjadi pada masa lalu saja.

Tadi gubernur sudah menjelaskan, di teknologi berubah sama sekali sistem itu, maka keahlian dalam ilmu juga harus berubah. Itulah perubahan-perubahan yang mendasar, menjadi bagian dari apa yang kita harus pelajari dan apa yang harus kita laksanakan pada masa datang.

Begitu juga sistem secara umum. Kalau zaman pemerintahan sentralistik pemerintah mengontrol. Kalau pemerintah mengatakan harga beras sekian, semua ditaati. Kalau tidak ditaati dihukum. Sekarang tidak bisa lagi. Pemerintah berusaha menormalkannya dengan berbagai cara, tetapi tidak bisa memaksakan, hanya memengaruhinya.

Itu perubahan mendasar yang banyak terjadi dalam sistem pemerintahan. Karena itulah calon administrator dan administrator muda harus memperhatikan itu. Sistem pemerintahan sudah meluas, tetapi kekuasaannya berkurang. Tugasnya besar, tetapi kekuatannya berkurang. Gubernur

tentu diberikan tanggung jawab lebih besar, tetapi masyarakat harus diberi kesempatan lebih banyak lagi dari sebelumnya, baru menjadi pemerintahan yang baik. Begitu juga suatu negara tidak bisa lagi berdiri sendiri.

Apa inti itu semua? Intinya adalah persaingan. Negara bersaing satu sama lain. Daerah bersaing satu sama lain dan kota bersaing satu sama lain. Siapa yang bisa memenangkan persaingan? Efisiensi masyarakat. Bagaimana menjelaskan efisiensi masyarakat? Pendidikan, fasilitasi, inisiatif, kredibilitas. Jadi pemerintah berada di mana? Pemerintah memengaruhi, mengatur, dan memfasilitasi. Bukan menentukan lagi, bukan menguasai semua hal lagi, tetapi memfasilitasi, mendorong, memotivasi, dan mendorong rakyat lebih kreatif.

Itulah tugas pemerintahan di dunia ini. Kecuali satu, dua negara, seperti Korea Utara yang dapat melaksanakan segala macam dengan kekerasan, tetapi negara-negara yang ingin maju adalah memotivasi, mendorong kreativitas, mendidik, dan sebagainya.

Langkah-langkah persaingan itu terbentuk harus standardisasi, perdagangan yang baik, dan konektivitas antara masyarakat. Di situlah pemerintah berperan bagaimana konektivitas terjadi di masyarakat. Itulah permasalahan yang kita hadapi hari ini dan pada masa mendatang.

Jadi sistem pemerintahan berubah luar biasa karena beberapa hal. Sistem politik yang berubah, sistem ekonomi yang berubah, dan teknologi maju luar biasa. Akhirnya tugas pemerintah, khususnya daerah meluas, tugas pemerintah pusat menyempit. Di lain pihak unsur-unsur demokrasi legislatif menjadi kuat. Jadi terjadi segitiga pemerintah. Karena itulah pemerintah harus memahami itu. Saling ketergantungan antarnegara terjadi. Tidak ada orang bisa berdiri sendiri, apakah itu baik dan apakah itu buruk.

Faktor utama untuk memajukan suatu wilayah, suatu daerah, atau suatu negara ialah terjadinya komunikasi yang baik antarorang. Itu karena kekuasaan tidak bisa lagi menjadi kekuatan. Kalau dulu bupati kasih perintah camat untuk laksanakan, desa, kodim, polisi pasti dilaksanakan. Contoh yang paling gampang, dulu kalau pemerintah ingin bikin jalan, bebaskan tanah, kalau tidak mau pokoknya mundur saja. Sekarang mana bisa lagi? Hanya berunding-berunding, motivasi, ganti untung bukan ganti rugi.

Semua berubah dengan kondisi hari ini. Mungkin saja nanti fakultas harus mengajarkan ilmu negosiasi, contohnya, karena tidak ada lagi ilmu perintah, walaupun pemerintah itu namanya pemerintah.

Sering saya mengkritik, kalau ada yang mengimbau agar rakyat begini, bukan pengimbuhan negara. Harus memerintah, tetapi memerintah dalam batas-batas tertentu. Lainnya adalah memotivasi rakyat, menjelaskan ke rakyat. Ini kalau kita bikin jalan, ekonomi akan maju, tanah Anda juga akan maju. Tidak bisa lagi, "Eh kita bikin jalan di sini. Awas kamu kalau tidak bikin jalan di sini!"

Tidak ada lagi seperti itu dalam teknik pemerintahan dewasa ini. Nah, itu semua harus menjadi bagian pembelajaran. Perubahan-perubahan sistem yang terjadi di negara yang mengubah politiknya, berubah demokrasi.

Kedua, faktor utama dalam memajukan suatu wilayah, di samping komunikasi adalah modal, kapital. Kenapa? Karena kemajuan hanya bisa dicapai dengan suatu pertumbuhan, dengan suatu nilai tambah, dengan suatu investasi. Tentu pemerintah yang baik yang dapat mempromosikan sehingga orang yang mempunyai kemampuan usaha dapat masuk ke daerah itu.

China maju karena hal itu. Dulu siapa yang mau datang ke China, segalanya terlarang. Karena tidak boleh, tidak ada

yang muncul. Sekarang diubah, silakan. Semua menjadi maju. Tiba-tiba sekarang maju dan melampaui banyak negara, termasuk Indonesia akibat masuknya kapital.

Jadi dibutuhkan lagi sistem yang ada di pemerintahan, promosi, kesempatan, dan *skill* masyarakatnya. Tentu juga pada akhirnya kalau kapital dibutuhkan korporasi perusahaan-perusahaan yang ada. Tanpa itu pemerintah tidak sanggup membangun semua negaranya.

Contohnya hari ini. Kalau 5 tahun lalu anggaran pembangunan kita masih lebih 50 persen dari APBN akibat banyaknya beban pemerintahan, apakah pegawai yang besar, biaya subsidi, dan sebagainya, maka anggaran pembangunan tidak lebih dari 10 persen dari anggaran pemerintah, ditambah barang, jadi kira-kira 20 persen dari total APBN.

Secara angka naik, tetapi secara persentase menurun. Untuk itu dibutuhkan usaha yang begitu banyak, perusahaan-perusahaan yang begitu banyak, mendidik kita semuanya. Sebaliknya untuk memajukan itu ada hal konsumen, dibutuhkan pendapatan masyarakat agar dia membeli sesuatu, agar membuat sesuatu.

Ekonomi harus berjalan dengan siklus yang ada seperti itu. Pemerintah yang harus mendorong situasi itu. Dalam konteks itu, pemerintahan bukan lagi hanya pemerintahan umum saja, tetapi juga dibutuhkan spesialis-spesialis yang banyak. Karena itu pemerintah juga harus lebih memotivasi, kreatif pada kekuasaan. Inilah menjadi tumpuan kita ke depan.

Sekarang kita berlomba dengan negara lain. Ada persaingan. Apa itu persaingan? Persaingan selalu menyangkut tiga hal, berbuat lebih baik, berbuat lebih cepat, dan berbuat lebih murah. Kita bersaing dengan Vietnam, kita bersaing dengan Thailand. Kalau di Vietnam orang minta izin keluar dalam sehari, di sini keluar seminggu atau sebulan itu sudah

salah kita. Orang lari ke Vietnam atau ke Thailand. Kalau listrik di sana hanya 5 sampai 6 sen, di negara kita 10 sen, ya orang lari ke sana.

Jadi pemerintah dan kita semua harus berbuat lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat. Pemerintahan intinya harus lebih fleksibel melihat sesuatu dan lebih cepat. Karena itu pemerintah menginginkan tahun depan semua pemerintahannya harus dengan *e-government*.

Apa arti *e-government*? Masyarakat bisa mengakses langsung, *paperless*. Artinya tidak perlu banyak arsip lagi, tidak perlu surat-menyurat, tetapi semua langsung berhubungan, dan masyarakat bisa mengakses langsung. Sekarang kita kenal dengan Smart City, atau Kota Cerdas atau Kabupaten Cerdas.

Artinya administrator tanpa teknologi, *nothing*. Jadi ditambah lagi, diubah lagi. Ilmu yang ada di pemerintahan harus mengetahui dan mempelajari TI lebih baik. Tanpa itu akan ketinggalan. Apa intinya lagi? Pemerintahan harus diperkecil, birokrasi harus diperkecil. Kenapa diperkecil? Memang tidak dibutuhkan banyak karena masyarakat membutuhkan langsung.

Karena itulah, sekarang dalam tahap pemikiran untuk mengurangi eselonisasi di pemerintahan. Kalau di pemerintahan ada 4 eselon, mungkin sementara 3, mungkin berikutnya ada 2. Akibatnya lagi, aparat pemerintahan harus lebih ramping. Kalau sekarang ada 4,5 juta PNS, kita kembali 3,5 juta. Kenapa? Pertama teknologi, karena kredibilitas. Kedua aksesnya lebih cepat dan memang berlebihan selama ini. Namun, kita juga ada perubahan yang mendasar, PNS harus tetap menjadi perekat NKRI.

Dewasa ini dalam tahap yang membahayakan. Akibat terjadinya otonomi, terjadilah sekat-sekat yang luar biasa terjadi. Pegawai di Kabupaten Garut tidak mudah pindah ke Tasikmalaya akibat tersekat dengan otonomi di situ. Kalau dia

pegawai kantor gubernur di Jawa Barat, tidak boleh pindah ke Sulawesi Selatan. Padahal dulu kanwil salah satunya perekat nasional.

Yang bisa pindah-pindah sekarang hanya polisi, tentara, pegawai keuangan, kehakiman, dan lain-lain. Sepertinya terjadi otonomi yang luar biasa. Contohnya rektor Unpad kalau bukan orang Sunda sulit untuk sekarang ini. Sama juga dengan Makassar, kalau bukan lulusan Unhas susah itu jadi rektor Unhas sekarang. Akhirnya tidak terjadi pembelajaran *cross* ke pelajaran.

Itu kita akan ubah tahap demi tahap. Pegawai eselon I menjadi pegawai nasional sehingga dapat dipindah-pindahkan agar ada perekat nasional dan ada pembelajaran nasional. Kalau dia sukses di Jawa Barat bisa menjadi kepala dinas di Jawa Timur atau dari Sulawesi Selatan bisa pindah ke Jawa Barat. Kalau sekarang praktis tidak bisa, sulit. Hanya tidak ada lagi saling *sharing* pengalaman, tidak lagi ada perekat nasionalnya.

Ini yang menjadi bagian dari upaya kita memperbaiki, bagaimana PNS tetap menjadi perekat nasional supaya ada saling silang sehingga budaya nasional tetap terjaga. Bukan hanya budaya lokal yang terjaga, tentu sifat-sifat nasional tetap terjaga. Begitu juga dalam bidang-bidang lainnya, seperti pendidikan atau di bidang-bidang bisnis.

Nanti dengan pemerintahan seperti ini. Pemerintah tidak perlu mengatur bisnis karena bisnis mengatur dirinya sendiri. Pemerintah hanya mengatur komitmen-komitmen dan batasan-batasannya. Dalam mengatur batasannya juga tentu mengatur bagaimana pendapatan negara, daerah, pajak. Itu harus masuk dengan baik, dengan teknologi.

Jadi apabila setiap tahun kira-kira 120.000 pegawai pensiun, yang kita terima hanya 50.000. Jadi setiap tahun turun 50.000-60.000 orang sehingga dalam waktu 5 tahun

akan turun sekitar 300.000. Kenapa kita bikin program 8 tahun agar turun kira-kira 100.000 pegawai. Di lain pihak penduduk naik, maka rasionya akan lebih sehat.

Terkecuali pendidikan dan kesehatan. Tetapi banyak juga berlebihan di bidang guru. Bukan gurunya yang berlebihan, distribusinya yang parah. Itu kita ubah supaya tidak terjadi. Kalau dulu semua pendidikan dasar sampai SMA di kabupaten, sekarang SMA di provinsi. Itu untuk menjaga mutu dari distribusi guru agar tidak lagi guru SMA berpusat di kabupaten, tetapi berputar di provinsi. Kalau ada yang kurang dikasih sehingga bukan hanya SMA 3 atau SMA 5 di Bandung yang naik mutunya, tetapi harus mempunyai *brack marking* Jawa Barat atau Indonesia.

Itulah kita yang di pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah harus memahami itu. Jadi sebagai generasi muda jangan berpikir hanya bagaimana menjalankan di kabupaten, di gubernur, di camat, dan sebagainya, tetapi bagaimana memajukan bangsa secara keseluruhan dengan berbagai tantangannya. Harus berpikir lebih luas. Jadi yang namanya administrator muda bukan hanya dari fakultas *sustaibility*, tetapi nanti lebih banyak lagi orang teknik menjadi administrator, lebih banyak jadi ahli pertanian, dan sebagainya.

Pemerintahan bukan hanya pemerintahan umum yang dulu Pamong Praja, tetapi lebih luas, bisa menjadi motivator, bisa menjadi pendorong kreativitas, dan juga bagaimana mendorong semuanya. Tentu ini untuk memberikan suatu kesimpulan dari hal-hal ini. Pertama organisasi atau sistem dibentuk untuk mencapai tujuan. Bukan tujuan yang ikut pada organisasi, tetapi organisasi ikut pada tujuan. Harus dipahami seperti itu sehingga sistem pemerintahan lebih fleksibel menghadapi perubahan.

Debirokratisasi Birokrat

Kalau ingin menjadi motivator, ingin menjadi partisipator, harus lebih pintar dari masyarakatnya. Jadi dibutuhkan spesialis lebih banyak dalam pemerintahan. Saya ingin ulangi, dalam persaingan dibutuhkan kecepatan dan harus lebih fleksibel. Tanpa itu kita akan dikalahkan oleh persaingan.

Berikutnya, kita sekarang tidak bisa tanpa teknologi lagi, setiap hari. Karena itulah harus tanggap teknologi mulai sekarang, memahami teknologi. Tanpa memulai akan ketinggalan dengan daerah-daerah lain. Kalau Bandung sudah menjadi *smart city*, di Sumatera lain tidak, dia akan ketinggalan.

Sekarang kalau ada jalanan rusak atau ada kotoran di sudut kota, orang tidak perlu lari-lari ke lurah, ke camat untuk memberi tahu. Sekarang bisa langsung masuk ke walikota. Itu karena sistem teknologi yang sebenarnya sudah sangat sederhana. Karena itulah dibutuhkan *pass the treliss* dari pemerintahan. Tidak bisa lagi hanya belajar pemerintahan umum karena dibutuhkan spesialis-spesialis, mempunyai keahlian-keahlian itu. *

Disampaikan Pada Acara
Seminar Nasional Administrator Muda Universitas Padjajaran
Sumedang, Jawa Barat
24 Oktober 2016

Kalau kita berbicara tentang kepegawaian nasional, dalam bahasa Inggrisnya kita kenal sebagai *public servant*, artinya pelayan masyarakat. Tentu suatu pekerjaan yang mulia, yakni melayani masyarakat.

Karena itulah, kalau dahulu diadakan *polling* kepada mahasiswa, ketika tamat kuliah hendak ke mana? Mayoritas memilih jadi PNS. Namun, saat ini jumlah PNS rasanya sudah cukup. Untuk itu kita adakan moratorium penerimaan PNS agar mereka bisa lebih efektif.

Dalam beberapa tahun terakhir, tentu terjadi banyak perubahan. Ada tiga hal pokok yang menyebabkan perubahan pola kerja, dan apa yang harus dilakukan oleh pegawai negeri kita.

Pertama, perubahan terjadi karena sistem pemerintahan yang berubah. Kalau sebelumnya sentralistis, sejak tahun 2000-an kita melaksanakan otonomi daerah yang sangat mendalam, sangat mendasar. Akibatnya kalau dulu PNS sampai kabupaten merupakan pegawai pusat, karena kanwil, kepala dinas semua pegawai pusat, sekarang sebagian besarnya hanya pegawai daerah. Karena itu, kalau dulu semua instruksi terpusat, sekarang dibutuhkan inovasi-inovasi dan kebijakan daerah yang baik.

Kedua, adalah perubahan karena teknologi. Diakui kehadiran teknologi mengubah segala-galanya. Mulai dari cara kita berpemerintahan. Kalau dahulu, semuanya dengan data, mendaftar, mengisi formulir, menghadap, dan sebagainya, sekarang mulai dilaksanakan *e-government*, *smart city*, layanan *online*. Semua itu mempercepat dan mempersingkat layanan kepada masyarakat sehingga pegawai negeri tidak perlu selalu berhubungungan langsung dengan masyarakat. Itu dapat mengurangi juga praktek pungli.

Ketiga, adalah persaingan, baik internal juga eksternal. Persaingan tidak hanya bicara ASEAN atau antarnegara. Persaingan juga bisa antarkabupaten atau provinsi, akibat dari otonomi. Kalau daerah tidak efisien, orang berusaha di daerah lain. Kalau di sini tarif terlalu mahal, orang pindah ke daerah yang lebih murah. Kalau di sini layanan kurang, pengusaha menginvestasi di daerah yang layanannya baik, persaingan.

Maka, tiga hal itu haruslah mengubah karakter-karakter PNS. Karakter bagaimana menjadi inovatif, lebih inovatif karena tidak lagi selalu ada petunjuk, arahan, SOP dari pusat, tetapi daerah harus lebih inovatif.

Kalau dulu anggaran membikin sekolah, membikin jalan, semua ditentukan oleh Bappenas, sekarang ditentukan oleh daerah sendiri. Pemerintah hanya memberikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), tapi ketentuannya oleh daerah. Semua membutuhkan keahlian, *skill*, dan juga kecermatan yang baik. Tanpa itu, daerah akan ketinggalan.

Sama dengan pemanfaatan teknologi, ada daerah yang memanfaatkan komputer sekadar sebagai mesin ketik, itu akan ketinggalan dengan daerah yang memanfaatkan komputer sebagai sistem jaringan komunikasi dan data.

Semua itu mempercepat suatu pekerjaan. Karena itulah, apa yang tadi mendapat penghargaan, hampir semua

mempunyai inovasi yang ada hubungannya dengan kecepatan, perbaikan, dan juga sistem informasi teknologi yang baik yang sebenarnya sekarang dengan mudah diperoleh.

Namun, kita juga mempunyai efek-efek sampingan yang harus diperbaiki. Efek sampingannya ialah PNS atau pegawai negeri menjadi sangat lokal akibat kebijakan otonomi. Kalau dulu dengan mudah seorang kanwil atau kepala dinas dipindahkan dari Jawa ke luar Jawa atau dari luar Jawa ke Jawa, atau Sumatera dan sebagainya, sehingga mendapat pengalaman yang baik, ditularkan ke daerah-daerah itu dan tentu menjadi perekat nasional. Namun, akibat otonomi yang sangat ketat itu, 10 tahun pertama terjadilah seakan-akan pengkotakan wilayah.

Kalau Jawa Timur, pokoknya harus orang Jawa Timur, Sulawesi harus orang Sulawesi. Atau di Sumatera harus orang Sumatera, tamatan universitas setempat. Ini menyebabkan perekat nasional berkurang dan juga komunikasi antardaerah bisa berkurang.

Karena itulah, maka pemerintah mengubah menjadi eselon I harus menjadi pegawai nasional, yang dapat dipindahkan berkarier dengan Undang-Undang ASN nasional terjadilah *bidding*, tetapi itu pun belum cukup. Kita harus mengatur kembali pola nasional itu. Sehingga, tidaklah mendesak suatu daerah harus dipimpin oleh orang satu daerah, mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah karena itu membahayakan sistem nasional kita.

Namun, kita juga harus pahami, efek lain seterusnya ialah pendidikan di daerah harus ditingkatkan terus-menerus. Tanpa pendidikan yang tinggi juga akan terjadi ketidakseimbangan antardaerah.

Apa pun proses yang ada, pada akhirnya adalah kemampuan kita untuk mengelola daerah itu dengan baik, dengan *skill* yg baik, dengan kemampuan bersama. Karena

itu, kita harapkan pertemuan seperti rakornas ini harus membagi pengalaman.

Pengalaman yang ada, ditambah lagi dengan sistem politik kita, di mana pemilu, pemilihan bupati, kepala daerah, gubernur dipilih langsung berarti yang populerlah yang terpilih walaupun belum tentu dia pengalaman tentang daerah tersebut. Artinya adalah daerah itu harus didukung oleh sistem kepegawaian yang baik. Tanpa didukung oleh sistem pemerintahan yang baik, daerah itu akan menjadi ketinggalan dibanding daerah lainnya dalam era persaingan seperti ini.

Beberapa hal tentu itulah yang menjadi bagian yang harus kita pikirkan dan laksanakan dalam mengelola sistem kepegawaian nasional kita atau sistem ASN (Aparatur Sipil Negara) yang menjadi pedoman kita. Kita menyadari akibat teknologi sehingga jumlah pegawai tentu tidak dibutuhkan sebanyak itu lagi. Dahulu dibutuhkan kalau mengetik, membutuhkan tukang ketik, membutuhkan tukang arsip, membutuhkan tukang fotocopi, membutuhkan lagi penjaga, membutuhkan macam-macam. Sekarang dengan langsung dan sebagainya tentu dibutuhkan lebih sedikit dan lebih langsung. Ditambah lagi dengan pemekaran-pemekaran yang begitu besar, menyebabkan anggaran negara terserap begitu banyak untuk membiayai rutinitas daerah dan pusat.

Dewasa ini, di pusat saja, hampir 35 persen belanja negara untuk pegawai, daerah lebih besar lagi, rata-rata di atas 50 persen, malah ada daerah hampir 80 persen. Itu menyebabkan ketidakmampuan daerah untuk membangun menjadi kecil, padahal tujuan pemerintahan ialah melayani masyarakatnya, meningkatkan infrastrukturnya, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Apabila biaya internal terlalu besar, artinya kekurangmampuan itu pasti terjadi.

Hal itu sebenarnya tidak menjadi soal selama hasil kita di pemerintahan naik. Kita tidak mempunyai rencana untuk menurunkan tingkat kesejahteraan pegawai, malah kita ingin naikkan. Tetapi yang kita harapkan ialah efektivitasnya dinaikkan sehingga timbul pendapatan negara yang lebih tinggi. Itu yang kita harapkan.

Secara nominal tidak perlu diturunkan, yang diturunkan ialah persentasenya. Kalau secara nasional biaya rutin kita 70 persen, maka yang kita harapkan ialah tetap kesejahteraan terjamin tetapi persentasenya turun akibat naiknya pendapatan, naiknya pajak pendapatan daerah dan sebagainya. Yang dibutuhkan ialah bagaimana meningkatkan itu semua, yang dibutuhkan ialah bagaimana ekonomi bergerak, karena hanya ekonomi yang bergerak menimbulkan pendapatan ekonomi negara dan daerah naik, hanya itu caranya. Karena itulah, maka janganlah semua orang ingin mempunyai kewenangan dengan membikin aturan.

Banyak aparat pemerintah kita bermasalah dengan hukum, ada yang menganggap karena pegawai kita bergaji rendah. Kenapa gajinya rendah, karena ekonomi negaranya kurang berkembang dengan baik, akibat dari cara kita mengelola negeri ini yang sangat birokratis, sangat lamban. Apakah itu izin lahan, izin industri, izin investasi dan segala macam itu. Karena itulah, pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan debirokratisasi, deregulasi, untuk memudahkan rakyat anda semua di daerah. Agar mudah berusaha.

Hanya itu inti dari suatu kemajuan. Suatu kemajuan hanyalah apabila rakyatnya makin banyak berusaha, makin tinggi produktivitasnya dan hanyalah produktivitas yang tinggi yang dapat memberikan kesejahteraan.

Bukan aparat yang banyak yang dapat meningkatkan kesejahteraan, tetapi produktivitas yang tinggi dari masyarakat

yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kami harapkan dan kita harapkan kepada Anda semua di sini untuk memperbaiki cara kita melaksanakan pemerintahan. ✱

Disampaikan Pada Acara
Pembukaan Rapat koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2016,
Yang Diselenggarakan Oleh Badan Kepegawaian Negara
Dengan Tema Revolusi Mental Menuju ASN Berkretativitas,
Profesional dan Berdaya Saing Global
Di Hotel Bidakara Jakarta
26 Mei 2016

Lebih Suka “Tidak”

Dalam membuat kebijakan, pemerintah selalu berasal dari pejabat yang lebih tinggi, khususnya menteri, dirjen, direktur, atau pejabat yang setingkat. Malah kadang-kadang kalau melihat pengalaman, yang menjalankan negeri ini, sebenarnya secara langsung para pejabat itulah. Karena kalau presiden pegang perintah, selalu menteri yang disposisi dirjen agar ditelaah atau dilaksanakan. Dirjen perintah lagi ke bawah agar dilaksanakan sesuai aturan yang ada.

Jadi, akibatnya, kalau ada yang salah, kadang-kadang pengadilan kita lihat, dirjen bilang direktornya sudah bilang begitu, jadi saya laksanakan. Artinya, kalau direktur dan di bawahnya berbuat kekeliruan, di atas juga bisa keliru. Atau di atas memberikan kebijakan, di bawahnya tidak laksanakan, ya tidak jalan karena direktur yang mengendalikan aparat pelaksana. Ini yang harus diubah.

Kenapa harus berubah? Setidak-tidaknya ada empat hal. Perubahan pertama, sistem ketatanegaraan. Dulu pemerintah dari pusat sampai kabupaten. Ada sampai kepala dinas kabupaten, orang pusat. Sekarang dengan sistem otonomi yang luas, hanya enam kementerian atau yang efektif hanya empat kementerian yang sampai ke bawah, lainnya hanya di Jakarta,

di pusat. Jadi ada perubahan sikap bahwa kita mengendalikan keadaan dan memberikan kewenangan. Gubernur, bupati mewakili pusat di situ. Jadi cara pemerintahan berubah drastis dengan cara itu.

Kedua ialah keterbukaan. Akibat demokrasi, apa pun yang kita buat diketahui orang, media, dan sebagainya sehingga kita harus juga membuka diri kepada masyarakat.

Perubahan berikutnya adalah teknologi. Kita tidak bisa lagi bekerja tanpa teknologi yang kuat. Dulu semuanya ada bagian arsip, penerima telepon, sekarang semuanya langsung ke orang. Tidak ada lagi operator pesawat telepon di kantor. Semuanya langsung dengan *handphone*. Semuanya arsip langsung dengan komputer, semua bisa *online*, langsung diketahui. Itu semua mengubah tata kerja.

Perubahan besar yang sangat penting adalah persaingan. Persaingan antarnegara, antaradaerah, antarwilayah, juga antarorang. Kalau suatu daerah tidak baik aturannya, orang akan pindah ke daerah lain, apalagi negara. Begitu kita kemahalan, terlambat, orang akan berpindah.

Anda secara pribadi sekarang bersaing. Zaman dulu dari eselon II ke eselon I, pertama tinggal tunggu waktu lamanya bertugas, hubungan baik, performa, hubungan baik dengan atasan. Sekarang Anda harus bersaing satu sama lain akibat Undang-Undang ASN. Itu berarti kita harus meningkatkan diri. Tidak ada lagi yang otomatis dalam hal itu. Semua lewat persaingan.

Lewat persaingan, artinya memperbaiki kemampuan diri sendiri, kemampuan instansi untuk perubahan, kemampuan daerah, dan kemampuan lainnya. Semua itu membutuhkan perubahan dan sikap yang sama.

Kita menghadapi masyarakat yang makin banyak harapan dan permintaannya. Dulu kalau jalan sedikit lubang-lubang tidak ada soal, sekarang lubang langsung dilaporkan, diprotes.

Harga pangan naik di suatu wilayah langsung diprotes nasional.

Itulah keterbukaan. Karena itulah kita tidak bisa lagi birokrasi yang menunggu, tetapi birokrasi yang menyelesaikan masalah lebih cepat. Dan sekarang jauh lebih mudah. Di banyak kota, sudah banyak *smart city*, melibatkan masyarakat. Sehubungan dengan teknologi, maka pemerintah harus mengubah caranya dengan langsung berhubungan dengan masyarakat.

Kalau ojek saja bisa berhubungan langsung dengan pengguna, termasuk kalau mau beli bakmi bisa langsung dengan ojek, artinya layanan makin cepat. Masak pemerintah tidak bisa berhubungan langsung dengan rakyatnya. Semua dimungkinkan dengan aplikasi *online*.

Jadi keterbukaan teknologi dan persaingan haruslah mengubah sikap kita melihat kenyataan itu, di samping permintaan masyarakat makin tinggi karena dengan mudah masyarakat melihat perbandingan. Dengan mudah masyarakat kita melihat, misalnya harga daging di Malaysia cuma Rp 50.000 hingga Rp 60.000, masak di sini Rp 100.000. Kalau zaman dulu mungkin dia tidak tahu. Jadi dibutuhkan suatu perencanaan yang baik.

Tetapi semua perencanaan selalu dimulai dengan data yang baik. Masalah kita yang paling utama adalah data yang sama sekali berbeda-beda dan tidak tepat. Apakah data produksi, konsumsi, semua berbeda-beda, menyebabkan pengambilan keputusan menjadi rancu akibat perbedaan data tersebut.

Data kita berbeda di pusat, data daerah berbeda, data pedagang berbeda. Akhirnya timbul saling tuduh akibat perbedaan data. Data itu datang dari instansi daerah dan pusat.

Apa yang dibutuhkan masyarakat dewasa ini? Apakah masyarakat itu adalah masyarakat biasa, para pengusaha, dan sebagainya? Ini sangat penting untuk kita maklumi, bagaimana pentingnya aparat kita, apalagi pejabat tinggi pratama atau eselon II yang harus melayani dengan baik para pengusaha karena pengusahalah sebenarnya yang menjalankan roda ekonomi. Tentu strateginya ditentukan oleh pemerintah.

Kita kekurangan gula, siapa yang menyebabkan kekurangan gula? Para pengusaha yang tidak aktif atau pabrik yang tidak jalan. Bagaimana mendorong itu? Kita kekurangan berbagai kebutuhan, itu karena kegiatan-kegiatan para pengusaha. Tetapi ada satu hal yang sangat penting juga, ialah keadilan. Jadi kita butuh pertumbuhan, tetapi kita juga butuh keadilan. Lebih banyak masalah di dunia ini akibat kekurangadilan dibanding pertumbuhan.

Tetapi bagi kita, kedua-duanya sangat penting karena keadilan juga tidak mungkin realistis tanpa pertumbuhan. Keadilanlah yang dibutuhkan oleh *affirmative action*. Kita mementingkan pengusaha kecil menengah, mementingkan orang yang tidak mampu, mementingkan masyarakat yang di luar, mementingkan masyarakat yang terbelakang, mementingkan daerah-daerah yang kurang maju dibanding yang maju. Karena apabila terjadi ketidakadilan bisa menimbulkan berbagai masalah yang sulit diatasi apabila dibiarkan.

Ini tentu bagian dari pelaksanaan karena perencanaan pasti isinya baik, program nasional pasti lengkap. Tetapi kenapa antara perencanaan dan pelaksanaan hasilnya beda? Berarti ada masalah di tingkat pelaksanaan. Karena itulah kita perbaiki. Di samping memperbaiki perencanaan, tingkat pelaksanaannya juga diperbaiki.

Seperti saya katakan tadi, Anda bagian birokrasi yang paling depan menghadapi masyarakat, dan lainnya. Menteri

bertemu masyarakat, tetapi tidak datang langsung. Eselon II-lah di samping eselon I dan ke bawahnya yang kadang-kadang menentukan ya atau tidaknya sesuatu.

Cuma sekarang ada satu hal yang ingin kita perbaiki. Kadang-kadang pejabat birokrasi di bawah lebih senang memakai kata tidak daripada ya. Kita juga memahami banyaknya ketakutan. Kenapa? Karena kalau kata tidak, selesai urusan sehingga tidak ada risiko di belakang hari.

Kalau eselon II mengatakan tidak, maka eselon I pasti mengatakan tidak juga, menteri juga mengatakan tidak. Karena itulah harus ditelaah dengan baik manfaatnya. Ini yang kadang-kadang terjadi keterlambatan.

Kenapa sekarang masih banyak kasus-kasus gratifikasi, korupsi? Sering saya katakan, sebenarnya korupsi, gratifikasi itu umumnya dimulai oleh pengusaha, kan? Tapi kenapa itu ada? Karena pengusaha membeli dua hal, membeli waktu dan membeli kesempatan. Kalau tidak servis, waktu lama, kesempatan tidak ada.

Artinya, kalau ingin melihat negeri ini lebih baik, kita harus mempercepat segala sesuatu urusan agar tidak menimbulkan masalah. Hal ini juga tentu selalu dijawab, bagaimana? karena gaji pegawai negeri rendah. Bukan hanya gaji pegawai negeri rendah, gaji Presiden juga rendah dibanding negara lainnya. Wapres juga rendah, menteri juga rendah. Tetapi gaji dan kesejahteraannya naik, hanya bisa diberikan oleh negara yang maju.

Kalau negara kita tidak maju, bagaimana kita bisa memberikan kesejahteraan yang baik? Akibatnya, sekarang ini biaya rutin kita secara persentase sangat tinggi dibanding zaman sebelumnya. Kalau dulu anggaran rutin di bawah 50 persen, sekarang umumnya 60-70 persen anggaran rutin.

Akibatnya kita mengalami banyak kelambatan. Karena itulah kita tidak ingin mengurangi anggaran kesejahteraan

pegawai, tetapi bagaimana meningkatkan pendapatan sehingga anggaran bisa naik secara keseluruhan.

Yang kedua, bagaimana meningkatkan kapasitas pejabat kita. Kita lagi mempelajari kenapa negara-negara lain tidak seheboh kita apabila menghadapi hari-hari raya? Kita tiap tahun heboh. Ada yang keliru dalam hal ini. Karena itulah, mudah-mudahan tahun depan tidak heboh lagi. Kenapa selalu kita dikalahkan oleh para pengusaha, atau kita sendiri keliru mengatur itu?

Kalau Anda mengatakan beras cukup, di atas akan mengatakan cukup. Atau kalau eselon II mengatakan daging cukup, cukup lagi kita bilang. Jadi semuanya tergantung kemampuan Anda menganalisis itu. Begitu Anda mengatakan tidak, di atas juga mengatakan itu.

Itu mudah sekali kita lihat dari seluruh disposisi surat-surat. Saya suka lihat disposisi surat-surat, selalu terakhirnya eselon II atau malah eselon III. Kadang-kadang lagi malas, bikin lagi kepala seksinya. Kepala seksi telaah undang-undang atau aturan yang terkait, pasal terkait, makin lama itu. Maka pada bongkarlah segala macam arsip-arsip zaman dulu. Akhirnya telat lagi urusan. Kalah lagi kita dengan Thailand, kalah dengan Malaysia. Karena itu, kita selalu ingin agar itu terjadi. *

Disampaikan pada acara Rapat Kerja Nasional Pemerintah (RKP) 2016
Dengan seluruh Pejabat Eselon II Kementerian/Lembaga
Di Gedung Dhanapala, Kantor Kemenkeu RI Jakarta
7 Juni 2016

Deregulasi melalui Regulasi

Kita ini aneh, kerap bicara deregulasi, tetapi solusinya justru regulasi. Kita ingin mengurangi aturan dengan menambah aturan.

Bagaimana ini? Demikian pula dengan debirokratisasi, tetapi justru memperbanyak urusan. Harus hati-hati dalam menerapkan kebijakan deregulasi dan regulasi supaya kita pahami makna semuanya.

Deregulasi intinya kurang aturan. Ini agar mengubah cara kita berpikir dewasa ini yang menurut saya memberatkan ekonomi kita dengan selalu mencari payung hukum. Ada salah paham yang harus kita perbaiki. Aturan hukum sebenarnya mengatakan “selama tidak dilarang, itu artinya boleh dilakukan”.

Namun, yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Nah ini yang menjadi puncak seluruh masalah dari aturan yang ada.

Beberapa kali saya bicara dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terkait masalah deregulasi itu, tapi tetap saja masalah hukum acap kali menimpa pejabat kita. Sehingga mereka tidak berani lagi memutuskan kebijakan sendiri. Semua minta keppres, minta PP.

Untuk membangun jembatan saja mereka minta keppres jembatan. Mau buat jalan tol minta keppres jalan tol. Akhirnya di Indonesia menjadi hutan aturan.

Cara berpikir kita sudah masuk ke situ. Selalu ingin menyelesaikan sesuatu dengan aturan baru. Dalam kerangka ini, kita juga *me-reform* cara kita mengatur ekonomi kita bahwa berikanlah suatu kesempatan yang luas untuk berkreasi.

Semua di dunia tahu tentang inovasi. Namun, begitu semua diatur sedetail-detailnya, hilanglah inovasi itu. Begitu inovasi menghilang, negara tidak maju.

Sukses dari semua kebijakan bukan karena peraturan. Bagaimana kita berpikir, *me-review* cara kita dengan cara yang kita hadapi sekarang ini? Bagaimana mengubah akal kita? Apa masalahnya, apa kendalanya secara utuh.

Kemudian menyangkut sistem. Langkah yang dibuat seharusnya mempunyai dampak yang besar. Kalau hanya dampak-dampak kecil, maka tidak usah membuat aturan-aturan lagi.

Apa dampak yang besar? Apa hal yang dapat meningkatkan kapasitas industri? itulah yang harus kita perbaiki. Apa kita dapat meningkatkan industri transportasi kita?

Kemudian, yang perlu diperhatikan juga adalah menghilangkan kesan *superbody* karena sudah terlalu banyak *superbody* di Indonesia. Kalau kita masih membuat *superbody*, maka fungsi kementerian dan kebijakannya di daerah akan bermasalah lagi.

Kekuasaan dalam bingkai otonomi daerah jangan menjadi *superbody* karena akan mengecilkan peran kementerian. Bagaimana pun kementerian harus bertanggung jawab di bidangnya karena kita semua bekerja *full time*. Termasuk

kementerian, bekerja untuk itu, maka mereka harus menjadi supervisi yang bersifat sektoral. ✱

Disampaikan pada Acara
Rapat Paripurna Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan
Ekonomi, dan Penguatan Jaringan Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas
Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Nasional
Di Gedung Ali Wardhana, Kantor Kementerian Perekonomian
Jakarta, 28 Juni 2016

Otonomi Kesejahteraan

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ada beberapa upaya yang harus kita laksanakan. Upaya yang paling pokok adalah dengan cara meningkatkan produktivitas, misalnya meningkatkan produktivitas pertanian, manufakturing, dan jasa. Selain itu, upaya ini juga perlu diikuti dengan penyelenggaraan pemerintahan yang adil.

Itulah tugas utama dari pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai pelaksana terdepan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kini di era otonomi daerah asas pemerintahan bukan lagi *top down*, tetapi *bottom up*. Karena itulah fondasi utama kemajuan suatu daerah ialah kegiatan yang produktif dengan inovasi dan kreativitas dari daerah masing-masing. Tanpa inovasi dan kreativitas, tentulah tidak akan tercapai suatu kemajuan yang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu indikator kemajuan suatu daerah ialah kemampuan daerah secara mandiri untuk membiayai pembangunan wilayahnya.

Namun, pada kenyataannya masih banyak daerah yang belum dapat mandiri. Banyak daerah yang masih sangat

tergantungan kepada DAU-DAK saja. Itulah sebabnya Undang-undang Otonomi telah mengalami beberapa kali perubahan.

Pada saat kewenangan daerah semakin besar diberikan, maka kewenangan itu harus diperlakukan dengan baik dan tepat. Karena itulah dibutuhkan revisi-revisi yang sesuai, tanpa ingin mengurangi, karena saya ingin katakan, bupati yang mau mendapat otonomi bukan hanya diukur dari haknya saja, melainkan dari pelaksanaan hak tersebut.

Pada dasarnya perubahan-perubahan tersebut tidak bermaksud mengurangi kewenangan, tetapi agar lebih baik lagi. Kalau dulu semua izin tergantung bupati, sekarang beberapa izin tertentu dibutuhkan tetap dari bupati, tetapi dengan rekomendasi di atasnya agar ada *check and balances* sehingga semuanya dapat berlangsung dengan baik. Itulah inti dinamika otonomi. Di mana pun terjadi.

Saya ingin katakan, kebijakan pusat akan lebih memberikan kewenangan dan juga porsi yang besar dalam bidang dana kepada daerah. Kalau sebelumnya tahun-tahun yang lalu dana kementerian dan lembaga lebih besar dibanding transfer ke daerah, tahun ini sudah sama, sekitar Rp 770 triliun transfer ke daerah.

Saya juga ingin sampaikan, dalam waktu 10 tahun, transfer pusat ke daerah naik 350 persen. Tahun 2006, transfer pusat ke daerah hanya Rp 220 triliun, tetapi tahun ini transfer pusat ke daerah Rp 770 triliun, eski pertumbuhan ekonomi kita tidak sepadan dengan jumlah transfer itu. Anggaran pembangunan naik, tapi pertumbuhan tidak naik.

Anggaran pembangunan kita juga naik empat kali dibanding 10 tahun lalu. Akan tetapi, pertumbuhan tidak sebesar perbandingan jumlah anggaran kita. Tentu banyak alasannya. Ada inflasi, ada utang yang mesti dibayar, dan sebagainya, serta ongkos pemerintahan yang makin tinggi.

Karena itulah, pemerintah mempunyai suatu kebijakan, yaitu moratorium PNS dan kantor. Dua langkah ini mutlak harus dilakukan untuk efisiensi anggaran dalam pemerintahan. Karena sesungguhnya keberhasilan daerah tidak diukur dari megahnya kantor pemerintahan dan mewahnya rumah dinas. Akan tetapi, ditandai dengan kurangnya kemiskinan, kurangnya pengangguran, dan naiknya penghasilan negara. ✱

Disampaikan saat Menghadiri
Penguatan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia
(Apkasi) Periode 2015-2020 dan Peresmian Pembukaan 12th Apkasi International Trade
and Investment Summit 2016
Hall D Jie Expo Kemayoran Jakarta 4 Mei 2016

BAB 7

PENDIDIKAN

Universitas dan Museum

Ada satu perbedaan mendasar antara lembaga universitas dan museum, yakni universitas selalu melihat ke masa depan, sedangkan museum selalu melihat ke masa lalu. Jadi, apabila ada universitas yang selalu membangga-banggakan kebesaran masa lalunya, maka institusi tersebut sebenarnya bermental museum.

Lembaga universitas harus senantiasa melihat ke masa depan, melihat apa yang akan diupayakan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, para mahasiswa harus diajari berbagai ilmu yang diperkirakan dapat digunakan hingga sepuluh tahun ke depan, atau setidaknya-tidaknya lima tahun yang akan datang. Ilmu-ilmu yang sudah usang jangan diajarkan kepada para mahasiswa.

Hal ini menjawab pertanyaan, mengapa banyak universitas selalu menggandengkan antara riset dan pengajaran pendidikan? Jawabannya, lembaga universitas harus melihat ke depan karena ilmu berkembang dengan cepat.

Saya sering mengatakan, ilmu kedokteran berkembang 100 persen setiap tiga tahun. Artinya, jika seorang dokter tidak menambah ilmu, tidak belajar, tidak meneliti, ilmunya menjadi ketinggalan. Seolah-olah, pengetahuannya berkurang tinggal setengah. Akibatnya, pasien Indonesia akan mencari

dokter Singapura yang memiliki setengah dari ilmu yang sudah berkembang. Hal ini membuat kita selalu merasa ketinggalan dari dokter Singapura.

Kita perlu memahami situasi tersebut terlebih dahulu dalam dunia perguruan tinggi, khususnya fakultas kedokteran.

Selain itu, ada juga pertanyaan, apakah jumlah fakultas kita sudah cukup atau masih kurang? Dalam perkembangannya, selalu ditentukan dua hal, yakni jumlah dan kualitas.

Mungkin dalam jumlah, fakultas kita sudah banyak, tetapi kualitas harus lebih baik lagi. Tolok ukurnya sederhana. Apabila jumlah pasien Indonesia yang berobat ke Singapura dan Malaysia semakin berkurang, itu merupakan tanda bahwa kita sudah cukup dari sisi jumlah dan kualitas.

Memang, sebagai suatu lembaga universitas, dalam hal ini fakultas kedokteran, hanya memiliki sedikit jumlah mahasiswa. Jumlahnya memang harus sedikit karena proses pendidikannya sangat intensif.

Akan tetapi, umumnya jumlah mahasiswa juga diukur dengan kemampuan dari universitas dalam hal mengelola kualitas lulusannya. Itulah mengapa, fakultas kedokteran harus dikelola dengan baik karena lembaga tersebut memiliki parameter-parameter dan ukuran-ukuran yang baku untuk memastikan kemampuan untuk menghasilkan dokter. Oleh karena itulah, universitas tidak boleh asal mendirikan fakultas kedokteran. Pasti pemerintah juga mempunyai standar-standar yang harus dikelola dengan baik.

Namun, karena jumlah penduduk kita makin banyak, kebijakan pemerintah juga menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah dalam hal ini bisa membantu sarana kesehatan, seperti misalnya asuransi kesehatan sehingga semua orang dijamin pelayanan kesehatan oleh pemerintah.

Implikasinya, kita makin membutuhkan lebih banyak universitas, fakultas kedokteran, termasuk dokter. Walaupun

demikian, kita juga tahu bahwa ukuran kesehatan tidak ditandai dengan banyaknya rumah sakit atau dokter, tetapi ditandai dengan banyaknya orang sehat atau banyaknya orang yang sakit.

Pejabat Gubernur sering salah kaprah dengan merasa bangga bisa memiliki puluhan rumah sakit dan bisa melayani pasien dari pagi sampai malam. Inilah tanda-tanda kegagalan yang hebat. Kebanggaan semacam itu berarti bahwa program kesehatan masyarakat atau pencegahan, *preventif*, tidak berjalan di daerah tersebut. Oleh karena itu, jangan mengukur tingkat kesehatan masyarakat di daerah dengan melihat banyaknya rumah sakit dan dokter. Melainkan, tingkat kesehatan harus diukur dari sepiunya rumah sakit dan sepiunya dokter sebagai indikator tingkat kesehatan yang naik. Namun demikian, tetap dibutuhkan rumah sakit dan pelayan kesehatan mengikuti standar-standar yang baku.

Jadi fakultas kedokteran janganlah hanya mengajarkan bagaimana mengobati orang, tetapi mengajarkan bagaimana agar orang-orang tak perlu lagi berkunjung ke dokter. Itu yang sebenarnya, bagaimana kesehatan seseorang baik jika tidak perlu ke rumah sakit.

Kalau kita perhatikan, setiap kita bertemu seseorang, kesehatan kitalah yang ditanyakan, "Bagaimana, sehat?". Tidak pernah ditanyakan, "Saudara sakit?" Jadi, kita didoakan banyak orang agar kita sehat.

Walaupun, saya juga sering mengatakan bahwa semua universitas mesti hati-hati. Seorang lulusan fakultas kedokteran yang dididik dengan tidak baik, belum lengkap pendidikannya, atau kurang sempurna ilmunya, bisa membahayakan jiwa manusia, walaupun itu hanya satu atau dua pasien semata, tidak banyak.

Berbeda dengan lulusan fakultas ekonomi. Jika salah membuat perencanaan, mereka bisa memiskinkan banyak

Nilai UN Murid

orang. Lulusan fakultas teknik yang salah dan tidak tahu membangun rumah, bisa membuat gedung runtuh sehingga menyebabkan seratus orang meninggal. Sementara, lulusan fakultas hukum yang salah didik bisa menghukum orang yang tidak patut dihukum.

Jadi, semua ada risikonya. Risiko yang paling ringan justru pada lulusan fakultas kedokteran. Jadi, semua ada risikonya, tidak ada yang tidak memiliki risiko jika salah mendidik.

Oleh karena itu, kita harus mengutamakan bagaimana membuat orang tetap sehat. Itulah ukuran keberhasilan dari suatu daerah, juga keberhasilan program kesehatan. Jadi, diutamakan ke arah membuat orang tetap sehat. Sebaliknya, jangan melihat keberhasilan program kesehatan dengan ukuran banyaknya orang yang mau dioperasi, banyaknya orang yang mau dipasang ring jantung, dan macam-macam tindakan kuratif lain.

Dalam bidang kesehatan, kita tahu bahwa ada empat faktor yang menentukan, 1)hal genetik, siapa saja yang ada di rumah, 2)lingkungan, 3)kebiasaan, dan 4)rumah sakit. Kita harus ingat bahwa rumah sakit dan dokternya hanya seperempat bagian dari seluruh sistem kesehatan kita. *

Disampaikan Pada Acara Penandatanganan Prasasti Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa, Makassar
Di Universitas Bosowa, Makassar
Provinsi Sulawesi Selatan
25 juli 2016

Apabila kita ingin berbicara kemajuan negara atau kemakmuran yang adil, kita harus bisa meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan produktivitas tak lepas dari kemajuan teknologi karena tidak ada suatu bangsa yang maju tanpa kemampuan ilmu dan teknologi. Itulah dasar meningkatkan produktivitas bangsa di bidang industri, ekonomi, dan perorangan.

Syarat utama peningkatan teknologi adalah lewat pendidikan. Karena itulah, pendidikan adalah dasar dari semua kemajuan kita untuk meningkatkan kemampuan kita. Kita semua memahami bahwa perhatian yang utama hampir semua bangsa negara ialah pendidikan. Berbagai upaya telah kita jalankan.

Modal utama dari pendidikan adalah guru, fasilitas, sistem, dan juga semangat bangsa itu. Hubungan keempat hal tersebut tidak dapat kita lepaskan. Tidak ada yang statis karena ilmu itu sendiri dinamis. Mengejar ilmu yang dinamis dengan suatu sistem yang statis itu tidak mungkin. Jadi, ilmu harus dinamis, guru harus dinamis, fasilitas tentu juga sangat berkembang, sistem juga selalu dinamis. Mengapa selalu orang mengkritik bahwa kurikulum berubah terus? Ya memang karena kemajuan berubah, maka sistem juga

harus berubah. Nah, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, kita maklum bahwa kita semua mempunyai perhatian besar terhadap tiga hal ini.

Dilihat dari segi fasilitas, dulu banyak orang yang menertaawakan fasilitas sekolah kita yang reot. Saya kira mungkin masih ada satu, dua, tetapi umumnya sudah baik. Jauh lebih baik dibanding dengan 10-20 tahun yang lalu. Dari desa sampai kota semuanya juga banyak sudah jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Dari sisi kemampuan guru, saya yakin juga jauh lebih baik. Pada waktu saya sekolah di SD atau SR, para guru yang mengajar merupakan tamatan Sekolah Guru Bantu (SGB). Artinya, tiga tingkat atau tiga tahun di atas. Kemudian Sekolah Guru Atas (SGA) 6 tahun di atas. Kalau sekarang, hampir semua guru sudah tamat universitas. Secara formal, lulusan perguruan tinggi pasti lebih baik. Walaupun, kadang-kadang kalau dilihat secara material, mungkin dahulu ada tamatan SGA yang lebih mampu daripada sarjana lulusan saat ini.

Jadi kalau dilihat dari ijazah, kualitas guru memang sudah jauh lebih tinggi. Secara kemampuan, kualitas guru tergantung orang masing-masing. Begitu juga dengan kesejahteraan. Zaman dahulu kesejahteraan guru pasti lebih tinggi, terutama di zaman Belanda dan zaman 1950-an karena dilihat dari daya beli, bukan dilihat dari rupiahnya. Rupiah kecil, daya belinya lebih tinggi. Namun, kesejahteraan guru saat ini dibanding 10 tahun lalu saya yakin jauh lebih baik.

Karena itulah, di mana-mana ada pelatihan guru, peningkatan guru, sertifikasi dari masa ke masa. Sertifikasi tidak bisa sekali dilakukan karena hari ini dia boleh pintar, dua tahun kemudian ilmunya tinggal setengah karena ilmu berkembang. Seorang guru komputer yang mengajar hari ini

dengan ilmu komputer sepuluh tahun lalu bisa ditertawakan muridnya.

Di tengah tuntutan masyarakat dan pemerintah yang meminta peningkatan kualitas guru, justru juga ada suara guru juga mengejar kesejahteraan lebih tinggi. Memang wajar juga. Akan tetapi, kita sedang mencari di mana titik temunya. Pemerintah yang hanya berbicara tentang mutu guru tanpa berpikir kesejahteraan juga tidak akan pas. Akan tetapi, guru yang hanya berbicara kesejahteraan juga tidak akan berkembang. Guru harus menyesuaikan diri dengan alam ilmu yang berkembang itu agar tidak ketinggalan.

Yang kedua, sistem juga mempunyai perbedaan-perbedaan, tergantung filosofi bangsa itu. Contoh yang paling besar adalah filosofi pendidikan antara Amerika dan Eropa. Karena kita dahulu dijajah Belanda, sistem persekolahan kita mengikuti sistem Eropa yang lebih fokus. Tak heran, di SMA ada kelas A1, A2, dan A3, atau IPA dan IPS serta bahasa. Sekarang, sistem persekolah kita lebih bersifat umum, lebih mendekati sistem Amerika karena mungkin banyak ahli pendidikan kita merupakan lulusan Amerika. Berbagai pendekatan ini perlu kita kaji terus, bagaimana yang paling baik dalam kondisi Indonesia seperti ini.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah perlu orang menjadi sarjana? Itu juga menjadi pertanyaan di dunia saat ini. Karena itu, di sekolah-sekolah menengah mulai harus dibicarakan tentang keterampilan. Kita sudah punya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang banyak, juga cukup baik. Pertanyaannya, mampukah sekolah dan guru kita membawa siswa dengan keterampilan yang cukup di dunia kerja. Itulah pertanyaan kita semua. Pertanyaan ini turut kita bicarakan di PGRI, sebagai organisasi guru terbesar.

Karena itulah pendidikan juga harus diketahui mutunya. Salah satu cara kita untuk mengetahui mutu itu adalah Ujian

Nasional. Kenapa kita butuh Ujian Nasional? Karena ilmu selalu berkembang. Kalau tidak berkembang bagaimana mengetahui bahwa ilmu dapat diterima oleh murid selain melalui Ujian Nasional? Kenapa ujian dibuat nasional? Agar seluruh Indonesia mempunyai kemampuan yang sama.

Sering saya katakan bahwa salah satu dosa besar kita adalah membeda-bedakan ujian di setiap daerah. Ambil contoh, daerah Timur tempat saya di Sumatera Utara, Kupang, nilainya didongkrak. Angka enam di Jawa berbeda dengan angka enam di Kendari walau sama-sama enam. Hal tersebut membodohi rakyat dengan mengatakan sudah cukup dapat 6. Masalahnya, siswa menjadi tidak bisa masuk ITB karena skornya rendah. Itulah dosa besar kita apabila ingin membeda-bedakan seluruh anak Indonesia ini.

Padahal, apanya yang berbeda? Gedungnya sama anggarannya, bukunya sama anggarannya, gurunya sama-sama tamatan IKIP, FKIP. Mengapa hasilnya berbeda? Semangat belajar perlu perbaiki. Daerah-daerah lain jangan mau dongkrak angkanya. Begitu Anda dongkrak angka, itu pembodohan namanya. Kalau tidak lulus, ya tidak lulus. Jangan *permisif* dengan alasan, "Oh ini dari daerah jauh, maka kita kasih angka dua menjadi angka empat atau jadi enam." Itulah suatu kerangka yang keliru karena sistem kita masa dahulu.

Karena itu, Ujian Nasional harus sama dan tidak boleh ada *permisif*-nya. Kita waktu itu memang memerlukan lima tahun untuk menyamakannya. Kita ingat, angka lulusan pertama 3,5. Bayangkan, dengan angka 3,5 masih ada yang tidak lulus 20 persen, baru kemudian kita naikkan menjadi empat, kemudian 4,5 dan lima. Sungguh menyedihkan angka-angka itu pada awalnya. Sekarang, *Alhamdulillah* ujian itu sudah diterima sebagai suatu cara kita. Karena, kalau kita serahkan ke seluruh guru, guru itu menguji apa yang dia catat.

Ujian Nasional itu menguji apa yang mestinya siswa ketahui. Kalau siswa tidak tahu, ya jangan diluluskan. Ketidaktahuan itu bukan salah siswa. Guru-lah yang harus menjadi bagian dari instropeksi.

Kalau pendidikan yang kita inginkan berhasil, pastilah nilai tambah nasional naik sehingga pastilah anggaran pendidikan naik karena ekonominya yang naik. Jangan sebaliknya. Sekarang perlu usaha yang besar karena tak ada yang mau dibagi. Apabila kondisi ekonomi seperti ini, pajak turun. Walaupun guru bdemo berkali-kali, tidak mungkin kita langsung menaikkan gajinya karena kita mesti lebih galak. Kita mesti bayar gaji pegawai, mesti bayar tentara dan polisi juga. Kalau dinaikkan terus, guru terus, berarti yang lain mesti dikurangi, bagaimana?

Jadi yang harus dilakukan ialah berusaha menjalankan tugas kita sesuai dengan norma yang ada sehingga angka yang dibagi 20 persen itu semakin tinggi. Kalau makin tinggi, yang dipakai makin tinggi. Itu khasnya pendidikan. Berbeda dengan kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang tidak ada persentase dan kewajibannya. Hanya ada dua pos kewajiban negara kewajiban negara, yakni pos pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan 5 persen. Akan tetapi, persentase kesehatan tidak lewat Undang-Undang sedangkan pendidikan lewat Undang-Undang Dasar.

Jadi, apabila kita menginginkan itu semua naik, marilah kita bersama seluruh bangsa ini memperbaiki ekonomi kita dengan cara memperbaiki pendidikan, dan sebagainya. Itulah cara kita meningkatkan anggaran pendidikan tidak dengan demo. Makin banyak demo, makin sedikit tunjangannya. Kalau demo, ekonomi tidak jalan. Kalau ekonomi tidak jalan, orang tidak berani bayar pajak, membayar pajak turun 20 persen lagi. Itu sudah angka tetap, hasilnya kurang. Jadi, kalau

sudah kenyataan tidak usah didemo karena sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar. *

Disampaikan pada acara dialog pendidikan dengan tema
"Memajukan Pendidikan Nasional dan Peningkatan Peran PGRI di Tengah Perubahan"
Di Gedung Guru Indonesia
Jalan Tanah Abang III Jakarta Pusat
27 Mei 2016

Mendahului Zamannya

Suatu universitas itu dinilai dari banyak segi. Tentu segi pertama orang akan melihat kampusnya seperti apa, yang besar dan megah, kemudian siapa yang mengajar, siapa profesornya. Namun, yang lebih penting, seperti dikatakan tadi, apa hasilnya universitas itu.

Universitas bisa disamakan dengan pabrik. Orang tidak hanya melihat bangunan pabrik, tetapi apa yang dihasilkan oleh pabrik itu, laku atau tidak, bagus atau tidak. Nah, itulah yang selalu menjadi penilaian orang. Namun, dari semua itu, tergantung siapa orang-orang yang terlibat di kampus itu, bagaimana prosesnya, siapa yang menjadi pimpinannya, siapa yang mengajarnya, yang kesemuanya itu menjadi suatu hubungan keterkaitan.

Hal yang perlu dilihat adalah perkembangan ilmu dan teknologi. Mereka yang mengetahui perkembangan ilmu dan teknologi tak terbatas pada kalangan universitas, tetapi juga terkadang dari luar universitas.

Kadang-kadang, universitas malah menganggap perkembangan ilmu dan teknologi merupakan hal yang rutin. Sebaliknya, mereka yang di luar kampus banyak yang mengetahui kebutuhan teknologi seperti apa, saingannya bagaimana, dan efek dari teknologi tersebut.

Karena itulah, saya selalu menekankan pentingnya hubungan antara alumni dengan almamater. Hubungan tersebut bisa menciptakan dinamika universitas. Untuk itu, hubungan antar alumni dengan universitas harus lebih baik, bukan hanya arisan, hura-hura, atau pesta-pesta kecil.

Karena itulah pertemuan alumni perlu dilakukan. Setidaknya ada dua kegiatan per tahun yang selalu bisa dilakukan oleh alumni, halal bil halal dan buka puasa bersama. Karena itulah, harus ada program mengikat untuk dapat membantu universitas.

Misalnya, saya sebagai ketua Alumni Unhas, meminta kepada setiap fakultas di Unhas untuk setiap enam bulan mengajukan hal apa saja yang ingin ditonjolkannya sebagai bentuk upaya perubahan ke arah yang lebih maju. Karena universitas itu juga harus meningkatkan mutu. Untuk meningkatkan mutu, kita harus melakukan *refreshing*.

Memang, *refreshing* ilmu di fakultas kedokteran merupakan soal biasa, tetapi di fakultas lain itu hampir jarang terjadi. Dalam hal ini, alumni juga perlu *me-refreshing* keadaan universitas.

Sama halnya dengan pembangunan fakultas kedokteran, dalam pembangunan fakultas teknik saya selalu adil. Kami membangun satu di Timur dan satu di Barat. Saya minta juga untuk membangun di Makassar, di Medan, atau di Padang. Saat itu, saya memikirkan perlunya satu fakultas yang modern, yang mendahului zamannya.

Selalu saya mengatakan bahwa fakultas teknik harus mendahului zamannya. Kalau tidak mendahului zamannya, namanya STM atau BLK karena bekerja berdasarkan apa yang ingin dilakukan hari itu, atau politeknik.

Universitas harus ada risetnya, apa yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang. Nah, kalau hanya mempelajari apa

yang terjadi hari ini, itu namanya pelatihan. Namun, kalau universitas apa yang akan terjadi pada masa akan datang, dipersiapkan mahasiswa itu untuk waktu yang akan datang.

Universitas akan terkenal jika memiliki hasil pemikiran atau penelitiannya. Mungkin kita belum sampai, katakanlah seperti Miami atau Chicago yang alumninya banyak mendapat hadiah Nobel. Peneliti kita sempat ada yang mendapat nobel, hanya hampir saja, yaitu Dokter Taruna Ikrar.

Karena itulah, hubungan antara alumni dan universitas itu perlu dijaga. Kita harus proaktif. Oleh karena itu, saya minta alumni yang mempunyai kemampuan melihat melampaui zaman, mengadakan suatu penelitian untuk itu.

Kita jangan seperti perusahaan Asuransi yang hanya pintar mengumpulkan uang tetapi dia tidak tahu bagaimana mempergunakan uang itu. Akhirnya banyak yang *collapse*. Demikian juga sebuah penelitian. Hasil penelitian atau penemuan harus bisa dimanfaatkan, jangan jadi pajangan saja atau untuk ikut lomba.

Kemudian kita harus populerkan lagi kegiatan magang karena magang itu penting untuk mempersiapkan mahasiswa agar dapat bekerja dengan cepat, dari magang itu. Pada tahun 90-an, sebelum mahasiswa dinyatakan lulus, mereka harus mengikuti orientasi lapangan kerja selama tiga hari, bukan orientasi pengenalan kampus. Jadi, mau masuk ada orientasi dunia kampus, saat mau keluar harus orientasi dunia kerja.

Kemudian yang berikutnya ialah, apa masalah Indonesia dewasa ini? Masalah yang paling berat ialah kebangkitan ekonomi, agar ekonomi lebih adil karena kesenjangan yang besar sekali. Kesenjangan yang besar itu ialah bagaimana mendorong mahasiswa itu, sejak awal lebih ke arah masuk ke dunia usaha.

Berkali-kali saya katakan, jangan harap lagi masuk birokrasi. Tiap tahun kita hanya terima pegawai negeri 120.000. Di lain pihak, setiap tahun jumlah alumni universitas itu sejuta, dari perguruan tinggi seluruh Indonesia, negeri dan swasta. Sedangkan yang diterima sebagai pegawai negeri itu 120.000, itu pun kebutuhan sarjana untuk penerimaan pegawai negeri hanya 50 persen. Oleh karena itu, ada sekitar 900.000 lulusan harus terjun ke dunia non pemerintah.

Nah, itulah yang harus didorong persiapannya sehingga metode-metode di universitas itu menyesuaikan.

Dari sisi akademis, walaupun Unhas menerima mahasiswa dari seluruh Indonesia—sehingga bisa dikatakan bukan universitas lokal melainkan universitas nasional yang ada di Makassar—tetapi bagaimanapun mayoritas mahasiswanya pasti masih terbesar dari Sulawesi Selatan. Dari sisi keilmuan harus kita akui bahwa orang Sulawesi Selatan itu telat.

Sering saya katakan, sarjana pertama orang Bugis Makassar itu tahun 1949, jadi baru kira-kira 60 tahun yang lalu. Di lain pihak, orang Padang sejak tahun 1926 sudah memiliki doktornya. Jadi kita berbeda hampir 30 tahun dengan mereka. Dr. Sam Ratulangi orang Manado sudah doktor tahun 1926, doktor di bidang atom, di bidang fisika. Bayangkan, itu orang Manado!

Sehingga pada tahun-tahun awal Unhas, yang namanya profesor kalau bukan orang Manado orang Jawa. Tidak ada orang Bugis yang menjadi profesor pada tahun 60-an itu. Saat mereka berbaris memakai toga, semuanya orang Manado atau orang Jawa saja, tidak ada orang Bugis Makassar .

Mengelola universitas itu harus ada fokusnya, jangan semua mau dikerjakan. Perlu ditanyakan, apa fokusnya. Kalau kita mulai dari situ, saya yakin bahwa warna alumni yang keluar dari Unhas berbeda dari yang lainnya. Dan itu akan lebih memberikan arti. Di situlah letak kekurangan kita.

Apabila semua orang ingin jadi PNS, tentu tidak mungkin. Oleh karena itu, sistem penerimaan PNS juga ketat sehingga hanya 1-2 persen pelamar yang diterima akibat kita kelebihan PNS. *

Disampaikan pada acara
Pelantikan Pengurus dan Rakernas IKA unhas periode 2017-2021
Istana Wakil Presiden, Jakarta 24 Maret 2017

Harus Rajin Riset

Ilmu itu memang sangat berkembang. Setelah IT, ilmu yang paling cepat berkembang adalah kedokteran. Ada yang mengatakan bahwa ilmu kedokteran berubah 100 persen setiap tiga tahun. Karena itu, para dokter yang tidak belajar, atau tidak meneliti setelah tiga tahun, maka ilmunya tinggal setengah.

Akibatnya, karena orang Indonesia ingin mendapatkan dokter yang 100 persen ilmunya, mereka pergi ke Singapura, orang pergi ke luar negeri karena ilmu kedokteran sangat cepat berkembangnya dan kita sadari itu.

Dulu, orang operasi jantung harus ke Houston. Sekarang setiap hari di rumah sakit Indonesia di manapun sudah bisa. Begitu cepatnya perkembangan ilmu kedokteran itu, begitu juga ilmu yang lain dan begitu juga dengan pengobatan. Walaupun kita tahu juga bahwa kesehatan tidak semata tergantung kepada rumah sakit, tetapi tergantung bagaimana genetiknya, bagaimana di lingkungannya, bagaimana kebiasaannya, dan tentu baru rumah sakit. Namun, ujung dari itu adalah tentu pelayanan kesehatan yang baik dari kita semuanya.

Kita bangsa yang besar, 250 juta lebih penduduk kita. Kita membutuhkan begitu banyak dokter yang hebat. Tidak

ada kehebatan dalam perubahan selain pendidikan dan riset. Karena itulah, kita menerima atau sangat menghargai pendirian ini. Saya tentu juga berterima kasih kepada IsDB. *Thank you very much for your contribution* sehingga dapat kita resmikan lembaga ini.

Namun, lembaga adalah lembaga fisik dalam setiap penelitian, di samping tentu membutuhkan peralatan, yaitu otak orang itu. Jadi inti dari lembaga adalah orang. Dokter-dokter kita yang terdidik di luar negeri mempunyai keahlian, tetapi di Indonesia mereka tidak punya fasilitas yang baik sehingga tetap berada di luar negeri. Mereka tidak salah, cuma manfaatnya berbeda, kebanggaannya berbeda.

Agar kita tidak hanya menjadi konsumen dari penelitian, kita harus memberikan manfaat kepada kemanusiaan dengan penelitian yang baik. Banyak penyakit tropis yang justru tidak diketahui oleh orang lain di Amerika. Pernah satu kali saya pergi berjalan ikut adik saya di Amerika. Rupanya saya terkena demam berdarah. Di Amerika, dokter bingung mendiagnosis penyakit ini. Terpaksa, dokter itu menelepon dokter di Indonesia dan berdiskusi apa penyakitnya ini. Ternyata cuma demam berdarah. Artinya, banyak hal juga yang perlu diajarkan dari negeri ini kepada dokter-dokter lain, tetapi bukan hanya itu tentunya. Begitu luas wilayah dan juga masyarakat Indonesia, semakin tinggi permintaannya.

Kalau orang dahulu hanya puas dengan layanan kesehatan primer. Sekarang, semuanya ingin yang lebih baik lagi. Apalagi, pemerintah memiliki kebijakan yang menjamin layanan kesehatan kepada seluruh rakyat secara universal. Hal itu membutuhkan layanan yang lebih baik lagi, lebih meluas, dan lebih murah.

Layanan kesehatan yang lebih murah dapat terlaksana apabila kita mempunyai pusat pendidikan riset yang baik. Contohnya banyak. Ada obat yang berasal dari bahan yang

sederhana, tetapi dijual mahal berpuluh kali lipat karena risetnya lama.

Pada akhirnya, pemerintah yang harus membayar biaya mahal tersebut. Contohnya, banyak hal yang patennya tinggi, patennya hebat. Kita belajar juga banyak dari India dengan penelitian-penelitian itu. Mereka mesti jauh lebih murah layanan kesehatannya.

Masih banyak masyarakat kita yang tidak mau meminum obat kalau bukan obat paten. Bila tidak mendapat obat luar, mereka merasa kurang mendapat layanan yang baik. Kita tentu perlu juga menyadarkan masyarakat kita bahwa penelitian itu sangat penting.

Kita juga banyak mempunyai kearifan lokal, seperti jamu dan sebagainya. Dunia dewasa ini cenderung kembali ke alam. Kesempatan kita justru menjadi pelopor dalam hal-hal tersebut.

Kita mempunyai kekayaan seperti itu, tetapi perlu penelitian, perlu diuji. Kita tidak akan menghasilkan obat jamu yang dijual di pinggir jalan yang tidak bisa masuk dalam sistem kesehatan kita. Melalui riset yang sesuai dengan standar-standar internasional, kita akan membawa jamu dan obat tradisional Indonesia menjadi bagian dari sistem dunia universal seperti itu. Itulah pentingnya riset ini.

Dan tentu juga, harapan kita adalah pada dokter kita. Mereka sangat dibutuhkan melayani masyarakat Namun, ada juga yang fokus kepada penelitian atau kombinasi antara kesibukan melayani pasien dengan penelitian karena justru itulah yang paling efektif.

Dari dokter-dokter kita yang hebat, dari lima hari kerja sisihkanlah sehari untuk meneliti di sini agar kombinasi, antara melayani pasien dengan riset akan meningkatkan ini. Sebabnya, dokter kita terlalu sibuk hanya melayani pasien.

Hal itu memang sangat penting, tetapi janganlah tergantung pada hal tersebut.

Dan tentu juga karena riset adalah suatu kebutuhan bersama, sehingga tentu dibutuhkan banyak kerja sama di lembaga riset di dunia ini. Mereka juga ingin bekerja sama dengan kita untuk penyakit-penyakit yang ada di negeri ini.

Begitu juga industri. Banyak penelitian, tetapi karena tidak punya hubungan dengan industri, tinggalah hanya hasil penelitian. Karena itulah, maka industri juga harus menghargai dan mengakomodasi atau juga menjadikannya penelitian itu menjadi *the real*. Hanya dunia industri-lah yang dapat menjadikan penelitiannya itu masuk ke masyarakat, ke pasar melewati produksi dan distribusi yang baik. *

Disampaikan pada acara Peresmian Indonesian Medical Education And Research Institute Universitas Indonesia (IMERI UI)
Auditorium FK UI Salemba
Jakarta 12 April 2017

Guru Lebih Pragmatis

Saya pernah berbicara di acara PGRI. Begitu saya berbicara tentang keharusan meningkatkan mutu pendidikan, semua diam. Namun, begitu bicara kesejahteraan, semua tepuk tangan, berkali-kali. Motifnya sudah berubah. Saya prihatin juga di situ, perhatian para guru juga sudah mulai berbeda, lebih pragmatis.

Tentu juga penting pragmatisme. Walaupun secara umum pendapatan guru di sini sudah jauh lebih tinggi dibanding pendapatan provinsi lainnya sekarang, tetapi tetap saja merasa susah. Mungkin saja masih ada telat-telatnya satu persen. Padahal, lebih banyak lagi yang telat, tetapi tidak pernah dibicarakan berapa presentase gaji guru dibanding yang lainnya.

Yang saya ingin katakan, kita mencoba mengubah kembali, mengembalikan marwah guru. Kita dapat melihat perkembangan pendidikan seorang guru. Dulu guru-guru SD, guru SMP, hanya lulusan SGB atau SGA. Mereka tiga tahun sudah mengajar.

Kemudian ada B1, saya ingat B1, guru saya B1, hebat merasa B1. Setelah itu ada PTPG di Tomohon, di Malang, macam-macam. Ada juga PGSLP, baru masuk FKIP, FKIP

masuk IKIP, IKIP ke UNK. Jadi, berapa kali perubahan ini pendidikan guru daripada evolusinya.

Namun, apakah perubahan organisasi itu linear dengan mutu atau tidak, itu pertanyaannya. Tidak banyak negara yang menjadikan konstitusi biaya pendidikan 20 persen dari APBN. Hanya tiga negara di dunia, khususnya Taiwan dengan satu negara Amerika Selatan.

Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa pemerintah tidak perhatian. Sebenarnya pemerintah perhatian, hanya tidak ada. Departemen Pekerjaan Umum (PU) tidak dikatakan dapat sekian persen. Hanya pendidikan saja yang ada di UUD, 20 persen dari APBN. Artinya, korelasinya jangan ditanya bagaimana pendidikan. Begitu bangsa maju, anggarannya naik, tetapi begitu turun, anggarannya turun juga. Jadi terjadi korelasi langsung.

Tidak perlu diragukan kewajiban negara tentang pendidikan. Hal itu sudah jelas. Di bidang kesehatan, di APBN hanya 5 persen. Jadi, hanya tiga negara di dunia yang mencantumkan anggaran dasarnya berapa persen yang harus diberikan kepada pendidikan.

Itu yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa kita sudah berusaha. Anda sudah berusaha dari segi baik. Revolusi lembaga pendidikan guru luar biasa, terutama *step-step* yang telah ditempuh. Namun, apakah terjadi korelasi langsung terhadap mutu pendidikan?

Pada tahun 2003, waktu Menteri Malik Fajar, Ujian Nasional menjadi salah satu yang kita periksa bagaimana mutunya. Mulai dari tahun 90-an selama 50 tahun, ke tahun 2000 mutu pendidikan dilihat dari ujian. Saya terkejut melihat ujian akhir SD dan SMP tahun 1950, dibanding tahun 2000. Saya melihat rumit dan tingginya mutu ujian SD dan SMP tahun 1950.

Kedua, saya periksa ini, untuk supaya lebih jelas *background*-nya. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan mutu. Saya periksa tiga negara. Saya waktu itu mengajak Pak Menteri ke Singapura. Dari Singapura ke Malaysia, Malaysia ke Filipina. Ambil semua ujian aslinya, SD, SMP, dan SMA, tiga mata pelajaran. Jadi matematika, bahasa Inggris dan, Sains. Saya terkejut, ujian matematika dan bahasa Inggris, Singapura SD sama dengan ujian akhir SMP kita. Jadi berarti kita sudah ketinggalan tiga tahun dengan Singapura dari sisi itu. Malaysia kira-kira kita ketinggalan dua tahun. Kita sama dengan Filipina.

Karena itu, negara kita, tingkat ekonominya hampir sama dengan Filipina. Mutu sudah rendah sekali. Karena itu, harus kita hidupkan kembali. Tidak ada cara lain selain membuat Ujian Nasional agar ada standar nasional yang dapat diikuti oleh semuanya. Karena itulah, Ujian Nasional harus ditingkatkan selama program lima tahun, harus naik.

Saya ingin gambarkan lagi pengalaman saya pada waktu itu. Tahun 2003 saya bilang kepada Pak Malik, “Pak Malik coba bikin Ujian Nasional, normal yang angka kelulusannya lima dengan perbaikan standar yang tadi.” Uji coba di luar-luar sekolah hasilnya, 40 persen anak tidak lulus. Pertanyaannya, di mana kita tempatkan 40 persen itu kalau tidak lulus? Naikkan tingkat kelulusan, turunkan nilai kelulusan jadi 4. masih 25 persen yang tidak lulus, susah sekali. Terpaksa angka kelulusan diturunkan 3,5 persen. Waktu itu 3,5 persen anak tidak lulus.

Bayangkan mutu kita, sekolah kita. Salah satu kesalahannya karena teori ahli pendidik yang mendongkrak angka di daerah-daerah. Kalau angka di Jakarta enam, di Sulawesi Tenggara angka empat menjadi enam. Saya bilang, itulah pembodohan nasional. Marah saya. Kenapa? Semua terori yang dibuat harus dihapus. Biar saja mereka tidak lulus tahun

ini agar terwujud standar nasional. Otak kita sama semua. Maka terjadilah keributan.

Saya bilang, kalau kau mau bakar sekolahmu, bakar sekolahmu hari ini, saya tidak soal. Yang penting standar nasional ditertibkan. Itulah yang terjadi. Saya tunggu lima tahun. Sekarang saya bersyukur sudah angka enam. Angka 5,5 dan enam dibebaskan angka enam.

Dulu 3,5 persen orang tidak lulus akibat sistem itu. Jadi, mulai dosa, terjadi degradasi, terjadi peningkatan derajat pendidikan guru, terjadi degradasi yang luar biasa secara nasional.

Walaupun tentu telah terjadi banyak perdebatan mengenai perbaikan yang kita lalui. Padahal saya bilang, apa yang membedakan orang di NTT, di NTB, atau Bengkulu? Tidak ada. Semua guru juga tamatan IKIP. Sekolah antaranya sama, perpustakaannya sama, gurunya sama, gajinya sama. Kenapa berbeda hasilnya?

Saya ambil kesimpulan, budaya belajar yang berbeda, budaya belajar orang Yogya, berbeda. Karena itu, dibikin lagi program pertukaran kepala sekolah di antara daerah-daerah supaya ada budaya belajar yang baik.

Saya menggambarkan terlebih dulu kondisi kita. Karena itulah saya katakan, apa yang harus diperbaiki? Semua hal diperbaiki, tetapi kita sudah berusaha ke situ. Jadi yang dibutuhkan adalah kedisiplinan tinggi menjaga kualitas pendidikan. Karena itulah, kita harus melihat mutu dan jumlah, apakah kita menghasilkan guru sebanyak mungkin atau kita menghasilkan yang berkualitas baik.

Karena itu saya bilang, guru itu ada rohnya. Jadi tentu harus dinilai lagi. Saat kita membuat pendidikan spesial untuk para guru, apakah zaman SKIP atau zaman PTPG, harus berbeda dengan sekarang menjadi universitas. Berbeda kalau

kita mengubah alur berpikir. Sekarang Anda pintar dulu, baru diajar metodenya mengajar. Dulu diajar bersamaan.

Dulu jelas ada guru matematika, ada guru fisika, atau guru biologi. Ini merupakan pilihan-pilihan metodis yang harus kita berikan. Namun, intinya, kita butuh anak, butuh pendidikan. Tujuan pendidikan semua sama sejak 50 tahun, sama-sama orang pintar. Sekarang mau ditambah-tambah sistem UU Pendidikan yang panjang itu. Mau beradab, beragama, berilmu, terserahlah sepanjang tujuan pendidikan sama.

Banyak orang mengatakan, “Oh, kenapa selalu ganti kurikulum?” Iya kan situasi ke depan selalu berubah-ubah, ya kurikulum harus kita ubah. Asal jangan tiap dua tahun diubah. Kalau setiap 10 tahun, okelah, karena masa depan juga harus diubah. Tidak apa-apa selama itu tidak memberikan kegugupan pada guru. Kadang-kadang juga perubahan menyebabkan guru gugup melihat situasi itu. Itu masalahnya. Sekarang kalau kita lihat masa depan, kita butuh apa.

Karena itu, selalu masalahnya kita butuh orang yang punya *skill* atau kita butuh orang yang inovatif. Kedua-duanya kita butuhkan. Karena itulah yang selalu saya ingin, dan pernah diskusikan. Kita butuh *skill* dan kita butuh orang yang berinovasi, berkreasi.

Skill itu sama dengan di Korea, sama di Jepang. Akibat pendidikan seperti itu, akhirnya pilihan-pilihannya kecil. Kalau Amerika, dia mengutamakan kreativitas. Karena alam demokrasi butuh kreativitas, tetapi juga inovasi.

Karena itu, jangan coba membandingkan matematika anak Amerika dengan anak Korea, pasti Amerika kalah, atau Jerman. Karena itu, kalau dipisah rangkingnya, rangking Amerika itu nomor 28, tetapi ekonomi dunia tetap dipegang Amerika karena dunia sekarang butuh kreativitas, inovasi.

Namun, untuk pabrik ada di China, ada di Korea, ada di Jepang, ada di Jerman.

Jadi saya kira, semuanya bisa terjadi. Terlalu banyak kejujuran, tetapi kompetensinya kurang. Gurunya kurang atau lapangan kerja kurang. Ini untuk mengatakan, kita juga telah memilih *skill* itu, tetapi keberhasilannya tidak besar. Ini juga ada hubungannya dengan suatu penilaian.

Kenapa kita sudah 71 tahun merdeka, tetapi masih kalah dari banyak negara. Kita kalah dengan Singapura, kita kalah dari segi ekonomi, kita kalah dari Malaysia, kita kalah dari Thailand. Sekarang kita terkejar oleh Vietnam. Padahal Vietnam baru lepas dari perang, hancur-hancuran, tetapi dia kejar kita. Kita masih lebih baik, tetapi dia akan lebih cepat.

Jadi pertanyaan yang selalu fundamental *and then*, bagaimana kita meningkatkan mutu dan bagaimana meningkatkan kepercayaan guru mengajar? Bagaimana meningkatkan kecintaannya pada pelajar? Bukan hanya begitu sedikit tunjangan, terlambat, langsung demo. Ya, bagaimana?

Kemarin saya ke Sumatera naik mobil. Biasalah di daerahlah itu sering murid-murid dibariskan di tengah jalan, kadang-kadang juga kita lawan, tetapi mereka juga senang membawa bendera. Saya bilang sama gurunya, “Tahu nggak di mana guru SD dalam barisan itu? Kalau ada yang memakai pakaian safari yang lusuh, kemudian berdiri mengawal, itu guru SD. Jadi safari lusuh itu pasti dan ada cap pemda.”

Saya tanya, “Apakah relevan guru itu dijadikan birokrat untuk menjadi selalu cap kabupaten? Persis dulu, pegawai harian pemda. Ya, sedikit lebih bersifat netral, mungkin kita akan pelajari itu. Asal jangan dia dimasukkan dalam birokrasi daerah, provinsi daerah. Lihat saja semua, pokoknya safari ada cap kiri, kanan diknas. Itu untuk melihat kondisi itu.”

Namun, tentu yang paling penting bagi kita, membuat sesuatu karena kebutuhan guru. Selalu kira-kira, kita butuh

guru setiap tahun. Lihat saja sekarang. Guru kita kurang lebih tiga juta, PNS kurang lebih dua juta. Kalau penduduk bertambah 1,5 persen per tahun, guru kalau kerja 30 tahun hanya pensiun 3 persen, jadi 4,5 persen. Kalau guru tiga juta berarti setidaknya-tidaknya 100.000 guru dibutuhkan setiap tahun.

Jadi, tiap tahun mesti ada guru baru 4,5 persen dari jumlah guru yang ada sekarang. Jadi ketemunya kira-kira 100.000 per tahun. Kalau pegawai negeri kira-kira 80.000. Memang sudah dibahas berkali-kali. Contohnya, apakah kita kurang guru atau tidak kurang? Yang pasti cuma kurang terbagi merata.

Karena itulah, kita menyusun kenapa guru SMA dinaikkan ke provinsi. Guru SMA perlu diputar dalam tingkat provinsi. Kalau di kabupaten dia berputar-putar saja di situ. Malah, katakanlah kalau dia di golongan 2, dia menjadi pegawai nasional agar dapat kembali menjadi perekat nasional. Guru dari Jawa bisa mengajar di Sulawesi, walaupun tidak mudah seperti dulu.

Jadi itu masalahnya, bagaimana mutunya? Kenapa dulu guru dengan golongan yang terbatas bisa mengajar dengan hasil yang bagus? Siapakah yang turun mutunya? SMA yang turun mutunya atau guru turun mutunya, tentu keduanya. Kenapa kita harus ketatkan semua itu?

Ada suatu tren yang berbahaya. Saya berbicara panjang dengan Menteri Pendidikan untuk mempelajari tren. Ada tren kasta, kasta sekolah negeri, dan kasta sekolah swasta yang baik. Saya bilang, termasuk Labschool-nya UNJ yang selalu saya kritik. Tentang Labschool, saya katakan bahwa bukan outputnya yang baik, tetapi inputnya yang baik. Sekolah yang demikian itu bukan sekolah yang baik. Bagaimana tidak bagus, Labschool karena yang masuk terbatas dan IP-nya tinggi, NEM-nya tinggi. Masuk di situ keluar juga dengan NEM tinggi.

Itu bukan sekolah baik. Sekolah yang baik itu apabila bisa menerima mereka dengan NEM yang rendah kemudian menghasilkan NEM yang tinggi.

Nah, itulah yang harus diteliti. Bukan persoalan akan munculnya kasta baru. Anak yang sekolah internasional dapat membayar puluhan juta, ratusan juta malah, kemudian sekolah negeri menanggung. Hanya golongan menengah yang mampu lari semua ke sini.

Jadi, karena itu kita menciptakan lagi sekolah unggulan di daerah-daerah. Jangan haramkan membayar uang sekolah. Kalau subsidi, yang tidak mampu tidak bayar, tetapi yang orangtuanya mampu, ya bayar, supaya kesejahteraan guru meningkat, sehingga bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang premium.

Sekolah itu baik. Buat apa kita sekolah di luar negeri, tetapi menimbulkan kelas-kelas baru di daerah. Dulu banyak sekolah negeri yang bagus, tetapi masyarakat selalu kritis, tidak boleh bayar. Semua, *free, free, free, free*. *

Disampaikan pada acara
Eksekutif Briefing kepada Para Pimpinan Perguruan Tinggi yang Tergabung Dalam
Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia (ALPTKNI)
Di Gedung II Istana Wakil Presiden
07 September 2016

Sekolah untuk Pengusaha

Saat saya diminta untuk berbicara tentang bagaimana meningkatkan kemampuan di bidang kewirausahaan, pertanyaannya selalu apa tujuan hidup kita ini? Di mana pun jawabannya selalu adalah ingin sejahtera. Karena itu, tujuan berbangsa adil makmur dan sejahtera.

Untuk sejahtera harus ada apa? Harus ada pendapatan. Tidak ada orang sejahtera tanpa pendapatan. Di sini orang harus punya pendapatan. Pendapatan bisa berbagai macam sumbernya, bisa dari gaji, atau hasil usaha sendiri. Jadi cuma dua saja sumber pendapatan itu, dari gaji atau dari hasil usaha. Ada juga jenis pendapatan lain, yaitu korupsi. Akan tetapi anda bisa masuk penjara.

Untuk mendapatkan gaji kita bisa menjadi pegawai negeri, atau swasta. Namun, khusus untuk menjadi pegawai negeri, dalam lima tahun ini jangan berharap banyak dulu, karena kita sedang moratorium. Jumlah pegawai negeri sudah kebanyakan. Akan dikurangi 1 juta. Artinya kalau ada pensiun 100 pegawai, maka yang diterima hanya 50 orang. Jadi, dikurangi setengah terus selama lima tahun, dan yang bisa diterima hanya guru, dokter, dan peneliti serta petugas yang penting sekali. Untuk pegawai administrasi tidak ada lagi, selama lima tahun.

Jadi lowongan untuk menjadi pegawai pemerintah kian terbatas. Apa yang terbuka? Tentu saja pegawai swasta atau yang paling luas terbuka, yakni bekerja sendiri, atau mempekerjakan orang. Itulah kewirausahaan, yakni membuka usaha. Jadi kesempatan yang paling luas di sana.

Menjadi pengusaha tidak ada sekolahnya. Sekiranya ada sekolah yang bisa menjadikan orang begitu tamat langsung jadi pengusaha maka hebatlah negeri ini. Kita bisa kalahkan orang China. Akan tetapi, sulitnya tidak ada sekolah yang seperti itu .

Di dunia ini, orang yang paling hebat dan pengusaha paling kaya justru tidak tamat sekolahnya, yakni Bill Gates. Mark Zuckerberg, yang produknya selalu Anda pakai tidak tamat. Bapak saya juga hanya Sekolah Dasar. Akan tetapi, dia pengusaha besar. Saya cuma ikut bapak saya. Akan tetapi, sering saya katakan, mereka tidak tamat sekolah saja hebat apalagi kalau kita yang tamat sekolah.

Menjadi pengusaha itu layaknya orang belajar naik sepeda atau berenang. Anda boleh membaca segala buku tentang keseimbangan, kemudian naik sepeda, tapi tetap jatuh juga. Atau Anda boleh membaca semua buku tentang teori berenang, gaya bebas, maupun gaya kupu-kupu. Anda ke laut berenang, tenggelam juga, minum air juga. Namun, kalau Anda mulai dari tepi kemudian pelan-pelan ke tengah nanti akan bisa juga. Menjadi pengusaha tidak ada teorinya, tidak ada sekolahnya, yang ada ialah keberanian untuk memulai.

Jadi yang sangat penting ialah memulainya dengan hal yang kecil kecil. Itu yang paling susah dari menjadi pengusaha, keberanian untuk memulai. Anda boleh punya segalanya tapi kalau tidak berani memulai susah juga. Untuk itu, pemerintah juga akan membantu modal karena ini masalah utama, yakni modal. Maka pemerintah akan meminjamkan dengan bunga yang rendah agar anak muda bisa jadi pengusaha.

Kemudian pertanyaan, dari mana sumber yang memulai itu? Ada tiga sumber pengusaha itu sebenarnya. *Pertama*, sumber keluarga, seperti saya. Bapak saya pengusaha, maka saya jadi pengusaha dan saya ikuti Bapak saya, anak saya ikut saya, jadi generasi ketiga, generasi keempat, itu banyak. *Kedua*, dari pengalaman, mungkin selama ini Anda kerja di toko, kerja di perusahaan, jadi kerja ikut kontraktor, ikut toko. Saat itu dia pikir, "oh rasanya begini orang buka toko, ah saya buka toko juga." Nah, itu pengalaman yang ada dipakai. *Ketiga*, muncul dari kreativitas karena sekarang zamannya teknologi, orang makin mudah berusaha. Orang dapat berjualan *online* atau membikin suatu aplikasi seperti gojek. Semua generasi muda dewasa ini muncul di dunia ini dengan semudah mempergunakan ilmu untuk berusaha, teknologi untuk berusaha.

Sekarang tidak ada jarak bagi Anda semua. Mau berjualan apa saja tidak usah ke Jakarta. Di Sumbawa Anda bisa jualan untuk pembeli di Jakarta dengan *online*. Beda zaman dulu, Anda mesti datang ke Jakarta untuk jualan. Sekarang menjual sesuatu, barang ini, barang apa, hasil apa, susu sapi atau susu kerbau contohnya, buah-buahan atau apa pun, bisa dari sini menjualnya ke tempat lain, susu kuda liar ya, semua bisa.

Sering saya katakan, salah satu ketinggalan kita adalah di dunia usaha. Kita tidak bicara ras, tetapi kenyataan kita yang bicara, ialah sebagian besar pengusaha yang besar itu ya sahabat-sahabat kita dari orang Tionghoa, setidak-tidaknya di kota-kota besar, akhirnya kita jadi konsumen. Sekarang harus kita gerakkan yang kecil ke atas, bukan menurunkan yang besar, tapi yang kecil menjadi besar, supaya banyak yang besar di mana-mana. Hanya itu yang bisa membangun bangsa ini untuk bersatu. Kalau pincang, bangsa ini akan bahaya. Akan tetapi, kalau tidak ada semangat bagaimana caranya?

Jadi, di sini kita bicara semangat. Kita bicara keberanian tekad memulai. Kita bicara tentang menambah kemungkinan.

Jadi apabila saya ingin, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan ialah keberanian untuk memulai. Pergunakan ilmu dan teknologi Anda untuk mengubah sesuatu menjadi lebih bernilai, mempunyai tekad dan kerajinan serta membina kepercayaan, selesai. Tidak ada ilmunya. Anda boleh belajar investasi apa saja. Di dunia tidak ada ilmu untuk berdagang. Di Harvard ada teori, tamatan Harvard terpintar itu akan menjadi konsultan karena hanya orang pintar yang bisa jadi konsultan. Orang bodoh tidak bisa, yang dapat A jadi konsultan. Yang dapat B, dia jadi manajer hebat. Kemudian yang C jadi apa? Jadi pengusaha yang mempekerjakan A dan B tadi itu saja. Sederhana, karena kalau dapat C, dia tidak bisa jadi konsultan, tidak bisa jadi manajer. Tetapi bukan berarti saya minta mengajarkan anak dapat C. Karena dapat C saja jadi pengusaha hebat, apalagi kalau di A. Itu kira-kira teorinya, kembali, kita balik saja. *

Disampaikan Pada Saat
Memberikan Kuliah Umum Kepada Mahasiswa dan Civitas Akademika Universitas
Samawa Sumbawa, NTB
Di Kampus Universitas Samawa Sumbawa,
NTB 19 Juli 2016

Tidur di Gontor

Pendidikan sebenarnya hampir sama dengan restoran. Bukan tempatnya yang mencari pembeli, tetapi makanannya yang dicari. Jadi walaupun restoran itu ada di jalan kecil, tetapi makanannya enak, orang akan datang.

Begitu juga Pesantren Gontor. Dulu bapak saya tiap enam bulan datang ke sini. Saya tanya, bagaimana caranya sampai ke Gontor? Ya, kita ke Surabaya, turun ke Surabaya naik bus sampai ke Ponorogo. Dari situ naik dokar. Tiap enam bulan pasti datang, tidur seminggu untuk melihat anak dan cucunya.

Itulah bagaimana kita menghargai atas pendidikan yang telah dikelola secara sebaik. Pertanyaannya, apa yang harus kita hadapi ke depan karena pendidikan itu harus melihat ke depan?

Modern itu, bukan hanya kalau pakai jas, tetapi modern adalah pemikiran dan perilakunya. Sebagai bangsa yang besar ini, Islam di Indonesia selalu kita banggakan kepada dua hal saja. Pertama, Indonesia yang berpenduduk umat Islam terbesar di dunia. Karena itu, suatu waktu ada ustaz pidato, taziah di rumah saya waktu Ramadhan mengatakan, melihat begitu banyaknya orang Indonesia yang umroh. Karena itu saya yakin nanti pasti dia bilang, bukan lagi yakin, tetapi pasti,

bahwa nanti di surga yang paling banyak orang Indonesia. Lebih banyak daripada orang Arab Saudi.

Kenapa? Karena kalau 50 persen saja orang Indonesia masuk surga, itu sudah 100-125 juta orang hari ini, sementara penduduk Arab Saudi hanya 10 juta. Namun, saya jawab, “Ustaz, kalau masuk neraka 50 persen, ya paling banyak juga orang Indonesia”

Kedua, yang selalu kita kemukakan, ini umat yang moderat, umat yang selalu mempunyai pikiran yang berada di tengah *wasathiyah*, moderat, selalu memakai jalan tengah. Lebih dari itu, tidak ada lagi hal yang kita kemukakan.

Bicara keilmuan, sering saya katakan, kalau kita masuk toko buku, cari buku agama 90 persen terjemahan. Semenjak Pak Hamka mempunyai bukunya yang banyak, tidak banyak lagi buku-buku Islam yang beredar di luar negeri selain beliau. Itu kalau keilmuan diukur dari buku. Ekonomi juga begitu begitu. Begitu kita bicara tentang ekonomi, maka toko, pabrik, industri, dagang hampir 90 persen non muslim.

Jadi apabila kita ingin berpikir ke depan, tentu hal yang menjadi bagian pemikiran kita, bagaimana mendidik anak-anak Indonesia di samping jumlahnya, pemikiran moderat *wasathiyah*, ilmunya tinggi, juga spirit dunia usaha yang tinggi, produktivitasnya yang tinggi.

Dulu setiap orang masuk Pesantren Gontor, dua hal yang selalu dibanggakan, bisa Bahasa Arab dan bisa Bahasa Inggris. Itu benar. Namun, bagaimana yang lain? Kekurangan kita itu yang harus kita perbaiki.

Di dunia ini ada dua pemikiran tentang pendidikan, arahnya ke mana. Di Eropa, di China, di Inggris, di Jepang, pemikirannya *skill*, kemampuan.

Karena itulah pendidikan tentang keterampilan sangat penting. Namun, di negara lain seperti di Amerika, pikirannya inovasi, kreativitas. Karena itulah bagaimana misi dan visi

Gontor membentuk anak agar punya pikiran yang luas dan pemikiran yang lebih bebas. Tentu tidak berperilaku bebas, tetapi pikiran yang lebih luas dan bebas. Itu artinya akan menghasilkan kreativitas dan inovasi.

Kita butuhkan anak-anak yang pintar matematika. Itu pasti dibutuhkan *science*. Itulah kenapa Jepang, Korea, China menjadi ekonomi yang kuat, tetapi ekonomi nomor satu tetap Amerika karena kekuatannya inovasi dan kreativitas yang berasal dari pemikiran yang terbuka.

Karena itulah, generasi unggul yang diinginkan adalah generasi yang dapat berbicara ke depan, menguasai ilmu ke depan, mempunyai kemampuan berpikir pada 10 tahun yang akan datang. Bukan hanya berpikir kebanggaan masa lalu.

Memang pedih juga apabila kita melihat dunia Islam hari ini. Yang kita dilihat di TV hanya bom, penghancuran, kematian, pengungsian. Saya katakan dalam pertemuan di Jakarta, apabila bicara tentang Islam, kita bicara hijrah. Bagaimana *Rasulullah* hijrah dari Mekkah ke Madinah. Namun, yang terjadi sekarang umat Islam hijrah dari Irak, Suria ke Eropa.

Saya katakan, kita juga terima juga apabila mau hijrah ke Indonesia, tetapi tidak ada yang mau ke Indonesia karena ekonomi kita tidak maju. Dia ingin mendapat kerja yang lebih baik di Eropa, lebih aman. Itulah masalah dunia Islam dewasa ini.

Karena itulah, pengembangan universitas Islam di sini, itu lebih baik karena memang agak sulit berbicara apabila kita ingin mengirim anak kita sekolah di Yaman, di Suria, di Saudi, di Mesir pada dewasa ini karena ujung dari agama hanyalah peradaban dan akhlak.

Saat Islam di negara-negara Timur Tengah tidak lagi menghargai peradaban dan akhlak, apalagi yang bisa kita pelajari dari sana? Kalau belajar *fiqih* di mana-mana kita bisa

belajar. Belajar *aqidah* di mana pun kita boleh belajar. Namun, *akhlaq* dan peradaban betul-betul harus kita lihat praktiknya, tentu di samping niat membesarkan universitas kita.

Sekarang juga ada proses pendirian universitas yang lebih besar untuk riset di Jakarta. Menteri Agama sedang memprosesnya supaya Indonesia bukan hanya menjadi tempat mencari pembantu rumah tangga, tetapi juga mencari ustaz di Indonesia. Kita tidak hanya ingin bangga kepada jumlah dan sifat. Kita juga harus bangga kepada kemampuan kita. Ini tentu kita harus usahakan.

Itulah yang selalu menjadi bagian dari upaya merealisasikan tentang ke-Islaman, keilmuan, dan kemasyarakatan. Memasyarakatkan, artinya mempraktikkan keilmuan. ✱

Disampaikan Pada Acara
Peringatan 90 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor dan Peresmian Asrama
Mahasiswa Universitas Darussalam Gontor
Di Pondok Modern Darussalam Gontor, Kabupaten Ponorogo
Provinsi Jawa Timur
20 Agustus 2016

Ilmuwan Islam

Berbicara tentang keislaman, selalu ada dua hal yang sering kita banggakan. *Pertama*, fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Dari sekitar 255 juta penduduk negeri ini, 90 persen adalah umat Islam. Berarti hampir 210 juta penduduk Indonesia adalah muslim. Penduduk muslim terbesar kedua di dunia adalah India dengan jumlah hanya sekitar 180 juta jiwa.

Kebanggaan kedua kita sebagai Islam di Indonesia adalah seperti tema muktamar. *Wasathiyah* adalah jalan tengah, moderasi, dan toleransi. Kita bersyukur atas kondisi seperti itu.

Kadang kala kita berpikir apakah itu cukup? Tentu belum cukup hanya dengan dua hal tersebut, jumlah dan suasana pemikiran *wasathiyah* atau moderasi. Tetapi itu adalah modal yang sangat besar untuk bangsa ini.

Kita memahami sebagai bangsa bahwa Islam bukan hanya sebagai agama, melainkan juga suatu cara hidup kita yang damai di negeri ini. Kita saling menghargai, baik sesama muslim maupun dengan umat agama lain.

Tidak banyak negara di dunia ini, di mana organisasi Islam yang bekerja untuk kemaslahatan umat dan bangsanya.

Selain itu, juga bekerja untuk kedamaian bersama agar bangsa yang besar ini dapat bertahan.

Tentu banyak hal yang harus menjadi tugas kita bahwa selain kita bangga akan jumlah dan toleransi kita, *wasathiyah* kita, juga harus lebih memakmurkan umat kita. Kita tidak hanya bangga pada jumlah, tetapi harus bangga pada kualitas umat itu sendiri.

Umat yang besar di bangsa yang besar harus mempunyai peranan di semua aspek. Kita mempunyai peranan yang baik di bidang pemerintahan, di bidang politik, dan sebagainya. Dan untuk peran tersebut, saya rasa umat Islam cukup berperan. Namun, umat Islam di Indonesia masih kurang berperan dalam bidang keilmuan, secara mendunia.

Contohnya, kalau kita masuk ke toko-toko buku yang menjual buku-buku Islam, 90 persen buku yang dijualnya adalah buku terjemahan atau buku yang ditulis oleh ulama luar. Kita belum memiliki ilmuwan penulis yang cukup dihargai secara internasional.

Apalagi kalau kita berbicara tentang kemampuan dalam bidang ekonomi pengusaha-pengusaha besar. Saya selalu katakan, apabila ada 100 orang yang kaya di Indonesia, maka 90 persen diyakini bukan umat Islam. Artinya hanya sekitar 10 persen umat Islam yang menguasai sektor ekonomi.

Demikian pula sebaliknya, bila ada 100 orang miskin, maka 90 persennya adalah umat Muslim.

Para ulama atau ustaz kalau ada pernikahan berpidato, "*annikahu sunnati*". Padahal, Rasullulah sebelum nikah, "*attijarah*", jadi mesti "*attijarah sunnati*", berdagang itu sunah Rasullulah. Tetapi tidak pernah pidatokan itu, hanya "*annikahu sunnati*" saja terus. Akhirnya makin banyak orang nikah.

“*Attijarah sunnati*” sehingga kita dapat melaksanakan zakat yang baik. Hanya orang yang mampu yang berzakat dengan lebih banyak.

Jadi marilah kita di samping bangga akan jumlah, di samping bangga sebagai posisi *wasathiyah*, moderasi yang aman, kita juga harus mempunyai peran yang lebih besar lagi.

Bagaimana melaksanakan doa “*rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhirati hasanah*” itu yang menjadi bagian utama tugas kita. Semuanya untuk memajukan bangsa ini, sekaligus tentu bersama-sama memajukan umat ini. Dengan demikian, barulah kita bisa berdiri sejajar dengan siapa saja di antara bangsa-bangsa lain di dunia ini. Berdiri bersama-sama dengan kemampuan sendiri, kemampuan ekonomi, kemampuan ilmiah, dan sebagainya.

Pemerintah berupaya menciptakan pemerataan yang baik. Sedangkan organisasi Islam dalam berdakwah jangan hanya berdakwah bagaimana kita melaksanakan ibadah, bagaimana melaksanakan akhlak, tetapi juga bagaimana berdakwah tentang kehidupan yang lebih baik. Seperti doa yang selalu kita lafalkan, selalu ditutup dengan “*rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhirati hasanah*”. Doa tersebut merupakan keinginan kita untuk mencapai kebahagiaan dunia, kemudian baru mencapai kebahagiaan akhirat. Artinya hal yang ideal adalah bahagia di dunia dulu, kemudian berbahagia di akhirat karena mencapai kebahagiaan akhirat selalu harus mempunyai modal yang baik, modalnya kesehatan, modalnya kesempatan, modal materi, ataupun modal-modal yang lainnya.

Karena itulah, baik NU, Muhammadiyah, maupun ormas Islam lainnya harus tahu bahwa program di bidang ekonomi sangat penting. Harus ada kebanggaan, dan jangan nanti

muktamar baru mau memberikan sumbangan, tetapi setiap saat kita harus memberikan sumbangan kepada umat. ✱

Disampaikan pada acara
Pembukaan Muktamar III Wahdah Islamiyah
Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, 19 Juli 2016

Indeks

A

Abdullah, Husain iv, xiii, 234, 237
Abubakar 23
Aceh 67
adil 3, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 33, 34, 37,
38, 40, 45, 53, 63, 65, 68, 73,
113, 121, 123, 127, 140, 198,
269, 291, 301, 326, 335, 342,
343, 358
Afganistan 7, 256, 272
Afrika 37
Ahmadinejad 35
Al Qaeda 256
amar ma'ruf nahi munkar 56
Ambon 4, 5, 15, 38, 67, 226, 227,
257, 265
Amerika 41, 106, 116
Amerika Serikat 51
Amiruddin, Achmad 79
anggaran operasional pemerintah
75
anggota G20 53
APBN 76
Arab Saudi 106, 138
Arab Spring 16, 19, 45, 52, 226

Arab Springs 66
Argentina 106
ASEAN 41, 42, 52, 53, 68, 69, 101,
102, 191, 275, 312
Asia 116
Australia 41
Tax amnesty 85

B

bambu 200, 201, 202
Bank Indonesia 111, 121, 122, 124
bank sampah 205
Bappenas 58, 78
batu bara 114, 175, 176, 179, 182,
183, 184, 185, 191, 192
Bawaslu 276
Bhinneka Tunggal Ika 4, 151
Borobudur 46, 107, 156, 297
BPJS Kesehatan 150
Brexit 96, 105
BRI 26, 33, 88, 90, 91, 92, 174
Brunei 16

Buddha 5, 7, 16
BULOG 161, 162, 164, 166, 167,
168
BUMN 133, 134, 135, 136, 137, 143

C

carbon trading 208
Castro 35
Chaves 35
China 12, 36, 41, 51, 84, 94, 99,
101, 105, 106, 109, 116, 118,
122, 157, 167, 177, 222, 238,
247, 271, 272, 305, 355, 359,
363, 364

D

Dana Alokasi Khusus 312
Dana Alokasi Umum 312
demokrasi 68, 69, 256, 257, 267,
281, 282, 284, 288, 304, 318
deregulasi 96, 315, 323
diesel 114, 173, 175, 176
DI TII 5
DPR 24, 25, 39, 50, 65, 94, 275, 284,
289, 291, 295, 296
dwelling time 113

E

ekonomi nasional 73

energi 59, 60, 103, 114, 173, 174,
175, 176, 177, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193,
194, 257

energi biru 176
entrepreneurship 39, 89, 96
Eropa 51, 106, 116
executive order 37

F

fakultas kedokteran 332, 333, 334
fakultas teknik 334, 342
Filipina 109

G

GAM 5
gas turbin 175
Gates, Bill 88, 91, 359
GBHN 133
BUMN 133
koperasi 133
swasta 133
geothermal 176, 177, 179, 182, 183,
187, 188, 189, 191, 192
gini ratio 19, 43, 45, 52, 53, 66, 89
Gojek 224, 229, 231
Golkar 10, 277, 282, 283, 284, 285,
291
Gontor 362, 363, 364, 365
gratifikasi 321
Gulen 22
Gulen, Fethullah 20

H

Habibie 24
Hamu, Alwi 23
hidup rukun 3

I

Ibrahim, Husain 81
ICMI 22
India 36, 37, 95, 107, 109, 275, 282,
348, 366
Indonesia iv, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 15,
16, 17, 20, 27, 29, 32, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 43, 46, 52, 53,
55, 57, 63, 67, 68, 69, 70, 83,
89, 96, 98, 101, 102, 103,
107, 109, 110, 111, 119, 121,
122, 124, 125, 126, 129, 130,
135, 137, 140, 142, 143, 144,
150, 151, 152, 157, 159, 163,
165, 167, 171, 175, 177, 179,
180, 183, 184, 191, 194, 196,
201, 203, 207, 209, 213, 216,
221, 223, 225, 229, 230, 231,
232, 234, 239, 240, 243, 245,
251, 252, 253, 255, 259, 261,
262, 264, 266, 267, 268, 269,
270, 271, 276, 280, 281, 282,
287, 288, 289, 292, 294, 296,
301, 306, 309, 324, 328, 331,
332, 337, 338, 340, 343, 344,
346, 347, 349, 357, 362, 363,
364, 365, 366, 367
industri 31, 38, 41, 47, 63, 64, 92,
113, 114, 115, 126, 144, 145,
146, 147, 153, 171, 172, 173,
177, 178, 180, 183, 184, 190,
193, 208, 214, 216, 217, 218,
219, 220, 221, 231, 315, 324,
335, 349, 363

infrastruktur 59, 60, 67, 101, 103,
122, 130, 131, 132, 138, 139,
146, 154, 173, 176

inovasi xi, 17, 42, 43, 44, 66, 86,
120, 221, 222, 229, 230, 311,
313, 324, 326, 354, 363, 364

investasi 36, 73, 74, 103, 112, 113,
114, 124, 129, 131, 132, 133,
139, 158, 192, 194, 213, 219,
220, 229, 230, 305, 315, 361

Irak 5, 7, 16, 66, 106, 107, 252, 253,
255, 256, 258, 264, 265, 268,
272, 364

Iran 16, 35, 106, 238, 271

ISEI 33

Islam xi, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16,
20, 22, 36, 46, 55, 56, 57, 63,
107, 251, 252, 253, 254, 255,
256, 257, 258, 259, 260, 261,
264, 265, 266, 362, 363, 364,
366, 367, 368

IT pajak 140

J

Jakarta iv
Jaringan Wartawan Anti-Hoaks
(Jawah) 239

Jaringan Wartawan Anti-Hoax
(Jawarah) 240

Jepang 12, 36, 41, 51, 129, 157, 159,
180, 183, 192, 207, 272, 354,
355, 363, 364

K

Kadin 80

KADIN 33, 80, 81, 83, 86, 93, 96
 Kamboja 36
 Katolik 5, 20, 63
 keadilan xiii, 6, 13, 14, 15, 17, 18,
 25, 44, 52, 63, 64, 66, 68, 70,
 112, 123, 139, 260, 269, 287,
 290, 292, 320
 keadilan sosial 13
 kesenjangan di dunia 13
 kesenjangan ekonomi 68, 69
 ketahanan 59, 60, 190, 194
 ketahanan pangan 60
 ketidakadilan 5, 15, 16, 33, 38, 52,
 53, 113, 123, 126, 139, 320
 ketidakseimbangan ekonomi dan
 politik 67, 70
 Khadijah, Siti 23
 Kim Jong Un 35
 knowledge economy 221
 Kompas iv
 KompasTV 234
 komunikasi 229, 230, 231, 305,
 312, 313
 konflik eksternal 225
 konflik internal 225
 Konghucu 16
 konten 178, 233
 Korea 51, 117
 korupsi 60, 61, 110, 114, 286, 287,
 288, 289, 290, 292, 294, 295,
 296, 321
 KPU 276, 278, 289, 296
 kreativitas 43, 79, 86, 222, 229, 235,
 304, 309, 326, 354, 363, 364
 Kredit Canda Kulak (KCK) 126
 Kredit Investasi Kecil (KIK) 126
 Kredit Modal Kerja permanen
 (KMKP) 126
 kredit murah 65

Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes)
 126
 krisis 1998 125
 Kristen 5, 6, 7, 16
 KUR xiii, 15, 21, 24, 25, 26, 33, 44,
 49, 112, 123
 Kusuma, Buyung Wijaya 241
 Kuwait 138

L
 labour intensive 139
 lakum dinukum waliyadin 10
 Laos 36
 lembaga keuangan 53, 54, 112, 116,
 117, 118, 120, 125, 126
 Libya 7, 16, 66, 106, 107, 252, 265
 Light Train 131
 lingkungan 47, 67, 162, 184, 192,
 196, 197, 198, 199, 200, 201,
 204, 206, 207, 208, 209, 301
 link and match 218
 listrik 11, 75, 77, 103, 104, 114,
 149, 158, 171, 172, 173, 174,
 176, 177, 178, 179, 180, 183,
 184, 185, 187, 188, 189, 190,
 192, 193, 216, 229, 246, 290,
 296, 307

M
 magang 343
 Mahmud, Aksa 23
 Majelis Ulama 23, 24, 26, 28, 29,
 55, 56, 57

Malaysia 16, 23, 24, 41, 42, 53, 59,
 109, 110, 112, 119, 122, 123,
 135, 142, 153, 162, 191, 269,
 272, 275, 282, 319, 322, 332,
 352, 355
 Ma'ruf, Kiai 56
 masa keterbukaan 134
 masa konglomerasi 134
 masa monopoli 134
 Masyarakat Ekonomi ASEAN 69
 MEA 52, 101
 media massa 244
 media sosial 226, 227, 228
 memajukan bangsa 36, 53, 219,
 223, 301, 309, 368
 menghormati perbedaan 3, 4
 menjual budaya 159
 Mesir 16, 66, 163, 261, 364
 Monorail 131
 Muhammadiyah 13, 14, 18, 26, 40,
 47, 49, 50, 57, 64, 368
 multiplayer effect 76, 144, 145
 museum 331

N
 negara-negara Islam 6, 10, 253,
 254, 255, 256, 260, 265, 266
 nepotisme 288
 Nigeria 7, 16, 260, 294
 NU 49, 57, 64, 65, 368

O
 OJK 116, 117, 118, 123, 127
 orang Bugis 83, 152, 344
 orang NTT 83
 Orde Baru 126
 Orde Lama 111

P
 pajak 38, 44, 85, 93, 110, 120, 127,
 134, 135, 138, 139, 140, 141,
 142, 143, 145, 147, 173, 175,
 245, 248, 272, 308, 315, 339
 pajak progresif 139
 Pakistan 7, 37
 Pancasila 13, 37, 151
 pangan 59, 60, 75, 96, 136, 161,
 162, 163, 164, 166, 167, 171,
 190, 319
 Pangestu, Prayogo 26
 Papua 5, 82, 159, 162, 165, 166,
 225, 226
 partai 10, 50, 94, 269, 278, 279,
 280, 281, 282, 283, 284, 289,
 291, 296
 PDI-P 10
 pendidikan 335
 penduduk mayoritas Islam 16
 Penerbit Buku Kompas iv
 pengawasan 58, 59, 60, 61, 75
 penghijauan 177, 199
 pengusaha pribumi 21, 25, 81
 peristiwa Malari 21, 40
 Permesta 5, 15, 38, 225, 226
 persamaan 3, 4, 5, 8, 264
 pertahanan 190

pertanian 30, 31, 32, 33, 47, 64, 90, 98, 99, 113, 114, 136, 154, 217, 221, 309, 326
pertemuan Bugis-Makassar 82
pertumbuhan ekonomi 73
pesawat 35, 213, 214, 215, 216, 239, 263, 266, 318
PISAgro 33
PLN 114, 135, 149, 173, 175, 176, 177, 178, 189
PNS 23
Pokemon Go 222
Poso 4, 5, 15, 38, 67, 226, 227, 257, 265
PPP 10
profesionalisme 135, 137
program 35 ribu megawatt 114
PT DI 213, 214

R

radikalisme 254, 255, 256, 263, 264
reboisasi 177, 199, 207, 208
redistribusi aset 24
reformasi agraria 68
reformasi pasar ritel 68
regulasi 323
rehabilitasi 5, 207
restorative justice 291
retail 103
RMS 5
RRI 225, 228
Ruwanda 7

S

Salman, Raja 6, 35, 36
sampah 179, 182, 188, 203, 204, 205, 208
Sasono, Adi 24
Sekolah Guru Atas (SGA) 336, 350
Sekolah Guru Bantu (SGB) 336, 350
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 337
sektor pertanian 30, 31, 33, 98
semangat 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 39, 55, 57, 63, 64, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 90, 91, 106, 152, 245, 335, 360, 361
semangat berusaha 26
semangat dari bawah 86
Silalahi, Rossi 242
Sina, Ibnu 65
Singapura 41, 59, 119
sistem kesehatan 334, 348
sistem presidensial 280
skill 134, 217, 218, 219, 220, 306, 312, 313, 354, 355, 363
Smart City 307
Soeharto 28, 59
Soekarno 59
solidaritas 4
spirit entrepreneur 47
start up 23, 88, 90
subsidi 15, 17, 27, 28, 60, 65, 111, 112, 127, 146, 173, 174, 175, 183, 185, 193, 247, 271, 272, 306, 357
subsidi energi 173, 185
Sudan 7, 16
Sulawesi Utara 4, 7, 8
sungai 48, 183, 199, 200, 201, 205, 208

sunnah Rasullulah 49
Suriah 5, 7, 16, 252, 258, 260, 264, 265
Sutiyoso 14
swasembada beras 167
Swasembada beras 167

T

tax amnesty 84, 120, 142
Tax amnesty 93
tax invesment 139
tax ratio 138
teknologi 42, 43, 44, 77, 139, 142, 146, 147, 166, 168, 175, 178, 188, 193, 194, 203, 217, 218, 219, 221, 222, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 237, 238, 239, 267, 277, 303, 304, 307, 308, 310, 312, 313, 314, 318, 319, 335, 341, 360, 361
telekomunikasi 178, 229, 230, 231
tempat pembuangan sampah 205
terorisme xii, 99, 251, 254, 256, 257, 263, 264, 267
Thailand 37, 63, 110, 113, 117, 119, 142
the big nine 134
Timur Tengah 9, 10, 16, 35, 36, 37, 44, 46, 52, 66, 69, 101, 105, 106, 107, 116, 225, 251, 252, 259, 271, 364
Tionghoa 7, 20, 22, 48, 81, 90, 91, 360
Tjokrodisurjo, Iskak 21
TPA Luewigajah 205
Tunisia 16, 66
Turki 20, 22, 27, 55, 163, 228

TVRI 136, 233, 244

U

Ujian Nasional 337, 338, 339, 351, 352
UKM 21, 25, 68, 123, 127, 272
Umar 23
umrah 36, 157, 185
Usman 23

V

Venezuela 106, 107, 109, 110, 173, 185, 193, 287, 294

W

Wanandi, Sofjan 237
Wanandi, Sofyan 22
wasathiyah 55

Y

Yaman 66
Yunani 51

Z

zakat 23, 56, 142, 368

Zuckerberg, Mark 88, 91, 359